

0874-21
Jh... -

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET
TAHUN 1992/1993 - 2013/2014**

DRAFT RENCANA



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR PETA	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 I - 1
1.1 Maksud, Tujuan Dan Sasaran Rencana	I - 1
1.2 Pengertian Umum Dan Dasar Hukum	I - 3
1.2.1 Pengertian Dasar	I - 3
1.2.2 Tujuan Dan Sasaran Perencanaan ..	I - 5
1.2.3 Prinsip Dasar	I - 7
1.2.4, Prinsip Dan Ketentuan Teknis Peren- canaan	I - 8
1.3 Pendekatan Rencana	I - 12
1.4 Dimensi Waktu Perencanaan	I - 15
1.5 Sistematika Penyusunan Perencanaan	I - 15
 BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN	 II - 1
2.1 Karakteristik Wilayah Kota	II - 1
2.1.1 Kedudukan Kota Dalam Lingkup Wila- yah	II - 1
2.1.2 Peranan Kota Dalam Lingkup Wila- yah	II - 2

2.2 Karakteristik Internal Kota	II - 2	3.2.4 Kebijakan Sistem Pusat Pelayan-	
2.2.1 Karakteristik Fisik	II - 2	yanan	III - 14
2.2.1.1 Kondisi Fisik Dasar	II - 4	3.2.5 Kebijakan Fasilitas dan	
2.2.1.2 Pola Penggunaan Lahan ...	II - 4	Utilitas	III - 15
2.2.1.3 Struktur Kegiatan	II - 7	3.2.6 Kebijakan Tata Bangunan ...	III - 15
2.2.1.4 Kondisi Lingkungan Perumahan	II - 7	3.2.7 Kebijakan Sistem Transportasi	III - 16
2.2.2 Karakteristik Kependudukan	II - 14	3.2.8 Penentuan Dimensi Waktu Perencanaan	III - 17
2.2.3 Aspek Perekonomian	II - 25	3.3 Konsep Rencana	III - 17
2.2.4 Karakteristik Transportasi	II - 35	3.3.1 Sistem Pusat Pelayanan	III - 21
2.2.5 Karakteristik Prasarana dan Sarana	II - 40	3.3.2 Sistem Struktur Kegiatan	III - 22
2.3 Potensi dan Masalah Kota	II - 47	3.3.3 Sistem Jaringan Jalan	III - 26
BAB III RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA	III - 1	3.4 Rencana Unit Lingkungan dan Pusat Pelayanan	III - 30
3.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah ..	III - 1	3.5 Rencana Struktur Kegiatan	III - 35
3.1.1 Kebijakan Regional Jatim ..	III - 1	3.6 Kapasitas Tampung BWR	III - 35
3.1.2 Kebijakan Tata Ruang Daerah Kabupaten	III - 4	3.7 Rencana Penggunaan Lahan	III - 38
3.1.3 Kebijakan Sektorial	III - 8	3.8 Rencana Objek Khusus	III - 41
3.2 Kebijakan Dasar Rencana	III - 12	3.9 Rencana Tata Bangunan	III - 41
3.2.1 Penentuan Fungsi & Peranan Kota	III - 12	3.10 Rencana Sistem Transportasi Kota ...	III - 43
3.2.2 Strategi dasar Pengembangan Sektor dan Bidang	III - 13	3.10.1 Sistem Jaringan Jalan	III - 49
3.2.3 Kebijakan Kependudukan	III - 13	3.10.2 Rencana Fasilitas Penunjang .	III - 49
		3.10.3 Pola Perangkutan Kota	III - 51
		3.11 Rencana Sistem Fasilitas dan Utilitas Kota	III - 51

BAB IV RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA	IV - 1
4.1 Wilayah Perencanaan	IV - 1
4.2 Rumusan Kebijakan Dasar BWK	IV - 1
4.2.1 Penentuan Fungsi BWK	IV - 1
4.2.2 Penentuan Struktur BWK	IV - 2
4.2.3 Penentuan Jenis dan Intensitas Prasana dan Sarana Utama	IV - 3
4.2.4 Kepadatan Penduduk	IV - 3
4.2.5 Pengembangan Fasilitas dan Utilitas	IV - 3
4.3 Rencana Detail Tata Ruang	IV - 4
4.3.1 Indikasi Pembagian Unit-unit Ling- kungan BWK	IV - 4
4.3.2 Rencana Kepadatan Penduduk	IV - 5
4.3.3 Rencana Penggunaan Tanah Pada BWK	IV - 5
4.3.4 Rencana Sistem Transportasi BWK	IV - 10
4.3.5 Rencana Fasilitas Pelayanan Sosi- al dan Utilitas BWK	IV - 20
4.3.6 Rencana Utilitas BWK	IV - 35
4.3.6.1 Air Minum	IV - 35
4.3.6.2 Air Hujan	IV - 37
4.3.6.3 Air Buangan	IV - 38
4.3.6.4 Pembuangan Sampah	IV - 42
4.3.6.5 Listrik	IV - 43
4.3.6.6 Telepon	IV - 45

4.3.7 Rencana Intensitas Penggunaan

Tanah BWK	IV - 45
-----------------	---------

BAB V ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN	V - 1
---	-------

5.1 Tahapan dan Prioritas Pembangunan	V - 1
---	-------

5.2 Arah dan Penanganan Lingkungan	V - 11
--	--------

5.3 Indikasi Program dan Proyek Serta Penda- naan	V - 14
--	--------

5.4 Aspek Kelembagaan Pembangunan	V - 18
---	--------

5.5 Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan	V - 20
---	--------

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan	Halaman
2.1	POLA PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 1988	II - 5
2.2	POLA PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 1989	II - 5
2.3	POLA PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 1990	II - 6
2.4	POLA PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 1991	II - 6
2.5	PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KOTA DEKET	II - 14
2.6	PERKEMBANGAN KEPADATAN PENDUDUK BRUTO KOTA DEKET	II - 14
2.7	PERKEMBANGAN KEPADATAN PENDUDUK NETTO KOTA DEKET	II - 15
2.8	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 1988	II - 16
2.9	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 1989	II - 16
2.10	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 1990	II - 17
2.11	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 1991	II - 17
2.12	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 1988	II - 18
2.13	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 1989	II - 18
2.14	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 1990	II - 19
2.15	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 1991	II - 19

2.16	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT AGAMA TAHUN 1988	II - 20	2.34	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA TAHUN 1990	II - 24
2.17	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT AGAMA TAHUN 1989	II - 20	2.35	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA TAHUN 1991	II - 25
2.18	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT AGAMA TAHUN 1990	II - 20	2.36	NILAI TAMBAH SEKTOR TANAMAN PANGAN TAHUN 1988	II - 25
2.19	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT AGAMA TAHUN 1991	II - 20	2.37	NILAI TAMBAH SEKTOR TANAMAN PANGAN TAHUN 1989	II - 26
2.20	POLA PERTAMBAHAN PENDUDUK KOTA DEKET 1988 ...	II - 21	2.38	NILAI TAMBAH SEKTOR TANAMAN PANGAN TAHUN 1990	II - 26
2.21	POLA PERTAMBAHAN PENDUDUK KOTA DEKET 1989 ...	II - 21	2.39	NILAI TAMBAH SEKTOR TANAMAN PANGAN TAHUN 1991	II - 26
2.22	POLA PERTAMBAHAN PENDUDUK KOTA DEKET 1990 ...	II - 21	2.40	NILAI TAMBAH SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 1988 ...	II - 27
2.23	POLA PERTAMBAHAN PENDUDUK KOTA DEKET 1991 ...	II - 21	2.41	NILAI TAMBAH SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 1989 ...	II - 27
2.24	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PRIMER TAHUN 1988	II - 21	2.42	NILAI TAMBAH SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 1990 ...	II - 27
2.25	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PRIMER TAHUN 1989	II - 22	2.43	NILAI TAMBAH SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 1991 ...	II - 27
2.26	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PRIMER TAHUN 1990	II - 22	2.44	NILAI TAMBAH SEKTOR PERIKANAN TAHUN 1988	II - 28
2.27	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PRIMER TAHUN 1991	II - 22	2.45	NILAI TAMBAH SEKTOR PERIKANAN TAHUN 1989	II - 28
2.28	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1988 ...	II - 23	2.46	NILAI TAMBAH SEKTOR PERIKANAN TAHUN 1990	II - 28
2.29	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1989 ...	II - 23	2.47	NILAI TAMBAH SEKTOR PERIKANAN TAHUN 1991	II - 28
2.30	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1990 ...	II - 23	2.48	NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1988	II - 29
2.31	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1991 ...	II - 23	2.49	NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1989	II - 29
2.32	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA TAHUN 1988	II - 24	2.50	NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1990	II - 29
2.33	KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA TAHUN 1989	II - 24	2.51	NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1991	II - 29
			2.52	NILAI TAMBAH SEKTOR PERDAGANGAN TAHUN 1988 ..	II - 30
			2.53	NILAI TAMBAH SEKTOR PERDAGANGAN TAHUN 1989 ..	II - 30
			2.54	NILAI TAMBAH SEKTOR PERDAGANGAN TAHUN 1990 ..	II - 30
			2.55	NILAI TAMBAH SEKTOR PERDAGANGAN TAHUN 1991 ..	II - 30
			2.56	NILAI TAMBAH SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 1988 .	II - 31
			2.57	NILAI TAMBAH SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 1989 .	II - 31

2.58	NILAI TAMBAH SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 1990 ..	II - 31
2.59	NILAI TAMBAH SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 1991 ..	II - 31
2.60	NILAI TAMBAH SEKTOR JASA SOSIAL TAHUN 1988 ..	II - 32
2.61	NILAI TAMBAH SEKTOR JASA SOSIAL TAHUN 1989 ..	II - 32
2.62	NILAI TAMBAH SEKTOR JASA SOSIAL TAHUN 1990 ..	II - 32
2.63	NILAI TAMBAH SEKTOR JASA SOSIAL TAHUN 1991 ..	II - 32
2.64	NILAI TAMBAH SEKTOR JASA BANGUNAN TAHUN 1988 ..	II - 33
2.65	NILAI TAMBAH SEKTOR JASA BANGUNAN TAHUN 1989 ..	II - 33
2.66	NILAI TAMBAH SEKTOR JASA BANGUNAN TAHUN 1990 ..	II - 33
2.67	NILAI TAMBAH SEKTOR JASA BANGUNAN TAHUN 1991 ..	II - 33
2.68	NILAI TAMBAH SEKTOR EKONOMI TAHUN 1988	II - 34
2.69	NILAI TAMBAH SEKTOR EKONOMI TAHUN 1989	II - 34
2.70	NILAI TAMBAH SEKTOR EKONOMI TAHUN 1990	II - 34
2.71	NILAI TAMBAH SEKTOR EKONOMI TAHUN 1991	II - 35
2.72	KONDISI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 1988	II - 37
2.73	KONDISI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 1989	II - 37
2.74	KONDISI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 1990	II - 37
2.75	KONDISI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 1991	II - 37
2.76	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1988	II - 38
2.77	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1989	II - 38
2.78	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1990	II - 39
2.79	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1991	II - 39
2.80	PENYEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 1988 ..	II - 40
2.81	PENYEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 1989 ..	II - 40
2.82	PENYEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 1990 ..	II - 41
2.83	PENYEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 1991 ..	II - 41

2.84	PENYEBARAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 1988 ...	II - 41
2.85	PENYEBARAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 1989 ...	II - 41
2.86	PENYEBARAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 1990 ...	II - 43
2.87	PENYEBARAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 1991 ...	II - 43
2.88	PENYEBARAN FASILITAS PERIBADATAN TAHUN 1988 ..	II - 43
2.89	PENYEBARAN FASILITAS PERIBADATAN TAHUN 1989 ..	II - 43
2.90	PENYEBARAN FASILITAS PERIBADATAN TAHUN 1990 ..	II - 45
2.91	PENYEBARAN FASILITAS PERIBADATAN TAHUN 1991 ..	II - 45
2.92	PENYEBARAN FASILITAS PERDAGANGAN TAHUN 1988 ..	II - 45
2.93	PENYEBARAN FASILITAS PERDAGANGAN TAHUN 1989 ..	II - 45
2.94	PENYEBARAN FASILITAS PERDAGANGAN TAHUN 1990 ..	II - 47
2.95	PENYEBARAN FASILITAS PERDAGANGAN TAHUN 1991 ..	II - 47
3.1	PERKIRAAN DAYA TAMPUNG PENDUDUK KOTA DEKET PER BWK	III - 38
3.2	PERKIRAAN KEBUTUHAN LAHAN BAGI PENGEMBANGAN TIAP BWK	III - 38
3.3	USULAN FASILITAS UMUM YANG DISEDIAKAN PADA TIAP JENJANG UNIT PERWILAYAHAN	III - 55
3.4	KEBUTUHAN FASILITAS PERUMAHAN	III - 54
3.5	KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN	III - 56
3.6	KEBUTUHAN FASILITAS PERDAGANGAN	III - 57
3.7	KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN	III - 58
3.8	KEBUTUHAN FASILITAS PERIBADATAN	III - 57
3.9	KEBUTUHAN FASILITAS KEBUDAYAAN DAN REKREASI ..	III - 59
3.10	KEBUTUHAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU	III - 60
3.11	KEBUTUHAN SARANA PELAYANAN UMUM	III - 60
3.12	KEBUTUHAN LAHAN BAGI PENGEMBANGAN KOTA	III - 62

3.13	KEBUTUHAN FASILITAS KELISTRIKAN	III - 61	4.20	KEBUTUHAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU PADA BWK B	IV - 28
3.14	KEBUTUHAN AIR MINUM	III - 63	4.21	KEBUTUHAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU PADA BWK C	IV - 28
3.15	KEBUTUHAN FASILITAS TELEPHONE	III - 63	4.22	KEBUTUHAN SARANA PELAYANAN UMUM PADA BWK A ..	IV - 29
3.16	KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN SAMPAH	III - 64	4.23	KEBUTUHAN SARANA PELAYANAN UMUM PADA BWK B ..	IV - 29
4.1	KEBUTUHAN FASILITAS PERUMAHAN PADA BWK A	IV - 21	4.24	KEBUTUHAN SARANA PELAYANAN UMUM PADA BWK C ..	IV - 30
4.2	KEBUTUHAN FASILITAS PERUMAHAN PADA BWK B	IV - 21	4.25	KEBUTUHAN LAHAN BAGI PENGEMBANGAN KOTA PADA BWK A	IV - 31
4.3	KEBUTUHAN FASILITAS PERUMAHAN PADA BWK C	IV - 21	4.26	KEBUTUHAN LAHAN BAGI PENGEMBANGAN KOTA PADA BWK B	IV - 31
4.4	KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN PADA BWK A ...	IV - 21	4.27	KEBUTUHAN LAHAN BAGI PENGEMBANGAN KOTA PADA BWK C	IV - 31
4.5	KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN PADA BWK B ...	IV - 22	4.28	KEBUTUHAN FASILITAS KELISTRIKAN PADA BWK A ..	IV - 30
4.6	KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN PADA BWK C ...	IV - 22	4.29	KEBUTUHAN FASILITAS KELISTRIKAN PADA BWK B ..	IV - 32
4.7	KEBUTUHAN FASILITAS PERDAGANGAN PADA BWK A ..	IV - 22	4.30	KEBUTUHAN FASILITAS KELISTRIKAN PADA BWK C ..	IV - 32
4.8	KEBUTUHAN FASILITAS PERDAGANGAN PADA BWK B ..	IV - 23	4.31	KEBUTUHAN AIR MINUM PADA BWK A	IV - 32
4.9	KEBUTUHAN FASILITAS PERDAGANGAN PADA BWK C ..	IV - 23	4.32	KEBUTUHAN AIR MINUM PADA BWK B	IV - 32
4.10	KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN PADA BWK A	IV - 24	4.33	KEBUTUHAN AIR MINUM PADA BWK C	IV - 33
4.11	KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN PADA BWK B	IV - 24	4.34	KEBUTUHAN FASILITAS TELEPHONE PADA BWK A	IV - 33
4.12	KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN PADA BWK C	IV - 25	4.35	KEBUTUHAN FASILITAS TELEPHONE PADA BWK B	IV - 33
4.13	KEBUTUHAN FASILITAS PERIBADATAN PADA BWK A ..	IV - 26	4.36	KEBUTUHAN FASILITAS TELEPHONE PADA BWK C	IV - 33
4.14	KEBUTUHAN FASILITAS PERIBADATAN PADA BWK B ..	IV - 26	4.37	KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN SAMPAH PADA BWK A	IV - 34
4.15	KEBUTUHAN FASILITAS PERIBADATAN PADA BWK C ..	IV - 26	4.38	KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN SAMPAH PADA BWK B	IV - 34
4.16	KEBUTUHAN FASILITAS KEBUDAYAAN DAN REKREASI PADA BWK A	IV - 27	4.39	KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN SAMPAH PADA BWK C	IV - 34
4.17	KEBUTUHAN FASILITAS KEBUDAYAAN DAN REKREASI PADA BWK B	IV - 27	5.1	INDIKASI PROGRAM DAN PROYEK PEMBANGUNAN KAWASAN PERENCANAAN TAHUN 1992/1993 - 2013/2014	V - 15
4.18	KEBUTUHAN FASILITAS KEBUDAYAAN DAN REKREASI PADA BWK C	IV - 27			
4.19	KEBUTUHAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU PADA BWK A	IV - 28			

3.7	KONSEP SISTEM STRUKTUR KEGIATAN ALTERNATIF II	III - 28	4.7	RENCANA FUNGSI JALAN (BWK B)	IV - 16
3.8	KONSEP SISTEM STRUKTUR KEGIATAN ALTERNATIF III	III - 29	4.8	RENCANA FUNGSI JALAN (BWK C)	IV - 17
3.9	KONSEP SISTEM JARINGAN JALAN ALTERNATIF I ..	III - 31	4.9	RENCANA DIMENSI JARINGAN JALAN	IV - 18
3.10	KONSEP SISTEM JARINGAN JALAN ALTERNATIF II .	III - 32	4.10	RENCANA SIRKULASI ANGKUTAN UMUM	IV - 19
3.11	KONSEP SISTEM JARINGAN JALAN ALTERNATIF III.	III - 33	4.11	RENCANA JARINGAN AIR BERSIH	IV - 36
3.12	RENCANA PERWILAYAHAN KOTA	III - 36	4.12	RENCANA SALURAN PEMATUSAN	IV - 39
3.13	RENCANA STRUKTUR KEGIATAN KOTA	III - 37	4.13	RENCANA LOKASI TPA	IV - 44
3.14	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN	III - 40	4.14	RENCANA JARINGAN LISTRIK	IV - 46
3.15	RENCANA OBYEK KHUSUS	III - 42	4.15	RENCANA JARINGAN TELEPHONE	IV - 47
3.16	RENCANA PENGATURAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN.	III - 44	4.16	RENCANA PENGATURAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN DI BWK A	IV - 49
3.17	RENCANA PENGATURAN KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN	III - 45	4.17	RENCANA PENGATURAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN DI BWK B	IV - 50
3.18	RENCANA PENGATURAN KETINGGIAN BANGUNAN	III - 46	4.18	RENCANA PENGATURAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN DI BWK C	IV - 51
3.19	RENCANA PENGATURAN GARIS SEMPADAN	III - 47	4.19	RENCANA KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN DI BWK A .	IV - 53
3.20	RENCANA SISTEM JARINGAN JALAN	III - 50	4.20	RENCANA KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN DI BWK B .	IV - 54
3.21	RENCANA LOKASI FASILITAS PENUNJANG TRANSPORTASI	III - 52	4.21	RENCANA KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN DI BWK C..	IV - 55
3.22	RENCANA SIRKULASI LALU LINTAS	III - 53	4.22	RENCANA KETINGGIAN BANGUNAN DI BWK A	IV - 56
3.23	RENCANA SALURAN PEMATUSAN	III - 65	4.23	RENCANA KETINGGIAN BANGUNAN DI BWK B.....	IV - 57
3.24	RENCANA JARINGAN UTILITAS	III - 66	4.24	RENCANA KETINGGIAN BANGUNAN DI BWK C	IV - 58
4.1	RENCANA PEMBAGIAN UNIT LINGKUNGAN	IV - 6	4.25	RENCANA PENGGUNAAN LUAS PERSIL DI BWK A	IV - 60
4.2	RENCANA KEPADATAN PENDUDUK	IV - 7	4.26	RENCANA PENGGUNAAN LUAS PERSIL DI BWK B	IV - 61
4.3	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN (BWK A)	IV - 11	4.27	RENCANA PENGGUNAAN LUAS PERSIL DI BWK C	IV - 62
4.4	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN (BWK B)	IV - 12	4.28	RENCANA GARIS SEMPADAN DI BWK A	IV - 63
4.5	RENCANA PENGGUNAAN LAHAN (BWK C)	IV - 13	4.29	RENCANA GARIS SEMPADAN DI BWK B	IV - 64
4.6	RENCANA FUNGSI JALAN (BWK A)	IV - 15	4.30	RENCANA GARIS SEMPADAN DI BWK C	IV - 65

DAFTAR PETA

No. Peta	Halaman
2.1 BATAS ADMINISTRASI	II - 3
2.2 TATA GUNA LAHAN	II - 8
2.3 PERSEBARAN LOKASI FASILITAS PELAYANAN KOTA TAHUN 1992	II - 9
2.4 KONDISI BANGUNAN TAHUN 1992	II - 11
2.5 KEPADATAN BANGUNAN TAHUN 1992	II - 12
2.6 KARAKTERISTIK TATA BANGUNAN TAHUN 1992	II - 13
2.7 KONDISI JARINGAN JALAN	II - 36
2.8 PERSEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN	II - 42
2.9 PERSEBARAN FASILITAS KESEHATAN	II - 44
2.10 PERSEBARAN FASILITAS PERIBADATAN	II - 46
2.11 PERSEBARAN FASILITAS PERDAGANGAN/JASA	II - 48
2.12 SALURAN DRAINASE	II - 49
2.13 JARINGAN LISTRIK DAN TELEPHONE	II - 50
3.1 PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DATI I JATIM	III - 5
3.2 PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DATI II LAMONGAN ...	III - 9
3.3 KONSEP PUSAT PELAYANAN ALTERNATIF I	III - 23
3.4 KONSEP PUSAT PELAYANAN ALTERNATIF II	III - 24
3.5 KONSEP PUSAT PELAYANAN ALTERNATIF III	III - 25
3.6 KONSEP SISTEM STRUKTUR KEGIATAN ALTERNATIF I	III - 27

5.1	TAHAPAN PENGEMBANGAN KAWASAN	V - 5
5.2	TAHAPAN PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN	V - 7
5.3	TAHAPAN PENGEMBANGAN SALURAN PEMATISAN	V - 8
5.4	TAHAPAN PENGEMBANGAN PELAYANAN SARANA AIR BERSIH	V - 10
5.5	TAHAPAN PENGEMBANGAN PELAYANAN SARANA KELISTRIKAN	V - 12
5.6	TAHAPAN PENGEMBANGAN PELAYANAN SARANA TELEKOMUNIKASI	V - 13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud, Tujuan Dan Sasaran Rencana

Rencana Umum Tata Ruang Kota pada hakekatnya merupakan rencana tata ruang yang mendasari strategi pembangunan fisik kota, baik yang menyangkut perencanaan tata ruang yang lebih terinci seperti Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota maupun Rencana Kegiatan Sektorial seperti pelabuhan, industri, fasilitas sosial, dan sebagainya.

Rencana Detail Tata Ruang Kota di lain pihak merupakan tindak lanjut pendalaman materi Rencana Umum Tata Ruang Kota agar dapat bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal Daerah, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun Masyarakat.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah Nasional dan Daerah.

Dalam pada itu Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan Rencana Tata Ruang Kota yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi bagian-bagian wilayah kota yang pada hakekatnya merupakan pengarahan lokasi dari berbagai kegiatan yang memiliki kesamaan fungsi maupun lingkungan permukiman yang memiliki karakteristik tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun agar Pemerintah Daerah mempunyai rencana pemanfaatan ruang kota jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Atasan dan Pemerintah Kota / Daerah sendiri, serta masyarakat yang bersangkutan.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota harus berisikan rencana menyeluruh yang mencerminkan rencana-rencana Sektoral dan Daerah yang terdapat atau yang akan dialokasikan di wilayah perencanaan. Selanjutnya, Rencana Umum Tata Ruang Kota yang disusun harus mampu menjawab permasalahan dan tuntutan pembangunan kota serta rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan pada masa mendatang.

Secara lebih detail, tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah berupa kebijaksanaan, strategi, dan rencana itu sendiri. Ketiga bentuk keluaran tersebut tertuang dalam pola pengembangan kota yang sifatnya regional dan pola pengembangan kota yang

sifatnya lokal. Pola pengembangan kota yang sifatnya regional akan berkaitan dengan masalah penentuan fungsi dan peranan kota serta rumusan arah ekstensifikasi pengembangan kota di masa mendatang. Pola pengembangan kota yang bersifat lokal di lain pihak akan menyangkut arahan mengenai struktur tata ruang, penggunaan lahan, kependudukan, fasilitas dan utilitas, serta arahan program implementasi rencana kota.

Sementara itu penjabaran Rencana Umum Tata Ruang Kota ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota bertujuan menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang merupakan upaya menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi serta intensitas penggunaan tanah antar bagian wilayah kota atau dalam satu bagian wilayah kota.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota juga bertujuan untuk mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas.

Dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota maka akan lebih mudah bagi pengelola kota dalam menyusun atau menjabarkannya ke dalam Rencana Teknik Ruang Kota serta akan mempermudah dalam menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek-proyek tahunan.

1.2 Pengertian Umum dan Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987, terdapat 4 (empat) jenis rencana tata ruang kota, yaitu :

- Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan, yaitu rencana struktur ruang perkotaan secara garis besar yang disusun untuk menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dengan strategi perkotaan nasional dalam jangka panjang dan untuk menjaga keserasian perkembangan pembangunan kota dengan wilayah pengembangan dalam rangka pengendalian program sektoral maupun daerah. Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan digambarkan dalam peta berskala 1 : 20.000.
- Rencana Umum Tata Ruang Kota, yaitu rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan jangka panjang. Rencana Umum Tata Ruang Kota digambarkan dalam peta berskala 1 : 10.000.
- Rencana Detail Tata Ruang Kota, yaitu rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota pada setiap kawasan. Rencana Detail Tata Ruang Kota digambarkan dalam peta berskala 1 : 5.000.
- Rencana Teknik Ruang Kota, yaitu rencana geometris pemanfaatan ruang yang disusun untuk perwujudan ruang kota

dalam rangka implementasi pembangunan kota. Rencana Teknik Ruang Kota digambarkan dalam peta berskala 1 : 1.000.

Dengan demikian, berdasarkan pengertian-pengertian yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tersebut, maka penyusunan suatu Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota akan terkait dengan pengertian bahwa rencana tata ruang kota yang harus disusun meliputi Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan skala visualisasi 1 : 10.000 dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dengan skala visualisasi 1 : 5.000.

Pada bagian berikut ini akan diterangkan mengenai dasar-dasar perencanaan dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang mencakup pengertian dasar, tujuan dan sasaran perencanaan, prinsip dasar, serta ketentuan teknis perencanaan.

1.2.1 Pengertian Dasar

Perencanaan kota adalah kegiatan penentuan konsepsi, perumusan, penyusunan dan / atau peninjauan kembali rencana kota dalam rangka mewujudkan bentuk suatu kota yang berwawasan lingkungan hidup, berasaskan kelestarian dan pelestarian serta peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi dan seimbang untuk dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Rencana kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatasnya dan dibawahnya serta merupakan pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang, dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota mempunyai ruang lingkup sebagai suatu rencana kota yang mencerminkan suatu strategi pengembangan kota dalam kurun waktu 20 tahun serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahun sekali yang sejalan pula dengan pelaksanaan pembangunan lima tahun Daerah Tingkat I dan pembangunan lima tahun nasional (Repelita).

Rencana Umum Tata Ruang Kota merupakan rencana tata ruang kota yang mendasari strategi pembangunan fisik kota baik yang menyangkut perencanaan tata ruang yang sifatnya lebih terinci seperti Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota maupun rencana kegiatan sektoral

seperti pelabuhan, industri, fasilitas sosial, dan sebagainya.

Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan tindak lanjut pendalaman materi Rencana Umum Tata Ruang Kota agar dapat bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota baik yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah, Pemerintah Daerah, Swasta maupun masyarakat.

Dalam pada itu Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana tata ruang kota yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi bagian-bagian wilayah kota yang pada hakekatnya merupakan pengarah lokasi dari berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi maupun lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu.

Pada prinsipnya Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penetapan intensitas penggunaan ruang yang sesuai dengan fungsinya di dalam struktur tata ruang kota secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan urutan penyusunan rencana kota maka Rencana Detail Tata Ruang Kota pada hakekatnya juga merupakan dasar pertimbangan bagi penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota yang mencakup ketentuan mengenai bagian wilayah tersebut dan ketentuan mengenai kerangka materi pokok bagi penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota.

1.2.2 Tujuan Dan Sasaran Perencanaan

Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun agar Pemerintah Daerah mempunyai rencana pemanfaatan ruang kota jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Atasan, dan Pemerintah Kota atau Daerah sendiri, serta masyarakat yang bersangkutan.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota harus berisikan rencana menyeluruh yang mencerminkan rencana-rencana sektoral dan daerah yang terdapat atau yang akan dialokasikan di wilayah perencanaan. Selanjutnya Rencana Umum Tata Ruang Kota yang disusun harus mampu menjawab masalah dan tuntutan pembangunan kota serta rumusan maupun kebijaksanaan yang dibutuhkan pada masa mendatang.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota dalam perimbangan wilayah yang lebih luas. Dalam hal ini pengembangan kota ditujukan agar mampu berfungsi sebagai pusat atau sub pusat pengembangan dalam suatu sistem pengembangan wilayah nasional dan daerah.

Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun dengan tujuan dapat merangsang dan meningkatkan kemampuan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan pencapaian cita-cita ter-

tinggi masyarakat kota yang bersangkutan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan perkotaan.

Upaya pengembangan kota ditujukan untuk dapat menciptakan pola tata ruang kota yang serasi dan optimal, serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan kota sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Dengan adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota, maka diharapkan akan dapat diciptakan lingkungan kehidupan yang dapat menyenangkan bagi masyarakat kota dalam bentuk :

- Aman, yaitu bahwa suasana kehidupan kota dapat menciptakan rasa aman dan tenang bagi penduduk yang tinggal.
- Tertib, yaitu bahwa pengembangan kota yang berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Kota akan menciptakan lingkungan kota yang teratur, terarah, dan terkendali secara baik.
- Lancar, yaitu bahwa pengembangan kota di masa mendatang akan menciptakan suatu lingkungan kota yang memungkinkan dapat dilaksanakan segala kegiatan penduduk kota dengan lancar. Begitu pula tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang memadai akan menjadi kelancaran pergerakan kendaraan dan penduduk.
- Sehat, yaitu dalam upaya menciptakan lingkungan kehidupan kota yang sesuai dengan norma-norma kesehatan lingkungan.

- Indah, yaitu bahwa pengaturan pengembangan seyogyanya mempertimbangkan nilai-nilai estetika pada pola tata ruang kota, sistem jaringan jalan, *landscaping*, dan lain-lain.

Mengingat bahwa perkembangan kota tidak hanya akan berakibat pada wilayah-wilayah di sekitarnya saja, tetapi juga wilayah regional yang lebih luas, dan bahkan juga mempunyai dampak terhadap kepentingan nasional, maka penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota harus mempertimbangkan kepentingan nasional, regional, dan lokal sebagai berikut :

- Kepentingan nasional, yaitu bahwa dalam rangka pembangunan wilayah, upaya pengembangan dan pembangunan kota diarahkan untuk mencapai adanya keseimbangan pertumbuhan antara kota-kota dan usaha peningkatan kualitas lingkungan permukiman kota.
- Kepentingan regional, yaitu bahwa pengembangan kota diarahkan pada keseimbangan pertumbuhan kota dengan wilayah belakangnya. Selain itu kota harus mampu menyediakan fasilitas dan utilitas bagi kepentingan regional.
- Kepentingan lokal, yaitu bahwa perencanaan kota bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan kehidupan kota yang baik. Suatu lingkungan kehidupan kota yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan bekerja bagi penduduk dalam suasana yang menyenangkan.

Di lain pihak, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal yang menjadi tujuan dan sasarannya, yaitu :

- Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan tanah antar bagian wilayah kota atau dalam satu bagian wilayah kota.
- Menciptakan kelestarian lingkungan permukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungannya yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan bagian wilayah kota pada khususnya.
- Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan jalan kota.
- Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan, fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur baik kualitas maupun kuantitasnya.
- Membantu dan mempermudah menyusun Rencana Teknik Ruang Kota dan menyusun program-program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek-proyek tahunan pada masing-masing bagian wilayah kota yang diprioritaskan pengembangannya.
- Sesuai dengan prioritas pengendalian pengembangan kota dan program pengembangan kota, maka pada kawasan-kawasan tertentu disusun pula Rencana Teknik Ruang Kota yang mampu

menjadikan pedoman bagi tertib pembangunan dan tertib pengaturan ruang secara terinci.

1.2.3 Prinsip Dasar

Dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota pada prinsipnya harus mempertimbangkan tujuh prinsip pendekatan, yaitu :

1. Prinsip pendekatan politis, yang menyangkut upaya menyelaraskan pertumbuhan kota-kota sekaligus mencegah timbulnya kesenjangan antara kota-kota besar dengan kota-kota kecil.
2. Prinsip pendekatan ekonomi, yang menyangkut pada upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan potensi-potensi yang dimiliki kota.
3. Prinsip pendekatan sosial budaya, yang menyangkut upaya penciptaan suasana dan lingkungan kesasyarakatatan dengan nilai-nilai sosial budaya yang harmonis berdasarkan kegotongroyongan.
4. Prinsip pendekatan hankam, yang menyangkut pada penciptaan kondisi kota yang aman dan tertib untuk menunjang ketahanan nasional.
5. Prinsip pendekatan strategis, yang menyangkut penentuan fungsi kota, pengembangan kegiatan kota dan tata ruang kota yang merupakan penjabaran dan pengalasan dari rencana-

na-rencana pembangunan nasional dan daerah dalam jangka panjang.

6. Prinsip pendekatan teknis, yang menyangkut upaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota, antara lain dengan memperbaiki lingkungan, merencanakan, memberikan fasilitas dan utilitas secara tepat, mengoptimalkan pola angkutan, menjaga kelestarian dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sesuai dengan kaidah teknis perencanaan.

7. Prinsip pendekatan pengelolaan, yang menyangkut aspek administrasi keuangan, hukum, dan perundang-undangan, agar rencana kota dapat diterapkan melalui koordinasi antara instansi vertikal di daerah dan dinas otonom dalam pelaksanaan dan pengendalian rencana kota.

Di dalam usaha penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota perlu dirumuskan kebijaksanaan pengembangan kota dengan mempertimbangkan azas manfaat, pemerataan, keseimbangan, dan pertumbuhan serta kelestarian sesuai dengan tingkat perkembangan kota itu sendiri maupun hubungan antara kota itu dengan daerah sekitarnya.

Suatu hal yang penting ialah bahwa kebijaksanaan dasar perencanaan harus dirumuskan berdasarkan tipe kemampuan tumbuh dan berkembangnya kota serta pola watak kota itu sendiri.

Dalam menetapkan wilayah perencanaan kota dapat dibedakan atas kota yang berstatus pemerintahan dan kota yang ti-

dak berstatus pemerintahan. Bagi kota yang berstatus pemerintahan, maka wilayah perencanaan ditetapkan sama dengan luas wilayah administrasinya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan atau peraturan perundangan. Sedangkan kota yang tidak berstatus pemerintahan, ditetapkan wilayah perencanaan kotanya yang meliputi wilayah lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris dan diperkirakan dapat menampung perkembangan hingga 20 tahun mendatang. Batas administratif yang memuat batas wilayah kota tetap dijadikan pegangan sebagai basis data dan pengarahannya perencanaan tata ruangnya.

1.2.4 Prinsip Dan Ketentuan Teknis Perencanaan

Rencana Umum Tata Ruang Kota memuat rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur utama tingkat pelayanan kota, rencana sistem utama transportasi, rencana sistem utama jaringan utilitas kota, rencana pemanfaatan air baku, indikasi unit pelayanan kota dan rencana pengelolaan pembangunan kota dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebijakan pengembangan kota, mencakup penentuan tujuan pengembangan kota, fungsi kota, strategi dasar pengembangan sektor-sektor dan bidang pembangunan, kependudukan, intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan ruang kota dan pengembangan fasilitas dan utilitas.

2. Rencana pemanfaatan ruang kota, mencakup arahan pemanfaatan ruang kota yang menggambarkan lokasi intensitas tiap penggunaan, baik untuk kegiatan fungsi primer dan fungsi sekunder yang ada di dalam kota sampai akhir tahun perencanaan.
3. Rencana struktur tingkat pelayanan kota, mencakup arahan tata jenjang fungsi-fungsi pelayanan di dalam kota, yang merupakan rumusan kebijaksanaan tentang pusat-pusat pelayanan kegiatan kota berdasarkan jenis, intensitas, kapasitas, dan lokasi pelayanan.
4. Rencana sistem transportasi, memuat arahan garis besar tentang pola jaringan pergerakan arteri dan kolektor baik fungsi primer maupun sekunder termasuk jaringan jalan kereta api yang ada di dalam kota tersebut.
5. Rencana sistem utilitas kota, memuat arahan utama tentang pola jaringan fungsi primer dan sekunder untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, air kotor, air limbah, dan gas di dalam kota.
6. Rencana pengembangan pemanfaatan air baku, memuat arahan pengolahan pemanfaatan air permukaan, air tanah dalam dan air tanah dangkal untuk kepentingan pelayanan kota.
7. Indikasi unit pelayanan kota, merupakan arahan mengenai pembagian unit-unit pelayanan kota dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penduduk kota.
8. Rencana pengelolaan pembangunan kota, memuat arahan tahapan pelaksanaan program pembangunan setiap lima

tahunan selama 20 tahun, arahan penanganan lingkungan berupa peningkatan fungsi, perbaikan, pembaharuan atau peremajaan, pemugaran dan perlindungan, manajemen pertanahan, arahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan serta arahan bagi pengorganisasian aparatur pelaksana pembangunan kota.

Rencana Umum Tata Ruang Kota disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Batas wilayah perencanaan yaitu :

1. Bagi kota-kota yang sudah mempunyai status pemerintahan seperti Kotamadya atau Kota Administratif, wilayah perencanaan adalah keseluruhan wilayah administrasi kota.
2. Bagi kota-kota yang belum mempunyai status pemerintahan, ditetapkan menurut besaran tertentu, yaitu hektar atau km² dengan berpedoman pada batas Kecamatan atau Desa.

b. Bagi kota-kota yang sudah mempunyai Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan maka rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang sejalan dengan Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dengan peraturan perundang-undangan.

c. Rumusan rencana lebih merupakan Rencana Struktur pemanfaatan ruang.

d. Bersifat strategis dan operasional.

e. Secara internal mampu menjamin adanya konsistensi antara program pembangunan Sektoral atau Lintas Sektoral dengan program pembangunan Daerah dalam jangka panjang.

Strategi dan Kebijaksanaan Dasar pengembangan kota merupakan arahan terhadap :

a. Kebijaksanaan pengembangan kota :

1. penentuan fungsi kota
2. pengembangan sektor-sektor dan bidang-bidang pembangunan
3. intensifikasi dan atau ekstensifikasi pemanfaatan ruang
4. kependudukan, antara lain mobilitas, fertilitas dan mortalitas, serta distribusi penduduk pada akhir tahun perencanaan.
5. pengembangan fasilitas dan utilitas

b. Struktur pemanfaatan ruang kota :

1. penentuan persediaan ruang untuk tiap komponen kota.
2. penentuan intensitas penggunaan menurut fungsi ruang, baik fungsi primer atau fungsi sekunder.
3. hubungan antar fungsi-fungsi kegiatan yang ada dalam kota yang direncanakan sampai akhir tahun perencanaan dengan ke dalam sampai pada kawasan-kawasan.

c. Struktur utama tingkat pelayanan kota :

1. tata jenjang fungsi-fungsi pelayanan kota
2. pusat-pusat pelayanan kota berdasarkan jenis, intensitas, kapasitas, dan lokasi.

d. Sistem utama transportasi :

1. pola jaringan pergerakan arteri dan kolektor, baik fungsi primer maupun fungsi sekunder.
2. pola jaringan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan pelayaran baik laut, danau maupun angkutan penyeberangan dan angkutan udara.

e. Sistem utama jaringan utilitas kota :

1. air bersih
2. telepon
3. listrik
4. gas
5. air kotor / drainase
6. air limbah

f. Pengembangan pemanfaatan air baku :

1. air permukaan
2. air tanah dalam
3. air tanah dangkal

g. Indikasi unit pelayanan seperti penentuan dan pembagian unit-unit pelayanan terhadap penduduk kota.

h. Sistem pengelolaan pembangunan kota :

1. tahapan pelaksanaan pembangunan, yaitu tahapan pembangunan yang disesuaikan dengan Repelita Nasional, seperti berikut:
 - Tahap Persiapan : 1992/1993 - 1993/1994
 - Tahap I : 1994/1995 - 1998/1999
 - Tahap II : 1999/2000 - 2003/2004

- Tahap III : 2004/2005 - 2008/2009

- Tahap IV : 2009/2010 - 2013/2014

2. penanganan lingkungan
3. sumber pembiayaan pembangunan
4. pengorganisasian aparaturnya pelaksana

Dalam pada itu, Rencana Detail Tata Ruang Kota disusun sesuai dengan prinsip dan ketentuan teknis perencanaan sebagai berikut :

1. Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah dua puluh tahun dan sesuai dengan jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota yang bersangkutan (empat PELITA).
2. Wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota mencakup dan berlaku untuk seluruh wilayah kota tetapi jika dipandang perlu pihak Pemerintah Daerah dapat menetapkan bagian demi bagian sesuai dengan kondisi dan tingkat permasalahannya.
3. Penetapan struktur dan besarnya bagian wilayah kota harus mencerminkan intensitas penggunaannya yang dinilai dari segi kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan sesuai dengan fungsi penggunaannya.
4. Penetapan struktur bagian wilayah kota akan ditentukan oleh peranan pusat-pusat pelayanannya.
5. Tiap bagian wilayah kota yang direncanakan harus mampu mencerminkan satu kesatuan lingkungan permukiman atau

lingkungan kegiatan kota yang sesuai dengan sarana dan prasarana yang di rencanakan / ditetapkan.

5. Rencana Detail Tata Ruang Kota memuat rumusan mengenai kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyelaraskan perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota.

7. Rumusan rencana sudah merupakan penyajian ruang dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah.

8. Rumusan rencana diatas bukan lagi sekedar arahan, tetapi secara teknis sudah menjadi kebijaksanaan lebih konkrit tentang :

a. Pengembangan penduduk dalam hal distribusi dan pertumbuhan kepadatan untuk tiap-tiap blok peruntukan.

b. Pemanfaatan ruang ditinjau dari segi besarnya untuk setiap blok peruntukan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur pusat perbelanjaan / pasar / pertokoan, industri menurut jenisnya, pendidikan mulai dari SD sampai PT, puskesmas dan rumah sakit, rumah ibadah, taman rekreasi dan lapangan olahraga, perkantoran dan perumahan, penginapan / hotel / wisma, pelabuhan udara / laut, stasiun, terminal, pertanian, pemukiman dan kawasan khusus lainnya.

c. Struktur tingkat pelayanan kegiatan kota dalam hal hubungan tata jenjang, kapasitas dan intensitas antara

fungsi-fungsi pelayanan tiap-tiap lingkungan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur perdagangan, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan rekreasi.

d. Sistem fungsi jaringan jalan dalam hal penentuan lokasi dan besaran tiap fungsi jaringan pergerakan, fungsi jalan arteri sekunder, fungsi jalan kolektor sekunder, fungsi jalan lokal sekunder termasuk jaringan jalan kereta api dan alur pelayaran.

e. Sistem jaringan utilitas dalam penentuan lokasi dan besaran jaringan sekunder dan tersier pada jaringan air bersih, telepon, listrik, gas, pengelolaan sampah, air limbah, dan air hujan.

f. Kepadatan bangunan lingkungan dalam hal perbandingan antara keseluruhan luas lahan tertutup dengan luas bangunan pada setiap blok peruntukan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur koefisien dasar bangunan dengan klasifikasi sangat tinggi ($> 75\%$), tinggi ($50\% - 75\%$), menengah ($20\% - 50\%$), rendah ($5\% - 20\%$) dan sangat rendah ($< 5\%$).

g. Penentuan ketinggian bangunan, maksimum dan minimum pada setiap blok peruntukan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur :

- bangunan tidak bertingkat
- bangunan bertingkat maksimum 2 lantai (KLB=2xKDB)
- bangunan bertingkat maksimum 4 lantai (KLB=4xKDB)
- bangunan bertingkat maksimum 8 lantai (KLB=8xKDB)

- bangunan bertingkat minimum 9 lantai (KLB=9xKDB)
 - bangunan bertingkat maksimum 20 lantai (KLB=20xKDB)
- h. Penetapan garis sempadan atau garis pengawasan jalan bagi lahan yang boleh atau tidak boleh ada bangunan diatasnya pada setiap blok peruntukan yang materinya sekurang-kurangnya akan mengatur jarak antara es jalan dengan pagar halaman dan bangunan / rumah baik pada sisi muka, samping, dan belakang. Ketentuan detail mengikuti PP 26 / 1985.
- i. Penetapan luas petak bangunan yang terdapat pada setiap blok peruntukan, dimana materinya sekurang-kurangnya akan mengatur klasifikasi luas perpetakan sebagai berikut :
- klasifikasi I. 2500 m² -
 - klasifikasi II. 1000 m² - 2500 m²
 - klasifikasi III. 600 m² - 1000 m²
 - klasifikasi IV. 250 m² - 600 m²
 - klasifikasi V. 100 m² - 250 m²
 - klasifikasi VI. 50 m² - 100 m²
 - klasifikasi VII. rumah susun.
- j. Indikasi unit pelayanan dalam hal fasilitas umum kota yang terdiri dari pelayanan perbelanjaan, kesehatan, rekreasi, dan olah raga pada setiap blok peruntukan.
- k. Tahapan pelaksanaan pembangunan dalam hal pengendalian peruntukan, pelaksanaan program / proyek dari prasarana

na dan sarana kota dalam kurun waktu lima tahun yang dibagi dalam tahunan.

1. Pengelolaan / penanganan lingkungan dalam hal peningkatan, perbaikan, pembaharuan, pemugaran, perencanaan, perlindungan lingkungan dan manajemen pertanahan serta pengoperasian aparat pelaksana dan pengendali pada tingkat pemerintah wilayah kecamatan.

1.3 Pendekatan Rencana

Untuk mencapai kepada maksud dan tujuan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Deket, maka metodologi pendekatannya diatur secara kronologis sebagai berikut :

Pengkajian kebijaksanaan pembangunan regional

Pengkajian kebijaksanaan pembangunan regional dimaksudkan untuk mengetahui strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan serta memiliki pengaruh bagi kota yang direncanakan. Informasi mengenai kebijaksanaan ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain :

- Pola Dasar Pembangunan Daerah
- Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah
- Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Lamongan
- Rencana-rencana pembangunan sektoral

Pengkajian potensi dan permasalahan regional

Pengkajian potensi dan permasalahan regional dimaksudkan untuk mengetahui kondisi eksisting dari komponen-komponen tata ruang yang berada di wilayah yang lebih luas. Komponen-komponen yang ditinjau adalah :

- Aspek sumber daya alam
- Aspek kependudukan
- Aspek perekonomian
- Aspek fasilitas dan utilitas

Pengkajian potensi dan permasalahan kota

Pengkajian potensi dan permasalahan kota dimaksudkan untuk mengetahui kondisi eksisting dari komponen-komponen perkotaan yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota. Komponen-komponen yang ditinjau adalah :

- Aspek kependudukan
- Aspek perekonomian
- Aspek fisik dasar
- Aspek penggunaan lahan
- Aspek pertanahan
- Aspek fasilitas dan utilitas
- Aspek administrasi dan pengelolaan pembangunan kota

Potensi dan permasalahan yang dikaji akan berkaitan dengan hal jumlah, jenis, besaran atau dimensi, dan distribusi ruang.

Analisa lingkup regional

Dalam analisa lingkup regional, dilakukan berbagai pembahasan untuk mengkaji peran dan fungsi kota yang direncanakan terhadap wilayah yang lebih luas.

Analisa lingkup kota

Analisa lingkup kota bertujuan untuk menghasilkan beberapa temuan dan keterkaitan antar berbagai aspek tata ruang di dalam wilayah internal kota yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghasilkan beberapa rekomendasi untuk mengembangkan kota yang direncanakan.

Salah satu analisis yang dilakukan adalah perkiraan jumlah penduduk. Selain untuk mengetahui jumlah penduduk kota pada masa mendatang, perkiraan jumlah penduduk dibutuhkan untuk memperkirakan kebutuhan jumlah serta kebutuhan lahan dari fasilitas dan utilitas perkotaan. Prediksi penduduk dilakukan dengan aplikasi model yang *representative* untuk kota yang direncanakan. Tiga model yang akan dicoba diaplikasikan adalah :

- *linear growth model*
- *eksponential growth model*
- *linear regression model*

Perkiraan kebutuhan fasilitas dan utilitas akan mencakup kebutuhan jenis, jumlah, serta kebutuhan ruang. Perkiraan dilakukan dengan aplikasi standar Departemen Pekerjaan

Umum yang terdapat dalam buku Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota.

Selain itu, perlu juga dilakukan analisa fisik lahan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan. Pada dasarnya penentuan *land suitability* dan *land capability* dimaksudkan untuk mengetahui lahan yang cocok untuk kawasan terbangun maupun areal ekatensifikasi kota. Penentuan dilakukan dengan metoda *superimpose* beberapa peta aspek fisik dasar seperti :

- peta topografi
- peta hidrologi
- peta geologi
- peta struktur tanah

Analisa lingkup BWK

Untuk lebih memperdalam tingkat analisa, dilakukan pembahasan lingkup BWK dengan tujuan untuk dapat memberikan berbagai rekomendasi dalam mengembangkan tiap bagian wilayah kota yang direncanakan.

Penetapan kebijaksanaan fungsi dan peranan kota

Dari hasil analisa lingkup regional serta didasarkan atas pertimbangan kebijaksanaan pembangunan regional, maka dapat ditetapkan kebijaksanaan fungsi dan peranan kota. Fungsi dan peranan kota tersebut berkaitan dengan kedudukan kota yang direncanakan dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Aspek perekonomian akan lebih banyak dibahas dalam

analisa penetapan kebijaksanaan fungsi dan peranan kota, seperti jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja.

Penetapan rencana tata ruang kota

Dari hasil analisis lingkup kota serta dengan mempertimbangkan kebijaksanaan pembangunan regional dan kondisi wilayah regional, dilakukan penetapan rencana tata ruang kota. Rencana tata ruang secara umum akan mencakup indikasi unit pelayanan, penggunaan lahan, sistem transportasi, fasilitas dan utilitas, serta tahapan pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikasi unit pelayanan didasarkan atas pola keruangan yang terjadi dan arahan-arahan yang terdapat dalam kebijaksanaan pembangunan daerah. Gambaran mengenai pola keruangan eksisting diperoleh dari beberapa karakteristik seperti kecenderungan konsentrasi kegiatan, kecenderungan konsentrasi penduduk, dan orientasi keruangan. Indikasi unit pelayanan akan menyangkut hal-hal mengenai :

- delineasi wilayah pengembangan perkotaan
- lokasi pusat wilayah pengembangan perkotaan
- kegiatan dominan pada masing-masing wilayah pengembangan

Sementara itu rencana penggunaan lahan ditetapkan berdasarkan pertimbangan beberapa aspek, antara lain :

- kebutuhan lahan fasilitas dan utilitas
- pola penggunaan lahan eksisting
- rencana distribusi penduduk
- kebijaksanaan fungsi dan peranan kota

Penetapan rencana distribusi spasial dari fasilitas dan utilitas perkotaan didasarkan pertimbangan :

- kebutuhan jumlah dan jenis dari fasilitas serta utilitas
- rencana struktur tata ruang
- rencana distribusi penduduk
- rencana penggunaan lahan

Penetapan tahapan dan pengelolaan pembangunan akan menyangkut beberapa aspek, antara lain :

- tahapan pelaksanaan pembangunan dalam tiap perioda lima tahunan
- indikasi program dan proyek
- arahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan
- arahan pengorganisasian aparaturnya pelaksana pembangunan

1.4 Dimensi Waktu Perencanaan

Dimensi waktu perencanaan dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Deket bermula dari akhir Pelita V (1992/1993) dan berakhir pada Pelita IX (2013/2014). Setiap lima tahun rencana tersebut harus ditinjau kembali untuk disesuaikan dan dievaluasi dengan mempertimbangkan kecenderungan perkembangan kota Deket. Pada akhir Pelita IX, perlu disusun kembali Rencana Umum Tata Ruang Kotanya.

1.5 Sistematika Penyusunan Perencanaan

Sistematika penyusunan laporan dalam buku rencana untuk pekerjaan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Deket diatur sesuai dengan tatanan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan beberapa hal yang mengawali buku rencana seperti maksud, tujuan, dan sasaran rencana; pengertian umum dan dasar hukum, pendekatan rencana, dimensi waktu perencanaan, serta sistematika penyusunan perencanaan.

BAB II KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai wilayah perencanaan yang meliputi kedudukan kota dan peranan kota dalam lingkup wilayah, karakteristik fisik, karakteristik kependudukan, karakteristik perekonomian, karakteristik transportasi, karakteristik sarana dan prasarana, serta pembahasan mengenai potensi dan masalah kota.

BAB III RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Bab ini berisikan produk penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang berintikan kebijaksanaan pengembangan wilayah dan kebijaksanaan dasar rencana yang meliputi penentuan fungsi dan peranan kota.

kebijaksanaan penentuan strategi dasar pengembangan sektor-sektor kegiatan, kebijaksanaan kependudukan, kebijaksanaan sistem pusat pelayanan, kebijaksanaan utilitas dan fasilitas, kebijaksanaan tata bangunan, kebijaksanaan sistem transportasi, serta penentuan dimensi waktu waktu perencanaan.

BAB IV RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Bab ini berisikan produk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota yang berisikan pembahasan mengenai wilayah perencanaan, rumusan kebijaksanaan dasar bagian wilayah kota, serta produk teknis dari Rencana Detail Tata Ruang Kota seperti indikasi pembagian unit-unit lingkungan RWK, rencana kepadatan penduduk RWK, rencana pemanfaatan ruang RWK, rencana sistem transportasi RWK, rencana fasilitas pelayanan sosial dan utilitas RWK, rencana utilitas RWK, dan rencana intensitas penggunaan tanah RWK.

BAB V ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

Bab ini berisikan pembahasan mengenai tahapan dan prioritas pembangunan, arah penanganan lingkungan, indikasi program dan proyek serta pendanaan, aspek kelembagaan pembangunan, serta aspek hukum dalam pelaksanaan.

BAB II

KARAKTERISTIK WILAYAH PERENCANAAN

Karakteristik wilayah perencanaan yang akan diuraikan meliputi kedudukan kota dalam lingkup wilayah, karakteristik fisik, karakteristik kependudukan, karakteristik perekonomian, karakteristik transportasi, serta karakteristik prasarana dan sarana.

2.1 Karakteristik Wilayah Kota

Pembahasan mengenai karakteristik wilayah kota meliputi kedudukan kota dalam lingkup wilayah serta peranan kota dalam lingkup wilayah.

2.1.1 Kedudukan Kota Dalam Lingkup Wilayah

Wilayah kota Deket ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1988, Kota Deket terdiri atas 3 desa yaitu :

- desa Deket Wetan
- desa Deket Kulon
- desa Rejosari

Kota Deket meliputi areal seluas 687,818 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara : desa Sugihwaras dan Sidobinangun
- sebelah Timur : desa Pandanpancur
- sebelah Selatan : desa Tambakrigadung
- sebelah Barat : kota Lamongan

Selanjutnya batas wilayah administrasi dari desa-desa yang termasuk dalam wilayah fungsional kota Deket dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Kota Deket sebagai ibukota kecamatan Deket berjarak sekitar 3 kilometer dari ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan dilalui oleh jalur jalan arteri primer Gresik - Lamongan.

2.1.2 Peranan Kota Dalam Lingkup Wilayah

Dalam sistem perwilayahan pembangunan Kabupaten Lamongan, seperti telah diuraikan pada bab terdahulu, Kecamatan Deket berada dalam sub SWP IV Lamongan yang berpusat di Kota Deket sendiri. Dengan demikian maka Kecamatan Deket yang terletak di sebelah Timur dari wilayah Kabupaten Lamongan dapat berfungsi sebagai wilayah penyangga (hinter-

land) antara wilayah kota Lamongan dengan wilayah di sebelah Timur kota Lamongan.

Pusat pengembangan Kecamatan Deket sendiri adalah Kota Deket. Kota ini memiliki tingkat aksesibilitas cukup tinggi terhadap Kota Lamongan maupun kota-kota kecamatan lain di sekitarnya. Hal ini terjadi karena didukung oleh jalur jalan yang kondisinya cukup baik (beraspal).

Demikian pula hubungan antara Kota Deket dengan wilayah pedesaan disekitarnya, dapat dikatakan cukup tinggi aksesibilitasnya. Hal ini tentunya sangat mendukung fungsi Kota Deket sebagai simpul jasa distribusi. Dengan pernyataan lain, Kota Deket akan mampu berperan dalam merangsang pertumbuhan wilayah pedesaan disekitarnya.

2.2 Karakteristik Internal Kota

Pembahasan mengenai karakteristik internal kota meliputi karakteristik fisik, karakteristik kependudukan, karakteristik perekonomian, karakteristik transportasi, serta karakteristik sarana dan prasarana.

2.2.1 Karakteristik Fisik

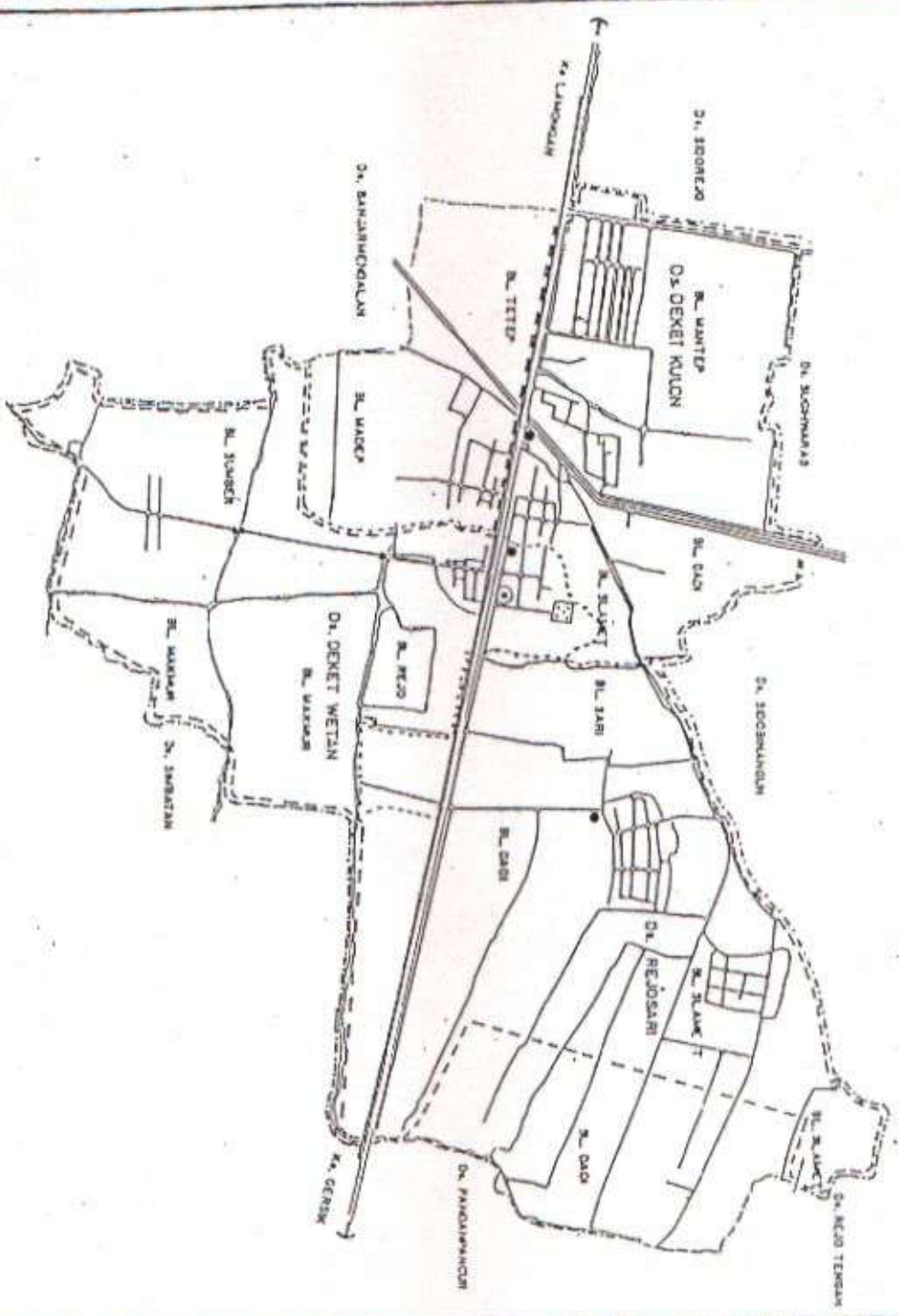
Bahasan mengenai karakteristik fisik kota Deket meliputi kondisi fisik dasar, pola penggunaan lahan, struktur kegiatan, dan kondisi lingkungan perumahan.

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
 IBUKOTA KECAMATAN DEKET

BATAS ADMINISTRASI

KETERANGAN

-  IBUKOTA KECAMATAN
-  KANTOR DESA
-  BATAS PENELITIAN
-  BATAS DESA
-  JARINGAN JALAN
-  JALAN KERETA API
-  SUNGAI



0 0.57 0.54 0.51
 S K A L A
 K M

SUMBER : HASIL SIGI LAPANGAN
 TAHUN 1992

KODE / PETUNJUK PETA

DIGAMBAR :	21
DICAMBAH :	
DIPERIKSA :	
NO	MO
LEMB	LEMB
APL	LEMB

2.2.1.1 Kondisi Fisik Dasar

Letak geografis kota Deket berada di sebelah Timur kota Lamongan dengan jarak sekitar 3 kilometer. Ketinggian kota berkisar antara 5 - 6 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 0 - 2 % ke arah Utara dan ke arah Timur 0 - 1 %. Jenis tanah adalah aluvial dengan tekstur sedang dan kedalaman di atas 90 cm, sehingga sangat sesuai untuk pertanian dan perikanan. Suhu udara rata-rata berkisar antara 17,5 - 25 derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata 1500 mm per tahun. Musim penghujan berlangsung antara bulan Nopember - April dan musim kemarau antara Mei - Oktober. Kedalaman air tanah antara 5 - 10 m yang umumnya rasanya asin sehingga kurang sesuai untuk memenuhi kebutuhan air minum. Sungai besar yang melintas di kota Deket adalah Kali Deket yang merupakan bagian dari drainase wilayah Kabupaten Lamongan sedangkan untuk drainase kota melalui saluran-saluran kecil yang umumnya juga merupakan saluran irigasi.

2.2.1.2 Pola Penggunaan Lahan

Seperti halnya pada kota-kota kecamatan pada umumnya, maka pola penggunaan lahan di kota Deket secara umum masih didominasi oleh daerah persawahan dan tegalan produktif yang sekaligus berfungsi sebagai sumber mata pencaharian utama penduduk kota Deket dan juga merupakan penunjang utama sistem perekonomian di kota Deket. Wilayah desa Rejosari meru-

pakan desa terluas yang arealnya membentuk kota Deket sedangkan desa Deket Kulon dan desa Deket Wetan memiliki luas areal paling kecil. Desa Deket Kulon memiliki areal daerah terbangun paling luas yaitu sekitar 68 ha apabila dibandingkan dengan luas daerah terbangun di desa Deket Wetan (sekitar 12 ha).

Pada tahun 1988, dari 687,818 ha luas kota Deket, maka hanya 108,800 ha merupakan areal terbangun sedangkan sisanya sebagian besar merupakan daerah tidak terbangun yang digunakan untuk areal persawahan 529,350 ha, areal tegalan 11,428 ha, dan penggunaan lainnya seperti makam, tanah bengkok, saluran irigasi, dan lainnya memanfaatkan lahan seluas 17,240 ha. Pola dan komposisi pemanfaatan lahan di kota Deket pada tahun 1988 ini tampaknya tidak mengalami perubahan yang terlalu besar pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1989 dan tahun 1990, tidak terjadi perubahan besar pada komposisi penggunaan lahan di kota Deket. Namun pada tahun 1991, luas areal daerah terbangun tampak meluas lagi dan bahkan lebih luas dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1988 dan tahun 1989, yaitu menjadi 109,800 ha. Selanjutnya perkembangan pola penggunaan lahan di kota Deket secara statistik dapat dilihat pada Tabel 2.1 - 2.4.

Apabila ditinjau di lapangan, maka pola penggunaan lahan di kota Deket juga masih memiliki kondisi yang prototype, yaitu berkembang secara linear di sepanjang jalan arteri primer Gresik - Lamongan. Perkembangan linear ini tidak

TABEL 2.1 POLA PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 1988

DESA	DAERAH TERBANGUN	PERSA WAHAN	LADANG TEGALAN	DANAU RAWA	TANAH BENGKOK	KUBURAN	LAIN LAIN	JUMLAH
Deket Kulon	68,000	155,000					10,940	233,940
Deket Wetan	12,800	140,350	11,428				6,300	170,878
Rejosari	28,000	234,000		3,000	17,000	1,000		283,000
JUMLAH	108,800	529,350	11,428	3,000	17,000	1,000	17,240	687,818

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.2 POLA PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 1989

DESA	DAERAH TERBANGUN	PERSA WAHAN	LADANG TEGALAN	DANAU RAWA	TANAH BENGKOK	KUBURAN	LAIN LAIN	JUMLAH
Deket Kulon	68,000	155,000					10,940	233,940
Deket Wetan	12,800	140,350	11,428				6,300	170,878
Rejosari	28,000	234,000		3,000	17,000	1,000		283,000
JUMLAH	108,800	529,350	11,428	3,000	17,000	1,000	17,240	687,818

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.3 POLA PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 1990

DESA	DAERAH TERBANGUN	PERSA WAHAN	LADANG TEGALAN	DANAU RAWA	TANAH BENGKOK	KUBURAN	LAIN LAIN	JUMLAH
Deket Kulon								0,000
Deket Wetan	12,800	215,396	11,428				3,500	243,124
Rejosari	29,000	238,000	13,000				3,000	283,000
JUMLAH	41,800	453,396	24,428	0,000	0,000	0,000	6,500	526,124

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.4 POLA PENGGUNAAN LAHAN TAHUN 1991

DESA	DAERAH TERBANGUN	PERSA WAHAN	LADANG TEGALAN	DANAU RAWA	TANAH BENGKOK	KUBURAN	LAIN LAIN	JUMLAH
Deket Kulon	68,000	155,000					10,940	233,940
Deket Wetan	12,800	215,396	11,428				3,500	243,124
Rejosari	29,000	238,000	13,000				3,000	283,000
JUMLAH	109,800	608,396	24,428	0,000	0,000	0,000	17,440	760,064

Sumber : Potensi Desa

begitu intensif sehingga masih ada lahan persawahan atau tegalan yang tersisa di sepanjang jalan arteri primer Gresik - Lamongan tersebut. Perkembangan linear ini ternyata juga dilengkapi dengan perkembangan ke arah dalam yaitu ke arah Utara dan Selatan dari kawasan sepanjang jalan arteri primer namun apabila diperhatikan, maka perkembangan ke arah dalam ini ternyata juga berpola linear karena terjadi sepanjang jalan-jalan kolektor dan jalan lokal juga. Pola yang umum adalah hampir tidak ada satu blok yang diisi seluruhnya oleh daerah terbangun, sehingga areal sepanjang jalan selalu diisi oleh kegiatan perkotaan tertentu sedangkan kawasan di belakangnya hampir selalu merupakan areal tidak terbangun.

Daerah terbangun di kota Deket sebagian besar merupakan areal permukiman penduduk yang dilengkapi dengan prasarana permukiman seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas peribadatan sementara fasilitas kesehatan hanya berlokasi pada tempat-tempat tertentu saja. Kegiatan yang menempati areal di sepanjang jalan arteri primer Gresik - Lamongan adalah :

- permukiman penduduk yang menempati sebagian besar kawasan sepanjang jalan.
- fasilitas pendidikan yang terdapat pada segmen jalan arteri primer di desa Deket Wetan dan Deket Kulon.
- fasilitas perdagangan dan jasa yang berkembang cukup intensif di sepanjang jalan arteri primer.

- kegiatan industri pengolahan padi / huller yang terdapat di sepanjang jalan arteri primer.
- fasilitas kesehatan berupa puskesmas.

Selanjutnya pola penggunaan lahan pada saat ini di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 2.2.

2.2.1.3 Struktur Kegiatan

Struktur kegiatan di kota Deket dapat diklasifikasikan atas kegiatan primer, yaitu kegiatan perkotaan yang terkait dengan pelayanan regional, dan kegiatan sekunder, yaitu kegiatan perkotaan yang terkait dengan pelayanan internal kota. Kegiatan primer kota Deket yang terdiri atas industri pengolahan padi dan gudang seluruhnya berlokasi di sepanjang jalan arteri primer Gresik - Lamongan. Sementara itu kegiatan sekunder di kota Deket berkembang secara linear di sepanjang jalan arteri primer dan tersebar pula pada kawasan-kawasan permukiman di bagian Utara dan Selatan jalan arteri primer. Selanjutnya struktur kegiatan yang ada pada saat ini di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 2.3.

2.2.1.4 Kondisi Lingkungan Perumahan

Bangunan-bangunan perumahan dan bangunan-bangunan bagi kegiatan perkotaan lainnya di kota Deket yang terletak di sepanjang jalan arteri primer Gresik - Lamongan umumnya merupakan bangunan berkondisi baik. Demikian juga dengan seba-



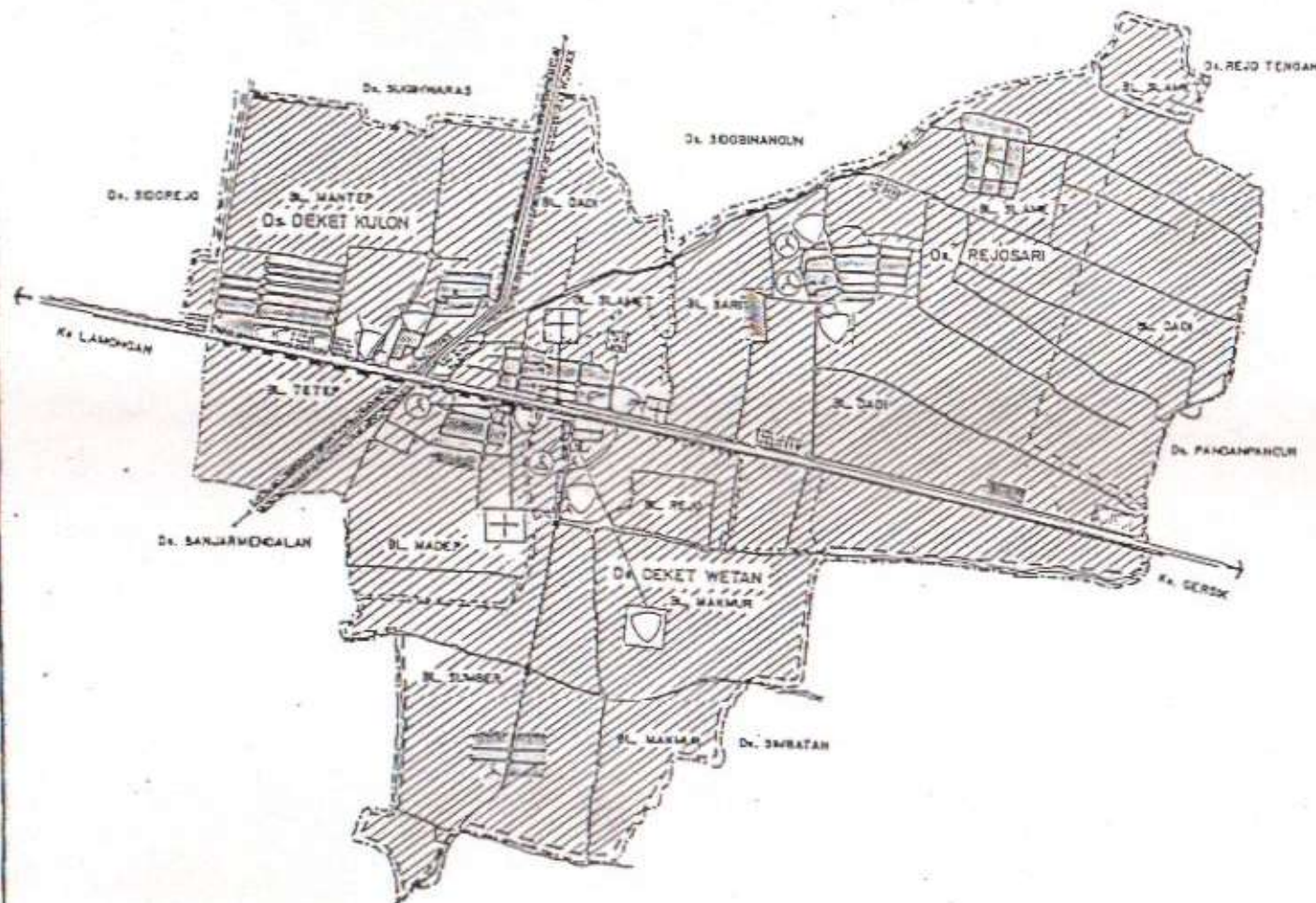
PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

TATA GUNA LAHAN

KETERANGAN

- | | |
|--|---------------------|
| | PERMUKIMAN |
| | PENDIDIKAN |
| | PERKANTORAN |
| | PERIBADATAN |
| | PERDAGANGAN/JASA |
| | KESIHATAN/PUSKESMAS |
| | GUDANG/MULLER |
| | JALUR HIJAU |
| | SAWAH/TEGAL |
| | MAKAM |



0 0.17 0.34 0.51 KM
S K A L A

SUMBER : HASIL SIGI LAPANGAN
TAHUN 1992

KODE / PETUNJUK PETA

DAMBAH : 2.2

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :



NO

LEMB

JML

LEMB

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

PERSEBARAN LOKASI
FASILITAS PELAYANAN
KOTA TH 1992

KETERANGAN

- ① PERKANTORAN
- ② PERDAGANGAN/JASA
- ③ PERIBADATAN
- ④ KESEHATAN/PUSKESMAS
- ⑤ PENDIDIKAN
- ⑥ GUDANG

SUMBER : HASIL SIGI LAPANGAN
TAHUN 1992

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 12.3

DIGAMBAR :

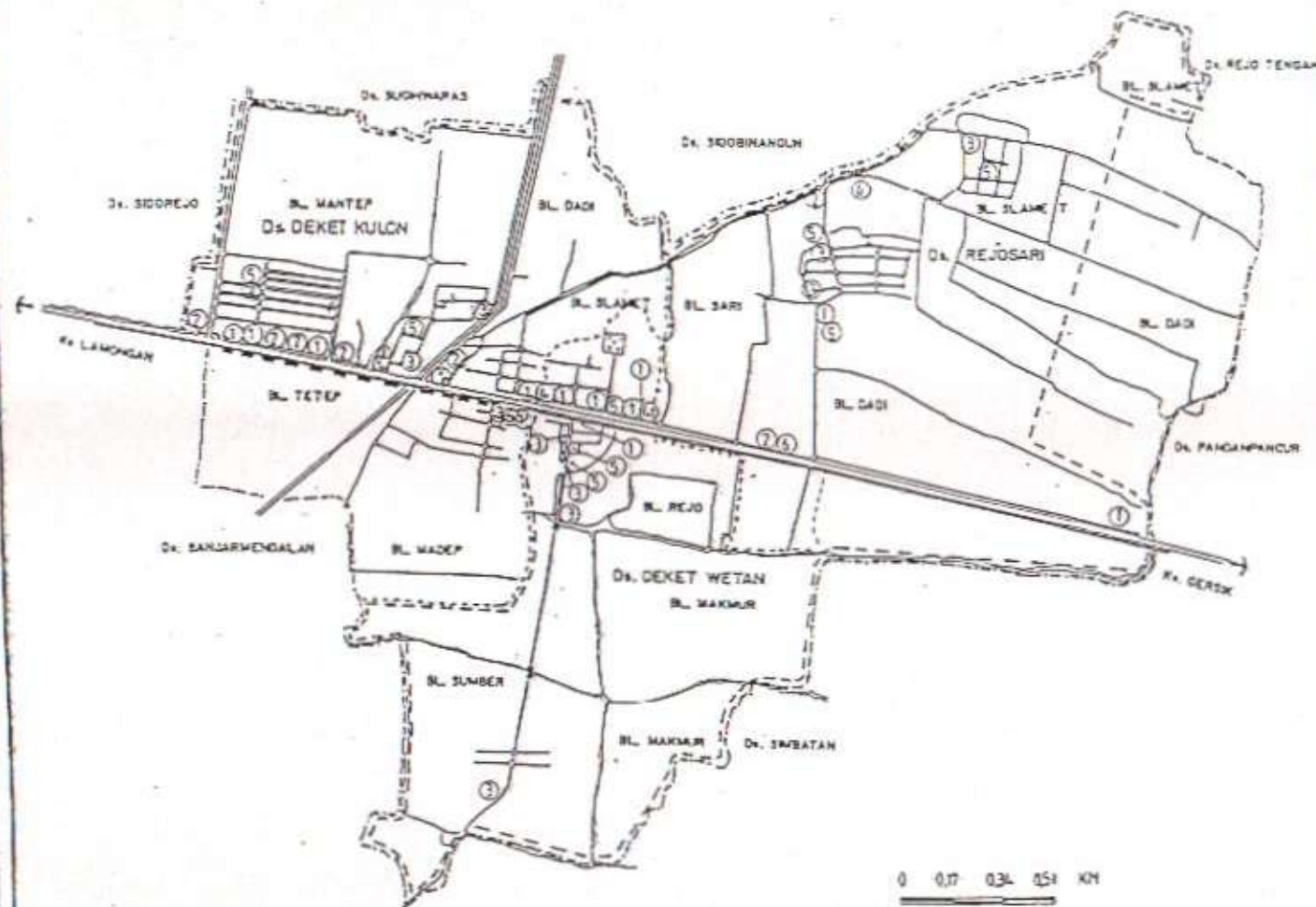
DIPERMSA : 



NO

LEMB

241
LEWIS



SKALA

gian bangunan di sepanjang jalan utama desa Deket Kulon serta sebagian bangunan yang terdapat di sepanjang jalan desa Rejosari . Selain itu bangunan yang terletak di sepanjang jalan arteri primer Gresik - Lamongan juga ada yang memiliki kondisi sedang. Bangunan berkondisi sedang juga terdapat di sebagian besar daerah terbangun yang terletak di luar kawasan sepanjang jalan arteri primer. Sementara itu hanya pada beberapa kawasan tampak terlihat bangunan-bangunan dengan kondisi buruk yang umumnya terletak di bagian pinggiran kota Deket. Selanjutnya penyebaran bangunan berdasarkan kondisinya di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Ditinjau dari tingkat kepadatannya maka kawasan-kawasan yang terdapat di kota Deket dapat dikategorikan atas :

- kawasan dengan kepadatan bangunan tinggi, terdapat pada kawasan di sepanjang jalan arteri primer Gresik - Lamongan.
- kawasan dengan kepadatan bangunan sedang, terdapat pada kawasan di bagian Utara dan Selatan dari jalan arteri primer Gresik - Lamongan.
- kawasan dengan kepadatan bangunan rendah, terdapat pada kawasan di bagian pinggiran kota Deket.

Selanjutnya klasifikasi kawasan di kota Deket berdasarkan tingkat kepadatan bangunannya dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Apabila seluruh bangunan yang ada di kota Deket ditinjau dari tingkat intensitas penggunaan lahannya, maka keadaan intensitas penggunaan lahan tersebut dapat dibagi atas beberapa kategori sebagai berikut :

- bangunan dengan koefisien dasar bangunan 70 % - 80 % terdapat pada perumahan dan perdagangan yang terdapat di desa Deket Kulon.
- bangunan dengan koefisien dasar bangunan 60 - 70 % terdapat pada bangunan perumahan yang terdapat di desa Deket Kulon dan bangunan perdagangan yang terdapat di desa Rejosari .
- bangunan dengan koefisien dasar bangunan 50 - 70 % terdapat pada bangunan perumahan yang terdapat di desa Deket Kulon, bangunan perumahan yang terdapat di desa Rejosari , serta bangunan perumahan yang terdapat di desa Deket Wetan.
- bangunan dengan koefisien dasar bangunan 40 % - 60 % terdapat pada bangunan umum dan bangunan perkantoran yang terdapat di desa Deket Wetan serta bangunan perumahan dan perkantoran yang terdapat di desa Rejosari .
- bangunan dengan koefisien dasar bangunan 40 % - 50 % terdapat pada bangunan perumahan yang terdapat di desa Deket Wetan.

Selanjutnya karakteristik tata bangunan pada seluruh bangunan di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 2.6.



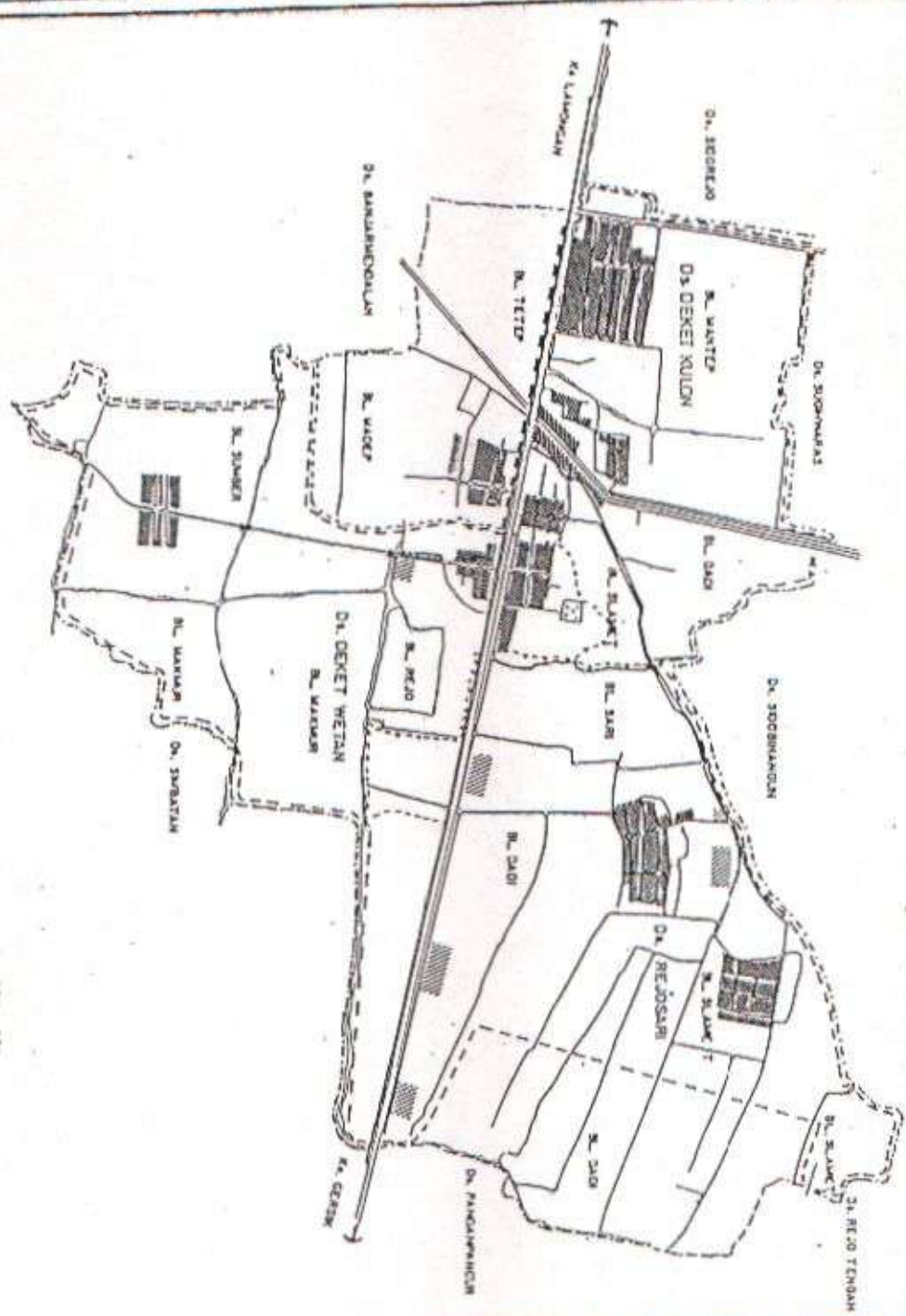
PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
DAERAH TINGKAT II

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
REJUNOTA KECAMATAN DEKET

KEPADATAN BANGUNAN TAHUN 1992

KETERANGAN

- KEPADATAN TINGGI
- KEPADATAN SEDANG
- KEPADATAN RENDAH



0 017 034 051
K M
S K A L A

SUMBER : HASIL SIGI LAPANGAN
TAHUN 1992

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 1, 2, 5	NO	LEMB	AM	LEMB
DOKUMEN : 1, 2, 5	1	1	1	1
OPERASI : 1, 2, 5	1	1	1	1

2.2.2 Karakteristik Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Deket pada tahun 1991 adalah 7.710 jiwa dimana jumlah penduduk tersebut merupakan perkembangan dari 7.493 jiwa pada tahun 1988. Dengan demikian maka terdapat laju perkembangan penduduk secara total untuk kota Deket sebesar 0,97 % per tahun. Laju perkembangan penduduk yang paling besar terdapat di desa Deket Kulon dan desa Deket Wetan yang laju perkembangan penduduknya di atas 1,00 % per tahun sementara laju perkembangan penduduk paling rendah terdapat di desa Rajosari yaitu 0,50 % per tahun. Akumulasi penduduk paling besar di kota Deket terdapat di desa Deket Kulon karena desa ini merupakan areal dengan daerah terluas paling luas dan relatif dekat dengan kawasan pusat pelayanan kota. Selanjutnya perkembangan jumlah penduduk di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK KOTA DEKET

DESA	1988	1989	1990	1991	LAJU
Deket Kulon	3.069	3.089	3.533	3.165	1,04%
Deket Wetan	2.302	2.325	2.340	2.391	1,29%
Rajosari	2.122	2.188	2.254	2.154	0,50%
JUMLAH	7.493	7.602	8.127	7.710	0,97%

Sumber : Potensi Desa

Kepadatan penduduk secara bruto di kota Deket secara umum mengalami perubahan dari tahun 1988 - 1991, yaitu dari 16 jiwa per ha menjadi 17 jiwa per ha. Kondisi ini disebabkan oleh kecilnya angka laju perkembangan penduduk sehingga kondisi kepadatan penduduk bruto relatif tetap. Desa-desa yang memiliki angka kepadatan penduduk bruto lebih besar dari angka rata-rata adalah desa Deket Kulon (23 - 24 jiwa per ha). Selanjutnya perkembangan kepadatan penduduk bruto di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6 PERKEMBANGAN KEPADATAN PENDUDUK BRUTO KOTA DEKET

DESA	LUAS	1988	1989	1990	1991
Deket Kulon	132,20	23	23	27	24
Deket Wetan	132,20	17	18	18	18
Rajosari	193,20	11	11	12	11
JUMLAH	457,60	16	17	18	17

Sumber : Potensi Desa

Kepadatan penduduk secara netto di kota Deket secara umum tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar 18 jiwa per ha dari tahun 1987 - 1991. Kondisi ini juga disebabkan oleh kecilnya angka laju perkembangan penduduk sehingga kondisi kepadatan penduduk netto relatif tetap. Desa-desa yang memiliki angka kepadatan penduduk netto lebih besar dari

angka rata-rata adalah desa Deket Kulon (24 - 25 jiwa per ha) dan desa Deket Wetan (18 - 19 jiwa per ha). Selanjutnya perkembangan kepadatan penduduk netto di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7 PERKEMBANGAN KEPADATAN PENDUDUK NETTO KOTA DEKET

DESA	LUAS	1988	1989	1990	1991
Deket Kulon	127,20	24	24	28	25
Deket Wetan	127,20	18	18	18	19
Rejosari	170,20	12	13	13	13
JUMLAH	424,60	18	18	19	18

Sumber : Potensi Desa

Apabila dilihat komposisi penduduk kota Deket menurut kelompok umur, maka komposisinya relatif tetap dari tahun 1988 - 1991, yaitu penduduk kelompok usia muda memiliki proporsi lebih besar daripada penduduk kelompok usia dewasa dan kelompok usia tua. Kondisi ini memungkinkan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja pada masa mendatang di kota Deket sehinggaantisipasi penciptaan kesempatan kerja baru perlu diperluas. Selanjutnya komposisi penduduk kota Deket menurut kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.8 - 2.11.

Komposisi penduduk kota Deket menurut tingkat pendidikannya memiliki pola yang umum yaitu penduduk dengan latar

belakang pendidikan lebih rendah jumlahnya lebih besar daripada penduduk dengan latar belakang pendidikan lebih tinggi. Di kota Deket, penduduk dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar memiliki proporsi paling tinggi. Namun demikian penduduk yang tidak menamatkan pendidikan dasarnya juga ternyata memiliki proporsi pada peringkat kedua setelah penduduk dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar. Satu hal yang bernilai positif di kota Deket adalah adanya penduduk yang telah berhasil menamatkan pendidikan pada tingkat Akademi dan Perguruan Tinggi. Selanjutnya komposisi penduduk kota Deket menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 2.12 - 2.15.

Komposisi penduduk kota Deket menurut agamanya menunjukkan suatu pola yang relatif sama juga dengan kota-kota kecamatan lain di Jawa Timur yaitu penduduk yang beragama Islam memiliki proporsi paling besar dibandingkan dengan penduduk yang beragama lainnya. Namun yang lebih penting adalah terdapat pula penduduk yang beragama lain di kota Deket meskipun jumlahnya sangat sedikit dan relatif tidak berkembang jumlahnya dari tahun ke tahun, kecuali pemeluk agama Protestan. Selanjutnya komposisi penduduk kota Deket menurut agamanya dapat dilihat pada Tabel 2.16 - 2.19.

TABEL 2.6 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT KELORPOK UMUR TAHUN 1988

DESA	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-	JUMLAH
Deket Kulon	1.144	819	250	115	88	110	73	92	92	61	70	155	3.069
Deket Wetan	368	214	226	219	204	184	181	120	169	133	96	188	2.302
Rejosari	289	314	309	170	172	80	109	110	105	145	134	185	2.122
JUMLAH	1.801	1.347	785	504	464	374	363	322	366	339	300	528	7.493

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.9 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT KELORPOK UMUR TAHUN 1989

DESA	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-	JUMLAH
Deket Kulon	583	610	278	172	389	165	171	154	146	131	139	151	3.089
Deket Wetan	352	217	227	223	207	187	183	183	183	166	138	59	2.325
Rejosari	192	175	207	216	200	259	237	163	125	100	90	224	2.188
JUMLAH	1.127	1.002	712	611	796	611	591	500	454	397	367	434	7.602

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.10 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 1990

DESA	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-	JUMLAH
Deket Kulon	350	401	370	375	341	325	342	287	257	180	176	121	3.533
Deket Wetan	195	265	224	255	236	227	176	188	116	120	109	229	2.340
Rejosari	197	180	212	221	205	264	242	168	130	105	101	229	2.254
JUMLAH	750	846	806	851	782	816	760	643	503	405	386	579	8.127

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.11 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 1991

DESA	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-	JUMLAH
Deket Kulon	262	341	233	375	306	325	342	287	217	180	176	121	3.165
Deket Wetan	190	170	224	255	236	227	176	188	176	170	199	180	2.391
Rejosari	139	235	216	205	195	192	157	188	202	115	105	205	2.154
JUMLAH	591	746	673	835	737	744	675	663	595	465	480	506	7.710

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.12 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 1988

DESA	BS	TSD	SD	SLP	SLA	AK	PT	BA	JUMLAH
Deket Kulon	1.743	231	825	116	87	67			3.069
Deket Wetan	754	131	895	267	215	15	25		2.302
Rejosari	1.692	7	318	70	28		7		2.122
JUMLAH	4.189	369	2.038	453	330	82	32	0	7.493

Sumber : Potensi Desa

Keterangan : BS = belum sekolah
 TSD = tidak tamat SD
 SD = tamat SD
 SLP = tamat SLP
 SLA = tamat SLA
 AK = tamat Akademi
 PT = tamat Perguruan Tinggi
 BA = buta aksara

TABEL 2.13 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 1989

DESA	BS	TSD	SD	SLP	SLA	AK	PT	BA	JUMLAH
Deket Kulon	1.579	236	892	210	103	69			3.089
Deket Wetan	793	123	927	208	229	18	27		2.325
Rejosari	604	198	837	258	287	4			2.188
JUMLAH	2.976	557	2.656	676	619	91	27	0	7.602

Sumber : Potensi Desa

Keterangan : BS = belum sekolah
 TSD = tidak tamat SD
 SD = tamat SD
 SLP = tamat SLP
 SLA = tamat SLA
 AK = tamat Akademi
 PT = tamat Perguruan Tinggi
 BA = buta aksara

TABEL 2.14 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 1990

DESA	BS	TSD	SD	SLP	SLA	AK	PT	BA	JUMLAH
Deket Kulon	1.713	441	952	240	118	67	2		3.533
Deket Wetan	442	265	979	350	262	15	27		2.340
Rejosari	614	212	851	272	301	4			2.254
JUMLAH	2.769	918	2.782	862	681	86	29	0	8.127

Sumber : Potensi Desa

Keterangan : BS = belum sekolah
 TSD = tidak tamat SD
 SD = tamat SD
 SLP = tamat SLP
 SLA = tamat SLA
 AK = tamat Akademi
 PT = tamat Perguruan Tinggi
 BA = buta aksara

TABEL 2.15 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 1991

DESA	BS	TSD	SD	SLP	SLA	AK	PT	BA	JUMLAH
Deket Kulon	358	414	1.961	239	121	68	4		3.165
Deket Wetan	245	315	1.029	400	312	39	51		2.391
Rejosari	221	1.146	640	145		2			2.154
JUMLAH	824	1.875	3.630	784	433	109	55	0	7.710

Sumber : Potensi Desa

Keterangan : BS = belum sekolah
 TSD = tidak tamat SD
 SD = tamat SD
 SLP = tamat SLP
 SLA = tamat SLA
 AK = tamat Akademi
 PT = tamat Perguruan Tinggi
 BA = buta aksara

TABEL 2.16 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT AGAMA 1988

DESA	ISLAM	PROT.	KATH.	HINDU	BUDDHA	JUMLAH
Deket Kulon	3.022		41		6	3.069
Deket Wetan	2.302					2.302
Rejosari	2.122					2.122
JUMLAH	7.446		41	0	6	0 7.493

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.17 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT AGAMA 1989

DESA	ISLAM	PROT.	KATH.	HINDU	BUDDHA	JUMLAH
Deket Kulon	3.044		42		3	3.089
Deket Wetan	2.324		1			2.325
Rejosari	2.188					2.188
JUMLAH	7.556		43	0	3	0 7.602

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.18 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT AGAMA 1990

DESA	ISLAM	PROT.	KATH.	HINDU	BUDDHA	JUMLAH
Deket Kulon	3.527				4	2 3.533
Deket Wetan	2.338			2		2.340
Rejosari	2.254					2.254
JUMLAH	8.119		0	2	4	2 8.127

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.19 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT AGAMA 1991

DESA	ISLAM	PROT.	KATH.	HINDU	BUDDHA	JUMLAH
Deket Kulon	3.159			4	2	3.165
Deket Wetan	2.391					2.391
Rejosari	2.154					2.154
JUMLAH	7.704		0	0	4	2 7.710

Sumber : Potensi Desa

Ditinjau dari komponen-komponen kependudukan kota Deket menurut proporsi komponen perubahan penduduknya, maka komponen perubahan penduduk yang paling besar pengaruhnya terhadap perubahan jumlah penduduk di kota Deket adalah komponen kelahiran di satu pihak dan komponen migrasi keluar di pihak lain sehingga gabungan antara komponen-komponen ini menghasilkan laju perkembangan penduduk yang relatif kecil, yaitu di bawah 1 % per tahun. Selanjutnya pola pertumbuhan penduduk kota Deket menurut komponen-komponennya dapat dilihat pada Tabel 2.20 - 2.23.

TABEL 2.20 POLA PERTAMBAHAN PENDUDUK KOTA DEKET TAHUN 1988

DESA	LAHIR	MATI	DATANG	PINDAH
Deket Kulon	24	15	1	
Deket Wetan	24	18	23	18
Rejosari	18	12	17	31
JUMLAH	66	43	41	49

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.21 POLA PERTAMBAHAN PENDUDUK KOTA DEKET TAHUN 1989

DESA	LAHIR	MATI	DATANG	PINDAH
Deket Kulon	23	18	20	3
Deket Wetan	32	14	37	15
Rejosari	20	14	25	28
JUMLAH	75	46	82	46

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.22 POLA PERTAMBAHAN PENDUDUK KOTA DEKET TAHUN 1990

DESA	LAHIR	MATI	DATANG	PINDAH
Deket Kulon	19	9	23	6
Deket Wetan	34	20	31	23
Rejosari	24	16	32	19
JUMLAH	77	45	86	48

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.23 POLA PERTAMBAHAN PENDUDUK KOTA DEKET TAHUN 1991

DESA	LAHIR	MATI	DATANG	PINDAH
Deket Kulon	44	25	49	54
Deket Wetan	33	15	15	37
Rejosari	35	4	18	7
JUMLAH	112	44	82	98

Sumber : Potensi Desa

Komposisi penduduk kota Deket menurut lapangan pekerjaan pada sektor primer menunjukkan hanya satu jenis lapangan pekerjaan yang sangat dominan yaitu pada sektor pertanian. Selanjutnya komposisi penduduk kota Deket menurut lapangan pekerjaan pada sektor primer dapat dilihat pada Tabel 2.24 - 2.27.

TABEL 2.24 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PRIMER TAHUN 1988

DESA	MELAYAN	PINTA	PERLA-	PERKE	PETER	JUMLAH
		NIAN	DANGAN	ECUNAN	NAKAN	
Deket Kulon		506				506
Deket Wetan		215				215
Rejosari		673				673
JUMLAH	0	1.394	0	0	0	1.394

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.25 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PRIMER TAHUN 1989

DESA	NELAYAN	PERTA NIAN	PERLA- DANGAN	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	JUMLAH
Deket Kulon		506				506
Deket Wetan		185				185
Rejosari		472				472
JUMLAH	0	1.163	0	0	0	1.163

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.26 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PRIMER TAHUN 1990

DESA	NELAYAN	PERTA NIAN	PERLA- DANGAN	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	JUMLAH
Deket Kulon		519				519
Deket Wetan		190				190
Rejosari		472				472
JUMLAH	0	1.181	0	0	0	1.181

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.27 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PRIMER TAHUN 1991

DESA	NELAYAN	PERTA NIAN	PERLA- DANGAN	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	JUMLAH
Deket Kulon		519				519
Deket Wetan		190				190
Rejosari		673				673
JUMLAH	0	1.382	0	0	0	1.382

Sumber : Potensi Desa

Pada sektor industri, ternyata hanya pada sektor industri besar saja yang menjadi lapangan pekerjaan penduduk kota Deket yang menggantungkan hidupnya pada sektor industri. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang bekerja pada sektor industri besar ini relatif tetap dari tahun 1988 - 1991, yaitu sebanyak 2 jiwa. Selanjutnya komposisi penduduk kota Deket menurut lapangan pekerjaan pada sektor industri dapat dilihat pada Tabel 2.28 - 2.31.

TABEL 2.28 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1988

DESA	INDUSTRI KECIL	INDUSTRI SEDANG	INDUSTRI BESAR	JUMLAH
Deket Kulon			2	2
Deket Wetan			0	0
Rejosari			0	0

JUMLAH	0	0	2	2
--------	---	---	---	---

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.29 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1989

DESA	INDUSTRI KECIL	INDUSTRI SEDANG	INDUSTRI BESAR	JUMLAH
Deket Kulon			2	2
Deket Wetan			0	0
Rejosari			0	0

JUMLAH	0	0	2	2
--------	---	---	---	---

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.30 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1990

DESA	INDUSTRI KECIL	INDUSTRI SEDANG	INDUSTRI BESAR	JUMLAH
Deket Kulon			2	2
Deket Wetan			0	0
Rejosari			0	0

JUMLAH	0	0	2	2
--------	---	---	---	---

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.31 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1991

DESA	INDUSTRI KECIL	INDUSTRI SEDANG	INDUSTRI BESAR	JUMLAH
Deket Kulon			2	2
Deket Wetan			0	0
Rejosari			0	0

JUMLAH	0	0	2	2
--------	---	---	---	---

Sumber : Potensi Desa

Pada sektor perdagangan dan jasa, jenis-jenis lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh penduduk kota Deket adalah berdagang, kesehatan (dokter, bidan, dan mantri), pendidikan (sebagai guru), pegawai negeri sipil, ABRI, penjaminan pe-

sawai negeri, buruh, tukang, dan pada sektor perangkutan. Dari semua jenis pekerjaan ini, lapangan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil memiliki proporsi paling besar dan jumlahnya relatif bertambah dari tahun ke tahun. Pada peringkat kedua dari segi jumlah adalah pekerjaan sebagai buruh yang jumlahnya relatif berkurang dari tahun ke tahun. Proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai tukang dan pensiunan pegawai negeri sipil juga tampak lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lainnya yang tersisa. Selanjutnya komposisi penduduk kota Deket menurut lapangan pekerjaan pada sektor perdagangan dan jasa dapat dilihat pada Tabel 2.32 - 2.35.

..TABEL 2.32 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA TAHUN 1988

DESA	PEDA KESB- GANG HATAN DIKAN	PENDI PNS	PENSI ABRI UNAN	BURUH KANG KUTAN	JUMLAH					
Dekat Kulon	40	1	32	135	14	35	44	41	7	349
Dekat Metan	3	3	37	101	19	36	59	20	12	290
Rejosari	25	2	12	1	11	30	16			97
JUMLAH	68	4	71	249	34	82	133	77	19	736

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.33 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA TAHUN 1989

DESA	PEDA KESB- GANG HATAN DIKAN	PENDI PNS	PENSI ABRI UNAN BURUH	TU- ANG KANG KUTAN	JUMLAH					
Dekat Kulon	42	1	49	158	19	39	58	44	7	417
Dekat Metan	35	3	42	110	21	38	67	32	12	360
Rejosari	2	1	10	5	2	10	25	25	3	83
JUMLAH	79	5	101	273	42	87	150	101	22	860

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.34 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA TAHUN 1990

DESA	PEDA KESB- GANG HATAN DIKAN	PENDI PNS	PENSI ABRI UNAN BURUH	TU- ANG KANG KUTAN JUMLAH						
Dekat Kulon	42	1	53	160	13	41	70	35	3	418
Dekat Metan	20	2	47	110	17	28	67	30	12	333
Rejosari	2	1	10	5	2	10	25	25	3	83
JUMLAH	64	4	110	275	32	79	162	90	18	834

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.35 KOMPOSISI PENDUDUK KOTA DEKET MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN .
PADA SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA TAHUN 1991

DSSA	PEDA KESE- GANG KATAN	PENDI DIKAN	PNS	ABRI	PENSI UNAN	BURUH	TU- KANG	ANG KUTAN	JUMLAH	
Deket Kulon	42	1	53	150	13	41	70	33	6	419
Deket Wetan	20	2	47	110	17	28	67	30	12	333
Rejosari	76	3	6	4	7	13		20		129
JUMLAH	138	6	106	274	37	82	137	83	18	881

Sumber : Potensi Desa

2.2.3 Aspek Perekonomian

Aspek perekonomian yang penting untuk dikaji selain perkembangan jumlah produksi tiap sektor ekonomi adalah nilai tambah yang diperoleh dari tiap kegiatan sektor ekonomi. Pengkajian ini pada akhirnya akan dapat memperlihatkan komposisi sektor-sektor ekonomi dominan dan sektor-sektor ekonomi kurang dominan pada kota yang bersangkutan. Untuk kota Deket, sektor-sektor ekonomi yang memberikan nilai tambah adalah :

- sektor pertanian tanaman pangan
- sektor perkebunan
- sektor kehutanan dan pekarangan
- sektor peternakan
- sektor perikanan

- sektor industri dan kerajinan
- sektor perdagangan
- sektor transportasi dan angkutan
- sektor jasa sosial
- sektor jasa bangunan

Untuk sektor pertanian tanaman pangan, dari pengamatan tahun 1988 - 1991 menunjukkan terjadinya kenaikan dalam nilai produksi dan biaya produksi sedangkan nilai tambah yang diperoleh sektor ekonomi ini mengalami kenaikan yang sangat besar. Pada tahun 1988 nilai tambah yang diperoleh adalah sekitar 162 juta rupiah sedangkan nilai tambah yang diperoleh pada tahun 1991 adalah sekitar 1,1 milyar rupiah. Selanjutnya perkembangan nilai tambah pada sektor pertanian tanaman pangan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.36 - 2.39.

..TABEL 2.36 NILAI TAMBAH SEKTOR TANAMAN PANGAN TAHUN 1988

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	127.150.000	12.715.000	108.713.250
Deket Wetan	45.480.000	4.548.000	38.885.400
Rejosari	17.875.000	1.787.500	15.283.125
JUMLAH	190.505.000	19.050.500	162.881.775

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.37 NILAI TAMBAH SEKTOR TANAMAN PANGAN TAHUN 1989

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	154.320.000	15.432.000	131.943.600
Deket Wetan	388.400.000	49.170.000	322.268.500
Rejosari	50.250.000	5.025.000	42.963.750
JUMLAH	592.970.000	69.627.000	497.175.850

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.38 NILAI TAMBAH SEKTOR TANAMAN PANGAN TAHUN 1990

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	197.240.000	33.000.025	156.027.976
Deket Wetan	447.450.000	75.058.500	353.771.925
Rejosari	174.142.500	29.146.125	137.746.556
JUMLAH	818.832.500	137.204.650	647.546.458

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.39 NILAI TAMBAH SEKTOR TANAMAN PANGAN TAHUN 1991

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	531.530.000	211.827.500	303.717.375
Deket Wetan	447.450.000	75.058.500	353.771.925
Rejosari	497.250.000	26.000.000	447.687.500
JUMLAH	1.476.230.000	312.886.000	1.105.176.800

Sumber : Potensi Desa

Untuk sektor peternakan, dari pengamatan tahun 1988 - 1991 menunjukkan terjadinya kenaikan dalam nilai produksi dan biaya produksi sedangkan nilai tambah yang diperoleh sektor ekonomi ini mengalami kenaikan yang relatif kecil. Pada tahun 1988 nilai tambah yang diperoleh adalah sekitar 21 juta rupiah sedangkan nilai tambah yang diperoleh pada tahun 1991 adalah sekitar 33 juta rupiah. Selanjutnya perkembangan nilai tambah pada sektor peternakan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.40 - 2.42.

...TABEL 2.40 NILAI TAMBAH SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 1988

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	11.291.000	1.129.100	9.645.255
Deket Wetan	4.625.000	462.500	3.954.375
Rejosari	9.784.000	978.400	8.365.320
JUMLAH	25.690.000	2.569.000	21.964.950

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.41 NILAI TAMBAH SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 1989

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	13.065.000	1.306.500	11.170.575
Deket Wetan	9.067.000	3.373.700	5.408.635
Rejosari	12.600.000	1.260.000	10.773.000
JUMLAH	34.732.000	5.940.200	27.352.210

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.42 NILAI TAMBAH SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 1990

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	21.700.000	5.800.000	15.105.000
Deket Wetan	10.200.000	2.925.000	6.911.250
Rejosari	17.415.550	3.483.110	13.235.818
JUMLAH	49.315.550	12.208.110	35.252.068

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.43 NILAI TAMBAH SEKTOR PETERNAKAN TAHUN 1991

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	19.025.000	7.155.000	11.276.500
Deket Wetan	10.200.000	2.925.000	6.911.250
Rejosari	15.806.000	150.000	14.873.200
JUMLAH	45.031.000	10.230.000	33.060.950

Sumber : Potensi Desa

Untuk sektor perikanan, dari pengamatan tahun 1988 - 1991 menunjukkan terjadinya kenaikan dalam nilai produksi dan biaya produksi sedangkan nilai tambah yang diperoleh sektor ekonomi ini mengalami kenaikan yang relatif kecil. Pada tahun 1988 nilai tambah yang diperoleh adalah sekitar 720 juta rupiah sedangkan nilai tambah yang diperoleh pada

tahun 1991 adalah sekitar 790 juta rupiah. Selanjutnya perkembangan nilai tambah pada sektor perikanan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.44 - 2.47.

....TABEL 2.44 NILAI TAMBAH SEKTOR PERIKANAN TAHUN 1988

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	114.750.000	34.425.000	76.308.750
Deket Wetan	768.000.000	230.400.000	510.720.000
Rejosari	200.800.000	60.240.000	133.532.000
JUMLAH	1.083.550.000	325.065.000	720.560.750

Sumber : Potensi Desa

....TABEL 2.45 NILAI TAMBAH SEKTOR PERIKANAN TAHUN 1989

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	194.900.000	41.610.000	145.625.500
Deket Wetan	782.500.000	230.750.000	524.162.500
Rejosari	224.750.000	67.425.000	149.458.750
JUMLAH	1.202.150.000	339.785.000	819.246.750

Sumber : Potensi Desa

....TABEL 2.46 NILAI TAMBAH SEKTOR PERIKANAN TAHUN 1990

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	195.000.000	78.000.000	111.150.000
Deket Wetan	909.300.000	363.720.000	518.301.000
Rejosari	282.600.000	130.680.000	144.324.000
JUMLAH	1.386.900.000	572.400.000	773.775.000

Sumber : Potensi Desa

....TABEL 2.47 NILAI TAMBAH SEKTOR PERIKANAN TAHUN 1991

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	211.200.000	78.630.000	125.941.500
Deket Wetan	909.300.000	363.720.000	518.301.000
Rejosari	224.375.000	70.625.000	146.062.500
JUMLAH	1.344.875.000	512.975.000	790.305.000

Sumber : Potensi Desa

Untuk sektor industri dan kerajinan, dari pengamatan tahun 1988 - 1991 menunjukkan terjadinya kenaikan dalam nilai produksi dan biaya produksi sedangkan nilai tambah yang diperoleh sektor ekonomi ini juga mengalami kenaikan yang sangat kecil. Pada tahun 1988 nilai tambah yang diperoleh adalah sekitar 1.4 juta rupiah sedangkan nilai tambah yang

diperoleh pada tahun 1991 adalah sekitar 4,2 juta rupiah. Selanjutnya perkembangan nilai tambah pada sektor industri dan kerajinan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.48 - 2.51.

.....TABEL 2.48 NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1988

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	3.750.000	2.250.000	1.425.000
Deket Wetan			0
Rejosari			0
JUMLAH	3.750.000	2.250.000	1.425.000

Sumber : Potensi Desa

.....TABEL 2.49 NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1989

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	3.750.000	2.250.000	1.425.000
Deket Wetan			0
Rejosari			0
JUMLAH	3.750.000	2.250.000	1.425.000

Sumber : Potensi Desa

.....TABEL 2.50 NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1990

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	3.750.000	2.250.000	1.425.000
Deket Wetan			0
Rejosari			0
JUMLAH	3.750.000	2.250.000	1.425.000

Sumber : Potensi Desa

.....TABEL 2.51 NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI TAHUN 1991

DESA	NILAI PRODUKSI	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	7.500.000	3.000.000	4.275.000
Deket Wetan			0
Rejosari			0
JUMLAH	7.500.000	3.000.000	4.275.000

Sumber : Potensi Desa

Untuk sektor perdagangan, dari pengamatan tahun 1988 - 1991 menunjukkan terjadinya kenaikan dalam hal marketable surplus dan merce perdagangan sedangkan nilai tambah yang diperoleh sektor ekonomi ini juga mengalami kenaikan yang relatif kecil. Pada tahun 1988 nilai tambah yang diperoleh adalah sekitar 232 juta rupiah sedangkan nilai tambah yang

diperoleh pada tahun 1991 adalah sekitar 243 juta rupiah. Selanjutnya perkembangan nilai tambah pada sektor perdagangan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.52 - 2.55.

...TABEL 2.52 NILAI TAMBAH SEKTOR PERDAGANGAN TAHUN 1988

DESA	MARKET SURPLUS	MERCE PERDAG.	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	298.372.400	39.332.600	37.365.970
Deket Wetan	1.146.460.000	176.665.000	167.831.750
Rejosari	320.746.000	28.437.250	27.015.388
JUMLAH	1.765.578.400	244.434.850	232.213.108

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.53 NILAI TAMBAH SEKTOR PERDAGANGAN TAHUN 1989

DESA	MARKET SURPLUS	MERCE PERDAG.	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	298.372.400	39.332.600	37.365.970
Deket Wetan	1.146.460.000	176.665.000	167.831.750
Rejosari	320.746.000	28.437.250	27.015.388
JUMLAH	1.765.578.400	244.434.850	232.213.108

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.54 NILAI TAMBAH SEKTOR PERDAGANGAN TAHUN 1990

DESA	MARKET SURPLUS	MERCE PERDAG.	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	298.372.400	39.332.600	37.365.970
Deket Wetan	1.146.460.000	176.665.000	167.831.750
Rejosari	320.746.000	28.437.250	27.015.388
JUMLAH	1.765.578.400	244.434.850	232.213.108

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.55 NILAI TAMBAH SEKTOR PERDAGANGAN TAHUN 1991

DESA	MARKET SURPLUS	MERCE PERDAG.	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	393.205.000	64.892.500	61.647.875
Deket Wetan	1.146.460.000	176.665.000	167.831.750
Rejosari	256.250.000	15.000.000	14.250.000
JUMLAH	1.795.915.000	256.557.500	243.729.625

Sumber : Potensi Desa

Untuk sektor transportasi, dari pengamatan tahun 1988 - 1991 menunjukkan terjadinya kenaikan dalam nilai income dan biaya produksi sedangkan nilai tambah yang diperoleh sektor ekonomi ini justru mengalami penurunan yang relatif kecil. Pada tahun 1988 nilai tambah yang diperoleh adalah sekitar 72 juta rupiah sedangkan nilai tambah yang diperoleh pada

tahun 1991 adalah sekitar 62 juta rupiah. Selanjutnya perkembangan nilai tambah pada sektor transportasi di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.56 - 2.69.

...TABEL 2.56 NILAI TAMBAH SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 1988

DESA	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	79.056.000	7.950.600	63.994.860
Deket Wetan	10.224.000	1.024.400	8.279.640
Rejosari			0
JUMLAH	89.280.000	8.975.000	72.274.500

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.57 NILAI TAMBAH SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 1989

DESA	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	73.485.000	22.662.000	45.740.700
Deket Wetan	8.820.000	882.000	7.144.200
Rejosari			0
JUMLAH	82.305.000	23.544.000	52.884.900

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.58 NILAI TAMBAH SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 1990

DESA	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	30.760.000	3.976.000	24.105.600
Deket Wetan	20.500.000	2.400.000	16.290.000
Rejosari	4.040.000	405.000	3.271.500
JUMLAH	55.300.000	6.781.000	43.667.100

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.59 NILAI TAMBAH SEKTOR TRANSPORTASI TAHUN 1991

DESA	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	65.860.000	19.675.000	41.566.500
Deket Wetan	20.500.000	2.400.000	16.290.000
Rejosari	7.550.000	2.050.000	4.950.000
JUMLAH	93.910.000	24.125.000	62.806.500

Sumber : Potensi Desa

Untuk sektor jasa sosial, dari pengamatan tahun 1988 - 1991 menunjukkan terjadinya kenaikan dalam nilai produksi dan biaya produksi sedangkan nilai tambah yang diperoleh sektor ekonomi ini juga mengalami kenaikan yang cukup besar. Pada tahun 1988 nilai tambah yang diperoleh adalah sekitar 12 juta-rupiah sedangkan nilai tambah yang diperoleh pada

tahun 1991 adalah sekitar 37 juta rupiah. Selanjutnya perkembangan nilai tambah pada sektor jasa sosial di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.60 - 2.63.

...TABEL 2.60 NILAI TAMBAH SEKTOR JASA SOSIAL TAHUN 1988

DESA	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI NILAI TAMBAH
Deket Kulon	6.759.000	675.900	5.778.945
Deket Wetan	6.200.000	620.000	5.301.000
Rejosari	1.920.000	192.000	1.841.600
JUMLAH	14.879.000	1.487.900	12.721.545

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.61 NILAI TAMBAH SEKTOR JASA SOSIAL TAHUN 1989

DESA	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI NILAI TAMBAH
Deket Kulon	6.900.000	690.000	5.899.500
Deket Wetan	4.410.000	702.000	3.522.600
Rejosari	3.300.000	330.000	2.821.500
JUMLAH	14.610.000	1.722.000	12.243.600

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.62 NILAI TAMBAH SEKTOR JASA SOSIAL TAHUN 1990

DESA	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI NILAI TAMBAH
Deket Kulon	8.700.000	810.000	7.495.500
Deket Wetan	5.350.000	882.000	4.244.600
Rejosari	8.750.000	447.500	7.887.375
JUMLAH	22.800.000	2.139.500	19.627.475

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.63 NILAI TAMBAH SEKTOR JASA SOSIAL TAHUN 1991

DESA	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI NILAI TAMBAH
Deket Kulon	17.950.000	4.487.000	12.789.850
Deket Wetan	5.350.000	882.500	4.244.125
Rejosari	33.600.000	12.250.000	20.282.500
JUMLAH	56.900.000	17.619.500	37.316.475

Sumber : Potensi Desa

Untuk sektor jasa bangunan, dari pengamatan tahun 1988 - 1991 menunjukkan terjadinya kenaikan dalam nilai bangunan dan gaji serta upah sedangkan nilai tambah yang diperoleh sektor ekonomi ini juga mengalami kenaikan dengan volume yang cukup besar. Nilai tambah paling tinggi pada sektor ini terjadi pada tahun 1990. Pada tahun 1988 nilai tambah yang

diperoleh adalah sekitar 60 juta rupiah sedangkan nilai tambah yang diperoleh pada tahun 1991 adalah sekitar 73 juta rupiah. Selanjutnya perkembangan nilai tambah pada sektor jasa bangunan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.64 - 2.67.

..TABEL 2.64 NILAI TAMBAH SEKTOR JASA BANGUNAN TAHUN 1988

DESA	NILAI BANGUNAN	GAJI DAN UPAH	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	108.000.000	27.000.000	34.020.000
Deket Wetan	54.500.000	13.625.000	17.167.500
Rejosari	28.500.000	7.125.000	8.977.500
JUMLAH	191.000.000	47.750.000	60.165.000

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.65 NILAI TAMBAH SEKTOR JASA BANGUNAN TAHUN 1989

DESA	NILAI BANGUNAN	GAJI DAN UPAH	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	108.000.000	27.000.000	34.020.000
Deket Wetan	54.500.000	13.625.000	17.167.500
Rejosari	28.500.000	7.125.000	8.977.500
JUMLAH	191.000.000	47.750.000	60.165.000

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.66 NILAI TAMBAH SEKTOR JASA BANGUNAN TAHUN 1990

DESA	NILAI BANGUNAN	GAJI DAN UPAH	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	108.000.000	27.000.000	34.020.000
Deket Wetan	54.500.000	13.625.000	17.167.500
Rejosari	28.500.000	7.125.000	8.977.500
JUMLAH	191.000.000	47.750.000	60.165.000

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.67 NILAI TAMBAH SEKTOR JASA BANGUNAN TAHUN 1991

DESA	NILAI BANGUNAN	GAJI DAN UPAH	NILAI TAMBAH
Deket Kulon	61.000.000	15.250.000	19.215.000
Deket Wetan	54.500.000	13.625.000	17.167.500
Rejosari	117.000.000	29.250.000	36.855.000
JUMLAH	232.500.000	58.125.000	73.237.500

Sumber : Potensi Desa

Dengan mengamati perkembangan nilai tambah pada tiap sektor ekonomi di kota Deket pada tahun 1988 - 1991, maka secara total nilai tambah yang diperoleh kota Deket menunjukkan adanya kenaikan dari 1,28 milyar rupiah pada tahun 1988 menjadi 2,83 milyar rupiah pada tahun 1991. Kondisi yang sama dari tahun 1988 - 1991 adalah bahwa ternyata sek-

tor ekonomi yang berciri rural lebih dan tetap dominan daripada sektor ekonomi yang berciri urban. Ini terbukti dari dominannya sektor pertanian dan perikanan sebagai wujud ekonomi rural dibandingkan dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai wujud ekonomi urban. Selanjutnya perkembangan nilai tambah ekonomi secara total untuk kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.68 - 2.71.

.....TABEL 2.68 NILAI TAMBAH SEKTOR EKONOMI TAHUN 1988

SEKTOR EKONOMI	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Tanaman pangan	190.505.000	19.050.500	162.881.775
Peternakan	25.690.000	2.569.000	21.964.950
Perikanan	1.083.550.000	325.065.000	720.560.750
Industri	3.750.000	2.250.000	1.425.000
Perdagangan	1.765.578.400	244.434.850	232.213.108
Transportasi	89.280.000	8.975.000	72.274.500
Jasa sosial	14.879.000	1.487.900	12.721.545
Jasa bangunan	191.000.000	47.750.000	60.165.000
JUMLAH	3.364.232.400	651.582.250	1.284.206.628

Sumber : Potensi Desa

.....TABEL 2.69 NILAI TAMBAH SEKTOR EKONOMI TAHUN 1989

SEKTOR EKONOMI	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Tanaman pangan	592.970.000	69.627.000	497.175.850
Peternakan	34.732.000	5.940.200	27.352.210
Perikanan	1.202.150.000	339.785.000	819.246.750
Industri	3.750.000	2.250.000	1.425.000
Perdagangan	1.765.578.400	244.434.850	232.213.108
Transportasi	82.305.000	23.544.000	52.884.900
Jasa sosial	14.610.000	1.722.000	12.243.600
Jasa bangunan	191.000.000	47.750.000	60.165.000
JUMLAH	3.887.095.400	735.053.050	1.702.706.418

Sumber : Potensi Desa

.....TABEL 2.70 NILAI TAMBAH SEKTOR EKONOMI TAHUN 1990

SEKTOR EKONOMI	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Tanaman pangan	618.832.500	137.204.650	647.546.458
Peternakan	49.315.550	12.208.110	35.252.068
Perikanan	1.386.900.000	572.400.000	773.775.000
Industri	3.750.000	2.250.000	1.425.000
Perdagangan	1.765.578.400	244.434.850	232.213.108
Transportasi	55.300.000	6.781.000	43.667.100
Jasa sosial	22.800.000	2.139.500	19.627.475
Jasa bangunan	191.000.000	47.750.000	60.165.000
JUMLAH	4.293.476.450	1.025.168.110	1.813.671.209

Sumber : Potensi Desa

.....TABEL 2.71 NILAI TAMBAH SEKTOR EKONOMI TAHUN 1991

SEKTOR EKONOMI	NILAI INCOME	BIAYA PRODUKSI	NILAI TAMBAH
Tanaman pangan	1.476.230.000	312.886.000	1.105.176.800
Peternakan	45.031.000	10.230.000	33.060.950
Perikanan	1.344.875.000	512.975.000	790.305.000
Industri	7.500.000	3.000.000	4.275.000
Perdagangan	1.795.915.000	256.557.500	243.729.525
Transportasi	93.910.000	24.125.000	62.806.500
Jasa sosial	56.900.000	17.619.500	37.316.475
Jasa bangunan	232.500.000	58.125.000	73.237.500
JUMLAH	5.052.861.500	1.195.518.000	2.349.907.850

Sumber : Potensi Desa

2.2.4 Karakteristik Transportasi

Jaringan jalan yang membentuk kota Deket berawal dari tingginya akses jalan arteri primer Gresik - Lamongan yang melalui kota Deket. Tingginya akses jalan arteri primer ini kemudian menjadi pemicu timbulnya jalan-jalan baru yang seluruhnya bermuara menuju jalan arteri primer. Akses di luar jalan arteri primer umumnya rendah karena kondisinya sebagian besar merupakan jalan tanah. Namun demikian jalan kolektor dan lokal di dalam kota Deket ini memiliki akses yang

baik dalam menghubungkan antara desa-desa di bagian dalam kota Deket.

Jaringan jalan yang terdapat di kota apabila ditinjau dari kondisi perkerasannya secara statistik terdiri atas jalan aspal, jalan batu, dan jalan tanah. Jalan batu paling besar volumenya sedangkan jalan aspal memiliki volume paling besar. Menurut data dalam potensi desa, panjang jalan di dalam kota Deket adalah sebagai berikut :

- jalan aspal yang ada memiliki panjang sekitar 5.000 meter pada tahun 1988 menjadi sekitar 3.000 meter pada tahun 1991.
- jalan batu yang ada panjangnya 11.000 meter pada tahun 1988 sedangkan pada tahun 1991 panjangnya menjadi 8.000 meter.
- jalan tanah memiliki panjang sekitar 200 meter pada tahun 1988 menjadi sekitar 6.000 meter pada tahun 1991.

Tidak disebutkan dalam potensi desa tersebut mengapa justru terjadi pengurangan panjang jalan di kota Deket. Jalan dengan kualitas perkerasan aspal hanyalah jalan arteri primer saja sedangkan jalan-jalan lainnya yang bermuara menuju jalan arteri primer umumnya merupakan jalan batu dan jalan tanah. Selanjutnya jaringan jalan berdasarkan kondisi perkerasannya di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Jembatan yang terdapat di kota Deket terdiri atas jembatan beton yang panjangnya berubah dari 9 meter pada tahun



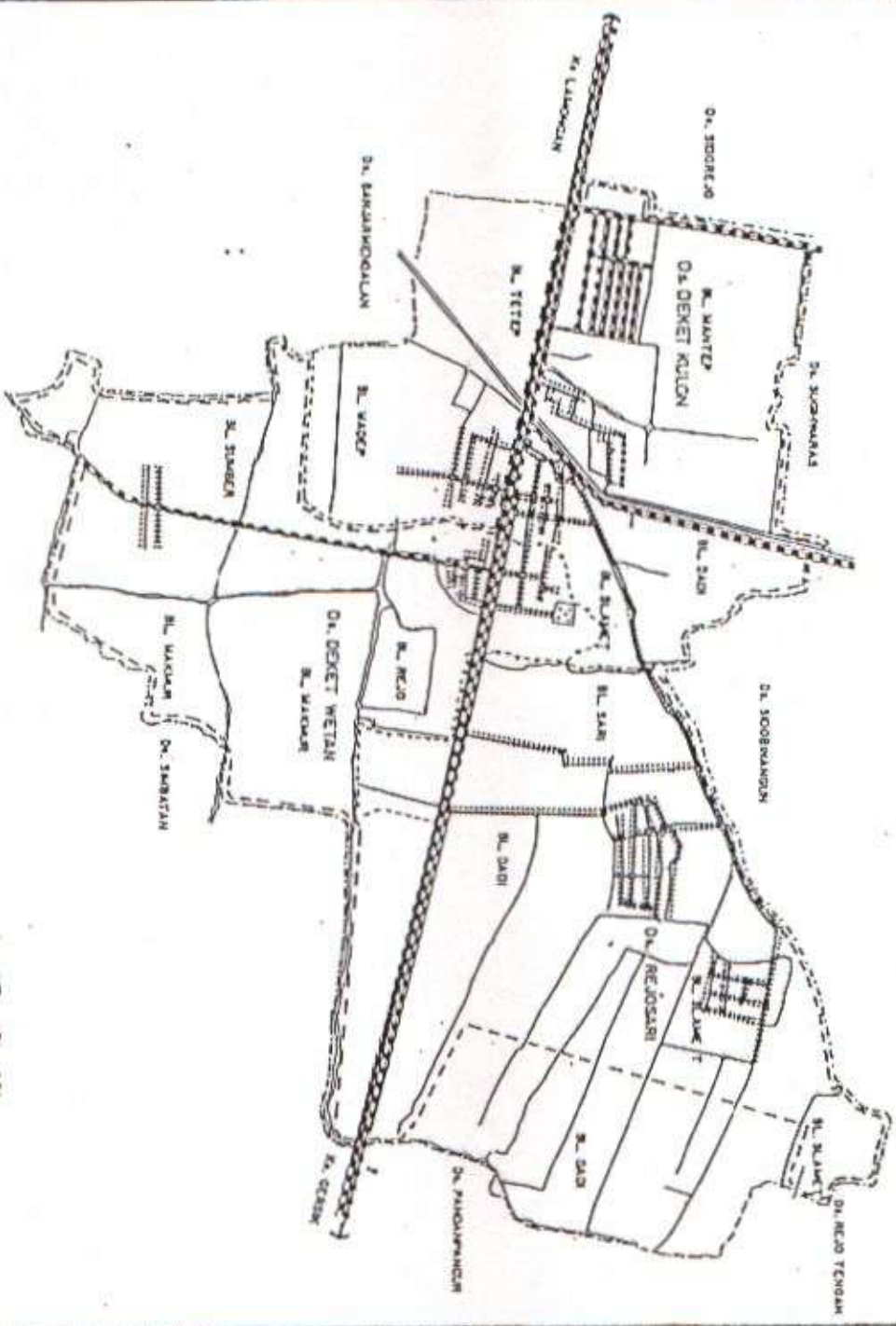
PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
DAERAH TINGKAT II

REKANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
REKANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

KONDISI
JARINGAN JALAN

KETERANGAN

- JALAN ASPAL
- JALAN BATU/MAKADAM
- JALAN BETON
- JALAN TANAH



0 0,27 0,54 0,81
K M
S K A L A

SUMBER : HASIL SICI LAPANGAN
TAHUN 1992

KODE / PETUNJUK PETA

Garuda	: 2.7
OKWASAR	: 1
DIREKSI	: 1
NO	
LEMB	
JML	
LEMB	
SKALA	

1988 menjadi 5 meter pada tahun 1991 serta jembatan kayu yang panjangnya juga berubah dari 32 meter pada tahun 1988 menjadi 5 meter pada tahun 1991.

Selanjutnya perkembangan kondisi jalan dan jembatan di kota Deket secara statistik dapat dilihat pada Tabel 2.72 - 2.75.

TABEL 2.72 KONDISI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 1988

DESA	JL ASPAL		JL BATU		JL TANAH		JB BETON		JB KAYU	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
Deket Kulon	3.000	8,00	3.000	3,50			1	2,00	32	2,00
Deket Wetan	2.000	8,00	3.000	2,50	200	2,00	3	4,00		
Rejosari			5.000	4,00			5	3,00		
JUMLAH	5.000	8,00	11.000	3,33	200	2,00	9	3,00	32	2,00

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.73 KONDISI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 1989

DESA	JL ASPAL		JL BATU		JL TANAH		JB BETON		JB KAYU	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
Deket Kulon	3.000	8,00	3.000	3,50			1	2,00	32	2,00
Deket Wetan										
Rejosari			3.000	2,00			3	2,00		
JUMLAH	3.000	8,00	6.000	2,75			4	2,00	32	2,00

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.74 KONDISI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 1990

DESA	JL ASPAL		JL BATU		JL TANAH		JB BETON		JB KAYU	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
Deket Kulon	1.000	2,00	2.000	3,00	1.000	3,00	1	2,00	2	1,50
Deket Wetan	2.000	7,00	2.000	3,00			4	2,00	3	2,00
Rejosari			3.000	2,00			3	2,00		
JUMLAH	3.000	4,50	7.000	2,67	1.000	3,00	8	2,00	5	1,75

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.75 KONDISI JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 1991

DESA	JL ASPAL		JL BATU		JL TANAH		JB BETON		JB KAYU	
	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
Deket Kulon	1.000	2,00	2.000	3,00	2.000	3,00	1	2,00	2	1,50
Deket Wetan	2.000	7,00	2.000	3,00			4	2,00	3	2,00
Rejosari		3,00	4.000	1,00	4.000				10	3,00
JUMLAH	3.000	4,00	8.000	2,33	6.000	3,00	5	2,00	15	2,17

Sumber : Potensi Desa

Sarana transportasi di kota Deket terdiri atas kendaraan roda empat (angkutan penumpang/mobil dan angkutan barang/truk), kendaraan roda tiga (becak), serta kendaraan roda dua (sepeda motor dan sepeda). Menurut data yang bersumber dari potensi desa jumlah total sarana transportasi

TABEL 2.76 JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1988

DESA	MOBIL	TRUK	S MOTOR	DELMAN	GEROBAK	SEPEDA	BECAK	JUMLAH
Deket Kulon	5	4	41	2	3	65	15	135
Deket Wetan	4		80	1	6	470	10	571
Rejosari	1		52			187		240
JUMLAH	10	4	173	3	9	722	25	946

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.77 JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1989

DESA	MOBIL	TRUK	S MOTOR	DELMAN	GEROBAK	SEPEDA	BECAK	JUMLAH
Deket Kulon	7	6	46	2	3	,70	19	153
Deket Wetan	6	4	98			470	8	586
Rejosari	1		61			212		274
JUMLAH	14	10	205	2	3	752	27	1.013

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.78 JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1990

DESA	MOBIL	TRUK	S MOTOR	DELMAN	GEROBAK	SEPEDA	BECAK	JUMLAH
Deket Kulon	4	3	75	1	3	15	10	111
Deket Wetan	5	1	150			250	50	456
Rajosari	1		99		11	157	3	271
JUMLAH	10	4	324	1	14	422	63	838

Sumber : Potensi Desa

TABEL 2.79 JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 1991

DESA	MOBIL	TRUK	S MOTOR	DELMAN	GEROBAK	SEPEDA	BECAK	JUMLAH
Deket Kulon	4	3	115	2	2	,35	10	171
Deket Wetan	5	1	150			250	50	456
Rajosari	1		100		25	162	3	291
JUMLAH	10	4	365	2	27	447	63	918

Sumber : Potensi Desa

yang ada di kota Deket menurun dari 946 unit pada tahun 1988 menjadi 918 unit pada tahun 1991. Sarana transportasi yang paling banyak jumlahnya adalah sepeda dan sepeda motor. Selanjutnya perkembangan jumlah sarana transportasi di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.76 - 2.79.

2.2.5 Karakteristik Prasarana Dan Sarana

Fasilitas umum yang terdapat di kota Deket terdiri atas fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas perdagangan.

Fasilitas pendidikan yang ada di kota Deket jumlahnya berkembang dari 9 unit pada tahun 1988 menjadi 14 unit pada tahun 1991. Jenis fasilitas pendidikan yang terdapat di kota Deket terdiri atas :

- Taman Kanak-Kanak yang jumlahnya 3 unit dan terdapat di setiap desa yang membentuk kota Deket.
- Sekolah Dasar yang jumlahnya 7 unit dan terdapat di setiap desa yang membentuk kota Deket.
- Sekolah Menengah Pertama yang jumlahnya 1 unit dan hanya terdapat di desa Deket Wetan.
- Sekolah Menengah Atas yang jumlahnya 1 unit dan hanya terdapat di desa Deket Kulon.
- Madrasah Ibtidaiyah yang jumlahnya 2 unit dan terdapat pada desa Deket Kulon dan desa Rejosari .

Selanjutnya jumlah dan penyebaran fasilitas pendidikan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.80 - 2.83 dan Gambar 2.8.

...TABEL 2.80 PENYEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 1988

DESA	TK	SD	SLTP	SLTA	MI	JUMLAH
Deket Kulon	1				1	2
Deket Wetan	1	2	1			4
Rejosari	2				1	3
JUMLAH	4	2	1	0	2	9

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.81 PENYEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 1989

DESA	TK	SD	SLTP	SLTA	MI	JUMLAH
Deket Kulon	1	3		1	1	6
Deket Wetan	1	2	1			4
Rejosari		2			1	3
JUMLAH	2	7	1	1	2	13

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.82 PENYEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 1990

DESA	TK	SD	SLTP	SLTA	MI	JUMLAH
Deket Kulon	1	3		1	1	6
Deket Wetan	1	2	1			4
Rejosari		2			1	3
JUMLAH	2	7	1	1	2	13

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.83 PENYEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN TAHUN 1991

DESA	TK	SD	SLTP	SLTA	MI	JUMLAH
Deket Kulon	1	3		1	1	6
Deket Wetan	1	2	1			4
Rejosari	1	2			1	4
JUMLAH	3	7	1	1	2	14

Sumber : Potensi Desa

Fasilitas kesehatan yang ada di kota Deket jumlahnya relatif tetap yaitu 9 unit dari tahun 1988 - 1991. Jenis fasilitas kesehatan yang terdapat di kota Deket terdiri atas :

- Puskesmas yang jumlahnya hanya 1 unit dan terdapat di desa Deket Wetan.
- Posyandu yang jumlahnya 8 unit dan terdapat di setiap desa yang membentuk kota Deket.

Selanjutnya jumlah dan penyebaran fasilitas kesehatan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.84 - 2.87 dan Gambar 2.9.

....TABEL 2.84 PENYEBARAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 1988

DESA	POLIKLINIK	PUSKESMAS	POSYANDU	JUMLAH
Deket Kulon			3	3
Deket Wetan		1	3	4
Rejosari			2	2
JUMLAH	0	1	8	9

Sumber : Potensi Desa

....TABEL 2.85 PENYEBARAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 1989

DESA	POLIKLINIK	PUSKESMAS	POSYANDU	JUMLAH
Deket Kulon			3	3
Deket Wetan		1	3	4
Rejosari			2	2
JUMLAH	0	1	8	9

Sumber : Potensi Desa



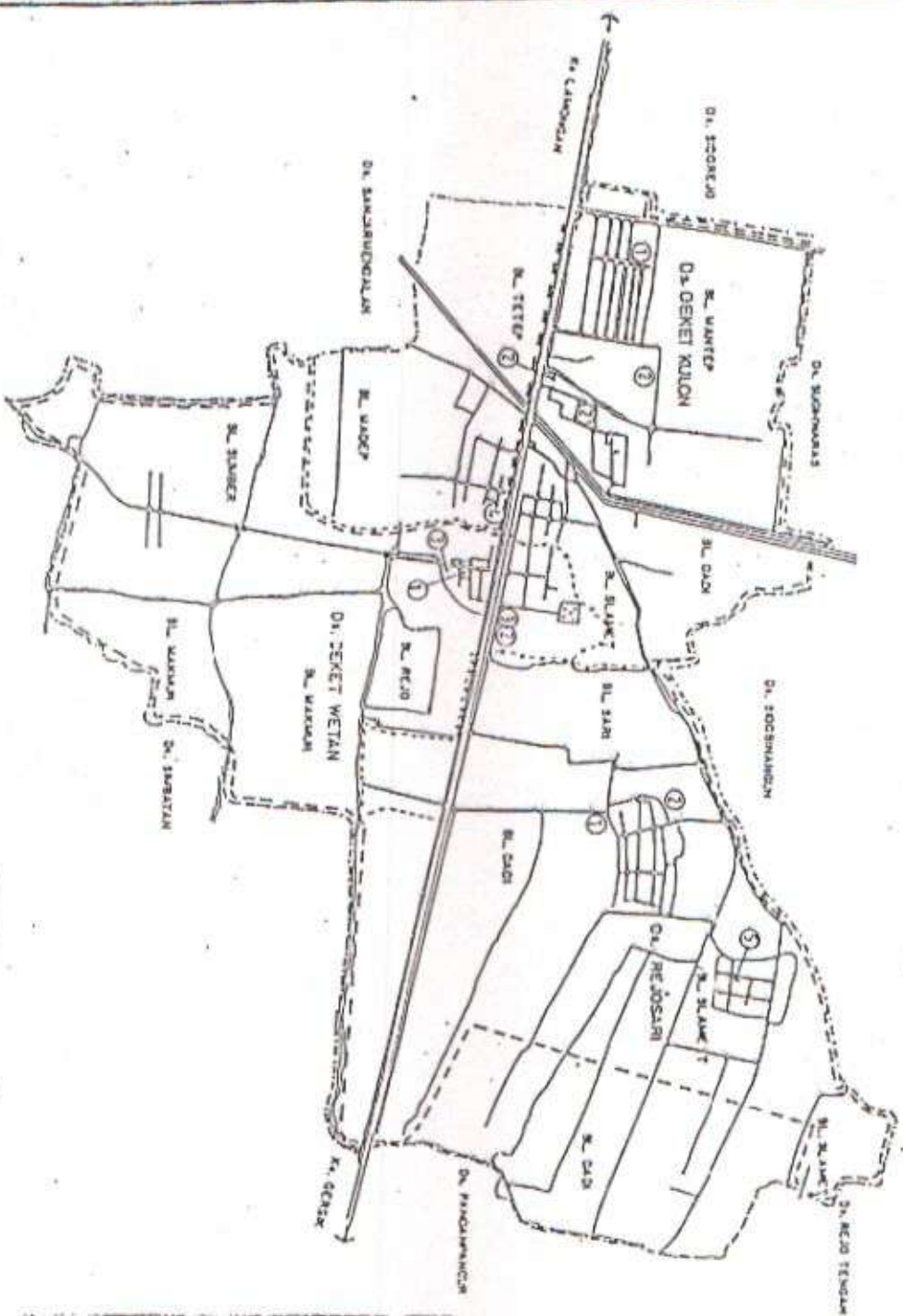
PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
DAERAH TINGKAT II

RENCANA UNDAH TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDULUHAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
JELUKTA KECAMATAN DEKET

PERSEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN

KETERANGAN

- ① TK
(TAMAN KANAK-KANAK)
- ② SD (SEKOLAH DASAR)
- ③ SMP
(SEKOLAH MENENGAH
TINGKAT PERTAMA)
- ④ SMA
(SEKOLAH MENENGAH
TINGKAT ATAS)
- ⑤ MI (MADRASAH IBTIDAIYAH)



0 0,17 0,34 0,51 KM
SKALA

KODE / PENJAJARAN PETA

SUMBER : HASIL SIGI LAPANGAN
TAHUN 1992

GAJAH : 1 2.8

DICAPAI : 1

DIREKSI : 0

	
NO	LEMB

....TABEL 2.86 PENYEBARAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 1990

DESA	POLIKLINIK	PUSKESMAS	POSYANDU	JUMLAH
Deket Kulon			3	3
Deket Wetan		1	2	3
Rejosari			2	2
JUMLAH	0	1	7	8

Sumber : Potensi Desa

....TABEL 2.87 PENYEBARAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 1991

DESA	POLIKLINIK	PUSKESMAS	POSYANDU	JUMLAH
Deket Kulon			3	3
Deket Wetan		1	2	3
Rejosari			2	2
JUMLAH	0	1	7	8

Sumber : Potensi Desa

Fasilitas peribadatan yang ada di kota Deket jumlahnya berkembang dari 13 unit pada tahun 1988 menjadi 21 unit pada tahun 1991. Jenis fasilitas peribadatan yang terdapat di kota Deket terdiri atas :

- Langgar yang jumlahnya 15 unit dan terdapat di setiap desa yang membentuk kota Deket serta sebagian besar terdapat di desa Deket Kulon.

- Mesjid yang jumlahnya 6 unit dan terdapat di setiap desa yang membentuk kota Deket.

Selanjutnya jumlah dan penyebaran fasilitas peribadatan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.88 - 2.91 dan Gambar 2.10.

...TABEL 2.88 PENYEBARAN FASILITAS PERIBADATAN TAHUN 1988

DESA	LANGGAR	MESJID	GEREJA	JUMLAH
Deket Kulon	6	1		7
Deket Wetan	3	1		4
Rejosari		2		2
JUMLAH	9	4	0	13

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.89 PENYEBARAN FASILITAS PERIBADATAN TAHUN 1989

DESA	LANGGAR	MESJID	GEREJA	JUMLAH
Deket Kulon	6	1		7
Deket Wetan	3	1		4
Rejosari	3	2		5
JUMLAH	12	4	0	16

Sumber : Potensi Desa



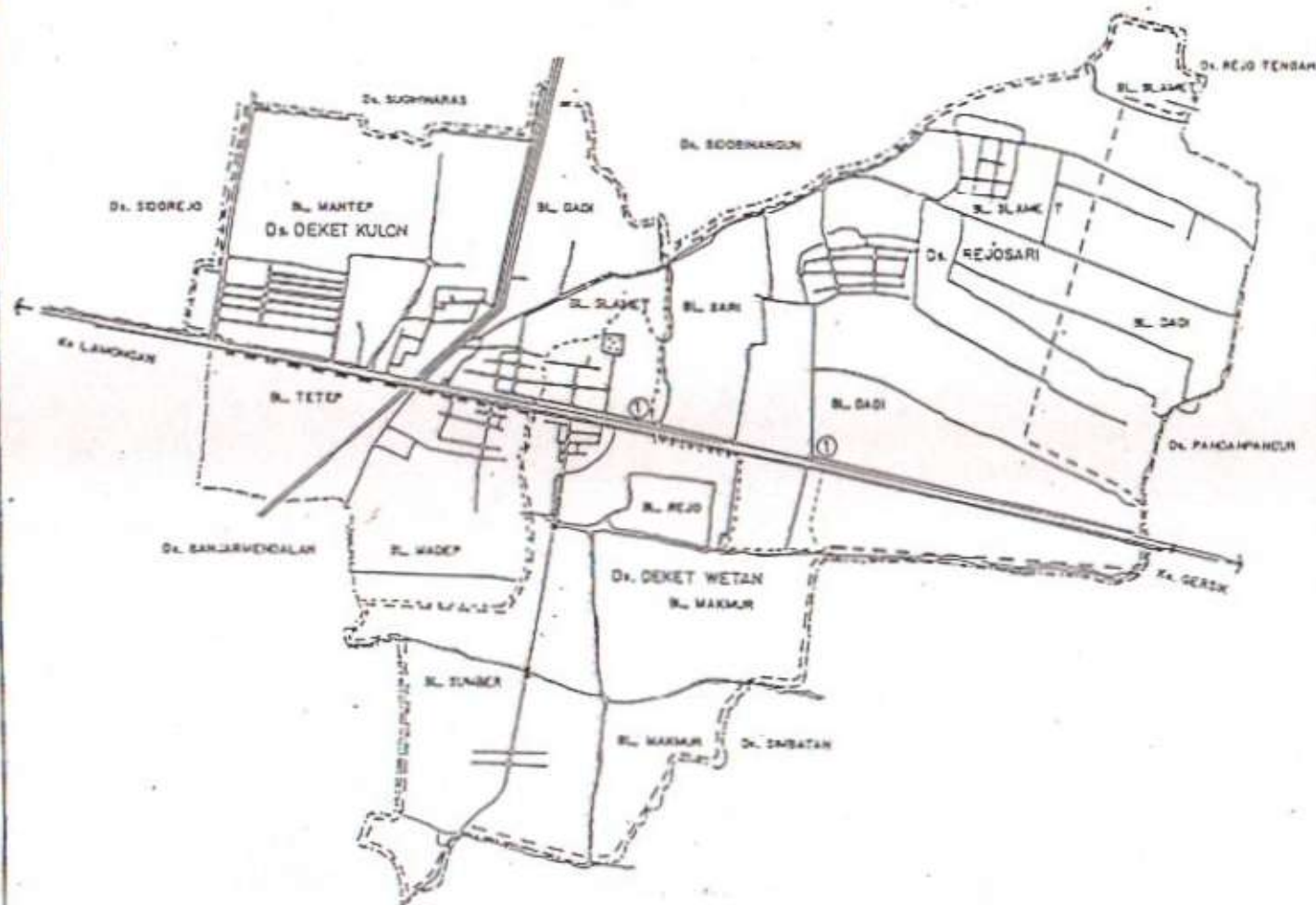
PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

PERSEBARAN FASTILITAS KESEHATAN

KETERANGAN

① PUSKESMAS



1 27 23 05

S. K. L. A.

SUMBER : HASIL SIGI LAPANGAN
TAHUN 1992

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 2.9

DIGAMBAR : 

OPERA : 1



NO

LEMS

水

...TABEL 2.90 PENYEBARAN FASILITAS PERIBADATAN TAHUN 1990

DESA	LANGGAR	MESJID	GEREJA	JUMLAH
Deket Kulon	7	3		10
Deket Wetan	3	1		4
Rejosari	3	2		5
JUMLAH	13	6	0	19

Sumber : Potensi Desa

...TABEL 2.91 PENYEBARAN FASILITAS PERIBADATAN TAHUN 1991

DESA	LANGGAR	MESJID	GEREJA	JUMLAH
Deket Kulon	9	3		12
Deket Wetan	3	1		4
Rejosari	3	2		5
JUMLAH	15	6	0	21

Sumber : Potensi Desa

Fasilitas perdagangan yang ada di kota Deket jumlahnya berkembang dari 56 unit pada tahun 1988 menjadi 61 unit pada tahun 1991. Jenis fasilitas perdagangan yang terdapat di kota Deket terdiri atas :

- Kios / warung yang jumlahnya 44 unit dan terdapat di setiap desa yang membentuk kota Deket.

- Toko yang jumlahnya 17 unit dan terdapat di setiap desa yang membentuk kota Deket.

- Gudang yang jumlahnya 4 unit dan hanya terdapat di desa Deket Wetan dan desa Deket Kulon.

Selanjutnya jumlah dan penyebaran fasilitas perdagangan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 2.92 - 2.95 dan Gambar 2.11.

..TABEL 2.92 PENYEBARAN FASILITAS PERDAGANGAN TAHUN 1988

DESA	PASAR	KIOS	TOKO	GUDANG	JUMLAH
Deket Kulon		19	6		25
Deket Wetan		18	3	1	22
Rejosari		9			9
JUMLAH	0	46	9	1	56

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.93 PENYEBARAN FASILITAS PERDAGANGAN TAHUN 1989

DESA	PASAR	KIOS	TOKO	GUDANG	JUMLAH
Deket Kulon		19	6	3	28
Deket Wetan		18	3	1	22
Rejosari		6	6		14
JUMLAH	0	43	17	4	64

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.94 PENYEBARAN FASILITAS PERDAGANGAN TAHUN 1990

DESA	PASAR	KIOS	TOKO	GUDANG	JUMLAH
Deket Kulon		19	6		25
Deket Wetan		18	3		21
Rejosari		6	8		14
JUMLAH	0	43	17	0	60

Sumber : Potensi Desa

..TABEL 2.95 PENYEBARAN FASILITAS PERDAGANGAN TAHUN 1991

DESA	PASAR	KIOS	TOKO	GUDANG	JUMLAH
Deket Kulon		19	6		25
Deket Wetan		18	3		21
Rejosari		7	8		15
JUMLAH	0	44	17	0	61

Sumber : Potensi Desa

Saluran air yang terdapat di kota Deket dapat diklasifikasikan atas :

- saluran irigasi yang dibangun karena sebagian besar areal kota Deket merupakan areal pertanian produktif. Saluran ini terdapat di bagian Utara jalan arteri primer.
- saluran penatusan yang mengalir pada sisi Utara jalan arteri primer.

Selanjutnya saluran air yang terdapat di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 2.12.

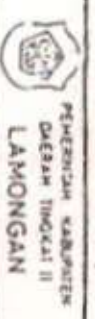
Jaringan utilitas yang terdapat di kota Deket meliputi jaringan listrik dan telepon sedangkan sarana penyediaan air bersih dari PDAM belum melayani kota Deket. Jaringan listrik yang melayani kota Deket terdiri atas :

- jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) yang melalui bagian Selatan kota Deket.
- jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) yang melalui jalan arteri primer Gresik - Lamongan, jalan utama desa Deket Wetan (arah ke Selatan), dan sepanjang jalan utama desa Deket Kulon (arah ke Utara).
- jaringan SUTR (Saluran Udara Tegangan Rendah) yang melalui hampir sebagian besar jaringan jalan yang ada di kota Deket.

Sementara itu jaringan telepon yang ada tampaknya hanya melayani kota Deket dalam skala terbatas dan jaringan utamanya melalui jalan arteri primer Gresik - Lamongan. Selanjutnya jaringan listrik dan telepon di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 2.13.

2.3 Potensi Dan Masalah Kota

Potensi dan permasalahan perkembangan kota yang terjadi di kota Deket adalah sebagai berikut :

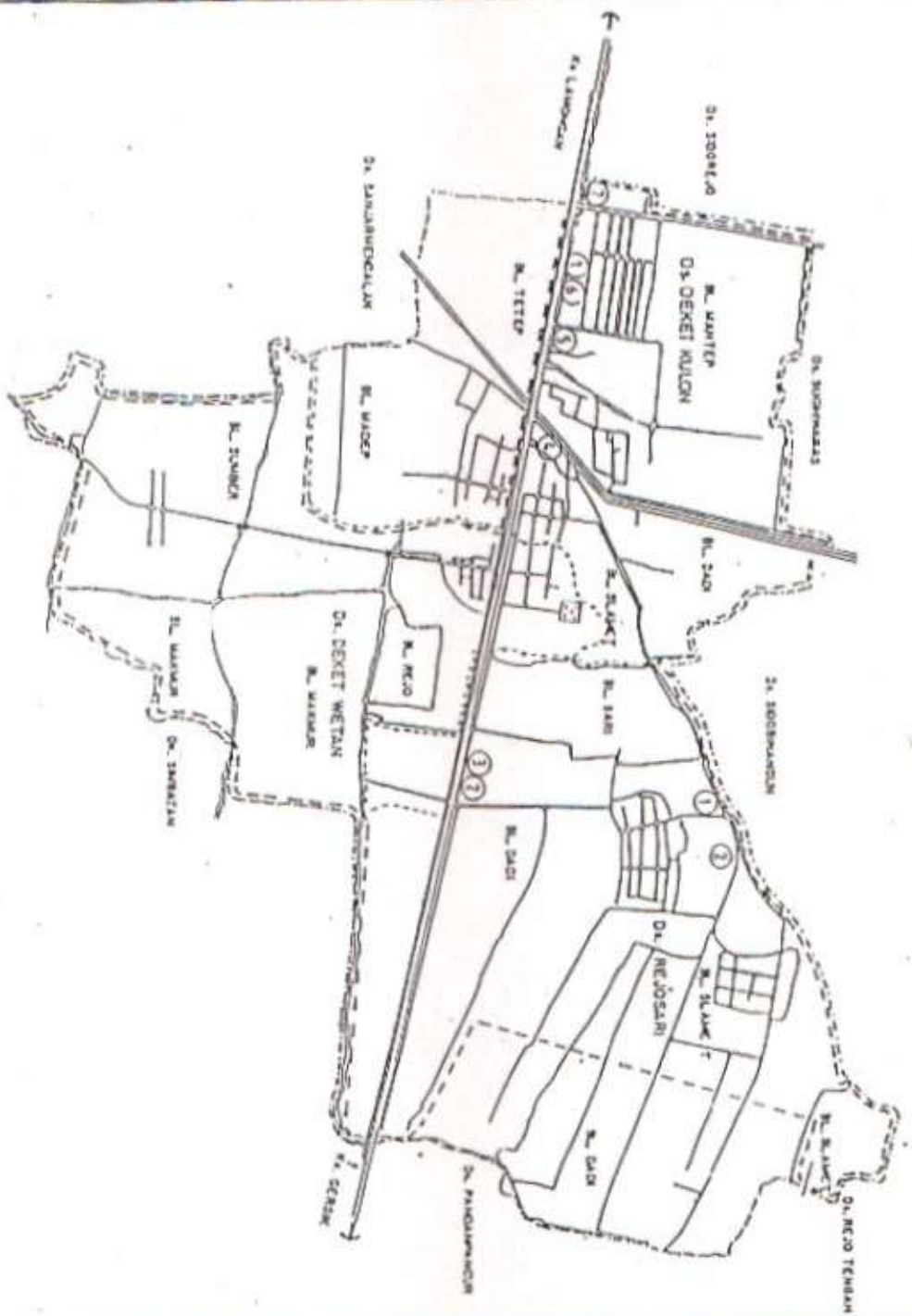


RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

**PERSEBARAN
FASILITAS PERDAGANGAN/JASA**

KETERANGAN

- ① TOKO/RIUKO
- ② MILLER
- ③ KUD
- ④ BRI
- ⑤ TAMBANGAN KENDARAAN
- ⑥ POM
- ⑦ BPR



0 2.7 5.4 10.8
KM
S K A L A

SUMBER : HASIL SURvei LAPANGAN
TAHUN 1982

KODE / PETUNJUK PETA

DAFTAR	2.11
CEKAMAN	
DIREKSI	
NO	
LEMB	
YUL	
LEMB	

PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

REKAMANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENCIAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

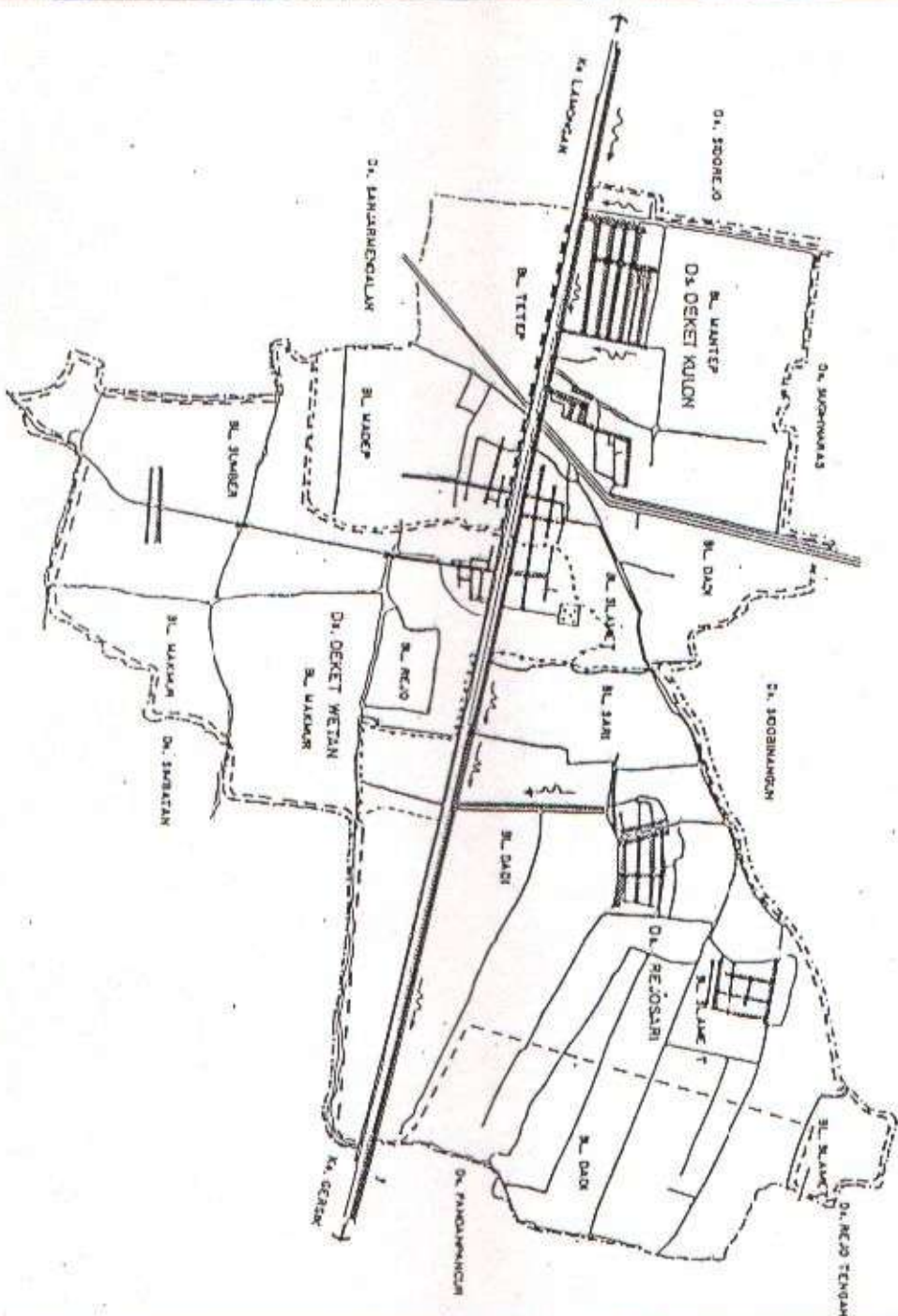
SALUTRAN DRAINAGE

KETERANGAN



SALURAN

ARAH ALIRAN AIR



0 0.77 2.34 2.56 4.77

SUMBER : HASIL SIGI LAPANGAN
TAHUN 1992

KODE / PETUNJUK PETA

Game 2	12.12
--------	-------

DIGITALBAR : 7

五



NO	LEM3
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

KETERANGAN

- | | |
|---|---|
|  | SUTT
(SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI) |
|  | SUTM
(SALURAN UDARA TEGANGAN MENENGAH) |
|  | SUTR
(SALURAN UDARA TEGANGAN RENDAH) |
|  | TRAVO |
|  | JARINGAN TELEPON |

SUMBER : HASIL SIGI LAPANGAN
TAHUN 1992

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 12.13

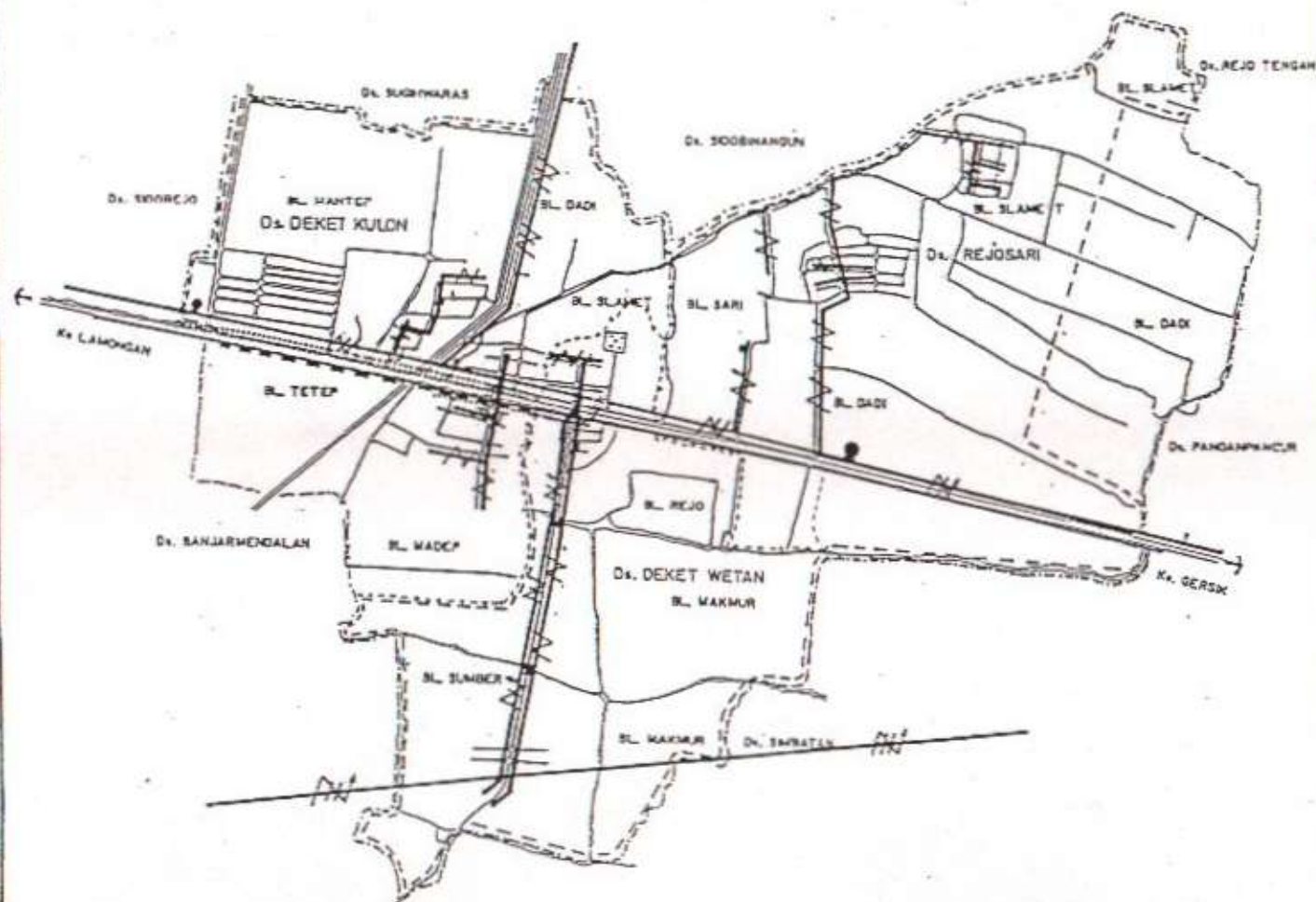
DIGAMBAR :

DIFERENSA :



NO

LEAD	
ME	



0 0.17 0.34 0.51 KM

S K A L A

- Kurangnya prasarana jalan kota sehingga perkembangan kota cenderung linear mengikuti jaringan jalan yang telah ada. Akibat dari hal tersebut maka kawasan di kiri dan kanan jalan menjadi sasaran perkembangan pembangunan fasilitas kota yang dapat menurunkan fungsi jalan di masa mendatang.
- Tingkat pertumbuhan pembangunan cukup tinggi yang memungkinkan terjadi saling kepentingan antara kawasan satu dengan lainnya.
- Tuntutan kebutuhan fasilitas pelayanan kota dan kebutuhan perumahan yang cukup tinggi mengingat kota Deket berlokasi cukup akses dengan kota Lamongan sehingga mungkin terjadi alternatif pilihan lokasi investasi ke kota Deket.
- Kualitas lingkungan permukiman masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan.
- Sangat terbatasnya kemampuan pengelola kota baik di segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pemeliharaan prasarana kota.
- Belum teraturnya tata ruang kota, jaringan jalan, jaringan drainase yang dapat menurunkan kualitas lingkungan kota.

BAB III

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

3.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah regional yang terkait dengan penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Deket adalah kebijakan pembangunan Jawa Timur dan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan.

3.1.1 Kebijakan Regional Jawa Timur

Tujuan pembangunan daerah jangka panjang adalah menunjang tercapainya sasaran pembangunan nasional, yaitu terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Sehubungan dengan itu, maka titik berat dalam pembangunan daerah jangka panjang juga diletakkan pada bidang ekonomi dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta kebutuhan pokok rakyat dengan didukung bidang lain. Pembangunan daerah di luar bidang ekonomi dilaksanakan seiring dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi dan tersedianya sumber-sumber pembangunan yang lebih luas.

Tujuan pembangunan daerah jangka panjang berdasarkan pendekatan tata ruang wilayah (spasial) adalah terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah secara terkendali dan serasi yang diimbangi dengan upaya-upaya penyelamatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga terlaksanalah pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dalam keseimbangan ekosistem secara regional, serta terjalin pula interaksi yang harmonis dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan.

Prioritas pembangunan daerah dalam PELITA V diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi yang dititik beratkan pada sektor pertanian, yaitu melanjutkan usaha-usaha peningkatan produksi pertanian yang diimbangi peningkatan sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan komoditi ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri terutama dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian, baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyerapan tenaga kerja.

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan yang serasi antar daerah dalam PELITA V prioritas penyebaran dan pemerataan pembangunan lebih diutamakan pada daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau dalam PELITA IV, terutama daerah yang relatif terbelakang, daerah dengan kepadatan penduduk ting-

gi, daerah yang mempunyai kondisi fisik alami kritis, minus dan sedang, serta daerah rawan tanpa mengabaikan kelanjutan pembangunan di daerah-daerah yang mempunyai kondisi alami yang baik dan subur.

Program utama yang akan dilaksanakan dalam PELITA V meliputi sembilan aspek pembangunan, yaitu:

- Produksi pertanian dalam arti luas.
- Pekerjaan.
- Pendidikan.
- Prasarana perhubungan dan prasarana produksi.
- Perumahan dan lingkungan permukiman.
- Kesehatan dan kependudukan.
- Penyelamatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
- Kesejahteraan sosial dan kesejahteraan keluarga.
- Pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Dalam hubungan itu, arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam PELITA V tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat terus diperluas jangkauannya, sehingga mampu mencapai sasaran pembangunan, yang ditetapkan melalui delapan jalur pemerataan.

Untuk menjamin agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan serasi, maka perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan nasional, pembangunan regional dan pembangunan daerah. Hal ini berarti bahwa dalam setiap kegiatan pem-

bangunan di daerah, disamping pertimbangan-pertimbangan sektoral harus pula diperhatikan pertimbangan-pertimbangan regional / wilayah.

Pendekatan perwilayahan yang berdasarkan kondisi fisik alami dalam tiga kriteria kritis/minus, sedang dan subur dalam PELITA IV masih terus dilanjutkan, dan diarahkan pada usaha-usaha rehabilitasi dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah kritis dan sedang, untuk daerah subur di jaga kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah semaksimal mungkin.

Dengan melihat kondisi fisik alami dan kondisi sosial ekonomi penduduknya, maka untuk mengusahakan laju pertumbuhan dan pengembangan daerah secara seimbang, prioritas lokasi pembangunan Jawa Timur disusun sebagai berikut:

Prioritas Pertama (Sub Wilayah III)

Lokasi pembangunan Jawa Timur prioritas pertama diarahkan di wilayah Jawa Timur bagian Selatan yang kritis dan tandus meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, Ponorogo bagian Selatan, Nganjuk, Tulungagung, Blitar Selatan dan Malang Selatan.

Prioritas Kedua (Sub Wilayah II)

Lokasi pembangunan Jawa Timur prioritas kedua diarahkan di wilayah Jawa Timur bagian Utara yang kurang subur, yang

terdiri dari DAS Bengawan Solo yang meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan seluruh Pulau Madura dan Situbondo bagian Utara.

Prioritas Ketiga (Sub Wilayah IV)

Lokasi pembangunan Jawa Timur prioritas ketiga diarahkan di wilayah kepulauan yang terdiri dari 63 pulau di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep dan masing-masing sebuah pulau di Kabupaten Gresik, Probolinggo dan Sampang.

Prioritas Keempat (Sub Wilayah I)

Lokasi pembangunan Jawa Timur prioritas keempat diarahkan di wilayah dataran tinggi dan bagian tengah yang subur mulai dari Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi sampai dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Kebijaksanaan pembangunan melalui pendekatan perwilayahan pembangunan selama PELITA IV akan dilanjutkan dan disempurnakan dalam PELITA V yang lebih diefektifkan pelaksanaannya. Adapun 9 (sembilan) wilayah pembangunan yang terdapat di Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- SWP GERBANGKERTOSUSILA dengan pusat pengembangannya di Kotamadya Surabaya, diarahkan pada kegiatan pertanian, industri, perhubungan, pariwisata, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.
- SWP Madura dan kepulauan dengan pusat pengembangan Sumenep, diarahkan pada kegiatan pertanian, industri, perhu-

bungan, pariwisata, perdagangan dan lingkungan hidup.

- SWP Banyuwangi dengan pusat pengembangannya kota Banyuwangi, diarahkan pada kegiatan pertanian, industri, perhubungan, perdagangan dan pariwisata.
- SWP Jember dan sekitarnya dengan pusat pengembangannya kota Jember, diarahkan pada kegiatan pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pariwisata, perdagangan dan pendidikan.
- SWP Probolinggo-Lumajang dengan pusat pengembangannya Kotamadya Probolinggo, diarahkan pada kegiatan pertanian, industri, pariwisata, perhubungan dan perdagangan.
- SWP Malang-Pasuruan dengan pusat pengembangannya Kotamadya Malang, diarahkan pada kegiatan pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pariwisata, perdagangan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.
- SWP Kediri dan sekitarnya dengan pusat pengembangannya Kotamadya Kediri, diarahkan pada kegiatan pertanian, industri, perhubungan, pariwisata, perdagangan, pertambangan dan lingkungan hidup.
- SWP Madiun dan sekitarnya dengan pusat pengembangannya Kotamadya Madiun, diarahkan pada kegiatan pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pariwisata, perdagangan dan lingkungan hidup.
- SWP Tuban-Bojonegoro dengan pusat pengembangannya Tuban, diarahkan pada kegiatan pertanian, industri, perhubungan, pariwisata, perdagangan, pertambangan dan lingkungan

hidup.

Penerapan konsep pusat-pusat pembangunan ini secara efektif akan memperkecil kepincangan-kepincangan pembangunan dan perbedaan kemakmuran antar wilayah, karena kegiatan pembangunan lebih dapat disebarluaskan kesegnap pelosok wilayah.

Selain digariskan mengenai ketentuan tentang penataan satuan wilayah pembangunan (SWP), maka kebijaksanaan tata ruang yang tercermin dalam sistem perwilayahan pembangunan juga menekankan tentang tata ruang kawasan budidaya dan bukan budidaya, penataan sistem pusat-pusat pengembangan, sistem jaringan transportasi dan komunikasi, serta kebijaksanaan pengendalian operasional tata ruang pada kawasan budidaya dan bukan budidaya. Keseluruhan kebijaksanaan tersebut benar-benar disesuaikan dengan potensi dan prioritas wilayah-wilayah tersebut yang tidak lepas dari prinsip tata ruang serta terintegrasi secara utuh dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya, kebijaksanaan pembangunan di wilayah Propinsi Jawa Timur yang diwujudkan dalam sistem perwilayahan dapat dilihat pada Gambar 3.1.

3.1.2 Kebijaksanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten

Mengingat bahwa Pembangunan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Lamongan merupakan bagian integral dari pemba-



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH LINGKAR 2
LAMONGAN

RENCANA URAIAN TAJA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TAJA RUANG KOTA
IDUGIA KECAMATAN DEKET

**PERWILAYAHAN
PEMBANGUNAN JAWA TIMUR**

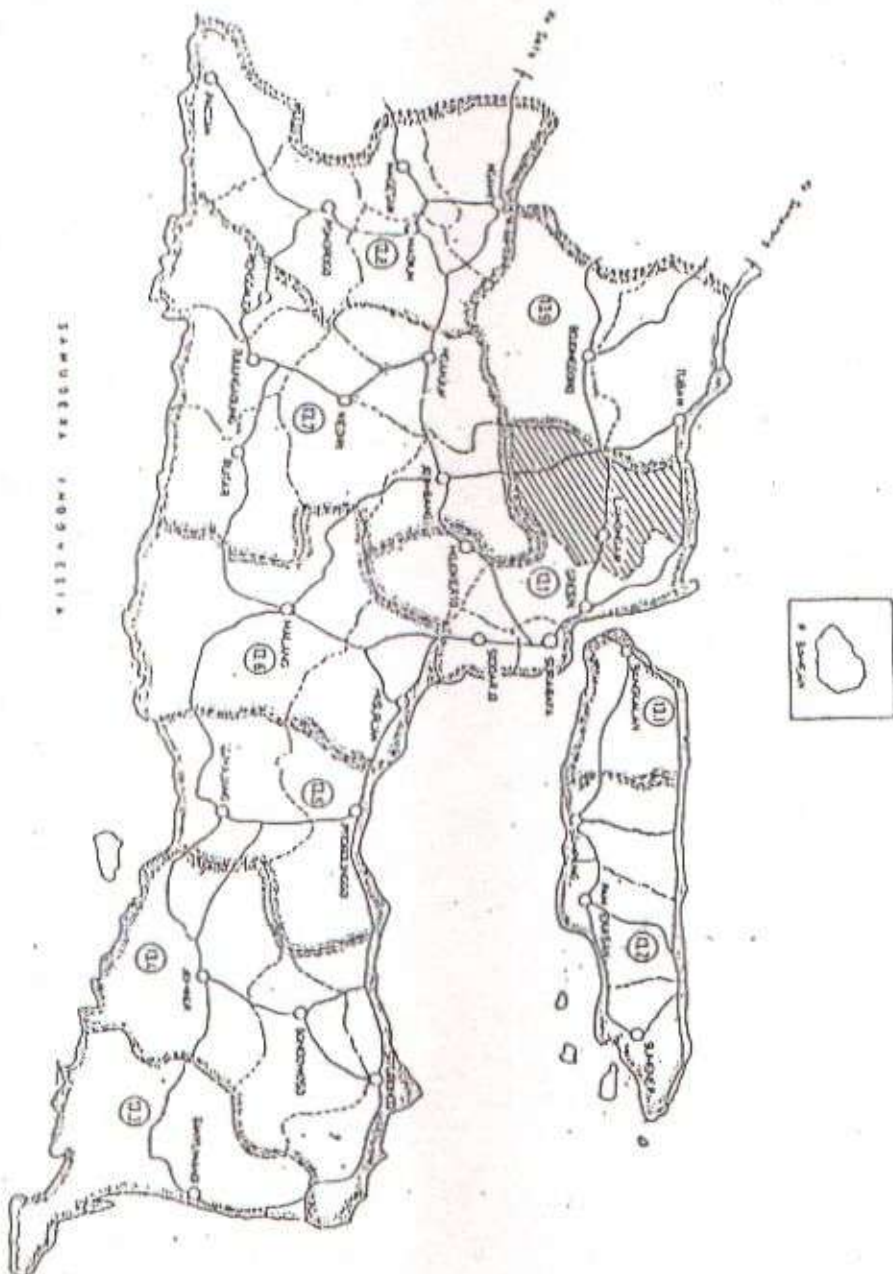
KETERANGAN

- 1.3.1 GERBANG KERTOSUSILO
- 1.3.2 MADURA
- 1.3.3 BANYUWANGI
- 1.3.4 JEMBER
- 1.3.5 PROBOLINGGO
- 1.3.6 MALANG, PASURUAN
- 1.3.7 KEDIRI
- 1.3.8 MADIUN
- 1.3.9 TUBAN, BOJONEGORO



KAB. LAMONGAN
BATAS S.W.P

PROVINSI JAWA TIMUR



JAMURONGA 1403-ESIA

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

KODE / PETUNJUK PETA

SUMBER : BAPPEDA TK. JAWA TIMUR

NO	LEMB	ANL	LEMB
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

ngunan Nasional, maka perlu dipelihara keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan itu, dalam setiap kegiatan pembangunan daerah selain mempertimbangkan kepentingan sektoral, harus pula diperhatikan kondisi, potensi dan prioritas daerah wilayah.

Disamping itu dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, diusahakan makin terpelihara keserasian laju pembangunan antar daerah, sehingga dapat memperkecil perbedaan tingkat kemakmuran antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Untuk itu bagi daerah-daerah yang masih kurang berkembang perlu diberikan prioritas pengembangan dan motivasi pembangunan yang disesuaikan dengankemampuan dan potensi yang terdapat di daerah yang bersangkutan.

Kebijaksanaan pembangunan daerah berdasarkan pendekatan tata ruang/perwilayahan (spasial), yang tercermin dalam sistem perwilayahan pembangunan yang diterapkan selama PELITA IV, perlu dilanjutkan dan disempurnakan serta lebih diefektifkan pelaksanaan dalam PELITA V terutama mengenai penataan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP).

Tujuan yang hendak dicapai dengan kebijaksanaan tata ruang (spasial) melalui penataan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) tersebut adalah :

a. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi didalam suatu SWP dan antar SWP agar perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah yang maju dengan wilayah yang masih terbe-

lakang dapat diperkecil semaksimal mungkin.

- b. Menggunakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi serta fungsi yang terdapat di setiap SWP.
- c. Mengembangkan hubungan ekonomi dimasing-masing SWP dengan memantapkan hubungan pusat wilayah belakangnya dan hubungan ekonomi antara SWP secara saling menguntungkan sehingga terjalin interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik/keamanan, sehingga terwujudlah struktur ekonomi regional yang kuat dan mampu menunjang kesatuan ekonomi nasional yang kokoh.
- d. Mempertajam prioritas pembangunan sehingga memungkinkan terjangkau wilayah-wilayah minus, kawasan kritis dan pantai oleh kegiatan pembangunan, antara lain melalui program-program khusus dengan memperhatikan sepenuhnya upaya penyelamatan sumber alam dan lingkungan hidup.
- e. Memantapkan pengendalian terhadap keseimbangan lingkungan secara regional, yaitu antara perkembangan penduduk serta kegiatannya dengan kemauan daya dukung wilayah dan sumber daya yang ada, sehingga terjamin pengertian pembangunan yang berkelanjutan.
- f. Memantapkan pengendalian tata ruang secara operasional pada kawasan budidaya, kawasan bukan budidaya dan kawasan khusus, berdasarkan kerangka kebijaksanaan tata ruang regional, sehingga keperpaduan tata ruang dalam skala regional maupun lokal dapat terjamin konsistensinya dalam

rangka menciptakan lingkungan hidup yang aman, tertib, sehat dan lestari.

Dalam rangka memenuhi keperluan pembangunan yang beraneka ragam, maka perlu dikembangkan kebijaksanaan tata ruang yang mampu menyelerasikan tata guna tanah, tata guna air dan sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan ekosistem yang dinamis, sehubungan dengan itu maka dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai perwilayahan pembangunan di Lamongan berdasarkan pendekatan tata ruang (spatial) selalu memperhatikan sepenuhnya hal-hal seperti hubungan antara kota (pusat) dan wilayah belakang (hinterland) dan homogenitas. Atas dasar itulah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dibagi menjadi 3 karakteristik wilayah yaitu :

1. Bagian Tengah Selatan terdiri dari daratan rendah yang relatif agak subur, yang membentang mulai dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sugio, Sukodadi, Lamongan, Brondong, Tikung, dan Kembangbatu.
2. Bagian Selatan dan Utara, terdiri dari pegunungan kapur berbatu-batu tanahnya termasuk sedang, mulai dari Kecamatan Mantup, Sambang, Ngimbang, Bluluk, Modo, Brondong dan Paciran.
3. Bagian Tengah Utara, terdiri dari daerah bonorowo yang termasuk daerah rawan banjir, mulai dari Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glegah.

Dalam rangka penerapan kebijaksanaan tata ruang (spatial) guna mensukseskan pemerataan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan maka disuikanlah Satuan-satuan Wilayah Pembangunan (SWP) beserta serangkaian kegiatan utama yang perlu mendapat perhatian kerana dinilai memiliki keunggulan komparatif. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan terdapat 4 SWP, yaitu :

- a. Satuan Wilayah Pembangunan I dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Lamongan yang meliputi Kecamatan Turi, Sukodadi, Kalitengah, Karanggegeng, Tikung, Kembangbahu, Mantup, dan Sugio. Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini antara perdagangan/pemasaran, industri ringan/kerajinan rakyat dan industri menengah, usaha pertanian/perkebunan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan jasa-jasa serta pariwisata.
- b. Satuan Wilayah Pembangunan II dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Babat yang meliputi kecamatan Sekaran, Kedungpring, Modo, Bluluk, Ngimbang, dan Sambang.
- c. Satuan Wilayah Pembangunan III dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Brondong yang meliputi Kecamatan Paciran dan Laren. Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini antara lain intensifikasi produksi perikanan laut, garam rakyat, tambak udang, industri pengalengan ikan, penggalian barang tambang, perkebunan, dan pariwisata.
- d. Satuan Wilayah Pembangunan IV dengan pusat pengembangannya di Kecamatan Deket yang meliputi Kecamatan Glegah dan

Karangbinangun. Kegiatan yang akan dikembangkan di wilayah ini antara lain pertanian/perikanan (tambak sawah dan sawah tambak dan pemanfaatan bonorowo).

Dalam rangka menajamkan prioritas pembangunan, maka regionalisasi wilayah berdasarkan aspek homogenitas atau kesamaan karakteristik daerah dalam bentuk kesamaan relief geologis dan tingkat kesuburan tanah dipertimbangkan dalam PELITA IV akan tetap dilanjut dan disempurnakan, dengan menambahkan aspek kawasan ekologi dan aspek hubungan timbal balik antara pusat wilayah belakang dari masing-masing SMP. Prioritas yang diterapkan dengan pertimbangan ketiga aspek tersebut perlu diwujudkan secara operasional dalam perencanaan pembangunan dan melalui alokasi dana-dana pembangunan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Lamongan atas sub-sub satuan wilayah pembangunan dapat dilihat pada Gambar 3.2.

3.1.3 Kebijakan Sektor

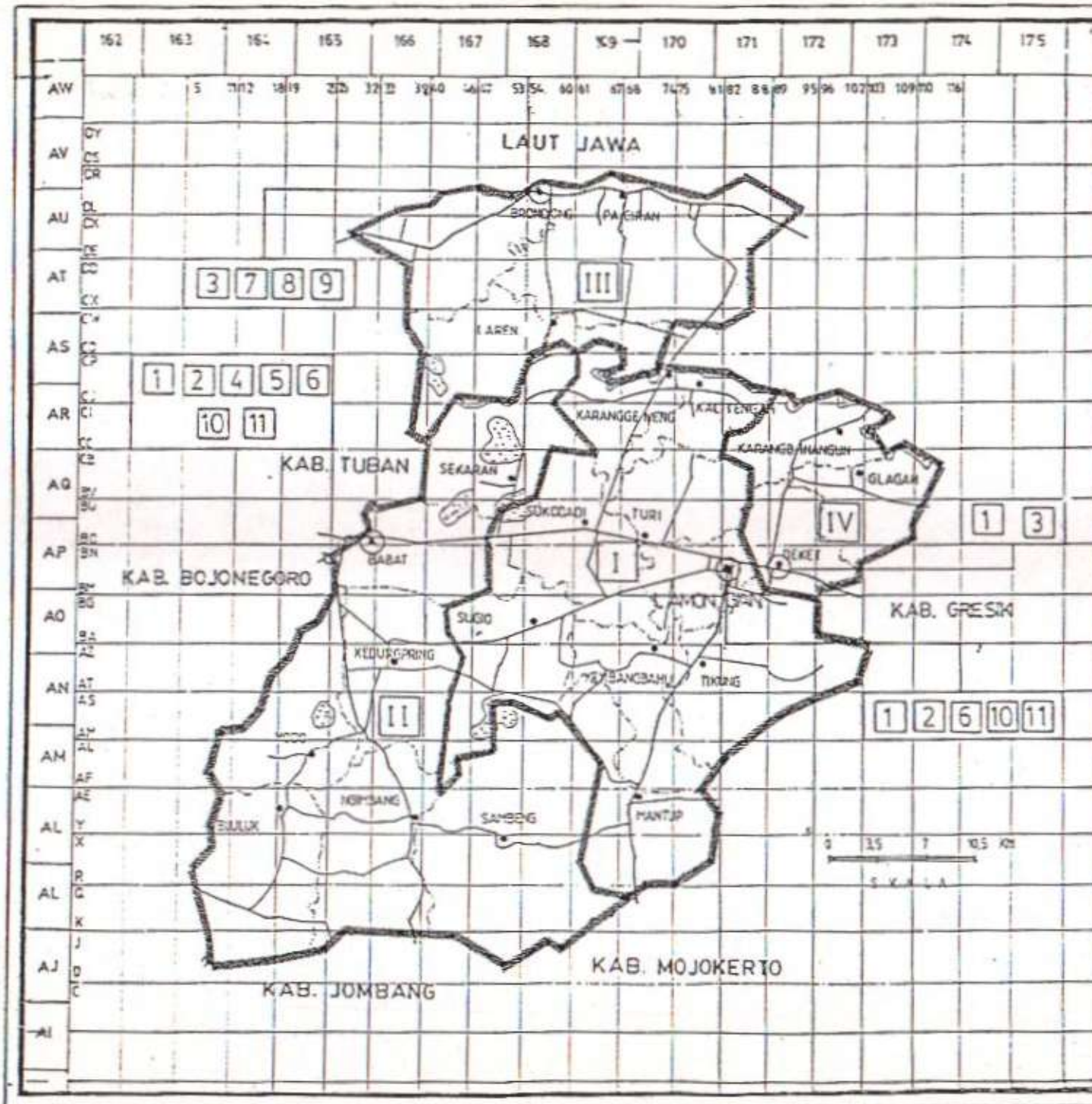
Jumlah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang harus ditampung dan dilayani cukup besar dan cenderung akan terus menerus bertambah. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan yang ketat dan tepat di dalam penggunaan tanah disamping pengelolaan lingkungan hidup yang cermat. Daerah-daerah yang berfungsi penting dalam rangka hidrologis harus dapat diamankan sebaik-baiknya. Kecenderungan untuk mengalihgunakan tanah pertanian untuk bukan pertanian perlu di-

batasi.

Mengingat penggunaan tanah-tanah pertanian yang relatif subur untuk pemukiman dan bangunan-bangunan lain makin meningkat, maka perlu mendapatkan pengawasan dan penataan kembali tentang prosedur ijin bangunan serta tata ruangnya. Pertumbuhan dan perluasan pemukiman serta fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan itu perlu direncanakan dan diawasi sebaik-baiknya.

Untuk dapat meningkatkan produksi padi, maka di daerah aliran Bengawan Solo dan di dekat waduk yang potensial akan terus dilaksanakan pengelolannya. Usaha ini sekaligus berhubungan dengan upaya penyediaan air sedimen, pengelontoran untuk mencegah pengotoran dan pencemaran melalui air, pengawetan air tanah, keserasian lingkungan, dan perbaikan daerah pantai.

Masalah yang berhubungan erat dengan tanah pertanian adalah semakin kecilnya kepemilikan tanah yang dikelola oleh petani. Untuk itu perlu dilakukan usaha yang beranggapan para petani agar bekerjasama, sehingga menghasilkan areal pengelolaan yang berdaya guna dan berhasil guna. Pencetakan sawah baru di daerah bonorowo perlu ditingkatkan, karena Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mempunyai tanah bonorowo yang cukup luas dan potensial. Apabila bonorowo/rawa ini dirubah menjadi kolam/tambak, maka hasilnya akan cukup besar. Mengingat kurang modal maka perlu adanya turun tangan dan pemikiran Pemerintah/pihak atas untuk mengusahakan inves-



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DATU II LAMONGAN

KETERANGAN



DATAS SUB SWP



PUSAT SWP KECAMATAN

KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA :

1. PERTANIAN
2. PERKEBUNAN
3. PERIKANAN
4. PETERNAKAN
5. KEHUTANAN
6. INDUSTRI KECIL/MENENGAH
7. INDUSTRI PENGALANGAN IKAN
8. PENGGALIAN BAHAN TAMBANG
9. PARIWISATA
10. PERDAGANGAN
11. PEMASARAN JASA

1. SUB SWP I BERPUSAT DI LAMONGAN
2. SUB SWP II BERPUSAT DI BABAT
3. SUB SWP III BERPUSAT DI BRONDONG
4. SUB SWP IV BERPUSAT DI DEKET

SUMBER : KANTOR BAPPEDA DATU II
LAMONGAN

KODE / PETUNJUK PETA	GAMBAR : 3.2
	DIGAMBAR : h
	DUPERSA : 4
	NO LEMB : 1
	JML LEMB : 1
	SKALA : 1:150000

tasi modal, baik melalui PMDN maupun PMA.

Demikian pula bantuan management dan daerah pemasaran ikan perlu ada pemikiran lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa hingga saat ini hasil produksi ikan segar dan ikan laut/perairan pantai dari Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan cukup besar (nomor dua setelah Muncar/Banyuwangi) yang dapat dipasarkan ke Gresik, Surabaya, Mojokerto, Jombang, Kediri, Semarang, Cirebon, Bandung dan Jakarta.

Pertanian harus diberikan pula kepada para nelayan dan pengrajin yang jumlahnya cukup besar di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. Untuk meningkatkan pendapatan mereka, diperlukan serangkaian usaha yang meliputi program penyuluhan, pembinaan usaha, pemasaran serta penyediaan fasilitas lain. Penghutanan pantai perlu ditingkatkan untuk menjaga kelestarian sumber/produksi ikan tertentu. Sementara itu penangkapan ikan perlu diperluas sampai ke daerah lepas pantai.

Dalam ikut serta menciptakan kerangka landasan Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri melalui proses perubahan struktural, pembangunan sektor industri dalam Repelita V akan lebih diperhatikan. Pembangunan sektor industri kecil/kerajinan rakyat dan menengah di Kabupaten Lamongan masih dititik beratkan pada penyediaan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja baru.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan sektor industri, maka dalam Pelita V akan dikembangkan terus kegiatan indus-

tri kecil, antara lain melalui pengembangan program lingkungan industri kecil (LIK). Pengembangan industri kecil dan kegiatan informal adalah nyata didalam pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, disamping mendorong berkembangnya industri menengah. Untuk itu perlu ditingkatkan penciptaan iklim yang dapat menarik investasi di sektor industri.

Sebagai pelaksanaan tahap terkahir dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang, maka prioritas pembangunan Daerah dalam Pelita V diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi yang dititik beratkan pada sektor pertanian, yaitu melanjutkan usaha-usaha produksi pertanian yang diimbangi dengan peningkatan sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan komoditi ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian.

Sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi, maka pembangunan di bidang politik, bidang sosial budaya dan lain-lain akan ditingkatkan sepadan dengan pembangunan dan harus saling menunjang.

Dalam rangka menciptakan pertumbuhan yang serasi antar wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dalam Pelita V prioritas penyebaran dan pemerataan pembangunan lebih diutamakan pada wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau dalam Pelita IV, terutama wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, wilayah yang mempunyai kondisi fisik alami yang mi-

nus dan sedang, tanpa mengabaikan kelanjutan pembangunan di wilayah yang mempunyai kondisi fisik alami yang baik dan subur.

Program utama yang dilaksanakan dalam Pelita V meliputi sembilan aspek pembangunan, yaitu :

1. Produksi Pertanian dalam Arti Luas

Sebagai salah satu daerah pemasok stok pangan regional, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan berkewajiban meningkatkan produksi pertanian, baik mengenai jumlah dan mutu produksi maupun mengenai penganekaragaman komoditi. Program peningkatan produksi pertanian dalam arti luas bukan saja untuk turut mempertahankan swasembada beras menuju terciptanya swasembada pangan, tetapi juga untuk turut mensukseskan usaha peningkatan produksi komoditi ekspor non migas.

2. Pekerjaan dan Ketenagakerjaan

Sumberdaya manusia yang begitu besar di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada saat ini belum sepenuhnya merupakan modal dasar pembangunan, tetapi lebih merupakan pengangguran. Oleh karena itu maka masalah pengangguran tersebut akan ditanggulangi secara lebih intensif melalui program perluasan kesempatan berusaha dan program penciptaan ketenagakerjaan yang bersifat menyeluruh dan terpadu.

3. Pendidikan

Program utamanya diarahkan pada peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan menengah, tanpa mengabaikan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Peningkatan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas manusia, sehingga pelaksanaan alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan menjadi semakin efektif.

4. Prasarana Perhubungan dan Prasarana Produksi

Menyadari masih belum memadainya prasarana yang ada maka program peningkatan prasarana fisik akan tetap dilanjutkan bahkan disempurnakan secara mendalam, baik untuk prasarana perhubungan maupun untuk prasarana produksi.

5. Perumahan dan Lingkungan Pemukiman

Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu penanganannya akan lebih diseraskan melalui program penataan ruang wilayah secara menyeluruh dan terpadu.

6. Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan akan terus ditingkatkan sehingga mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, baik dalam hal pelayanan medis maupun mengenai penyuluhan masalah pangan dan gizi.

7. Penyelamatan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup

Dalam rangka penyelamatan sumberdaya alam dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, maka program pengendalian tata lingkungan hidup akan terus ditingkatkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata ruang dan konservasi sumber daya alam.

8. Keadilan Sosial melalui Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan keluarga diarahkan untuk mempertinggi kesadaran dan kemampuan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan serta mempertebal rasa kesetiakawanan sosial.

9. Pemeliharaan Hasil-hasil Pembangunan

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai sampai saat ini adalah aset (kekayaan) Nasional yang harus dipelihara dengan cermat, sehingga seluruh aset tersebut dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk itu perlu segera diintensifkan bentuk-bentuk pengoperasian dan pemeliharaan yang paling tepat bagi semua aset tersebut.

Sektor-sektor pembangunan yang diprioritaskan/ diutamakan dalam Pelita V yang terkait dengan sembilan aspek pembangunan adalah sektor Pertanian dan Pengairan, Industri, Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Perhubungan Pariwisata, Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Kesehatan, Kesejahteraan So-

sial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

3.2 Kebijaksanaan Dasar Rencana

Kebijaksanaan dasar rencana meliputi penentuan fungsi dan peranan kota, kebijaksanaan penentuan strategi dasar pengembangan sektor-sektor kegiatan, kebijaksanaan kependudukan, kebijaksanaan sistem pusat pelayanan, kebijaksanaan fasilitas dan utilitas, kebijaksanaan tata bangunan, kebijaksanaan sistem transportasi, dan penentuan dimensi waktu perencanaan.

3.2.1 Penentuan Fungsi Dan Peranan Kota

Berdasarkan kebijaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten Lamongan, maka kota Deket diarahkan menjadi salah satu sub pusat pengembangan IV dengan wilayah sub ordinasi adalah kecamatan Glagah dan kecamatan Karangbinangun. Kemudian dalam kaitan dengan pelayanan umum, kota Deket sebagai sub pusat pengembangan wilayah dari sub wilayah pembangunan IV juga harus dapat menyediakan sarana dan prasarana perkotaan untuk menunjang fungsi tersebut. Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka fungsi dan peranan kota Deket diarahkan sebagai berikut :

- sebagai pusat pemasaran dan distribusi kegiatan pertanian dengan areal meliputi kecamatan Deket, Glagah, dan Karang-

binangun.

- sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial budaya dengan wilayah pelayanan meliputi kecamatan Deket, Glagah, dan Karangbinangun.
- sebagai pusat pelayanan administrasi dan pemerintahan serta kegiatan perdagangan, jasa, dan pelayanan umum yang meliputi wilayah kecamatan Deket, Glagah, dan Karangbinangun.
- sebagai salah satu lokasi kegiatan primer perkotaan karena berlokasi di wilayah pinggiran kota Lamongan.

3.2.2 Strategi Dasar Pengembangan Sektor Dan Bidang

Sektor dan bidang yang terkait dengan pengembangan kota Deket secara internal dan eksternal adalah sektor industri dan perdagangan.

Dalam sektor industri maka dengan adanya potensi tingkat aksesibilitas yang tinggi, khususnya karena sebagian jalan lingkar kota Lamongan melalui bagian Selatan kota Deket, serta kota Deket terletak di sepanjang jalan arteri primer, maka lahan-lahan tersebut dapat menjadi daya tarik utama bagi investor untuk mendirikan industri di kota Deket.

Dalam sektor perdagangan, perlu dikaji pengembangan kota Deket menjadi pusat pemasaran dan pengumpulan komoditi perdagangan. Penetapan ini dilakukan mengingat lokasi kota Deket yang cukup strategis dengan dikelilingi oleh daerah-

daerah hinterland yang berorientasi menuju jalan arteri primer Lamongan - Gresik. Daerah-daerah hinterland yang potensial dalam menunjang perkembangan sektor perdagangan di kota Deket adalah wilayah kecamatan Glagah dan kecamatan Karangbinangun.

3.2.3 Kehijaksanaan Kependudukan

Jumlah penduduk kota Deket yang meliputi akumulasi dari tiga desa yang membentuk kota Deket meningkat dengan laju sekitar 0,97 % per tahun dimana jumlah penduduk pada tahun 1988 sebanyak 7.493 jiwa dan pada tahun 1991 meningkat menjadi 7.710 jiwa. Perkembangan laju pertumbuhan jumlah penduduk ini diperkirakan akan meningkat dengan adanya peningkatan fungsi dan peranan kota Deket, peningkatan kegiatan industri dan peningkatan kegiatan perdagangan. Sampai akhir Pelita IX, maka diperkirakan jumlah penduduk kota Deket dapat membengkak menjadi sekitar 9.000 jiwa dan tampaknya kondisi kota Deket masih memungkinkan untuk menampung jumlah penduduk sebesar demikian.

Penyebaran penduduk di tiap desa pada kota Deket tidak merata. Kecenderungan penyebaran penduduk di suatu lokasi dipengaruhi oleh adanya daya tarik di lokasi tersebut. Salah satu daya tarik tersebut adalah kelengkapan fasilitas dan jarak terhadap tempat kerja, sehingga pemenuhan kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah.

Penyebaran penduduk yang paling banyak di Kota Deket terdapat di desa Deket Kulon yaitu 3.165 jiwa. Hal ini disebabkan karena desa Deket Kulon merupakan desa yang sudah berkembang dan terletak paling dekat dengan kota Lamongan di samping desa Deketwetan yang berpenduduk 2.331 jiwa. Kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah desa Deketwetan yaitu 14 jiwa per ha, selanjutnya adalah desa Deket Kulon yaitu 13 jiwa per ha, sementara kepadatan penduduk di desa Rejosari adalah 8 jiwa per ha. Dalam perkembangan selanjutnya, maka kepadatan maksimum yang dapat ditolerir untuk kota Deket hendaknya tidak mencapai 200 jiwa per ha. Dengan angka ini juga diharapkan agar tidak terjadi permukiman-permukiman kumuh dengan kualitas lingkungan rendah.

3.2.4 Kebijakan Sistem Pusat Pelayanan

Pembagian wilayah kota atas wilayah-wilayah yang lebih kecil bertujuan untuk meratakan perkembangan ke seluruh wilayah kota dan mendekonsentrasikan aktivitas-aktivitas perkotaan ke seluruh wilayah kota agar beban kawasan pusat kota tidak menjadi overload. Pembagian wilayah kota atas bagian-bagian wilayah kota dilakukan dengan dasar arahan pengembangan kota serta dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi eksisting kawasan atau bagian wilayah kota yang bersangkutan. Apabila secara teoritis sesuai untuk dikembangkan sebagai bagian wilayah kota sedangkan kenyataannya tidak ada

tidak ada kemampuan atau potensi awal yang bisa diharapkan memacu perkembangan kawasan maka tentunya akan lebih baik kalau kawasan tersebut tidak dijadikan satu bagian wilayah tersendiri.

Pembagian wilayah kota atas bagian-bagian wilayah kota juga hendaknya memperhatikan kawasan-kawasan fungsional yang ada untuk menghindari adanya overlapping dalam sistem pelayanan dalam tiap-tiap bagian wilayah kota. Untuk itu hal yang perlu dijadikan bahan pertimbangan adalah bahwa umumnya pusat pelayanan yang ada dan memiliki potensi untuk berkembang terletak di sepanjang jalan-jalan utama atau paling tidak setingkat jalan kolektor. Dengan demikian, pembagian sistem perwilayahan tersebut hendaknya tidak terlalu berpaku pada kenampakan-kenampakan alam yang ada seperti jalan misalnya. Berdasarkan pengalaman di kota-kota yang telah berkembang, justru kawasan-kawasan di sepanjang jalan utama yang perlu dikembangkan sebagai pusat bagian wilayah kota, bukannya digunakan sebagai batas bagian wilayah kota. Untuk mendistribusikan aktivitas-aktivitas perkotaan secara fungsional, maka perlu diadakan separasi antara kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi dengan kawasan yang memiliki intensitas kegiatan rendah. Jika dipandang perlu dapat pula ditetapkan kawasan dengan intensitas kegiatan sedang. Dengan demikian pola yang sesuai untuk dikembangkan dalam pembagian wilayah kota atas bagian-bagian wilayah kota adalah sebagai berikut :

- kawasan pusat kota
- kawasan transisi (jika dipandang perlu)
- kawasan pinggiran

3.2.5 Kebijakan Fasilitas Dan Utilitas

Fasilitas-fasilitas umum yang diperlukan untuk kota Deket adalah :

- fasilitas perumahan
- fasilitas pendidikan
- fasilitas perdagangan
- fasilitas kesehatan
- fasilitas peribadatan
- fasilitas kebudayaan dan rekreasi
- fasilitas ruang terbuka hijau
- fasilitas pelayanan umum

Sementara itu utilitas yang diperlukan untuk pengembangan kota Deket adalah :

- listrik
- air minum
- telepon
- penanganan sampah

3.2.6 Kebijakan Tata Bangunan

Kebijakan penataan bangunan secara umum mengatur hal-hal yang terkait dengan intensitas penggunaan lahan yang

terdiri atas komponen-komponen :

- koefisien dasar bangunan
- koefisien lantai bangunan
- ketinggian bangunan
- luas persil
- garis sempadan bangunan

Penataan koefisien dasar bangunan untuk suatu pada dasarnya mengarahkan bahwa kawasan pusat kota yang umumnya terdiri atas bangunan-bangunan non permukiman seharusnya memiliki nilai koefisien dasar bangunan yang lebih tinggi daripada nilai koefisien dasar bangunan pada kawasan permukiman atau pada kawasan pinggiran kota. Arahan ini sejalan dengan pengaturan koefisien lantai bangunan dan pengaturan ketinggian bangunan dimana bangunan-bangunan pada kawasan pusat kota seharusnya memiliki nilai koefisien lantai bangunan dan ketinggian bangunan yang lebih besar daripada kawasan permukiman dan kawasan pinggiran kota.

Pengaturan luas persil dan garis sempadan bangunan hendaknya juga ditetapkan secara berjenjang dimana pada umumnya bangunan-bangunan yang terletak pada jalan utama hendaknya memiliki luas persil dan lebar garis sempadan bangunan yang lebih besar daripada bangunan-bangunan yang tidak terletak pada jalan utama, tanpa memperhatikan jenis penggunaan bangunan. Untuk bangunan-bangunan non perumahan, khususnya pada bangunan-bangunan komersial dan yang bersifat pelayanan umum, maka hendaknya luas persil dan lebar garis

sempadan bangunannya lebih besar daripada bangunan-bangunan permukiman agar segala kegiatan dapat ditempatkan pada tiap persil tanpa mengganggu area jalan.

3.2.7 Kebijakan Sistem Transportasi

Pengembangan kota Deket pada saat ini lebih banyak ditunjang oleh keberadaan jalan arteri primer Lamongan - Gresik serta jalan desa Deket Waran yang merupakan calon jalan lingkar kota Lamongan. Batas wilayah kota Deket juga mendukung asumsi di atas dimana konsekuensinya kota Deket memiliki bentuk yang cenderung mengikuti pola linear sepanjang jalan arteri primer. Sementara itu perkembangan daerah terbangun di wilayah kota Deket menunjukkan pola yang linear dimana kawasan sepanjang jalan arteri primer merupakan kawasan terbangun paling intensif sedangkan pola pengembangan an pada kawasan-kawasan lainnya juga cenderung mengikuti jalan-jalan utama dan cabang-cabang jalan utama yang ada.

Hubungan antar kawasan di dalam kota Deket pada saat ini dilakukan melalui jalan-jalan desa dengan kualitas permukaan yang semuanya jalan tanah dan jalan batu. Sementara itu hubungan antara pusat kota Deket dengan bagian Timur Laut khususnya dengan bagian dari desa Rejosari saat ini sangat terbatas karena kurangnya prasarana jalan yang menghubungkannya. Oleh karena itu pada masa mendatang dipandang perlu untuk membuka akses pusat kota Deket dengan

kawasan terpencil ini dengan meningkatkan jalan yang sudah ada.

Berdasarkan pertimbangan keberadaan pola penyebaran daerah terbangun yang ada pada saat ini serta kemungkinan pengembangannya di masa mendatang, maka sistem transportasi yang dikembangkan untuk kota Deket adalah sedapat mungkin mempertahankan pola yang ada, yaitu :

- tetap mempertahankan jalan arteri primer sebagai jalan utama kota Deket dan jalan lingkar kota Lamongan untuk lalu lintas regional yang melalui kota Deket.
- akses keluar dan akses masuk kota Deket tetap dilakukan melalui ketiga pintu gerbang yang ada, yaitu jalan dari wilayah kota Lamongan (Barat), jalan dari wilayah kota Gresik (Timur), dan jalan dari wilayah kecamatan Karangbinangun (Utara).
- sampai akhir tahun perencanaan (2013/2014) belum dirasakan perlunya jalan konsentris yang melingkar kota karena perkembangan daerah terbangun tetap diorientasikan menuju kawasan di sepanjang jalan arteri primer dan jalan lokal primer.
- jalan-jalan lain yang dikembangkan sebagai penambah aksesibilitas adalah jalan-jalan kolektor yang bermuara menuju ke jalan arteri primer.
- lalu lintas angkutan umum antar kota, angkutan umum antar kecamatan, dan angkutan umum pedesaan tetap dipertahankan untuk melalui jalur utama kota Deket, yaitu melalui

jalan arteri primer.

- keberadaan sub terminal setidaknya terkait dengan eksistensi pusat kota Deket, jalur angkutan umum regional, serta rencana peletakan sub terminal menurut Rencana Induk Kota Lamongan.

3.2.8 Penentuan Dimensi Waktu Perencanaan

Dimensi waktu perencanaan dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Deket bermula dari akhir Pelita V (1992/1993) dan berakhir pada Pelita IX (2013/2014). Pelaksanaan rencana tersebut diorganisasikan atas beberapa tahapan sebagai berikut :

- tahap persiapan (1992/1993 - 1993/1994)
- tahap I (1994/1995 - 1998/1999)
- tahap II (1999/2000 - 2003/2004)
- tahap III (2004/2005 - 2008/2009)
- tahap IV (2009/2010 - 2013/2014)

3.3 Konsepsi Rencana

Pada umumnya, kota atau pusat pelayanan tumbuh karena keuntungan-keuntungan lokasional, misalnya lokasi yang benar-benar sentral, mudah dicapai dari segala arah, terse-

dia ruang yang memadai, serta dari segi fisik memungkinkan untuk dibangun atau ditempati. Pemunculan atau pusat pelayanan tersebut akan selalu terkait secara reversible dengan penduduk yang dilayani. Artinya, apabila dirasa tidak efisien, maka salah satu dari komponen keterkaitan tersebut akan mengalami proses degradasi. Apabila hal ini terjadi maka proses perkembangan pusat pelayanan akan terganggu. Namun apabila berkembang, maka prosesnya dapat menjadi multiplikatif. Selanjutnya, terjadi proses ekstensifikasi dan intensifikasi. Intensitas kegiatan mulai tampak berbeda. Pusat pelayanan akan menjadi lokasi dengan intensitas kegiatan paling tinggi. Selanjutnya intensitas kegiatan akan menurun secara gradual kearah konsentris.

Pusat pelayanan atau kota pada akhirnya biasanya juga dapat berkembang karena dirasa perlu membuat suatu rest area pada suatu koridor yang panjang, misalnya pada jalan yang menghubungkan dua lokasi potensial atau dua kota pada jarak yang cukup jauh. Dalam kasus yang terakhir ini, tetap dipilih lokasi yang benar-benar memadai, baik dari segi fisik lahan, aksesibilitas, maupun keuntungan lokasional. Semakin berkembang arus lalu lintas barang dan orang yang melalui jalan tersebut, semakin berkembang pula lokasi-lokasi potensial yang terdapat di sepanjang jalan tersebut.

Uraian di atas menggambarkan proses terjadinya kota-kota yang dimulai dengan kota-kota kecil berciri rural. Sebenarnya proses terbentuknya kota sekaligus lokasinya pada

dasarnya stereotipe, baik untuk ibukota kabupaten, kotamadya, maupun kota-kota kecamatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa lokasi di sepanjang jalan utama merupakan lokasi paling favorit untuk tumbuh dan berkembangnya kota. Untuk kota kabupaten atau kotamadya, lokasi kota pada jalan utama umumnya banyak menimbulkan masalah daripada keuntungan lokasional yang ditimbulkan. Hal ini disebabkan karena terjadinya percampuran kegiatan antara kegiatan regional dan kegiatan lokal kota dimana pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan lalu lintas yang cukup merepotkan. Permasalahan ini umumnya dipecahkan dengan membuat jalan elak atau yang lebih dikenal dengan istilah jalan lingkar yang ditujukan untuk menyalurkan arus lalu lintas menerus. Pada gilirannya juga dibuat jalan lingkar yang berlapis untuk kota-kota yang mengalami perkembangan sangat cepat, dengan klasifikasi yang umum, jalan lingkar dalam, jalan lingkar tengah, dan jalan lingkar luar.

Untuk kota-kota kecamatan yang umumnya berkembang secara lambat, kondisi pada kota kabupaten atau kotamadya tersebut belum akan terjadi, paling tidak untuk short time period. Dengan perkembangan penduduk yang relatif lambat, malah kadang-kadang minus, jumlah penduduk dibawah 100.000, maka proses timbulnya permasalahan akan terjadi dengan sangat lambat. Dengan demikian maka kebutuhan akan jalan elak atau sejenisnya dirasakan masih belum terlalu mendesak. Permasalahan-permasalahan yang timbul akibat percampuran

kegiatan regional dan kegiatan lokal masih dapat diatasi dengan pengaturan-pengaturan peruntukan lahan atau pengaturan sirkulasi lalu lintas. Ini disebabkan karena permasalahan timbul tidak secara frekuentif melainkan secara temporer. Meskipun demikian, tidak ada salahnya apabila dikembangkan jalan-jalan berpola konsentris yang dapat digunakan sebagai jalan elak apabila diperlukan. Namun secara fungsional jalan konsentris ini tidak dikembangkan secara khusus sebagai jalan elak. Jalan berpola konsentris ini dapat dikembangkan juga sebagai penuntun dan pemacu perkembangan kota ke arah yang diinginkan karena perkembangan kawasan terbangun pada kota-kota umumnya mengikuti koridor-koridor yang ada.

Secara struktural, pola peruntukan lahan pada suatu kota atau kawasan fungsional dapat diklasifikasikan atas tiga jenis, masing-masing :

- concentric zone, yaitu suatu pola peruntukan lahan dimana pola pelayanannya berpusat pada suatu lokasi sentral yang biasanya merupakan pusat kota. Kegiatan-kegiatan lainnya memanfaatkan lahan secara konsentris dengan mengelilingi lokasi pusat kota secara berlapis. Pola ini sangat stereotipe untuk kota-kota di Indonesia dan sebagian besar kota memiliki ciri zoning seperti demikian, terutama kota-kota kecamatan. Pusat pelayanan biasanya terjadi pada lokasi sentral dengan aktivitas komersial dan pelayanan umum yang mendominasi seluruh aktivitas di kota yang bersangkutan. Kawasan di bagian luarnya biasanya diisi dengan aktivitas

campuran antara aktivitas komersial dengan aktivitas permukiman dimana kawasan transisi ini memiliki intensitas penggunaan lahan yang lebih rendah. Makin ke arah luar, intensitas penggunaan lahan akan semakin rendah. Keuntungan dari pola ini adalah efisiennya jangkauan pelayanan karena masing-masing aktivitas berkembang secara konsentris, sedangkan kelemahannya adalah mudahnya timbul kerawanan-kerawanan spasial pada kawasan pusat kota serta sulitnya mengembangkan keseluruhan lahan kota apabila masing-masing aktivitas berkembang secara konsentris ke arah luar.

- sectoral concept, yaitu suatu pola peruntukan lahan dimana aktivitas-aktivitas perkotaan yang ada menempati lahan secara sektoral atau seperti "potongan-potongan kue tart". Lebih tepat apabila dikatakan bahwa terjadi separasi aktivitas perkotaan secara radial. Pola peruntukan lahan ini ditunjang oleh adanya jalan-jalan radial yang berfungsi menghubungkan antara tiap aktivitas sekaligus menjadi deloneator antara tiap kegiatan. Pola ini jarang terjadi pada kota-kota di Indonesia karena adanya ketidakjelasan pada sistem pelayanan. Perkembangan lahan perkotaan yang mengikuti pola ini umumnya bukan merupakan proses alamiah, namun lebih banyak diatur oleh rancangan-rancangan artifisial para perencana kota. Oleh karenanya pola ini umumnya terjadi pada kota-kota baru yang menuntut idealisme para perencana kotanya. Keuntungan dari aplikasi konsep ini

adalah dapat diredamnya gejala timbulnya permasalahan kota karena hampir tidak terdapat pemusatan aktivitas pada satu lokasi. Kerugian aplikasi pola ini adalah tidak adanya efisiensi pola pelayanan karena masing-masing aktivitas kelihatan berdiri sendiri-sendiri. Nampaknya pola ini kurang sesuai apabila diaplikasikan untuk kota-kota di Indonesia, terutama pada kota-kota kecamatan.

- multiple nuclei concept, yaitu suatu pola peruntukan lahan yang terdiri atas pusat-pusat pelayanan yang jumlahnya lebih dari satu. Dengan demikian tiap pusat pelayanan memiliki jangkauan pelayanannya sendiri. Namun demikian, pusat-pusat pelayanan tersebut tidaklah memiliki hirarki yang sama. Pusat pelayanan yang termasuk kategori pusat kota biasanya memiliki hirarki yang lebih tinggi sedangkan pusat-pusat pelayanan lainnya memiliki hirarki lebih rendah. Pola peruntukan lahan yang demikian tampaknya berupaya menyempurnakan kedua konsep di atas. Hampir tidak terdapat kelemahan dalam konsep ini, apalagi pada kondisi sekarang pola ini dipakai sebagai acuan dalam pengembangan kota. Pusat-pusat pelayanan yang lebih rendah ditempatkan pada lokasi-lokasi pengembangan kota yang ditujukan untuk memacu perkembangan kota ke arah yang dikehendaki. Pola ini tampaknya sangat sesuai untuk pengembangan kota-kota di Indonesia.

Hal lain yang perlu dikemukakan sehubungan dengan pengembangan kota adalah bentuk pusat pelayanan atau pola

pengembangan kawasan-kawasan fungsional. Kondisi eksisting yang umum terjadi pada kota-kota di Indonesia adalah pengembangan yang bersifat linear. Pola pengembangan ini sebenarnya sudah tumbuh secara historis di Indonesia dan dipandang cocok untuk kota-kota di Indonesia. Apabila dikeji jangkauan pelayanannya, maka tampak bahwa terasa tidak ada distribusi yang merata dari pusat-pusat pelayanan yang ada terhadap penduduk yang dilayani. Namun kenyataannya pola linear ini yang justru menjadi favorit. Seberapa kota pernah mencoba menerapkan konsep tandingannya, yaitu konsep pelayanan yang konsentris namun ternyata malah tidak berhasil dan pada akhirnya kembali pada konsep pola pelayanan yang linear. Dengan demikian, maka konsep linear merupakan konsep yang sesuai dan selanjutnya digunakan dalam penetapan konsep sistem pelayanan untuk kota yang direncanakan.

Pendekatan lain yang kadang digunakan dalam perencanaan tata ruang ada 4 jenis, masing-masing :

- fixed zoning, yaitu suatu konsep zoning yang menetapkan peruntukan lahan secara tegas dengan batas-batas peruntukan yang tegas pula. Apabila diterapkan secara benar maka konsep ini mempunyai dampak yang baik, namun pada kenyataannya sangat sulit untuk menerapkannya, terutama pada kota-kota yang sudah berkembang karena adanya conflict of interest dari pemilik-pemilik lahan.
- mixed used zoning, yaitu suatu konsep zoning yang memungkinkan kombinasi dalam penggunaan lahan secara intensif,

baik susunan vertikal maupun susunan horizontal serta tidak mengabaikan faktor kesehatan, keamanan, mobilitas, dan lain-lain. Konsep ini terbentuk karena pada dasarnya tidak mudah untuk menetapkan suatu zoning yang benar-benar fixed dengan berbagai macam alasan, terutama untuk kota-kota yang sudah completely built up. Dengan mixed used diharapkan akan terjadi keluwesan dalam penataan kota tanpa mengorbankan kepentingan guna lahan-guna lahan lainnya. Tujuan zoning ini terutama untuk menciptakan kesatuan ruang yang kompak dengan kawasan utama yang diidentifikasi. Dengan demikian kawasan ini berada pula dalam kondisi yang cukup fleksibel dalam penggunaan persil lainnya.

- cluster zoning, yaitu suatu konsep zoning yang merupakan pengelompokan aktivitas dengan komponen penggunaan lahan yang berkaitan erat, terutama untuk lingkungan yang tidak memungkinkan banyak pilihan penggunaan lahan. Tujuan utamanya adalah untuk mengefisienkan penggunaan prasarana yang tersedia.
- floating zone, yaitu suatu konsep zoning dimana kegiatan yang diarahkan belum dapat ditentukan pada saat perencanaan sehingga perkembangannya akan mengikuti permintaan pasar. Konsep ini diperuntukkan bagi kawasan perdagangan dan perkantoran. Sebagai akibatnya pemerintah harus menetapkan persyaratan-persyaratan dan peraturan untuk menghindari kemungkinan perkembangan yang tidak menguntungkan.

- interim zoning, yaitu suatu konsep zoning yang memungkinkan peruntukan lahan bagi kawasan konservasi atau kawasan lain yang akan ditentukan kemudian.

Untuk kota-kota di Indonesia, konsep-konsep peruntukan lahan yang dapat diterapkan adalah konsep mixed used dan konsep floating zone karena berbagai kondisi yang menjadi kendalanya, seperti kondisi kepemilikan lahan, built up area, permintaan pasar yang lebih dominan daripada peraturan yang mengaturnya, dan berbagai kondisi keterbatasan lainnya.

Secara umum perencanaan kota dapat dikategorikan atas dua hal menurut orientasinya, yaitu trend oriented planning dan target oriented planning. Untuk kota-kota yang sudah berkembang, konsep trend oriented planning lebih banyak digunakan daripada konsep target oriented planning. Untuk kota baru atau kawasan-kawasan kota yang belum terbangun, konsep target oriented planning akan lebih sering diaplikasikan. Pada kenyataannya konsep target oriented planning lebih sulit untuk diterapkan karena berbagai kendala yang membatasinya, antara lain masalah pendanaan, kondisi kepemilikan lahan, dan lain sebagainya. Sebaliknya konsep trend oriented planning lebih cocok untuk digunakan dalam perencanaan kota di Indonesia karena sebagian besar kota-kota di Indonesia sudah terbangun dan tidak terlalu padat modal dalam melaksanakannya. Pengalaman kota-kota besar di Indonesia dimana ternyata para pemilik modal juga ikut menentukan tata ruang kota dengan ide-idenya yang kontroversial membuk-

tikan bahwa konsep trend lebih sesuai untuk dipakai sebagai salah satu acuan dalam penataan kota.

3.3.1 Sistem Pusat Pelayanan

Untuk kota Deket maka disini disajikan tiga alternatif sistem pusat pelayanan yang disusun berdasarkan potensi dan kendala yang terdapat di kota Deket.

Pada alternatif pertama maka pusat kota Deket yang ada sekarang tetap dipertahankan sebagai pusat kota. Untuk mengembangkan kota Deket lebih lanjut maka diperlukan pendistribusian pusat-pusat pelayanan baru agar tingkat pelayanan kota menjadi lebih merata. Untuk melayani kawasan di bagian Barat maka diusulkan adanya pusat pelayanan sekunder di sepanjang jalan utama komplek permukiman Wisma Deket Permai dan untuk melayani kawasan di bagian Selatan diusulkan adanya pusat pelayanan sekunder di sepanjang jalan desa Deket Wetan. Usulan sistem pusat pelayanan alternatif pertama ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Pada alternatif kedua, pusat kota Deket yang ada sekarang masih tetap dipertahankan sebagai pusat kota sementara itu untuk mengembangkan sistem pelayanan dan mendistribusikan pusat-pusat pelayanan baru diusulkan penempatan beberapa lokasi pusat pelayanan sekunder. Pusat pelayanan sekunder tersebut diusulkan di sepanjang jalan arteri primer di sekitar perumahan Wisma Deket Permai untuk melayani kawasan

di bagian Barat dan di sepanjang jalan arteri primer di desa Rejosari untuk melayani kawasan di bagian Timur. Usulan sistem pusat pelayanan alternatif kedua ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Pada alternatif ketiga, pusat kota Deket yang ada sekarang masih tetap dipertahankan sebagai pusat kota. Pusat-pusat pelayanan baru yang diperlukan untuk lebih pemeratakan pelayanan kota dibentuk pada lokasi-lokasi di sepanjang jalan arteri primer, yaitu di sepanjang jalan arteri primer di sekitar perumahan Wisma Deket Permai untuk melayani kawasan di bagian Barat, di sepanjang jalan desa Deket Wetan untuk melayani kawasan di bagian Selatan, dan di sepanjang jalan arteri primer desa Rejosari untuk melayani kawasan di bagian Timur. Usulan sistem pusat pelayanan alternatif ketiga ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.5.

3.3.2 Sistem Struktur Kegiatan

Sistem struktur kegiatan di kota Deket diusulkan sesuai dengan tiga alternatif sistem pusat pelayanan dimana struktur kegiatannya dibagi atas struktur kegiatan dengan fungsi primer dan struktur kegiatan dengan fungsi sekunder.

Pada alternatif pertama, kegiatan-kegiatan dengan fungsi primer diletakkan pada lokasi-lokasi yang sesuai dimana kegiatan grosir dan sub terminal tetap berada di

kawasan pusat kota sementara kegiatan industri dan pergudangan diarahkan di bagian Timur kota. Kegiatan dengan fungsi sekunder seperti pemerintahan dan perkantoran diletakkan di sepanjang jalan arteri primer sedangkan kegiatan perdagangan dan pelayanan umum yang merupakan kegiatan yang harus ada pada tiap pusat bagian wilayah kota diletakkan pada tiap pusat bagian wilayah kota, yaitu di sekitar kawasan perumahan Wisma Deket Permai dan di sepanjang jalan desa Deket Wetan menurut sistem pusat pelayanan pada alternatif pertama. Usulan sistem struktur kegiatan alternatif pertama ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.6.

Pada alternatif kedua, kegiatan-kegiatan dengan fungsi primer diletakkan pada lokasi-lokasi yang sesuai dimana kegiatan grosir dan sub terminal tetap berada di kawasan pusat kota sementara kegiatan industri dan pergudangan diarahkan di bagian Timur kota. Kegiatan dengan fungsi sekunder seperti pemerintahan dan perkantoran diletakkan di sepanjang jalan arteri primer sedangkan kegiatan perdagangan dan pelayanan umum yang merupakan kegiatan yang harus ada pada tiap pusat bagian wilayah kota diletakkan pada tiap pusat bagian wilayah kota yaitu di sepanjang jalan arteri primer dekat perumahan Wisma Deket Permai dan di sepanjang jalan arteri primer desa Rejosari menurut sistem pusat pelayanan pada alternatif kedua. Usulan sistem struktur kegiatan alternatif kedua ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.7.



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
DAERAH TINGKAT II

RENCANA URAH TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IGUKOTA KECAMAHAN DEKET

KONSEP SISTEM
PUSAT PELAYANAN
ALTERNATIF I

KETERANGAN

-  BATAS WILAYAH
PELAYANAN
-  PUSAT PELAYANAN
-  ORIENTASI MENUJU
PUSAT BKK
-  ORIENTASI MENUJU
PUSAT KOTA

SUMBER : Hasil Rencana

KODE / PETUNJUK PETA

DAFTAR : 13.3

DISUSUN : 14

CIRI-KIRI : 14



NO
JML
LEMB
LEMB

Pada alternatif ketiga, kegiatan-kegiatan dengan fungsi primer diletakkan pada lokasi-lokasi yang sesuai dimana kegiatan grosir dan sub terminal tetap berada di kawasan pusat kota sementara kegiatan industri dan pergudangan diarahkan di bagian Timur kota. Kegiatan dengan fungsi sekunder seperti pemerintahan dan perkantoran diletakkan di sepanjang jalan arteri primer sedangkan kegiatan perdagangan dan pelayanan umum yang merupakan kegiatan yang harus ada pada tiap pusat bagian wilayah kota diletakkan pada tiap pusat bagian wilayah kota yaitu di sepanjang jalan arteri primer dekat perumahan Wisma Deket Pernai, di sepanjang jalan desa Deket Wetan, dan di sepanjang jalan arteri primer desa Rejosari menurut sistem pusat pelayanan pada alternatif ketiga. Usulan sistem struktur kegiatan alternatif ketiga ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.8.

3.3.3 Sistem Jaringan Jalan

Usulan sistem jaringan jalan pada dasarnya mengatur fungsi-fungsi dari jaringan jalan utama di kota Deket dan seharusnya terdapat pemisahan antara jaringan jalan dengan fungsi primer dan jaringan jalan dengan fungsi sekunder.

Pada alternatif pertama, maka jalan regional Lamongan - Gresik tetap dipertahankan sebagai jalan arteri primer namun dalam sistem internal kota Deket jalan ini juga difungsikan

sebagai jalan arteri sekunder. Jalan dari kecamatan Deket menuju kecamatan Karangbinangun dikembangkan sebagai jalan lokal primer dan dalam sistem internal kota Deket juga difungsikan sebagai jalan kolektor sekunder. Dengan demikian maka jaringan jalan lain di kota Deket selanjutnya diorganisasikan atas jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder. Usulan sistem jaringan jalan alternatif pertama ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Pada alternatif kedua, maka jalan regional Lamongan - Gresik tetap dipertahankan sebagai jalan arteri primer dan jalan kecamatan Deket - kecamatan Karangbinangun dikembangkan sebagai jalan lokal primer. Dengan demikian maka jaringan jalan lain di kota Deket selanjutnya diorganisasikan atas jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. Usulan sistem jaringan jalan alternatif pertama ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Pada alternatif ketiga, maka jalan regional Lamongan - Gresik tetap dipertahankan sebagai jalan arteri primer namun hanya pada section-section tertentu saja. Jalan utama mulai dari batas Timur sampai ke jembatan di desa Deket Kulon dikembangkan sebagai jalan arteri sekunder. Demikian juga dengan jalan lokal primer Deket - Karangbinangun dimana hanya pada segmen-segmen tertentu saja yang dikembangkan sebagai jalan lokal primer. Dengan demikian maka jaringan jalan lain di kota Deket selanjutnya diorganisasikan atas jalan jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder.

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DEKAT KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

SAH KEDALAMAN
EIAL TALA RUANG MOTI

KECAMAHATAN DEKET

KECAMAHATAN DEKET

KONSEP SISTEM
STRUKTUR KEGLATAN
ALTERNATIF I

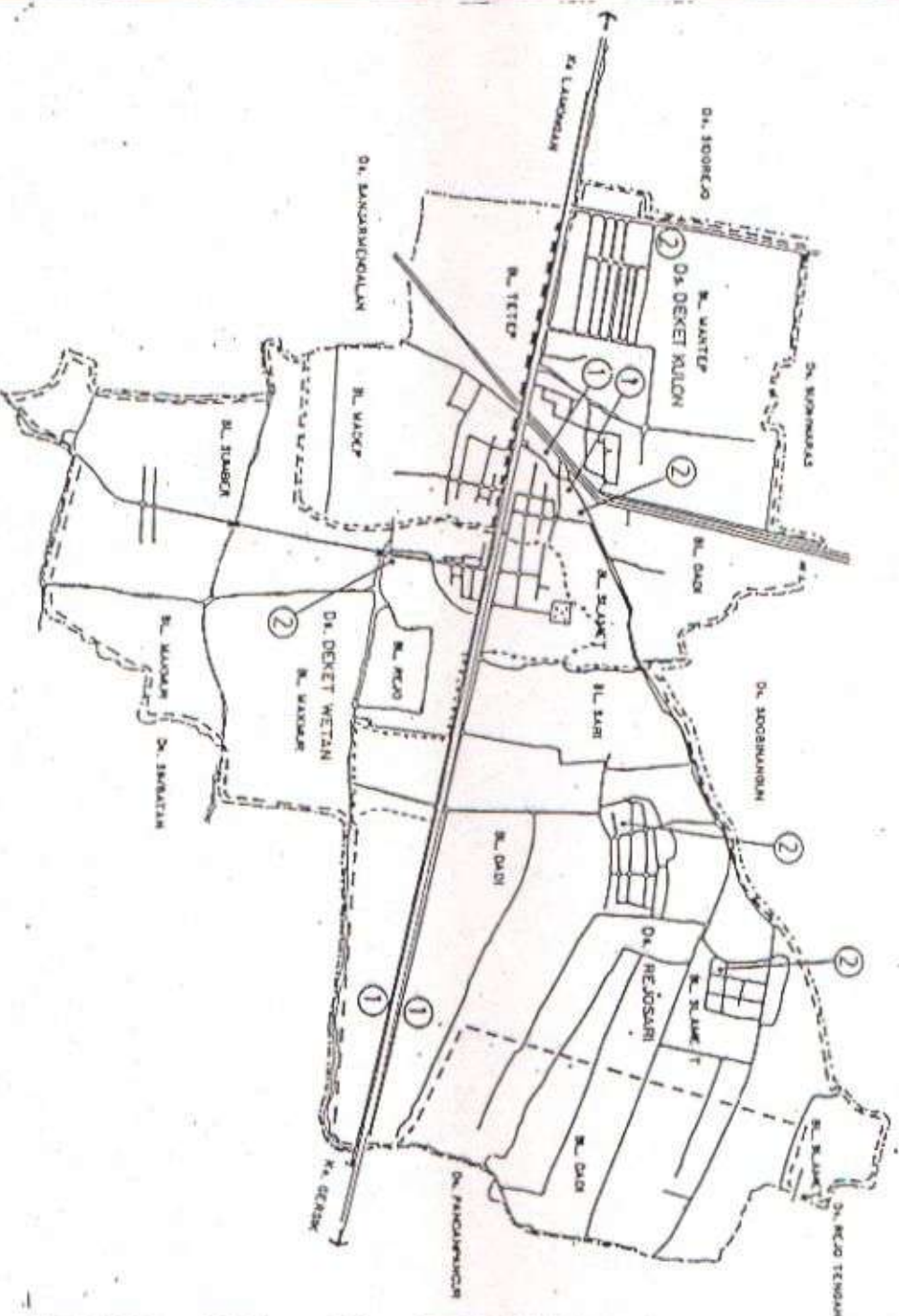
STRUKTUR KEGLATAN ALTERNATIF I

ALTERNATIVE 1

KETERANGAN

1. KEGIATAN PRIMER
2. KEGIATAN SEKUNDER

- ## 2. KEGIATAN SEKUNDER



SUMBER : Hasil Rencana

KODE / PETUNJUK PETA

QWERTY : 13.6

ORGANIZAZIONE : *mc*



MO	CEHS
JUL	LGMS

50

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAKHAATAN DEKET

KONSEP SISTEM
STRUKTUR NEGATAN
ALTERNATI II

KETERANGAN

1. KEGIATAN PRIMER
2. KEGIATAN SEKUNDER

SUB-EDITOR : MRS. RICHARDSON

KODE / PESTUNJUK PETA

CAVEM : 5.7

DECISION :	5
------------	---

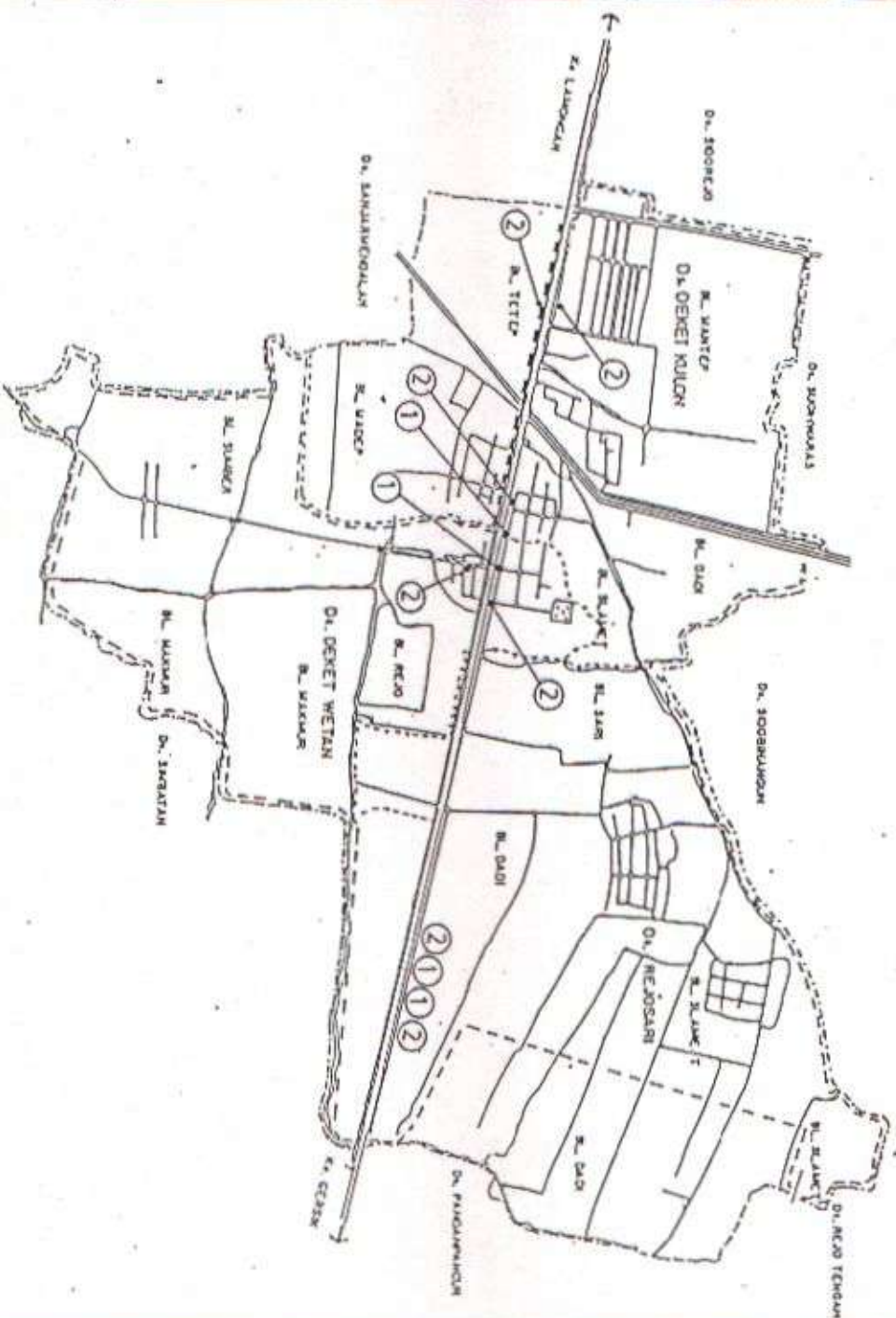
COMPENSA : 1

100



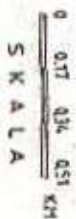
FBI

五



KETERANGAN

1. KEGIATAN PRIMER
2. KEGIATAN SEKUNDER



KODE / PETUNJUK PETA

KODE / PETUNJUK PETA	Gambar : 3.A
----------------------	--------------

Secured : ☒

DEFINITION :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

五

Usulan sistem jaringan jalan alternatif ketiga ini selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 3.11.

3.4 Rencana Unit Lingkungan Dan Pusat Pelayanan

Kota Deket termasuk dalam kategori kota-kota yang berkembang karena adanya jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan kota Deket dengan dua tujuan utama yaitu kota Lamongan dan kota Gresik. Perkembangan kota Deket pada saat ini berpusat pada kawasan di sekitar desa Deket Kulon. Sementara itu perkembangan pusat pelayanan dan perdagangan tampak mengarah pada pola pengembangan pita dan tersebar di sepanjang jalan arteri primer yang sekaligus merupakan jalan utama kota Deket.

Kawasan di sepanjang jalan utama dipenuhi oleh kegiatan perkotaan yang lebih banyak bersifat non perumahan, antara lain pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pelayanan umum. Perkembangan daerah terbangun dari kota Deket tampak sangat terbatas pada kawasan di sepanjang jalan arteri primer, jalan utama di tiap desa, serta pada kawasan-kawasan yang dekat dengan kota Lamongan. Perkembangan kota yang tidak mengarah di sepanjang jalan arteri primer tersebut terlihat intensif pada beberapa kawasan yang terletak di sepanjang jalan-jalan desa. Selain itu perkembangan kegiatan pelayanan umum lebih mengarah ke arah kawasan di sepanjang jalan arteri primer. Selain dari kedua jenis perkembangan kota

tersebut, kawasan di luarnya lebih banyak merupakan areal persawahan dan tegalan. Ciri kehidupan rural sangat jelas disini.

Pola struktur ruang kota tampak terpusat di sekitar pusat kota Deket. Pusat-pusat pelayanan lain tampak tumbuh di sekitar perumahan Wisma Deket Permai dan di sepanjang jalan desa Deket Wotan. Tampak adanya embrio ke arah strukturisasi tata ruang menuju ke pusat-pusat pelayanan tersebut. Meskipun demikian, orientasi pergerakan tetap menuju ke arah jalan arteri primer tersebut.

Pola perkembangan kota Deket yang demikian merupakan ciri umum dari kota-kota kecamatan yang tumbuh dan berkembang karena adanya keuntungan lokasional, yaitu terletak berbatasan dengan wilayah kota Lamongan serta terletak pada jalur transportasi utama (jalan arteri primer). Perkembangan kota Deket ini memiliki kecenderungan untuk mengarah pada kawasan di sepanjang jalan arteri primer. Perkembangan akan menuju pada kawasan disekitarnya apabila kawasan di sepanjang jalan arteri primer sudah terokupasi seluruhnya.

Dengan demikian, paling tidak terdapat dua alternatif usulan dalam pengembangan kota Deket, yaitu pertama dengan tetap mengakomodasi pola perkembangan yang ada (perkembangan pita), dan yang kedua adalah mengarahkan perkembangan kota kepada areal-areal kosong yang tidak terletak di sepanjang jalan utama. Adopsi alternatif pengembangan kota yang pertama membawa konsekuensi menuju gejala menurunnya fungsi jalan



RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

KONSEP SISTEM JARINGAN JALAN ALTERNATIF 1

KETERANGAN

-  JALAN ARTERI PRIMER/
ARTERI SEKUNDER
-  JALAN LOKAL PRIMER/
KOLEKTOR SEKUNDER
-  JALAN KOLEKTOR
SEKUNDER

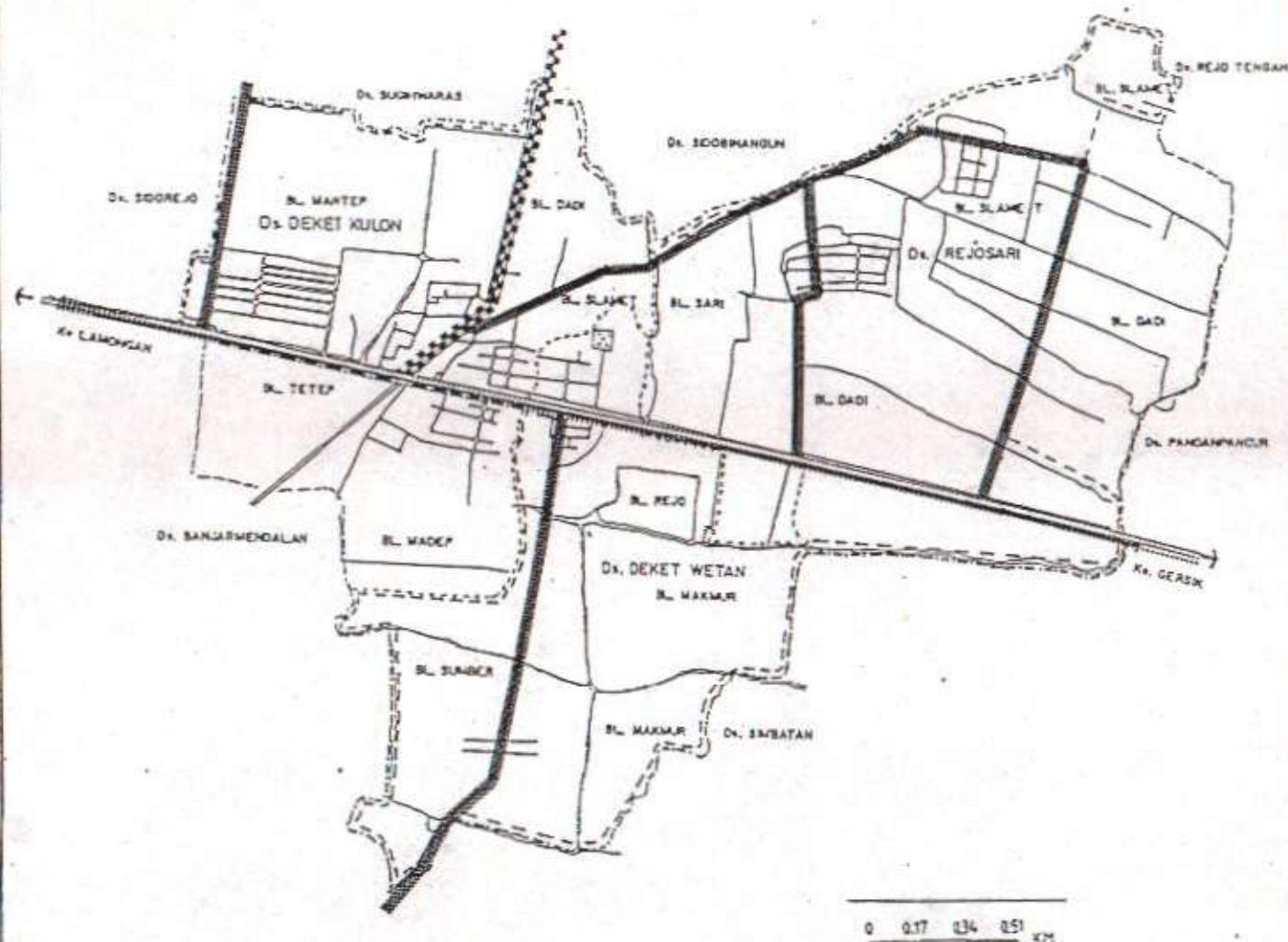
SUMBER : Hasil Rencana

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 3.9

OKAMBAR : M

DIPERIKSA : ☐



arteri primer apabila tidak didukung oleh pengaturan-pengaturan tata ruang yang tegas, namun konsep ini sangat fungsional dan efektif karena pola pengembangan pita merupakan ciri khusus tata ruang kota-kota di Indonesia. Tidak diperlukan arahan-arahan yang tegas. Yang diperlukan disini adalah tata ruang yang digunakan sebagai alat kontrol karena perkembangan linear ini umumnya terjadi dengan sangat cepat. Sementara itu pengembangan kota ke arah menjauhi jalan arteri primer dirasakan sebagai tidak lazim dan oleh karenanya tingkat keberhasilannya dapat dikatakan rendah. Meskipun demikian, pola pengembangan ini dapat mengantisipasi gejala gangguan terhadap jalan arteri primer dan gejala menurunnya fungsi jalan tersebut. Apabila pola pengembangan ini diadopsi maka tata ruang diperlukan lebih banyak sebagai sarana pengarah.

Untuk kota-kota kecamatan, dimana perkembangan tata ruang secara umum berjalan sangat lambat serta kurangnya minat untuk mengadakan investasi, maka disini perlu suatu rangsangan agar perkembangan tata ruang dapat berkembang dengan laju yang normal. Apabila digunakan pola tata ruang yang lebih bersifat mengarahkan, maka dikawatirkan malahan akan menghambat perkembangan tata ruang yang sedang dipacu. Oleh karena itu akan lebih baik apabila diadopsi pola tata ruang yang bersifat mengontrol sehingga hambatan-hambatan yang terjadi pada saat awal dapat lebih ditekan lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sampai 20 tahun mendatang, kawasan di sekitar jalan arteri primer diarahkan untuk kegiatan-kegiatan perumahan kepadatan rendah. Pusat-pusat pelayanan yang sekarang ada tetap dipertahankan seperti kawasan di sekitar pusat kota Deket yang ada sekarang dan pusat pelayanan sekunder di sepanjang jalan desa Deket Wetan. Berdasarkan pada kondisi eksisting tersebut, maka dalam pengembangannya, kota Deket diorganisasikan atas wilayah-wilayah pengembangan kota sebagai berikut :

- bagian wilayah kota A, yaitu kawasan yang terletak di sebelah Barat kota Deket dengan aktivitas utama adalah permukiman dan fasilitas umum. Pusat bagian wilayah kota ini ditempatkan di sepanjang jalan utama kompleks perumahan Wisma Deket Permai. Desa yang termasuk dalam bagian wilayah kota ini adalah desa Deket Kulon.
- bagian wilayah kota B, yaitu kawasan yang terletak di sekitar pusat kota Deket sekarang dengan aktivitas utama adalah perdagangan dan jasa, serta perkantoran niaga. Kawasan ini ditandai juga dengan intensitas kegiatan yang paling tinggi di kota Deket. Pusat bagian wilayah kota ini ditempatkan di sekitar pusat pelayanan di desa Deket Kulon. Desa yang termasuk dalam bagian wilayah kota ini adalah desa Deket Kulon dan desa Rejosari.
- bagian wilayah kota C, yaitu kawasan yang terletak di sebelah Selatan kota Deket dengan aktivitas utama adalah permukiman dan fasilitas umum. Pusat bagian wilayah kota

ini ditempatkan di sepanjang jalan desa Deket Wetan. Desa yang termasuk dalam bagian wilayah kota ini adalah desa Deket Wetan.

Selanjutnya pola pembagian wilayah kota Deket atas wilayah-wilayah pengembangan kota dapat dilihat pada Gambar 3.12.

Dari beberapa alternatif sistem pusat pelayanan yang ditawarkan beberapa hal tampak kurang tepat untuk dilaksanakan yaitu penetapan pusat-pusat pelayanan baru pada kawasan di luar kawasan sepanjang jalan arteri primer pada prakteknya sulit untuk dilakukan mengingat sangat potensialnya pengembangan kawasan di sepanjang jalan utama. Dengan demikian, maka berdasarkan sistem pembagian wilayah kota atas bagian-bagian wilayah kota alternatif pertama tampaknya merupakan sistem pusat pelayanan yang terbaik bagi pengembangan kota Deket.

3.5 Rencana Struktur Kegiatan

Struktur pelayanan kegiatan yang diarahkan untuk kota Deket terdiri atas dua kegiatan utama, masing-masing :

1. Kegiatan primer dengan fungsi pelayanan regional yang meliputi kegiatan perdagangan besar / grosir, kegiatan pergudangan dan industri, dan sub terminal.
2. Kegiatan sekunder dengan fungsi pelayanan lokal / kota yang meliputi kegiatan pemerintahan, perdagangan lokal,

peribadatan, kesehatan, pendidikan, perkantoran, dan pelayanan umum.

Jenis kegiatan dan lokasi dari tiap jenis kegiatan tersebut ditentukan dengan sedapat mungkin mempertahankan keberadaan fasilitas yang ada pada saat sekarang. Kegiatan primer jenis kegiatan perdagangan besar tetap dipertahankan pada lokasi aglomerasi kegiatan perdagangan yang ada pada saat ini, sementara kegiatan industri dan pergudangan diarahkan pada lokasi di bagian Timur kota Deket.

Untuk kegiatan sekunder, fasilitas umum yang ada tetap dipertahankan pada lokasinya yang ada, namun perlu diadakan pengaturan-pengaturan kembali pada hirarki / lingkup pelayanan dari masing-masing fasilitas. Kegiatan sekunder yang ditambahkan adalah pelayanan umum yang diarahkan pada lokasi di sepanjang jalan utama kota Deket. Selanjutnya rencana struktur kegiatan kota untuk kota Deket dapat dilihat pada Gambar 3.13.

3.6 Kapasitas Tampung RWK

Daya tampung penduduk pada tiap bagian wilayah kota dapat diperkirakan berdasarkan pendekatan luas lahan pada tiap bagian wilayah kota. Dengan asumsi kawasan perumahan memanfaatkan 60 % dari keseluruhan lahan kota, dimana sisanya diperkirakan dimanfaatkan oleh prasarana, maka dapat dihitung perkiraan jumlah penduduk yang dapat ditampung pada berbagai



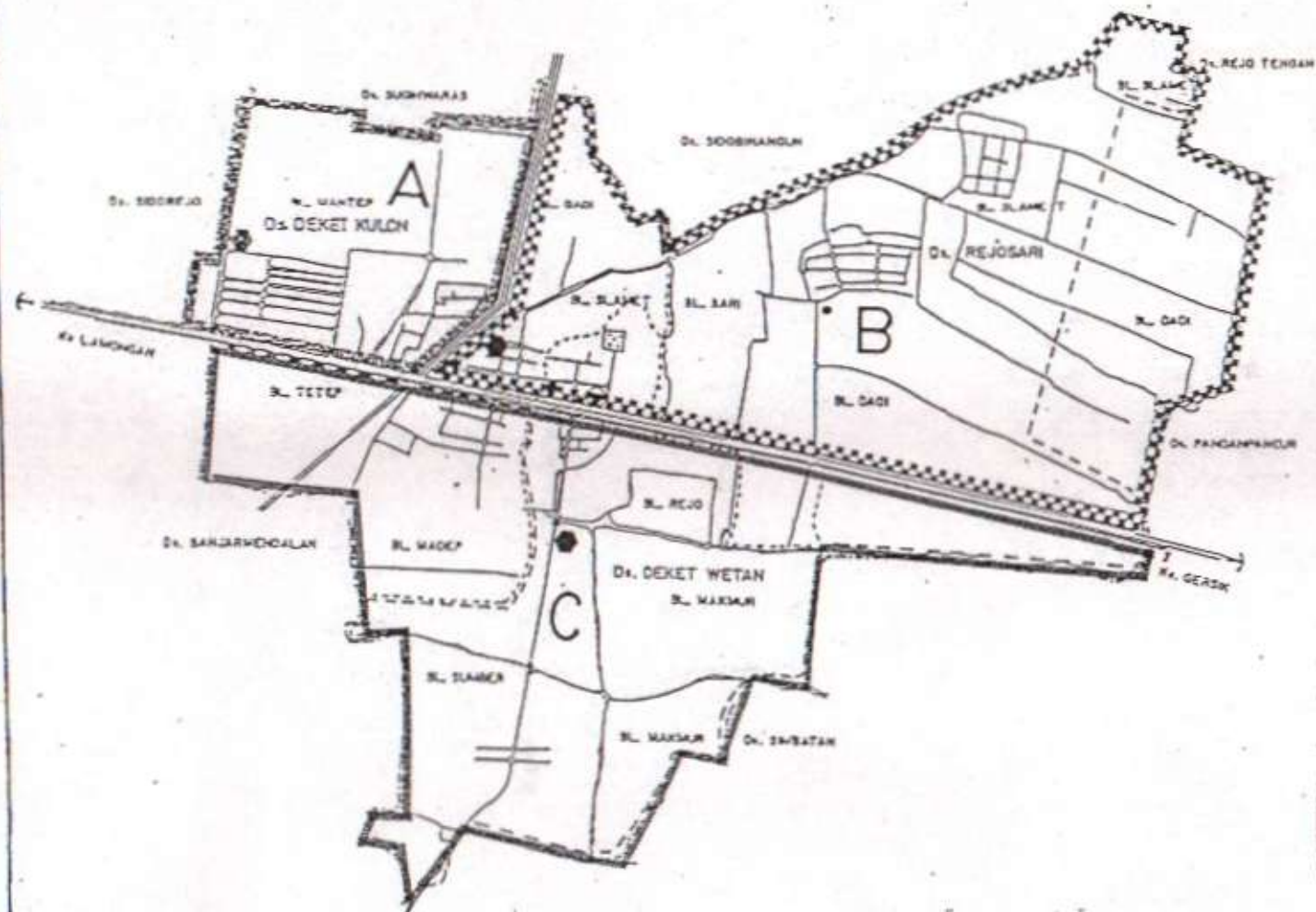
PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UHUK TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAHAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA PERWILAYAHAN KOTA

KETERANGAN

-  BWK BARAT
-  BWK TIMUR
-  BWK SELATAN
-  PUSAT BWK



0 0.17 0.34 0.51 KM
SKALA

SUMBER : Hasil Rencana

KODE / PETUNJUK PETA

DAMBAR : 13.12

DIGAMBAR : 13.12

DIPERIKSA : 13.12

NO
LEMB
JHL
LEMB

tingkat kepadatan penduduk seperti terlihat pada Tabel 3.1

TABEL : 3.1 PERKIRAAN DAYA TAMPUNG PENDUDUK KOTA DEKET PER BMR

BMR	LUAS	KEPADATAN (jiwa / ha)					
		25	50	100	150	175	200
BMR A	94.530	1.417	2.835	5.671	8.507	9.925	11.343
BMR B	317.963	4.769	9.538	19.077	28.616	33.386	38.155
BMR C	275.326	4.129	8.259	16.519	24.779	28.909	33.039

JUMLAH 687.818 10.315 20.632 41.267 61.902 72.220 82.537

Sumber : hasil analisis

Dari perkiraan daya tampung penduduk tersebut, dihitung kebutuhan lahan pada berbagai variasi kepadatan penduduk tersebut. Kepadatan penduduk total yang dapat ditolerir oleh tiap bagian wilayah kota di kota Deket adalah 175 jiwa per ha seperti terlihat pada Tabel 3.2

TABEL : 3.2 PERKIRAAN KEBUTUHAN LAHAN BAGI PENGEMBANGAN TIAP BMR

BMR	LUAS	DAYA TAMPUNG (jiwa / ha)					
		25	50	100	150	175	200
BMR A	94.530	12.79	26.75	51.59	77.92	90.75	103.56
BMR B	317.963	43.49	87.83	175.66	262.73	306.65	351.66
BMR C	275.326	38.55	76.13	152.09	228.18	266.14	303.60

JUMLAH 687.818 94.83 190.71 379.33 568.84 663.55 756.82

Sumber : hasil analisis

Dengan demikian, maka daya tampung penduduk pada tiap bagian wilayah kota di kota Deket adalah seperti pada perin-

dan berikut :

- daya tampung penduduk pada BMR A adalah 9.925 jiwa
- daya tampung penduduk pada BMR B adalah 33.386 jiwa
- daya tampung penduduk pada BMR C adalah 28.909 jiwa

3.7 Rencana Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan yang ada di kota Deket saat ini adalah adanya kecenderungan berkembangnya kegiatan pelayanan umum dan kegiatan regional pada kawasan di sepanjang jalan utama kota. Kecenderungan perkembangan ini meliputi perubahan penggunaan lahan maupun pengisian penggunaan lahan pada lahan kosong oleh kegiatan non permukiman. Sementara itu perkembangan radial yang memiliki ciri ekstensif dan didominasi oleh kegiatan permukiman penduduk cenderung memanfaatkan jalan-jalan kolektor dan jalan-jalan lokal.

Dengan lahan yang tersedia seluas sekitar 687 ha untuk pengembangan kota Deket serta jumlah penduduk sekitar 9.000 jiwa dan laju perkembangan penduduk sekitar 0,97 % per tahun, maka sampai akhir tahun perencanaan (2013/2014), diperkirakan masih tersisa beberapa hektar lahan yang belum dapat diakomodasi oleh perkembangan daerah terbangun di kota Deket. Oleh karena itu dalam penentuan pola penggunaan lahan untuk masa yang akan datang, akan ditentukan sejumlah lahan yang dikategorikan sebagai lahan cadangan perkembangan kota.

Secara umum, pola penggunaan lahan untuk kota Deket diatur berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- kawasan di sepanjang jalan-jalan utama (jalan arteri primer) akan diarahkan bagi kegiatan-kegiatan perdagangan regional dan permukiman kepadatan rendah.
- kawasan di luar areal sepanjang jalan-jalan utama akan dimanfaatkan dengan dominasi bagi kegiatan permukiman kepadatan sedang dan tinggi.
- mengingat rendahnya perkembangan daerah terbangun pada kawasan di bagian Timur Laut kota Deket (sebagian wilayah desa Rejosari), maka areal-areal tersebut tetap dipertahankan sebagai daerah terbuka yang dikategorikan sebagai areal cadangan perkembangan kota.

Berdasarkan pada kondisi pola penggunaan lahan yang telah ada serta dengan memperkirakan laju perkembangan daerah terbangun, maka pola penggunaan lahan untuk kegiatan sektoral di kota Deket pada masa mendatang ditentukan sebagai berikut :

- kegiatan perdagangan tetap dipertahankan dan dipusatkan pada kawasan pusat kota yang ada sekarang, yaitu di sekitar pusat pelayanan di desa Deket Kulon. Kegiatan perdagangan dengan lingkup pelayanan yang lebih kecil dikembangkan pada areal di sepanjang jalan utama kawasan perumahan Wisma Deket Permai, di sepanjang jalan desa Deket Wetan, dan di sepanjang jalan utama desa Rejosari.

- kegiatan pemerintahan masih dipertahankan pada lokasi di sekitar kantor kecamatan yang ada pada saat ini di sepanjang jalan arteri primer dengan pola ekstensifikasi yang diarahkan menuju ke arah Timur.
- kegiatan perkantoran dikembangkan pada lokasi di sepanjang jalan arteri primer dimana lokasi tepatnya adalah di sisi Utara jalan arteri primer di sekitar kawasan perumahan Wisma Deket Permai.
- kegiatan pelayanan umum / fasilitas umum dikembangkan dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tersisa di sepanjang jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder.

Kegiatan perumahan/permukiman penduduk diarahkan dengan memanfaatkan lahan-lahan di luar kawasan sepanjang jalan arteri primer, khususnya untuk kawasan perumahan kepadatan sedang dan tinggi. Kegiatan perumahan ini mencakup perumahan kota dan perumahan desa yang telah ada sekarang serta kegiatan perumahan yang akan dikembangkan pada masa mendatang. Perumahan kepadatan rendah diupayakan untuk menempati lahan-lahan di sepanjang jalan-jalan utama sedangkan perumahan kepadatan sedang dan tinggi diletakkan di luar kawasan sepanjang jalan-jalan utama.

Selanjutnya rencana penggunaan lahan untuk wilayah kota Deket dapat dilihat pada Gambar 3.14.

RENCANA URAIAN TARI RUJUNG KOTA
DENGAN KECAHATAN
RENCANA DETAIL TARI RUJUNG KOTA
IBUNOTA KECAHATAN DETET

RENCANA
PENGUNAAN LAHAN

KETERANGAN

- | | |
|---|--------------------------------------|
|  | PERDAGANGAN |
|  | PERKANTORAN |
|  | FASILITAS UMUM |
|  | INDUSTRI |
|  | PEMUKIMAN |
|  | RT/RW (Ruang Tetat
Keluar Kota) |
|  | CADANGAN
PENGEMBANGAN KOTA |

SUMBER : W32.INDONESIA

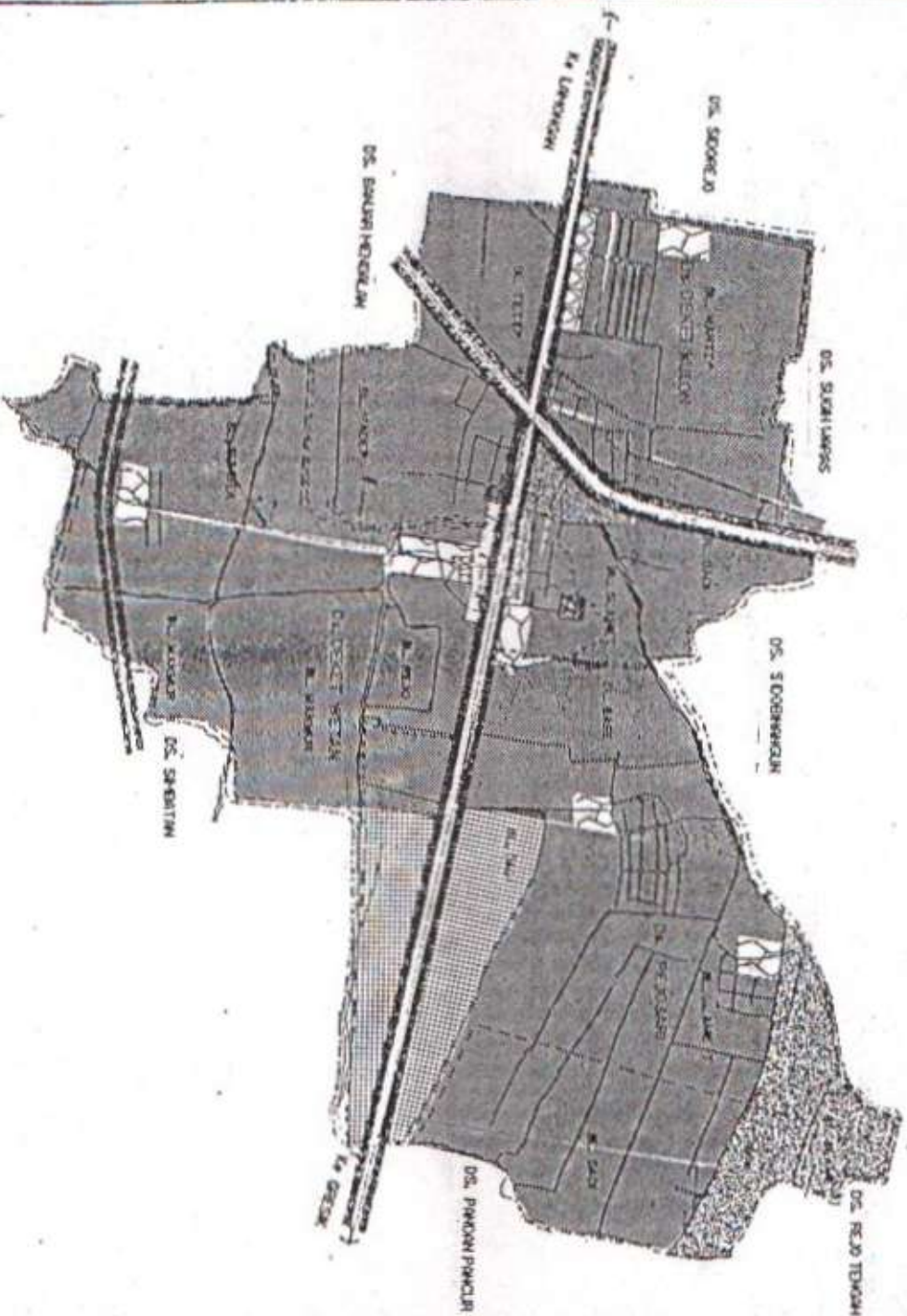
KODE / PENJUALAN PETA

Case 11	8.14
---------	------

Dealing : 17



5	5
---	---



0 017 622 831 km
SKALA

3.8 Rencana Obyek Khusus

Kegiatan khusus yang dikembangkan untuk kota Deket adalah kegiatan industri dan pergudangan yang pada saat ini belum terdapat di kota Deket. Untuk masa mendatang, karena kota Deket sangat akses menuju kota Lamongan, maka untuk mengantisipasi kebutuhan lokasi industri bagi kota Lamongan, diarahkan lokasi industri dan pergudangan di sepanjang jalan arteri primer desa Rejosari. Selanjutnya rencana lokasi obyek khusus di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 3.15.

3.9 Rencana Tata Bangunan

Ketentuan mengenai rencana tata bangunan meliputi pengaturan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan, dan garis sempadan bangunan.

Koefisien dasar bangunan pada dasarnya merupakan perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas lahan dimana bangunan tersebut berada. Untuk kota Deket, secara umum pengaturan koefisien dasar bangunan pada komponen-komponen guna lahan ditetapkan berikut :

- kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan regional dan lokal diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KDB 70 - 80 %.
- kawasan pemerintahan, perkantoran, dan fasilitas pelayanan umum lainnya diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KDB 60 - 70 %.

- fasilitas industri dan pergudangan diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KDB 50 - 60 %.
- kawasan perumahan diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KDB 30 - 60 %.
- sub terminal diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KDB 0 - 30 %.

Pengaturan koefisien dasar bangunan secara umum untuk kota Deket diatur seperti pada Gambar 3.16.

Koefisien lantai bangunan pada dasarnya adalah perbandingan antara luas lantai bangunan secara keseluruhan dengan luas lahan dimana bangunan tersebut berada. Pengaturan koefisien lantai bangunan secara umum untuk kota Deket diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan regional dan lokal diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 0,7 - 2,5.
- kawasan pemerintahan, perkantoran, dan fasilitas pelayanan umum diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 0,6 - 1,5.
- fasilitas industri dan pergudangan diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 0,5 - 1,2.
- kawasan perumahan diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 0,3 - 0,6.
- sub terminal diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 0 - 0,3.

Pengaturan koefisien lantai bangunan pada kota Deket diatur seperti pada Gambar 3.17.

Sementara itu ketinggian bangunan untuk kota Deket diatur sebagai berikut :

- kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan regional dan lokal diarahkan dengan ketinggian bangunan 1 - 3 lantai.
- kawasan perkantoran, pemerintahan, fasilitas umum, serta industri dan pergudangan diarahkan dengan ketinggian bangunan 1 - 2 lantai.
- kawasan permukiman diarahkan dengan ketinggian bangunan 1 lantai.

Selanjutnya pengaturan ketinggian bangunan untuk kota Deket dapat dilihat pada Gambar 3.18.

Pengaturan lebar garis sempadan bangunan untuk kota Deket diatur sebagai berikut :

- kawasan di sepanjang jalan arteri primer diarahkan untuk memiliki garis sempadan bangunan selebar 11 - 15 meter.
- kawasan di sepanjang jalan lokal primer diarahkan untuk memiliki garis sempadan bangunan selebar 4 - 5 meter.
- kawasan di sepanjang jalan kolektor sekunder diarahkan untuk memiliki garis sempadan bangunan selebar 1 - 3 meter.
- kawasan di sepanjang jalan lokal sekunder diarahkan untuk memiliki garis sempadan bangunan selebar 1 - 3 meter.

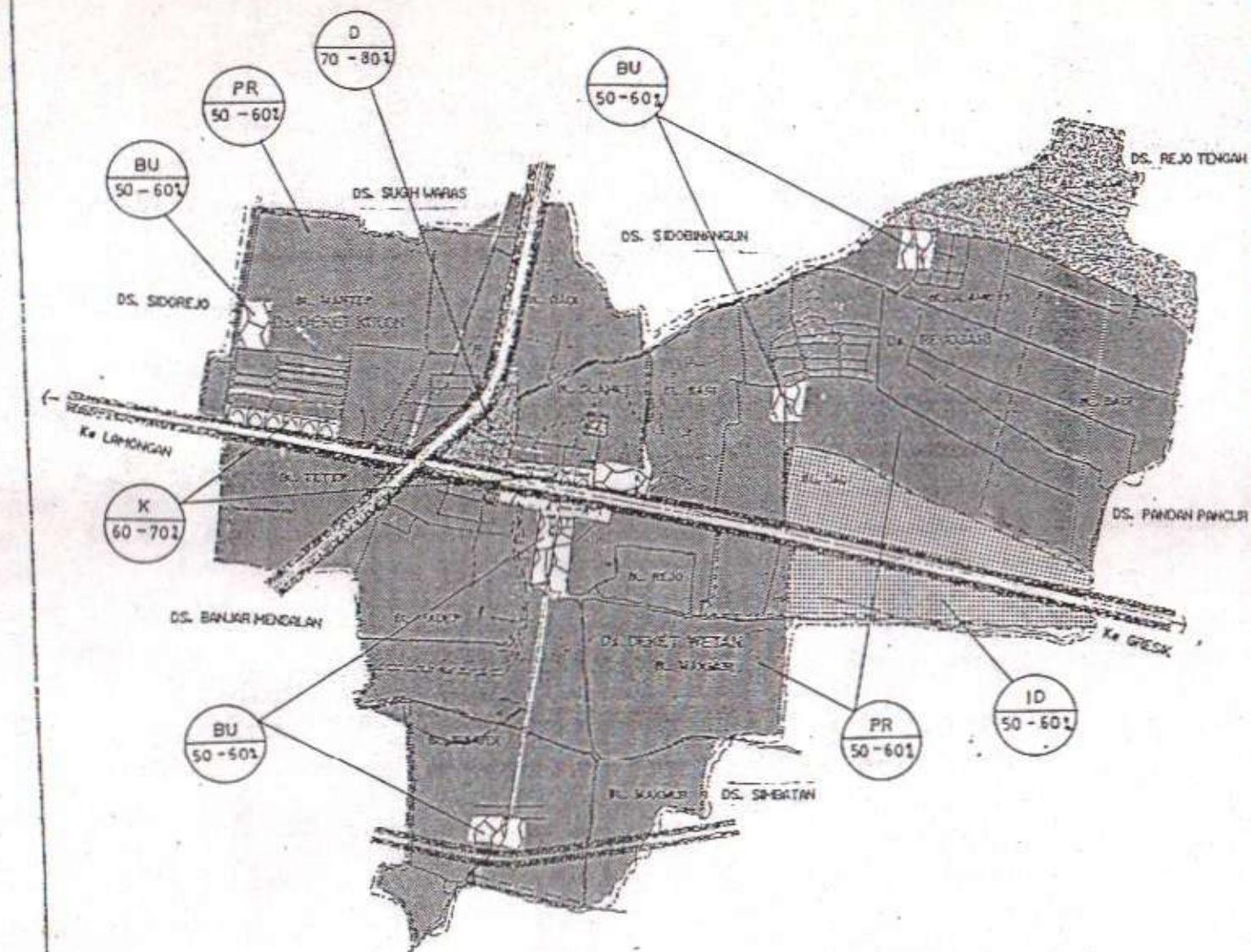
Selanjutnya pengaturan lebar garis sempadan bangunan untuk kota Deket dapat dilihat pada Gambar 3.19.

3.10 Rencana Sistem Transportasi Kota

Penataan sistem transportasi secara umum harusnya mencakup beberapa aspek seperti penataan distribusi dan dimensi prasarana transportasi seperti jaringan jalan dan jalan kereta api jika ada, penataan fasilitas transportasi, pengaturan sirkulasi lalu lintas, pengaturan sistem perangkutan umum, tahapan pengembangan jaringan jalan, serta pengklasifikasian aktivitas pengembangan jaringan jalan.

Untuk kota-kota yang berada pada simpul pergerakan regional, baik yang memiliki tiga atau empat arah outlet, pelaksanaan konsep radial konsentris akan sangat bermanfaat. Namun untuk kota-kota yang hanya memiliki dua outlet atau dengan kata lain kota tersebut berada pada jalur pergerakan linear, konsep radial konsentris tidak ada salahnya apabila diterapkan, karena selain digunakan untuk cadangan pengembangan jaringan jalan, jalan-jalan radial konsentris ini dapat dimanfaatkan sebagai pemacu perkembangan kota ke arah yang dikehendaki.

Konsep radial konsentris pada dasarnya terdiri atas dua komponen pokok, yaitu sistem jalan radial dan sistem jalan konsentris. Sistem jalan radial diwujudkan dalam bentuk jaringan jalan radial yang secara fungsional menghubungkan



0 0.17 0.34 0.51 KM
SKALA



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN KDB

KETERANGAN

- PERDAGANGAN
- PERKANTORAN
- FASILITAS UMUM
- INDUSTRI
- PEMUKIMAN
- RTHK (Ruang Tata Hijau Kota)
- CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

PR • PEMUKIMAN
D • PERDAGANGAN
K • PERKANTORAN
BU • FASILITAS UMUM
ID • INDUSTRI

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 3.16

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :

	NO	
	LEMB	
	JML	
	LEMB	

RENCANA PENGATURAN KLB

KETERANGAN

- PERDAGANGAN
- PERKANTORAN
- FASILITAS UMUM
- INDUSTRI
- PEMUKIMAN
- RTKK (Ruang Tata
Hilau Kota)
- CAKUPAN
PENGEMBANGAN KOTA

- PR = PEMUKIMAN
- D = PERDAGANGAN
- K = PERKANTORAN
- BU = FASILITAS UMUM
- ID = INDUSTRI

SUMBER : HASIL PERKAWAN

KODE / PERUMUKAN PETA

NO	1.17
LEMB	1.17
LEMB	1.17
LEMB	1.17



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN KETINGGIAN BANGUNAN

KETERANGAN

- PERDAGANGAN
- PERKANTORAN
- FASILITAS UMUM
- INDUSTRI
- PEMUKIMAN
- RTHK (Ruang Tata Hijau Kota)
- CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

PR • PEMUKIMAN
D • PERDAGANGAN
K • PERKANTORAN
BU • FASILITAS UMUM
ID • INDUSTRI

SUMBER : HASIL RENCANA

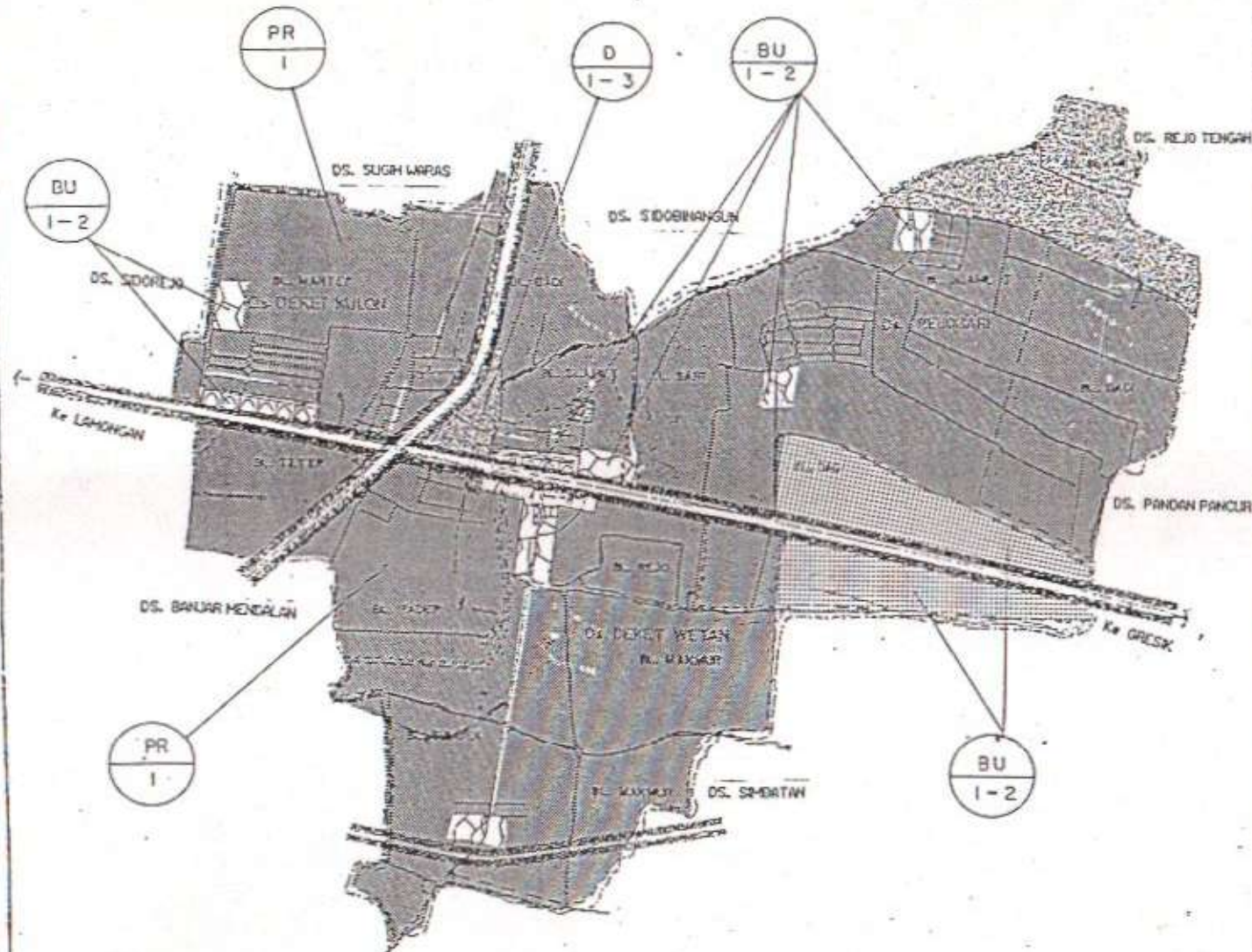
KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 3.18

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :

	NO	
	LEMB	
	JML	
	LEMB	



0 0.17 0.34 0.51 KM

SKALA



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
DEKAT TINGKAT II

RENCANA URAH TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
BUNDA KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN
GARIS SEMPADAN

KETERANGAN

- JALAN ARTERI PRIMER /
ARTERI SEKUNDER
11. METER
- JALAN LOKAL PRIMER /
KOLEKTOR SEKUNDER
4 METER
- JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
1 METER
- JALAN LOKAL SEKUNDER
1 METER

SUMBER : MRS. RENYKA

KODE / PETUNJUK PETA

GAHAR : 3.19	MO
DEKAT : 1/1	LEMB
DURASI : 1	JAL
	LEMB

pusat kota yang bersangkutan dengan kawasan-kawasan fungsional lainnya atau menghubungkan antara satu pusat pelayanan dengan pusat pelayanan lain dalam satu konstelasi wilayah yang lebih luas. Jalan-jalan radial ini umumnya masih memiliki fungsi sebagai jalan dengan kategori pelayanan primer, baik itu arteri primer maupun kolektor primer. Dalam perkembangan kota selanjutnya, fungsi jalan radial ini mulai dibedakan antara jalan primer dengan jalan sekunder dimana section yang masuk wilayah kota diberikan fungsi sekunder sedangkan section yang terletak di luar batas wilayah kota tetap diberi fungsi primer.

Di lain pihak sistem jalan konsentris berfungsi menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan yang terletak dalam satu kota tanpa melalui kawasan pusat kota. Selain itu sistem jalan konsentris ini juga dapat difungsikan sebagai pemberi akses kepada arus lalu lintas regional dan menerus yang melalui kota yang bersangkutan. Pada beberapa kota yang telah berkembang jauh, sistem jalan konsentris malahan digunakan sebagai pembatas perkembangan kota sehingga dapat terjadi sistem jalan konsentris ini berbentuk jalan lingkaran yang dibangun berlapis, baik karena jalan lapisan pertama sudah overload ataupun karena jalan lapisan pertama sudah tidak mampu membendung perkembangan kota yang bergerak secara konsentris.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, jaringan jalan diklasifikasikan secara fungsional atas

sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut :

- dalam satu satuan wilayah pengembangan menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, dan kota jenjang dibawahnya sampai ke persil
- menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu antar satuan wilayah pengembangan

Jalan arteri primer menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua. Jalan kolektor primer menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kota jenjang ketiga. Jalan lokal primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil, atau kota dibawah jenjang ketiga dengan persil.

Sistem jaringan jalan sekunder disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesa-

tu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan.

Jalan arteri sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Jalan kolektor sekunder menghubungkan antara kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga atau kawasan sekunder dibawahnya. Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

3.10.1 Sistem Jaringan Jalan

Dengan memperhatikan kondisi jalan di kota Deket yang ada pada saat ini serta kemungkinan pengembangannya di masa mendatang, maka sistem jaringan jalan untuk kota Deket direncanakan dengan tetap mempertahankan pola dan sistem yang ada, yaitu pola radial konsentris dengan pengaturan sebagai berikut :

- jalan arteri primer diarahkan untuk tetap dipertahankan sebagai jalan akses antar kota Lamongan - Gresik dan jalan akses antar kecamatan di wilayah Kabupaten Lamongan bagian Timur.

- dengan mempertimbangkan keberadaan jalan yang sudah ada, yaitu jalan desa Deket Wetan, maka rencana jalan lingkar kota Lamongan yang semula direncanakan sejajar kali (sisi Timur kali) diusulkan untuk disatukan dengan jalan desa Deket Wetan.
- jalan-jalan utama kota dikembangkan dengan meningkatkan jalan-jalan desa yang ada.
- untuk menambah akses antar kawasan dan akses antar tiap kawasan menuju pusat kota Deket, maka diusulkan jalan akses yang menghubungkan jalan arteri primer dengan kawasan di sebelah Timur Laut kota Deket (desa Rejosari).

Selanjutnya rencana sistem jaringan jalan untuk kota Deket dapat dilihat pada Gambar 3.20.

3.10.2 Rencana Fasilitas Penunjang

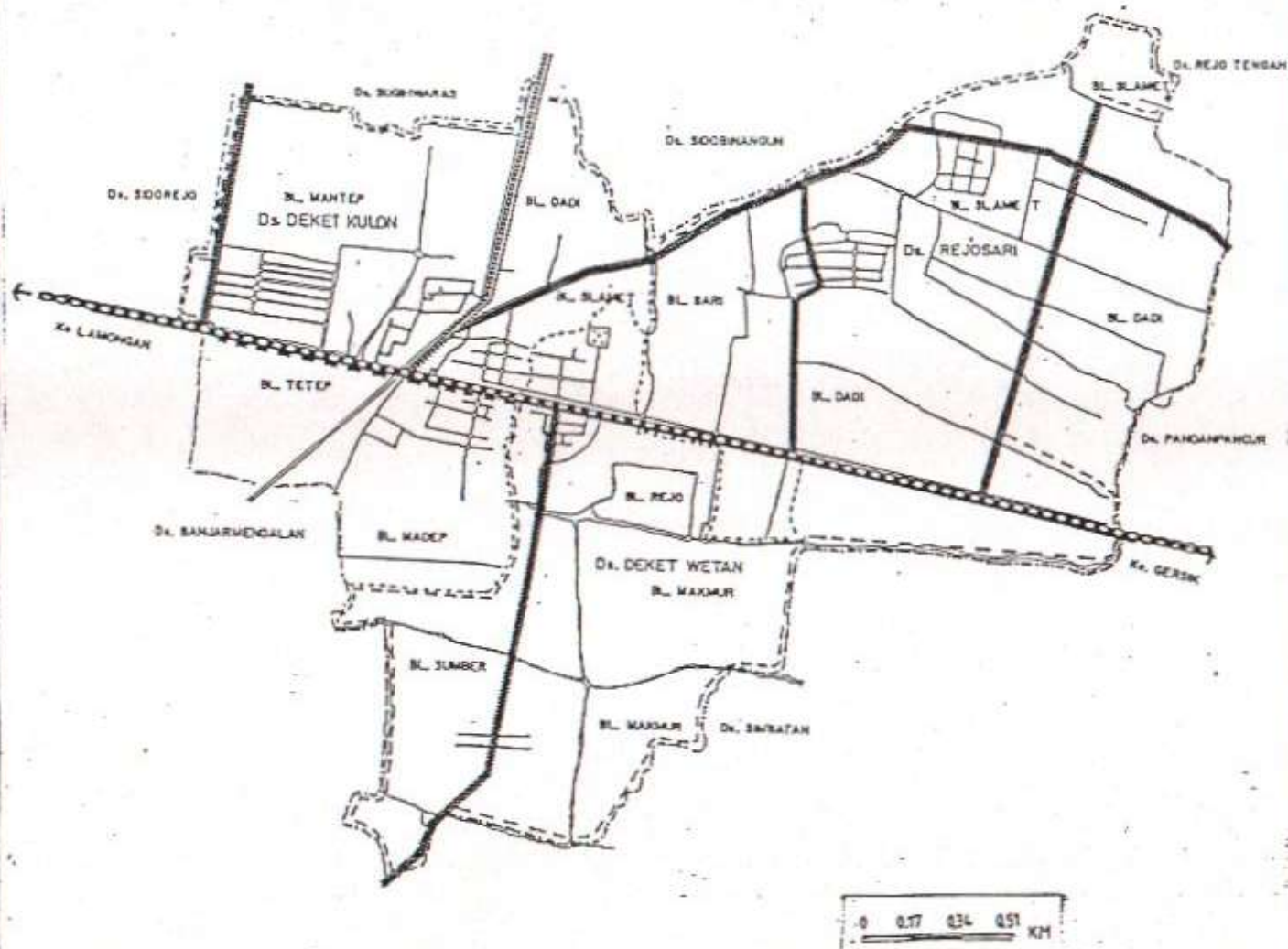
Fasilitas penunjang sistem transportasi yang seharusnya ada di kota Deket adalah sub terminal dan halte / tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum antar kecamatan atau antar desa / pedesaan. Keberadaan sub terminal diperlukan sebagai sarana pergantian moda kendaraan antara angkutan umum antar kota dan angkutan umum antar kecamatan yang melalui jalan arteri primer dengan angkutan umum pedesaan ataupun dengan angkutan pribadi di dalam wilayah kota Deket. Selain itu keberadaan sub terminal juga dikaitkan dengan lingkup pelayanan pusat kota Deket yang meliputi seluruh desa-



RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA STRUKTUR JARINGAN JALAN

KETERANGAN



SUMBER : Hasil Rencana

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 3,20

ORGANISME :

DIPERUSA :



NO LEMS
ALL LEMS

desa di wilayah kecamatan Deket serta untuk melayani wilayah kota Lamongan di bagian Timur. Karena lahan di sekitar pusat kota sebagian besar sudah terbangun maka lokasi sub terminal diusulkan pada lahan di sebelah Utara pusat kota. Usulan sub terminal di sebelah Selatan rel kereta api menurut RIK Lamongan dirasa kurang rasional karena adanya kendala berupa rel kereta api yang dapat menghambat sirkulasi keluar masuk sub terminal dari jalan arteri primer.

Sementara itu dengan memperhatikan kecenderungan pengembangan daerah terbangun di sepanjang jalan arteri primer dimana jalan tersebut sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang aksesibilitas antar kecamatan dan antar desa, maka keberadaan halte / tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan angkutan umum antar kecamatan tersebut jelas diperlukan. Keberadaan halte-halte tersebut akan dikaitkan dengan fungsi-fungsi kegiatan dan pola penggunaan lahan yang direncanakan terdapat di sepanjang jalan arteri primer. Tempat-tempat di sepanjang jalan arteri primer yang diperkirakan sesuai sebagai lokasi halte adalah di sekitar rencana kawasan industri di desa Rejosari. Selanjutnya usulan lokasi sub terminal dan halte di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 3.21.

3.10.3 Pola Perangkutan Kota

Pola perangkutan kota untuk Deket akan terdiri atas perangkutan umum dan perangkutan pribadi. Dengan melihat ke-

pada kondisi kota Deket pada masa sekarang dan prediksinya untuk masa mendatang, maka pola perangkutan umum yang terstruktur dalam kota dirasa masih belum relevan untuk kota Deket. Pola perangkutan umum dengan pelayanan regional yang sekarang ada tetap dipertahankan yaitu perangkutan umum antar kecamatan yang melalui jalan arteri primer serta jalan lokal primer dan perangkutan umum pedesaan / antar desa yang melalui jalan arteri primer dan jalan lokal primer. Sementara itu pola perangkutan umum dalam kota Deket dapat dilakukan dengan melalui sarana kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang menghubungkan antar kawasan di dalam kota Deket menuju jalan arteri primer dan jalan lokal primer. Selanjutnya arahan sirkulasi perangkutan umum di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 3.22.

3.11 Rencana Sistem Fasilitas Dan Utilitas Kota

Pengembangan kota Deket sampai akhir tahun perencanaan (2013) tentunya membutuhkan fasilitas dan utilitas yang menunjang tumbuh dan berkembangnya kota. Kebutuhan fasilitas dan utilitas tersebut diperkirakan berdasarkan standar kebutuhan fasilitas yang bersumber dari buku Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota dari Departemen Pekerjaan Umum. Kebutuhan utilitas di pihak lain diperkirakan berdasarkan standar yang umum dipergunakan oleh P3KT / IUIDP dengan sedikit modifikasi untuk kota-kota yang berstatus kota kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA SIRKULASI
LATU LINTAS

- KETERANGAN
- SIRKULASI ANGKUTAN
UMUM ANTAR KOTA
 - SIRKULASI ANGKUTAN
UMUM ANTAR KECAMATAN

SUMBER : Hasil Rancangan

MODE/PETUNJUK PETA

GAJAH : 3.22	NO	LEMB	LEMB
DOKUMEN : W/1	1		
DIREKSI : 2			

tan atau kota-kota dengan populasi dibawah 100.000 jiwa. Kedua standar kebutuhan tersebut membutuhkan masukan jumlah penduduk sebagai komponen utama untuk mengkalkulasi kebutuhan fasilitas dan utilitas.

Fasilitas-fasilitas umum yang akan dihitung kebutuhan jumlah dan ruangnya adalah :

- fasilitas perumahan
- fasilitas pendidikan
- fasilitas perdagangan
- fasilitas kesehatan
- fasilitas peribadatan
- fasilitas kebudayaan dan rekreasi
- fasilitas ruang terbuka hijau
- fasilitas pelayanan umum

Kebutuhan jumlah dan luasan masing-masing fasilitas umum dihitung berdasarkan standar penyediaan fasilitas umum dari Departemen Pekerjaan Umum yang dituangkan dalam buku Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota. Standar tersebut bersifat umum, dalam arti hanya menyangkut komponen jenis, jumlah, dan luasan ruang yang dibutuhkan sementara komponen hirarki belum dibicarakan. Untuk lebih aplikatifnya, maka pada standar penyediaan fasilitas umum perkotaan tersebut ditambahkan informasi mengenai hirarki fasilitas umum yang dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut :

- fasilitas umum yang memiliki jangkauan pelayanan skala kota

- fasilitas umum yang memiliki jangkauan pelayanan skala bagian wilayah kota
- fasilitas umum yang memiliki jangkauan pelayanan skala lingkungan / lokal

Untuk lebih jelasnya, standar penyediaan fasilitas umum untuk areal perkotaan dapat dilihat pada Tabel 3.3

Berdasarkan ukuran keluarga, komposisi jenis perumahan, dan ukuran lahan untuk tiap jenis perumahan, maka pada tahun 2013 mendatang, kebutuhan perumahan di kota Deket diperkirakan kurang lebih 1.755 buah rumah yang terdiri atas :

- rumah kapling besar 175 buah
- rumah kapling sedang 527 buah
- rumah kapling kecil 1.053 buah

Selanjutnya, kebutuhan jumlah dan luasan perumahan di wilayah kota Deket dapat dilihat pada Tabel 3.4

TABEL : 3.4 KEBUTUHAN FASILITAS PERUMAHAN

TAHUN	Jumlah PDK.	Jumlah KK	RUMAH-KECIL		RUMAH-SEDANG		RUMAH-BESAR		LUAS LAHAN (ha)
			UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	
1993	7.854	1.571	943	7,07	471	7,07	157	3,93	18,06
1998	8.084	1.617	970	7,28	485	7,28	162	4,05	18,60
2003	8.314	1.663	998	7,49	499	7,49	166	4,15	19,12
2008	8.545	1.709	1.025	7,69	513	7,70	171	4,28	19,66
2013	8.775	1.755	1.053	7,90	527	7,91	175	4,38	20,18

Sumber : hasil analisis

TABEL : 3.3 USULAN FASILITAS UMUM YANG DISEDIAKAN PADA TIAP JENJANG UNIT PERMILAYAHAN

FASILITAS UMUM	UNIT PERMILAYAHAN		
	SKALA LINGKUNGAN	SKALA BUK	SKALA KOTA
Fasilitas Pendidikan	Taman Kanak-kanak 1 TK per 1000 penduduk 1 TK = 1200 m ²	Sekolah Menengah Pertama 1 SMP per 4800 penduduk 1 SMP = 2700 m ²	Sekolah Menengah Atas 1 SMA per 4800 penduduk 1 SMA = 2700 m ²
	Sekolah Dasar 1 SD per 1600 penduduk 1 SD = 3600 m ²		
	Balai Pengobatan 1 BP per 1000 penduduk 1 BP = 300 m ²	Puskesmas 1 P = 2400 m ² Puskesmas Pembantu 1 PP = 1200 m ²	Rumah Sakit 3,6 m ² per penduduk
Fasilitas Kesehatan	Apotik 1 Apotik = 350 m ²		
	BKIA dan Rumah Bersalin 1 BKIA & RS = 1000 m ²		
Fasilitas Perdagangan	Kios dan Pasar 1 Kios per 250 penduduk 1 Sarana membutuhkan 100 m ²	Toko dan Pasar 1 Sarana membutuhkan 5000 m ²	Pusat Perdagangan dan pasar 1 Sarana membutuhkan 13500 m ²
	Sarana Peribadatan tingkat lingkungan 1 Sarana melayani 2500 - penduduk 1 Sarana membutuhkan 300 m ²	Sarana Peribadatan tingkat BUK 1 Sarana membutuhkan 750 m ²	Sarana Peribadatan tingkat kota 1 Sarana membutuhkan 1750 m ²
Fasilitas Sosial Budaya	Balai Pertemuan Kebutuhan lahan 0,12 m ² per penduduk	Gedung Serbaguna Gedung Blokop Kebutuhan lahan 0,1 m ² per penduduk	Gedung Serbaguna Gedung Blokop Gedung Kesenian Gedung perpustakaan Kebutuhan lahan 0,025 m ² per penduduk
	Pos Hansip Balai Rukun Warga Parkir Umum Kebutuhan lahan 0,16 m ² per Penduduk	Kantor Kelurahan Pos Polisi Parkir Umum Pemadam Kebakaran Kantor Pos Pembantu Kebutuhan lahan 0,05 m ² per penduduk	Kantor Kecamatan Kantor Polisi Parkir Umum Pemadam Kebakaran Kantor Pos Cabang Kebutuhan lahan 0,029 m ² per penduduk
Fasilitas Olahraga dan Pertamanan	Lapangan Olahraga Taman Kebutuhan lahan 1 m ² per penduduk	Lapangan Olahraga Taman Kebutuhan lahan 0,5 m ² per penduduk	Lapangan Olahraga Taman Kebutuhan lahan 0,3 m ² per penduduk

Sumber : Buku Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

Fasilitas pendidikan yang secara umum dan sesuai untuk disediakan pada kawasan permukiman kota-kota kecamatan adalah :

- Sekolah Taman Kanak-kanak
- Sekolah Dasar
- Sekolah Menengah Pertama
- Sekolah Menengah Atas

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas pendidikan, maka kebutuhan jumlah dan kebutuhan lahan bagi fasilitas pendidikan untuk wilayah kota Deket sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Taman Kanak-Kanak berjumlah 11 buah
- Sekolah Dasar berjumlah 5 buah
- Sekolah Menengah Pertama berjumlah 3 buah
- Sekolah Menengah Atas berjumlah 2 buah

Selanjutnya kebutuhan jumlah dan luasan lahan bagi fasilitas pendidikan untuk Kota Deket dapat dilihat pada Tabel 3.5

TABEL 3.5 KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TAMAN KANAK KANAK		SEKOLAH DASAR		SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		SEKOLAH MENENGAH ATAS		TOTAL LUAS LAHAN
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	
1993	7.854	10	1,20	5	1,00	2	0,54	2	0,54	3,28
1998	8.084	10	1,20	5	1,00	3	0,81	2	0,54	3,55
2003	8.314	10	1,20	5	1,00	3	0,81	2	0,54	3,55
2008	8.545	11	1,32	5	1,00	3	0,81	2	0,54	3,67
2013	8.775	11	1,32	5	1,00	3	0,81	2	0,54	3,67

Sumber : hasil analisis

Fasilitas perdagangan yang umumnya terdapat di lingkungan permukiman pada kota-kota kecamatan adalah :

- Pasar
- Kios / warung
- Toko
- Pusat pertokoan/perdagangan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas perdagangan, maka kebutuhan akan fasilitas perdagangan pada wilayah kota Deket sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- warung sejumlah 35 buah
- toko sejumlah 18 buah
- pusat perdagangan sejumlah 1 buah

Selanjutnya jumlah dan luasan lahan bagi kebutuhan fasilitas perdagangan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 3.6

TABEL 3.6 KEBUTUHAN FASILITAS PERDAGANGAN

TAHUN	JMLAH PENDUDUK	WARUNG		TOKO		PUSAT PERDAGANGAN		TOTAL LUAS LAHAN (ha)
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	
1993	7.854	31	0.16	16	0.24	1	1.35	1.75
1998	8.084	32	0.16	16	0.24	1	1.35	1.75
2003	8.314	33	0.17	17	0.26	1	1.35	1.77
2008	8.545	34	0.17	17	0.26	1	1.35	1.78
2013	8.775	35	0.18	18	0.27	1	1.35	1.80

Sumber : hasil analisis

Fasilitas kesehatan yang secara umum dan sesuai terdapat dalam lingkungan permukiman kota-kota kecamatan adalah :

- Balai Pengobatan
- Puskesmas
- BKIA dan Rumah Bersalin
- Rumah Sakit
- Apotik
- Tempat Praktek Dokter

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas kesehatan, maka kebutuhan jumlah dan kebutuhan lahan bagi fasilitas kesehatan untuk wilayah kota Deket pada akhir tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- balai pengobatan sejumlah 9 buah
- BKIA dan rumah bersalin sejumlah 4 buah
- puskesmas sejumlah 2 buah

- tempat praktek dokter sejumlah 4 buah
- apotik sejumlah 4 buah

Selanjutnya jumlah dan luasan lahan bagi kebutuhan fasilitas kesehatan untuk kota Deket dapat dilihat pada Tabel 3.7

Fasilitas peribadatan yang biasanya terdapat di lingkungan permukiman pada kota-kota kecamatan adalah :

- Sarana ibadah bagi pemeluk agama Islam
- Sarana ibadah bagi pemeluk agama Katolik / Kristen

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas peribadatan, maka kebutuhan fasilitas peribadatan di wilayah kota Deket sampai tahun 2013 diperkirakan sebagai berikut :

- langgar sejumlah 22 buah
- masjid sejumlah 11 buah
- fasilitas peribadatan lain seluas 0,65 ha

Selanjutnya, jumlah dan luasan lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas peribadatan di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 3.8

Tabel 3.8

TABEL 3.8 KEBUTUHAN FASILITAS PERIBADATAN

TAHUN	JMLAH PENDUDUK	MESJID		LANGGAR		LAIN		LUAS LAHAN (ha)
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	
1993	7.854	10	1.75	20	0.60	0	0.59	2.94
1998	8.084	10	1.75	20	0.60	0	0.59	2.94
2003	8.314	10	1.75	21	0.63	0	0.60	2.98
2008	8.545	11	1.93	21	0.63	0	0.64	3.19
2013	8.775	11	1.93	22	0.66	0	0.65	3.23

Sumber : hasil analisis

TABEL 3.7 KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN

TAHUN	Jumlah Penduduk	BRIK PUSKESMAS										Tempat Praktek Dokter		TOTAL Luas Lahan (ha)	
		BALAI PENGOBATAN	DAN RUMAH BERSALIN	BALAI PENGOBATAN	RUMAH SAKIT	LUAS UNIT	LUAS UNIT	LUAS UNIT	LUAS UNIT	LUAS UNIT	LUAS UNIT				
1993	7.854	8	0,24	4	0,08	2	0,24	0	0	0,00	4	0,06	4	0,14	0,76
1998	8.084	8	0,24	4	0,08	2	0,24	0	0	0,00	4	0,06	4	0,14	0,76
2003	8.314	8	0,24	4	0,08	2	0,24	0	0	0,00	4	0,06	4	0,14	0,76
2008	8.545	9	0,27	4	0,09	2	0,24	0	0	0,00	4	0,06	4	0,14	0,80
2013	8.775	9	0,27	4	0,09	2	0,24	0	0	0,00	4	0,06	4	0,14	0,80

Sumber : hasil analisis

Jenis fasilitas kebudayaan dan rekreasi yang umumnya terdapat dan sesuai dalam lingkungan permukiman kota-kota kecamatan adalah :

- Balai pertemuan
- Gedung serbaguna
- Gedung bioskop
- Gedung kesenian
- Gedung perpustakaan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas kebudayaan dan rekreasi, maka kebutuhan fasilitas kebudayaan dan rekreasi pada wilayah kota Deket diperkirakan sebagai berikut :

- gedung pertemuan sejumlah 9 buah
- gedung serbaguna sejumlah 1 buah
- gedung bioskop sejumlah 1 buah
- gedung kesenian sejumlah 1 buah
- gedung perpustakaan sejumlah 1 buah

Selanjutnya jumlah dan luasan lahan bagi kebutuhan fasilitas kebudayaan dan rekreasi dapat dilihat pada Tabel 3.9

TABEL 3.9 KEBUTUHAN FASILITAS KEBUDAYAAN DAN REKREASI

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	BALAI PERTEMUAN	GEDUNG SERBA GUNA	GEDUNG BIOSKOP	GEDUNG KESENIAN	GEDUNG PERPUS TAKAAN	TOTAL LUAS LAHAN (ha)
		UNIT LUAS	UNIT LUAS	UNIT LUAS	UNIT LUAS	UNIT LUAS	
1993	7.654	8 0,24	1 0,10	1 0,20	1 0,20	1 0,10	0,840
1998	8.084	8 0,24	1 0,10	1 0,20	1 0,20	1 0,10	0,840
2003	8.314	8 0,24	1 0,10	1 0,20	1 0,20	1 0,10	0,840
2008	8.545	9 0,27	1 0,10	1 0,20	1 0,20	1 0,10	0,870
2013	8.775	9 0,27	1 0,10	1 0,20	1 0,20	1 0,10	0,870

Sumber : hasil analisis

Fasilitas ruang terbuka hijau yang umumnya terdapat di lingkungan permukiman adalah taman, lapangan olah raga, dan juga fasilitas makam. Pengaturan kebutuhan lahan dilakukan dengan sistem berjenjang sebagai berikut :

- untuk lingkup lokal disediakan fasilitas dengan dukungan 250 penduduk yang membutuhkan lahan seluas 250 m² per unit fasilitas.
- untuk lingkup lingkungan disediakan fasilitas dengan dukungan 2500 penduduk yang membutuhkan lahan seluas 1250 m² per unit fasilitas.
- untuk lingkup kota disediakan fasilitas dengan dukungan 15.000 penduduk yang membutuhkan lahan seluas 9.000 m² per unit fasilitas.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas ruang terbuka hijau, maka kebutuhan akan fasilitas ruang

terbuka hijau untuk wilayah kota Deket sampai tahun 2013 diatur sebagai berikut :

- ruang terbuka hijau lingkup lokal seluas 0,88 ha
- ruang terbuka hijau lingkup lingkungan seluas 0,50 ha
- ruang terbuka hijau lingkup kota seluas 0,90 ha

Selanjutnya besaran-besaran kebutuhan ruang bagi fasilitas ruang terbuka hijau kota untuk kota Deket dapat dilihat pada Tabel 3.10

TABEL 3.10 KEBUTUHAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TAMAN LOKAL	TAMAN LINGK	TAMAN KOTA	LUAS (ha)
1993	7.854	0,78	0,38	0,90	2,05
1998	8.084	0,80	0,38	0,90	2,08
2003	8.314	0,83	0,38	0,90	2,10
2008	8.545	0,85	0,38	0,90	2,13
2013	8.775	0,88	0,50	0,90	2,28

Sumber : hasil analisis

Jenis fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum yang biasanya terdapat di lingkungan permukiman pada kota-kota kecamatan adalah :

- Pos hansip
- Parkir umum
- Balai Rukun Warga
- Kantor Kelurahan
- Pos Polisi
- Kantor Pemadam Kebakaran

- Kantor Polisi
- Kantor Kecamatan
- Kantor Pos Cabang

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas pelayanan umum, maka kebutuhan fasilitas pemerintahan dan bangunan umum di wilayah kota Deket diperkirakan sebagai berikut :

- fasilitas pemerintahan tingkat lingkungan seluas 4,388 ha
- fasilitas pemerintahan tingkat kota seluas 8,775 ha

Selanjutnya besaran kebutuhan ruang bagi fasilitas pemerintahan dan bangunan umum untuk kota Deket dapat dilihat pada Tabel 3.11

TABEL 3.11 KEBUTUHAN SARANA PELAYANAN UMUM

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	SARANA PELAYANAN TINGKAT LINGKUNGAN	SARANA PELAYANAN TINGKAT KOTA	JUMLAH KEBUTUHAN LAHAN (ha)
1993	7.854	3,927	7,854	11,781
1998	8.084	4,042	8,084	12,126
2003	8.314	4,157	8,314	12,471
2008	8.545	4,273	8,545	12,818
2013	8.775	4,388	8,775	13,163

Sumber : hasil analisis

Selanjutnya berdasarkan perhitungan perkiraan kebutuhan jumlah dan kebutuhan luasan untuk tiap jenis fasilitas umum pada kota Deket sampai akhir tahun perencanaan (tahun 2013).

maka akan dapat ditentukan kebutuhan total ruang atau lahan bagi pengembangan kota Deket dengan perincian sebagai berikut :

- fasilitas perumahan seluas 20,178 ha
- fasilitas pendidikan seluas 3,670 ha
- fasilitas perdagangan seluas 1,795 ha
- fasilitas peribadatan seluas 3,231 ha
- fasilitas kesehatan seluas 0,798 ha
- fasilitas kebudayaan dan rekreasi seluas 0,870 ha
- fasilitas ruang terbuka hijau seluas 2,275 ha
- fasilitas pemerintahan dan bangunan umum seluas 13,163 ha

Selanjutnya, luasan kebutuhan lahan untuk tiap fasilitas umum dapat dilihat pada Tabel 3.12

Utilitas yang akan diperkirakan kebutuhannya untuk kota-kota dengan populasi dibawah 100.000 atau kota-kota yang berstatus kota kecamatan adalah :

- listrik
- air minum
- telephone
- penanganan sampah

Kebutuhan fasilitas kelistrikan untuk kota Deket diperkirakan berdasarkan rata-rata konsumsi listrik pada tiap rumah tangga perkotaan, khususnya untuk kota-kota yang berstatus kota kecamatan atau kota dengan populasi kurang dari 100.000 jiwa. Untuk mengetahui kebutuhan wattage tiap rumah tangga, diperlukan informasi kebutuhan jumlah rumah tangga

ataupun jumlah rumah untuk tiap ukuran atau jenis rumah.

Kebutuhan listrik non domestik yang biasanya digunakan untuk penerangan jalan umum, fasilitas ekonomi maupun fasilitas sosial, dan kebutuhan non domestik lainnya diperkirakan sekitar 25 persen dari total kebutuhan listrik domestik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tahun 2013 mendatang, jumlah daya yang diperlukan untuk mensupply kebutuhan fasilitas kelistrikan bagi wilayah kota Deket dapat dilihat pada Tabel 3.13

TABEL 3.13 KEBUTUHAN FASILITAS KELISTRIKAN

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN LISTRIK DOMESTIK			KEBUTUHAN LISTRIK NON DOMESTIK	TOTAL KEBUTUHAN (kva)
		R. KECIL	R. SEDANG	R. BESAR		
1993	7.854	424	423	204	263	1.314
1998	8.084	436	436	210	271	1.353
2003	8.314	449	449	215	278	1.391
2008	8.545	461	461	222	286	1.430
2013	8.775	473	474	227	294	1.468

Sumber : hasil analisis

Kebutuhan air minum bagi kota Deket diperkirakan berdasarkan angka rata-rata konsumsi air minum penduduk perkotaan, khususnya untuk kota-kota yang berstatus kota kecamatan atau kota-kota dengan populasi dibawah 100.000 jiwa, yaitu sebesar 75 liter per orang per hari. Kebutuhan air minum non domestik diperkirakan mencapai volume 25 persen dari total kebutuhan air minum domestik. Faktor kehilangan

TABEL 3.12 KEBUTUHAN LAHAN BAGI PENGEMBANGAN KOTA

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS PERUMAHAN	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PERDAGANGAN	FASILITAS PERIBADATAN	FASILITAS KESEHATAN	FASILITAS KEBUDAYAAN	FASILITAS PERTAMANAN	FASILITAS UMUM LAIN	JUMLAH (ha)
1993	7.854	18.063	3.280	1.745	2.938	0,759	0,840	2,050	11.781	41.455
1998	8.084	18.600	3.550	1.750	2.938	0,761	0,840	2,075	12.126	42.639
2003	8.314	19.120	3.550	1.770	2.975	0,763	0,840	2,100	12.471	43.589
2008	8.545	19.658	3.670	1.775	3.194	0,795	0,870	2,125	12.818	44.904
2013	8.775	20.178	3.670	1.795	3.231	0,798	0,870	2,275	13.163	45.979

Sumber : hasil analisis

(losses) diperkirakan juga, yaitu sebesar 35 persen dari total kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik.

Dengan demikian, maka pada tahun 2013 mendatang, kebutuhan air minum untuk wilayah kota Deket dapat diperkirakan seperti pada Tabel 3.14

TABEL 3.14 KEBUTUHAN AIR MINUM

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN VOLUME (liter/hari)			KEBUTUHAN VOLUME TOTAL (ltr/hari)	KEBUTUHAN DEBIT (ltr/dtk)
		DOMESTIK	NON DOMESTIK	LOSSES		
1993	7.854	589.050	147.263	257.709	994.022	11,505
1998	8.084	606.300	151.575	265.256	1.023.131	11,842
2003	8.314	623.550	155.888	272.803	1.052.241	12,179
2008	8.545	640.875	160.219	280.383	1.081.477	12,517
2013	8.775	658.125	164.531	287.930	1.110.586	12,854

Sumber : hasil analisis

Kebutuhan telephone sampai tahun 2013 untuk wilayah kota Deket diperkirakan berdasarkan asumsi bahwa fasilitas telephone dibutuhkan oleh rumah berkeping besar. Kebutuhan telephone non domestik yang dibutuhkan bagi telephone umum dan untuk fasilitas ekonomi serta fasilitas sosial juga perlu untuk diperkirakan. Kebutuhan telephone umum diperkirakan sebesar 1 buah untuk melayani 1.000 penduduk sedangkan kebutuhan telephone untuk memenuhi komunikasi fasilitas sosial dan ekonomi diperkirakan sebesar 25 persen dari kebutuhan telephone domestik.

Dengan demikian jumlah kebutuhan fasilitas telephone sampai tahun 2013 untuk kota Deket dapat diperkirakan seperti pada Tabel 3.15

TABEL 3.15 KEBUTUHAN FASILITAS TELEPHONE

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	RUMAH TANGGA	TELEPHONE UMUM	KOMER SIAL	JUMLAH
1993	7.854	1.571	628	8	157	793
1998	8.084	1.617	647	8	162	817
2003	8.314	1.663	665	8	166	840
2008	8.545	1.709	684	9	171	864
2013	8.775	1.755	702	9	176	886

Sumber : hasil analisis

Perkiraan jumlah sarana pengangkutan sampah dilakukan berdasarkan angka rata-rata volume produksi sampah per kapita untuk kota-kota yang berstatus kota kecamatan atau kota-kota dengan populasi di bawah 100.000 jiwa, yaitu sekitar 2,3 liter per orang per hari.

Sistem penanganan sampah pada lokasi pembuangan akhir dianjurkan menggunakan sistem open dumping pada awalnya dan menggunakan sistem sanitary landfill minimal pada akhir Repelita IX (tahun 2013). Sarana pengangkutan sampah yang cocok untuk menangani masalah persampahan pada kota-kota kecamatan paling tidak adalah :

- gerobak sampah dengan kapasitas 1 m³
- truk sampah dengan kapasitas 6 m³

- tempat pembuangan sementara dengan kapasitas 10 m³ sampah atau dengan luasan lahan minimal 15 m²
- tempat pembuangan akhir yang sanggup menampung pembuangan sampah dengan volume sekitar 100.000 - 120.000 liter per hari

Adapun jumlah kebutuhan sarana pengangkutan sampah untuk wilayah kota Deket sampai tahun 2013 yang diperinci per jenis sarana pengangkutan sampah selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.16

TABEL 3.16 KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN SAMPAH

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	VOLUME SAMPAH (lt/hari)	JUMLAH GEROBAK			JUMLAH TPS	JUMLAH TRUK		
			1-rit	2-rit	3-rit		1-rit	2-rit	3-rit
1993	7.854	23.562	23	11	7	2	3	1	1
1998	8.084	24.252	24	12	8	2	4	2	1
2003	8.314	24.942	24	12	8	2	4	2	1
2008	8.545	25.635	25	12	8	2	4	2	1
2013	8.775	26.325	26	13	8	2	4	2	1

Sumber : hasil analisis

Rencana jaringan utilitas utama pada kawasan perencanaan akan meliputi sistem saluran pematusan, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan telephone.

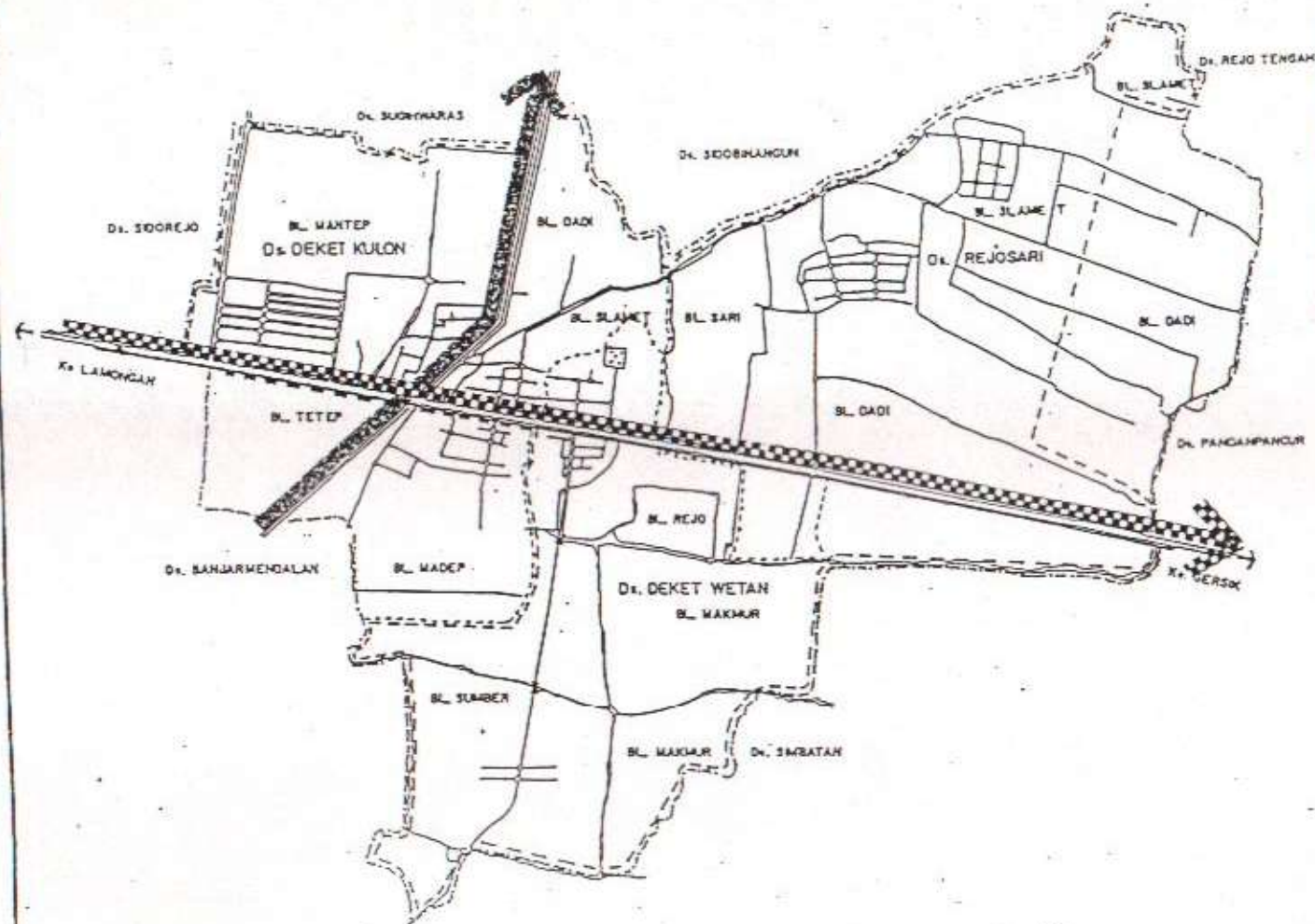
Rencana saluran pematusan yang mencakup areal seluruh kota Deket dilakukan dengan memanfaatkan saluran atau kali-kali yang ada sebagai saluran akhir / saluran pembuangan dari saluran pematusan yang akan direncanakan kemudian.

Dengan memanfaatkan bentuk dan arah kemiringan lahan yang ada di kota Deket, yaitu dari Selatan menuju Utara dan dari Barat menuju Timur, maka saluran-saluran yang direncanakan nantinya akan memiliki arah pengaliran air yang sesuai dengan kemiringan lahannya. Arah pengaliran saluran pematusan disesuaikan dengan kemiringan lahan sebagai berikut :

- kali-kali yang ada digunakan sebagai saluran pembuangan akhir dari saluran pematusan.
- saluran air yang ada pada saat sekarang (sepanjang jalan arteri primer) digunakan sebagai saluran pematusan primer kota Deket.

Selanjutnya arahan penentuan arah pengaliran dari saluran pematusan di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 3.23.

Sesuai dengan bentuk dan struktur kota yang telah ditentukan, maka sistem pelayanan jaringan air bersih, jaringan listrik, dan jaringan telephone dibentuk dengan mengikuti pola struktur kota Deket, dimana jalan arteri primer dan jalan lokal primer dimanfaatkan sebagai lokasi jaringan primer dari ketiga utilitas tersebut sementara jaringan pelayanan yang bersifat sekunder dapat ditempatkan dengan memanfaatkan jalan-jalan arteri dan kolektor yang merupakan cabang jalan arteri primer seperti terlihat pada Gambar 3.24.



0 0.17 0.34 0.51 KM

SKALA



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA SALURAN PEMATUSAN

KETERANGAN

-  SALURAN PRIMER
-  KALAMONGAN

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 3.23

DIGAMBAR : [Signature]

DIPERIKSA : [Signature]

	NO	LEMB
	241	LEMB

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAHAYAN DEKET

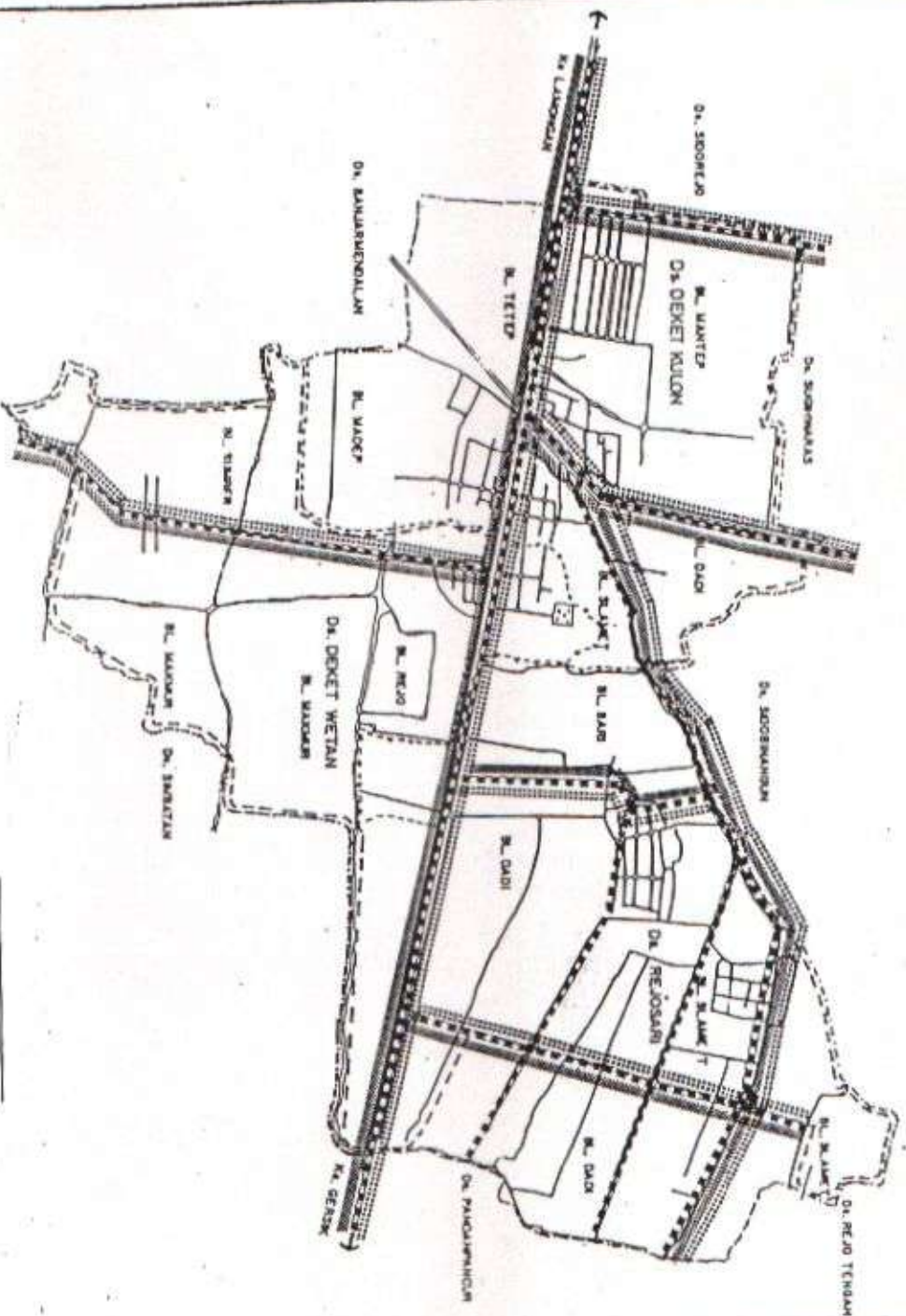
RENCANA
JARINGAN UTILITAS

KETERANGAN

JARINGAN LISTRIK PRIMER

JARINGAN AIR BERSIH
PRIMER

JAPANESE TELEPHONE PRIMER



0	0.77	0.36	0.51	kg
---	------	------	------	----

SUMBER : Hasil Rencana

MODE / PETUNJUK PETA

DATE : 3.24

Disponible : 1

DIRETORIA : 6



LEMB	
------	--

卷之四

BAB IV

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

4.1 Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota di kota kecamatan Deket meliputi seluruh wilayah kota yang terdiri atas 3 bagian wilayah kota, yaitu :

- bagian wilayah kota Barat (BWK A)
- bagian wilayah kota Timur (BWK B)
- bagian wilayah kota Selatan (BWK C)

4.2 Rumusan Kebijakan Dasar BWK

Rumusan kebijakan dasar BWK meliputi penentuan fungsi BWK, penentuan struktur BWK, penentuan jenis dan intensitas sarana dan prasarana utama, kepadatan penduduk, serta pengembangan fasilitas dan utilitas.

4.2.1 Penentuan Fungsi BWK

Dalam menuju kepada penguatan struktur kota Deket, dibentuk tiga wilayah pengembangan kota dalam bentuk bagian-bagian wilayah kota dengan fungsi dan peranan masing-masing bagian wilayah kota sebagai berikut :

- bagian wilayah kota Barat (BWK A), merupakan areal di sebelah Barat kota Deket yang sekarang merupakan areal permukiman baru dan sebagian merupakan areal belum terbangun yang diarahkan untuk berfungsi sebagai lokasi kegiatan perdagangan lokal, perkantoran, bangunan umum, kawasan permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, permukiman kepadatan tinggi, dan penunjang kegiatan pusat pelayanan lingkup bagian wilayah kota.

- bagian wilayah kota Timur (BWK B), merupakan areal di sekitar pusat pelayanan kota Deket yang sekarang merupakan pusat kota Deket dengan fungsi sebagai pusat pelayanan kota dalam lingkup regional dan pusat pelayanan dalam lingkup lokal kota Deket. Pusat pelayanan yang dimaksud mencakup kegiatan perdagangan dan jasa, pemerintahan, bangunan umum, serta permukiman kepadatan tinggi, permukiman kepadatan rendah, dan permukiman kepadatan sedang.

- bagian wilayah kota Selatan (BWK C), merupakan areal di sebelah Selatan kota Deket yang sekarang merupakan areal permukiman pedesaan dan sebagian merupakan areal belum terbangun yang diarahkan untuk berfungsi sebagai lokasi kegiatan perdagangan lokal, bangunan umum, kawasan permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, permukiman kepadatan tinggi, dan penunjang kegiatan pusat pelayanan lingkup bagian wilayah kota.

Secara struktural, tiap bagian wilayah kota dibagi atas zona-zona atau blok-blok yang lebih kecil dari ukuran bagian

wilayah kota dengan maksud untuk meratakan distribusi fasilitas pelayanan lingkup bagian wilayah kota menuju fasilitas pelayanan lingkup blok. Tiap blok diupayakan memiliki spesifikasi sendiri, baik dari kepadatan penduduknya maupun jenis fasilitas utamanya. Yang jelas, tiap blok harus memiliki fasilitas pelayanan yang dapat melayani kebutuhan penduduk dalam blok tersebut, seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

4.2.2 Penentuan Struktur BKK

Di dalam tiap bagian wilayah kota diadakan pengaturan lokasi dari tiap jenis struktur kegiatan dengan arahan sebagai berikut :

- kegiatan primer yaitu kegiatan dengan lingkup pelayanan regional dengan jenis kegiatan perdagangan regional / grosir, kegiatan industri dan perdagangan, serta sub terminal.
- kegiatan sekunder kesatu yaitu kegiatan dengan lingkup pelayanan kota dengan jenis kegiatan perdagangan lokal, pemerintahan, perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan kegiatan pelayanan umum.
- kegiatan sekunder kedua yaitu kegiatan dengan lingkup pelayanan bagian wilayah kota dengan jenis kegiatan perdagangan lingkup BKK, pendidikan, serta fasilitas peribadatan.

4.2.3 Penentuan Jenis Dan Intensitas Prasarana Dan Sarana Utama

Prasarana dan sarana yang disebarakan atau dialokasikan pada tiap bagian wilayah kota adalah :

- fasilitas perumahan
- fasilitas pendidikan
- fasilitas peribadatan
- fasilitas perdagangan

Sedangkan utilitas yang diarahkan melayani tiap bagian wilayah kota adalah semua jenis utilitas seperti :

- air bersih
- sarana kelistrikan
- sarana telekomunikasi
- sarana penanganan sampah

4.2.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk untuk lingkup kota Deket diupayakan agar tidak melebihi angka 200 jiwa per ha seperti diutarakan dalam kebijaksanaan kependudukan. Dalam penerapannya untuk lingkup bagian wilayah kota, angka ini perlu dirinci lebih detail lagi dengan menetapkan angka kepadatan penduduk dengan variasi sebagai berikut :

- kepadatan penduduk antara 50 - 100 jiwa per ha yang diarahkan pada kawasan permukiman kepadatan rendah.

- kepadatan penduduk antara 100 - 150 jiwa per ha yang diarahkan pada kawasan permukiman kepadatan sedang.
- kepadatan penduduk antara 150 - 200 jiwa per ha yang diarahkan pada kawasan permukiman kepadatan tinggi.

4.2.5 Pengembangan Fasilitas Dan Utilitas

Fasilitas dan utilitas pada tiap bagian wilayah kota di kota Deket merupakan inventarisasi dari elemen-elemen tata ruang yang sudah ada dan elemen-elemen tata ruang lain yang sesuai dikembangkan untuk kota Deket. Fasilitas dan utilitas pada tiap bagian wilayah kota tersebut adalah :

- fasilitas pada bagian wilayah kota Barat (BWK A) adalah perdagangan lingkup BWK, perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, dan permukiman kepadatan tinggi.
- fasilitas pada bagian wilayah kota Timur (BWK B) adalah perdagangan regional, perdagangan lokal, pemerintahan, industri, pergudangan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, permukiman kepadatan tinggi, permukiman kepadatan sedang, permukiman kepadatan rendah, sub terminal, serta areal cadangan perkembangan kota.
- fasilitas pada bagian wilayah kota Selatan (BWK C) adalah perdagangan lingkup BWK, fasilitas pendidikan, fasilitas

kesehatan, fasilitas peribadatan, permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, dan permukiman kepadatan tinggi.

4.3 Rencana Detail Tata Ruang

Rencana Detail Tata Ruang pada ketiga bagian wilayah kota di kota Deket meliputi indikasi pembagian unit-unit lingkungan, rencana kepadatan penduduk BWK, rencana penggunaan tanah pada BWK, rencana sistem transportasi BWK, rencana fasilitas pelayanan sosial dan utilitas BWK, rencana utilitas BWK, serta rencana intensitas penggunaan tanah BWK.

4.3.1 Indikasi Pembagian Unit-Unit Lingkungan BWK

Terdapat tiga bagian wilayah kota di kota Deket yang merupakan wujud pengaturan struktur tata ruang kota, dengan pembagian blok atau kawasan atau unit ruang di bawah unit bagian wilayah kota seperti berikut :

- bagian wilayah kota Barat (BWK A) dengan pusat BWK yang terletak pada kawasan di sepanjang jalan utama kawasan permukiman Wisma Deket Permai direncanakan terbagi atas 2 sub bagian wilayah kota, masing-masing sub bagian wilayah kota A1 dengan pusat di tepi jalan utama kawasan permukiman sekaligus sebagai pusat BWK A dan sub bagian wilayah kota A2 dengan pusat di tepi jalan desa Deket Kulon.

- bagian wilayah kota Timur (BWK B) dengan pusat BWK yang terletak pada areal sekitar pusat pelayanan kota Deket dan sekaligus merupakan pusat kota Deket, direncanakan terbagi atas 8 sub bagian wilayah kota, masing-masing sub bagian wilayah kota B1 dengan pusat di tepi jalan lokal primer, sub bagian wilayah kota B2 dengan pusat yang sekaligus merupakan pusat kota Deket, sub bagian wilayah kota B3 dengan pusat di tepi jalan desa Rejosari, sub bagian wilayah kota B4 dengan pusat di tepi jalan desa Rejosari, sub bagian wilayah kota B5 dengan pusat di tepi jalan desa Rejosari, sub bagian wilayah kota B6 dengan pusat di tepi jalan desa Rejosari, sub bagian wilayah kota B7 dengan pusat di tepi jalan desa Rejosari, dan sub bagian wilayah kota B8 dengan pusat di tepi jalan arteri primer desa Rejosari.

- bagian wilayah kota Selatan (BWK C) dengan pusat BWK yang terletak pada kawasan di sepanjang jalan desa Deket Wetan direncanakan terbagi atas 6 sub bagian wilayah kota, masing-masing sub bagian wilayah kota C1 dengan pusat di tepi jalan desa Deket Wetan sekaligus sebagai pusat BWK C, sub bagian wilayah kota C2 dengan pusat di tepi jalan desa Deket Wetan, sub bagian wilayah kota C3 dengan pusat di tepi jalan desa Deket Wetan, sub bagian wilayah kota C4 dengan pusat di tepi jalan desa Deket Wetan, sub bagian wilayah kota C5 dengan pusat di tepi jalan desa

Deket Wetan, dan sub bagian wilayah kota C6 dengan pusat di tepi jalan desa Deket Wetan.

Pembagian tiap bagian wilayah kota atas unit-unit perwilayahan yang lebih kecil atau blok-blok lingkungan untuk kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.1.

4.3.2 Rencana Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk pada tiap jenis intensitas penggunaan lahan diatur sebagai berikut :

- kawasan dengan intensitas penggunaan lahan paling tinggi diarahkan dengan kepadatan penduduk 200 - 300 jiwa per ha.
- kawasan dengan intensitas penggunaan lahan menengah tinggi diarahkan dengan kepadatan penduduk 150 - 200 jiwa per ha.
- kawasan dengan intensitas penggunaan lahan menengah rendah diarahkan dengan kepadatan penduduk 100 - 150 jiwa per ha.
- kawasan dengan intensitas penggunaan lahan paling rendah diarahkan dengan kepadatan penduduk 50 - 100 jiwa per ha.

Lingkungan permukiman penduduk di kota Deket akan dibagi atas tiga kategori, masing-masing :

- lingkungan permukiman kepadatan rendah merupakan lingkungan permukiman yang diperuntukkan bagi penduduk sosial ekonomi relatif tinggi dengan kepadatan penduduk 50 - 100 jiwa per ha sehingga apabila 25 % dari lahan yang ada

diperuntukkan bagi fasilitas umum, maka luas persil yang diarahkan adalah sekitar 375 - 750 m².

- lingkungan permukiman kepadatan sedang merupakan lingkungan permukiman yang diperuntukkan bagi penduduk sosial ekonomi relatif menengah dengan kepadatan penduduk 100 - 150 jiwa per ha sehingga apabila 25 % dari lahan yang ada diperuntukkan bagi fasilitas umum, maka luas persil yang diarahkan adalah sekitar 250 - 375 m².
- lingkungan permukiman kepadatan tinggi merupakan lingkungan permukiman yang diperuntukkan bagi penduduk sosial ekonomi relatif rendah dengan kepadatan penduduk 150 - 200 jiwa per ha sehingga apabila 25 % dari lahan yang ada diperuntukkan bagi fasilitas umum, maka luas persil yang diarahkan adalah sekitar 187,5 - 375 m².

Selanjutnya, rencana dan klasifikasi kepadatan penduduk untuk kota Deket diatur seperti pada Gambar 4.2.

4.3.3 Rencana Penggunaan Tanah Pada RWK

Pengembangan tata ruang kota Deket dilakukan dengan mengarahkan perkembangan ke arah kawasan sepanjang jalan lokal primer untuk pengembangan tata ruang yang sifatnya intensif dan mengarahkan perkembangan tata ruang ke arah kawasan di sepanjang jalan arteri sekunder, kolektor sekunder, dan lokal sekunder untuk perkembangan tata ruang yang sifatnya ekstensif. Arah perkembangan ini ditentukan dengan



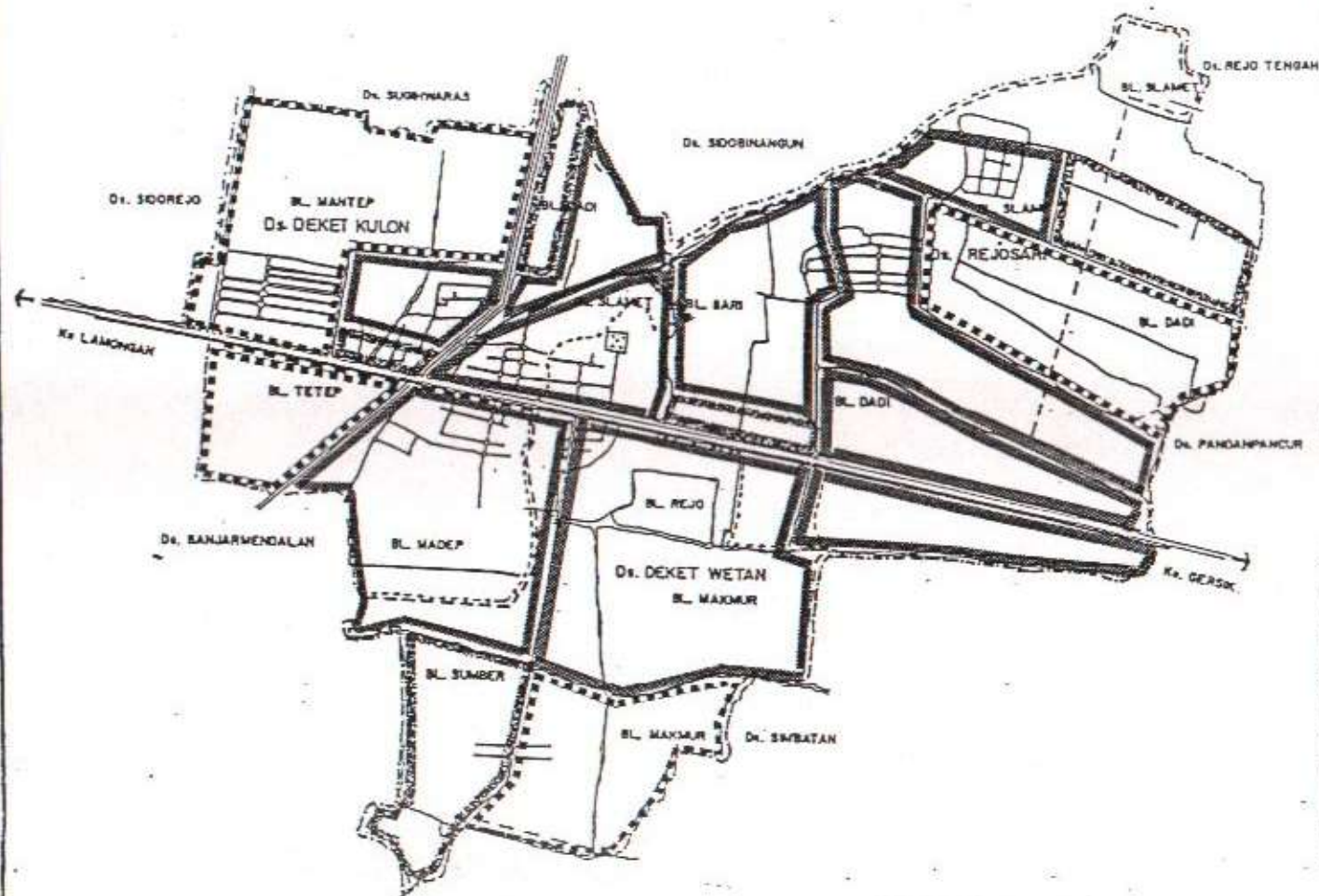
PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA KEPADATAN PENDUDUDUK

KETERANGAN

	50 - 100 JIWA/HA
	100 - 150 JIWA/HA
	150 - 200 JIWA/HA



SUMBER : Hasil Rencana

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 1.2

DIGAMBAR : h

DIPERIKSA : h

NOI
LEMB
JML
LEMB

pertimbangan bahwa jalan lokal primer merupakan sarana pemacu perkembangan kota Deket sedangkan jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder merupakan sarana pemacu perluasan daerah terbangun di kota Deket.

Rencana tata ruang secara umum untuk kota Deket pada prinsipnya sebagian besar merupakan upaya mempertahankan pola tata ruang yang ada dengan seminimal mungkin mengadakan perubahan. Upaya mempertahankan pola tata ruang yang ada ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pola tata ruang yang ada pada saat sekarang sudah efisien serta kecilnya laju perkembangan daerah terbangun, khususnya pada kawasan-kawasan yang pada saat sekarang masih merupakan areal pertanian dan tegalan produktif.

Perubahan pola tata ruang rencana yang mendasar untuk kota Deket adalah diupayakannya bentuk-bentuk zoning yang berupa cluster-cluster atau aglomerasi dari kegiatan perkotaan yang terkait pada satu lokasi atau kawasan. Selain itu fasilitas umum yang memiliki lingkup pelayanan sangat kecil seperti Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan langgar direkomendasikan untuk tidak berlokasi di sepanjang jalan arteri primer dan jalan lokal primer.

Dengan laju perkembangan daerah terbangun yang ada pada saat sekarang maka diperkirakan pada tahun 2013 mendatang luas daerah terbangun kota Deket tidak akan mengakomodasi keseluruhan wilayah kota Deket. Oleh karena perlu diidenti-

fikasi daerah-daerah yang masih dapat dipertahankan sebagai daerah tidak terbangun pada masa mendatang.

Selanjutnya rencana tata ruang kota Deket pada tiap bagian wilayah kota diarahkan seperti pada uraian berikut :

- rencana tata ruang pada bagian wilayah kota Barat (BWK A) diatur sebagai berikut :
- kegiatan perdagangan dan jasa lingkup bagian wilayah kota diletakkan pada kawasan di sepanjang jalan utama kawasan permukiman Wisma Deket Permai.
- kegiatan pelayanan umum yang mencakup fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diletakkan pada lokasi di sekitar pusat BWK A serta diletakkan juga pada lokasi tersebar sesuai dengan penyebaran permukiman penduduk.
- fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan yang telah ada dapat tetap dipertahankan sementara fasilitas yang baru dapat dialokasikan pada lokasi yang tersebar sesuai dengan penyebaran permukiman penduduk.
- kegiatan perkantoran dikembangkan di sepanjang sisi Utara jalan arteri primer.
- permukiman kepadatan sedang diarahkan pada kawasan di sebelah Utara bagian wilayah kota A.
- permukiman kepadatan rendah diarahkan pada kawasan di sebelah Selatan bagian wilayah kota A.

- selanjutnya rencana penggunaan tanah pada bagian wilayah kota Barat (BWK A) dapat dilihat pada Gambar 4.3.
- rencana tata ruang pada bagian wilayah kota Timur (BWK B) diatur sebagai berikut :
 - kegiatan perdagangan dan jasa lingkup regional, lingkup kota, dan lingkup bagian wilayah kota diletakkan pada kawasan yang sekarang merupakan kawasan pusat kota. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa ini diarahkan untuk memanfaatkan lahan di sisi Utara jalan arteri primer dan sisi Timur jalan lokal primer.
 - kegiatan pemerintahan tetap dipertahankan pada lahan di sekitar kantor kecamatan yang ada sekarang sampai batas lapangan olahraga (batas paling Timur).
 - kegiatan industri dan pergudangan diarahkan pada lahan di sepanjang sisi Utara jalan arteri primer di desa Rejosari.
 - kegiatan pelayanan umum yang mencakup fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diletakkan pada lokasi di sisi Timur jalan lokal primer.
 - fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan yang telah ada dapat tetap dipertahankan sementara fasilitas yang baru dapat dialokasikan pada lokasi yang tersebar sesuai dengan penyebaran permukiman penduduk.
 - ruang terbuka hijau perlu dipertahankan seperti makam, lapangan, dan kawasan di sepanjang sungai.

- permukiman kepadatan rendah dikembangkan di sisi Utara jalan arteri primer mulai dari kawasan pemerintahan sampai kawasan industri di desa Rejosari.
- permukiman kepadatan tinggi dikembangkan di sekitar kawasan perdagangan dan jasa dan di sekitar jalan arteri primer dan di sekitar kampung-kampung yang ada di sebelah Utara desa Rejosari.
- permukiman kepadatan sedang diarahkan pada kawasan di sebelah Timur bagian wilayah kota B.
- areal di sebelah Timur Laut dari bagian wilayah kota B ini dicadangkan bagi pengembangan kota Deket pada tahap selanjutnya.
- selanjutnya rencana penggunaan tanah pada bagian wilayah kota Timur kota (BWK B) dapat dilihat pada Gambar 4.4.
- rencana tata ruang pada bagian wilayah kota Selatan (BWK C) diatur sebagai berikut :
 - kegiatan perdagangan dan jasa lingkup bagian wilayah kota diletakkan pada kawasan di sepanjang jalan desa Deket Wetan.
 - industri dan pergudangan diarahkan pada lahan di sisi Selatan jalan arteri primer (masuk desa Rejosari).
 - kegiatan pelayanan umum yang mencakup fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan diletakkan pada lokasi di sekitar pusat BWK B serta diletakkan juga pada lokasi tersebar sesuai dengan penyebaran permukiman penduduk.

- fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan yang telah ada dapat tetap dipertahankan sementara fasilitas yang baru dapat dialokasikan pada lokasi yang tersebar sesuai dengan penyebaran permukiman penduduk.
- ruang terbuka hijau perlu dipertahankan seperti lapangan olahraga, makam, dan kawasan di sepanjang sungai.
- permukiman kepadatan tinggi diarahkan pada lahan di sisi Selatan jalan arteri primer dengan dibatasi oleh rel kereta api.
- permukiman kepadatan sedang diarahkan pada kawasan di sebelah Selatan kawasan permukiman kepadatan tinggi.
- permukiman kepadatan rendah diarahkan pada kawasan paling Selatan dari BWK C ini.
- selanjutnya rencana penggunaan tanah pada bagian wilayah kota Selatan (BWK C) dapat dilihat pada Gambar 4.5.

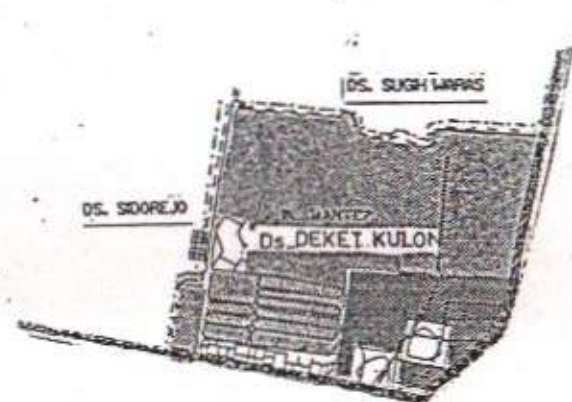
4.3.4 Rencana Sistem Transportasi BWK

Dengan adanya pengaturan jaringan jalan berdasarkan konsep radial konsentris, maka selanjutnya perlu ditetapkan klasifikasi fungsional jaringan jalan. Melihat kepada fungsinya pada saat ini dan proyeksinya di masa yang akan datang, klasifikasi fungsional jaringan jalan untuk kota Deket diatur sebagai berikut :

- jalan arteri primer yang sekaligus merupakan jalan utama kota Deket akan tetap dipertahankan sebagai jalan arteri primer mengingat dirasa kurang perlunya membuat jalan alternatif yang berfungsi sebagai jalan melingkar untuk kota Deket.
- jalan lokal primer yang menghubungkan kota Deket dengan kota kecamatan Karangbinangun akan tetap dipertahankan sebagai jalan lokal primer.

Sementara itu pengembangan fungsi jaringan jalan pada tiap bagian wilayah kota diatur sebagai berikut :

- untuk bagian wilayah kota Barat (BWK A) fungsi jaringan jalan sekunder diatur sebagai berikut :
 - jalan arteri sekunder ditetapkan untuk jaringan jalan yang sekaligus merupakan jalan arteri primer.
 - jalan kolektor sekunder ditetapkan untuk jaringan jalan utama di dalam kawasan perumahan Wisma Deket Permai.
 - jalan lokal sekunder ditetapkan untuk jaringan jalan di dalam kawasan permukiman penduduk.
- rencana fungsi jalan pada bagian wilayah kota Barat (BWK A) dapat dilihat pada Gambar 4.6.
- untuk bagian wilayah kota Timur (BWK B) fungsi jaringan jalan sekunder diatur sebagai berikut :
 - jalan arteri sekunder ditetapkan untuk jaringan jalan yang sekaligus merupakan jalan arteri primer.
 - jalan kolektor sekunder ditetapkan sekaligus untuk jaringan jalan utama yang menjadi penghubung antara kota



0 0.17 0.34 0.51 KM
S K A L A



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH ILMU
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

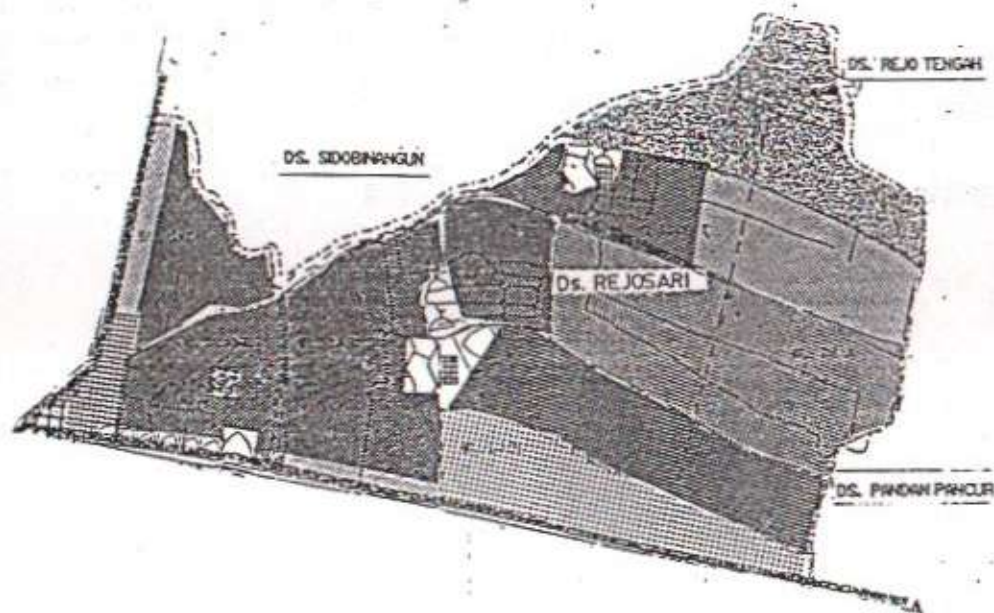
RENCANA PENGUNAAN LAHAN DI BWK A

KETERANGAN

-  PERDAGANGAN GROSIR
-  PERDAGANGAN LOKAL
-  PEMERINTAHAN
-  PERKANTORAN
-  PENDIDIKAN
-  KESSEHATAN
-  PERIBADATAN
-  BANGUNAN UMUM
-  INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
-  PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI
-  PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG
-  PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH
-  RTHK (Ruang Teta Hijau Kota)
-  CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA	DAMBAAR :	2.3
	DIGAMBAR :	
	DIPERIKSA :	
	NO	
	LEMB	
	JML	
	LEMB	



0 0.17 0.34 0.51
Kilometer
S K A L A



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGUNAAN LAHAN DI BUK B

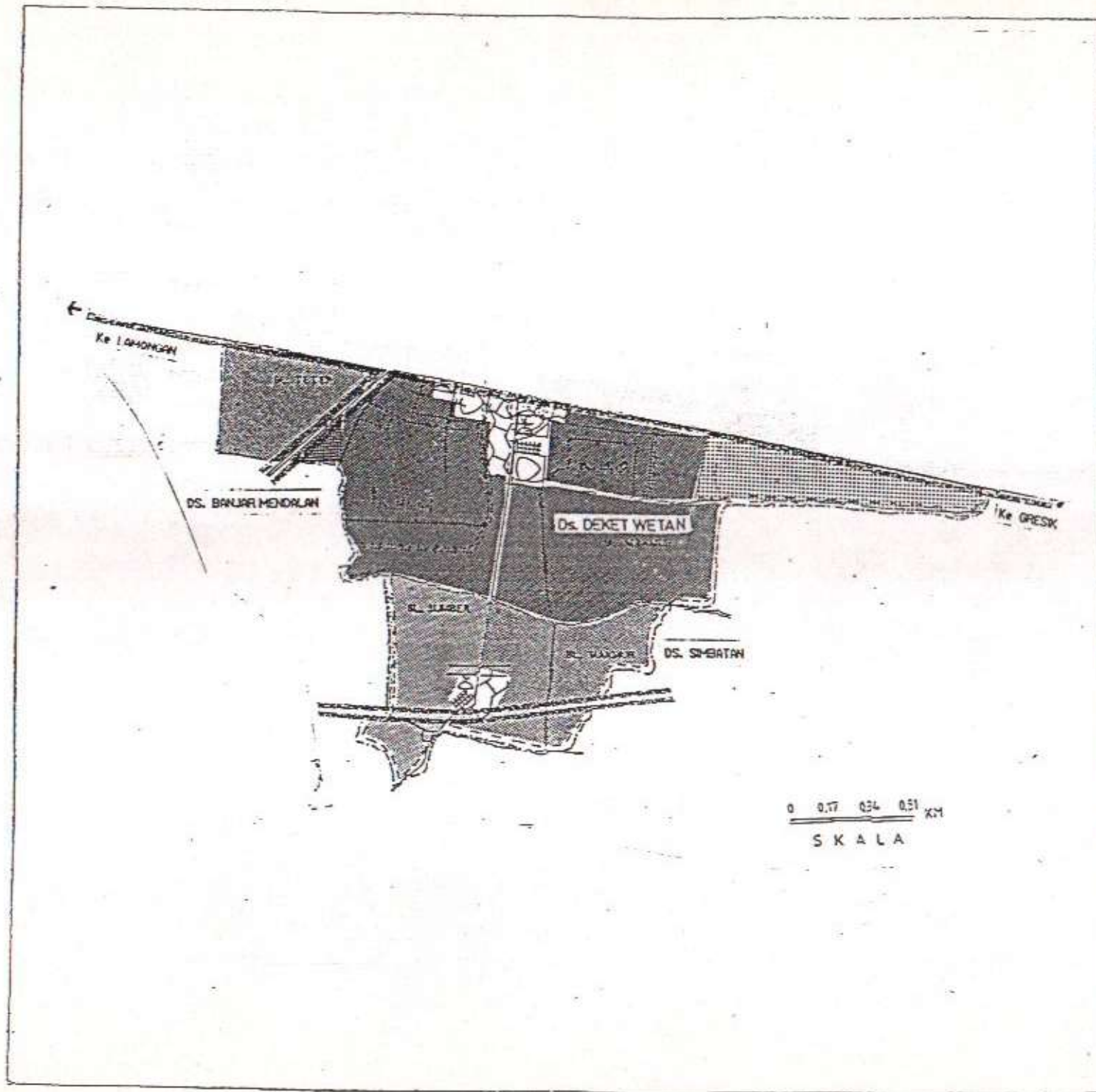
KETERANGAN

-  PERDAGANGAN GROSIR
-  PERDAGANGAN LOKAL
-  PEMERINTAHAN
-  PERKANTORAN
-  PENDIDIKAN
-  KESEHATAN
-  PERIBADATAN
-  BANGUNAN UMUM
-  INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
-  PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI
-  PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG
-  PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH
-  RTHK (Ruang Tata Hijau Kota)
-  CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA

GAHAR	: 1.4.4
ONGHAR	: A
DUPERSA	: A
NO	LENS
JML	LENS



RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

**RENCANA
PENGUNAAN LAHAN
DI BWK C**

KETERANGAN

- PERDAGANGAN GROSIR
- PERDAGANGAN LOKAL
- PEMERINTAHAN
- PERKANTORAN
- PENDIDIKAN
- KESEHATAN
- PERIBADATAN
- BANGUNAN UMUM
- INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
- PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI
- PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG
- PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH
- RTHK (Ruang Tata Hijau Kota)
- CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA	DIGAMBAR : 4.5
	DIGAMBAR :
	DIPERIKSA :
	NO LEMB
	JML LEMB

Deket dengan kota Karangbinangun. jalan utama di desa Rejosari, dan rencana jalan baru yang menembus desa Rejosari dengan jalan arteri primer.

- jalan lokal sekunder ditetapkan untuk jaringan jalan di dalam kawasan permukiman penduduk.
- rencana fungsi jalan pada bagian wilayah kota Timur (BWK B) dapat dilihat pada Gambar 4.7.
- untuk bagian wilayah kota Selatan (BWK C) fungsi jaringan jalan sekunder diatur sebagai berikut :
 - jalan arteri sekunder ditetapkan untuk jaringan jalan yang sekaligus merupakan jalan arteri primer.
 - jalan kolektor sekunder ditetapkan untuk jaringan jalan utama di desa Deket Wetan yang juga merupakan bagian dari jalan lingkar kota Lamongan.
 - jalan lokal sekunder ditetapkan untuk jaringan jalan di dalam kawasan permukiman penduduk.
 - rencana fungsi jalan pada bagian wilayah kota Selatan (BWK C) dapat dilihat pada Gambar 4.8.

Selanjutnya agar lebih teknis, maka perlu ditetapkan arahan dimensi jalan yang ditetapkan dalam klasifikasi jalan sesuai UU Jalan No 5 Tahun 1980 dan PP No 26 Tahun 1985, yaitu Daerah Manfaat Jalan (Damaja), Daerah Milik Jalan (DamiJa), dan Daerah Pengawasan Jalan (DawasJa). Kebutuhan dimensi jalan diperkirakan berdasarkan kondisi lebar eksisting, pengamatan volume lalu lintas, serta kemungkinan pengembangannya dimasa mendatang. Berikutnya dimensi jalan un-

tuk kota Deket ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- jalan arteri primer direncanakan dengan lebar Damaja 13 meter, DamiJa 18 meter, dan DawasJa 40 meter.
- jalan lokal primer Deket - Karangbinangun direncanakan dengan lebar Damaja 10 meter, DamiJa 12 meter, dan DawasJa 20 meter.
- jalan kolektor sekunder direncanakan dengan lebar Damaja 10 meter, DamiJa 12 meter, dan DawasJa 14 meter.
- jalan lokal sekunder direncanakan dengan lebar Damaja 8 meter, DamiJa 10 meter, dan DawasJa 12 meter.

Selanjutnya, arahan dimensi jaringan jalan untuk tiap kategori fungsi jalan pada kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Sirkulasi lalu lintas yang melalui kota Deket dapat tetap dipertahankan, yaitu sirkulasi lalu lintas angkutan umum antar kota yang melalui jalan arteri primer dan jalan lingkar serta sirkulasi angkutan antar kecamatan yang melalui jalan lokal primer dan jalan kolektor sekunder. Selanjutnya rencana penataan sirkulasi angkutan umum yang melintas kota Deket dan lokasi sub terminal dapat dilihat pada Gambar 4.10.



0 0.17 0.34 0.51 KM
S K A L A



PEMERINTAH KABUPATEN 17 - 15

DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA FUNGSI JALAN DI BWK A

KETERANGAN



JALAN ARTERI PRIMER /
ARTERI SEKUNDER



JALAN LOKAL PRIMER /
KOLEKTOR SEKUNDER



JALAN KOLEKTOR SEKUNDER



JALAN LOKAL SEKUNDER

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA

DAFTAR : 4.6

DIGAMBAR : *[Signature]*

DIPERIKSA : *[Signature]*

	NO	
	LEMB	
	JML	
	LEMB	



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA FUNGSI JALAN DI BWK B

KETERANGAN



JALAN ARTERI PRIMER /
ARTERI SEKUNDER



JALAN LOKAL PRIMER /
KOLEKTOR SEKUNDER



JALAN KOLEKTOR SEKUNDER



JALAN LOKAL SEKUNDER

SUMBER : HASIL RENCANA

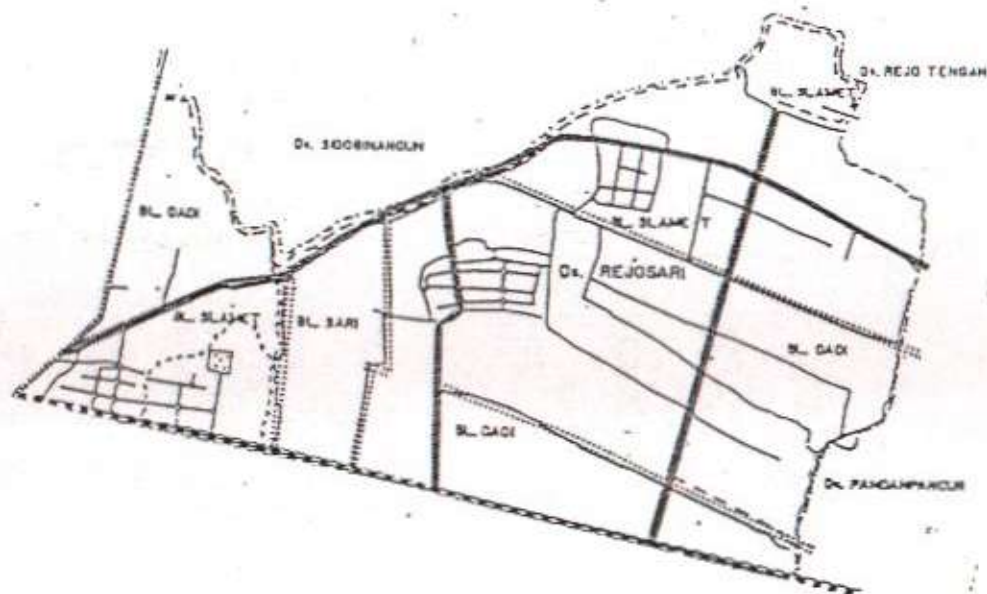
KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 4.7

DIGAMBAR : *[Signature]*

DIPERIKSA : *[Signature]*

	NO
	LEMB
	JAL
	LEMB



0 0.17 0.34 0.51 KM

SKALA



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA FUNGSI JALAN DI BWK C

KETERANGAN



JALAN ARTERI PRIMER /
ARTERI SEKUNDER



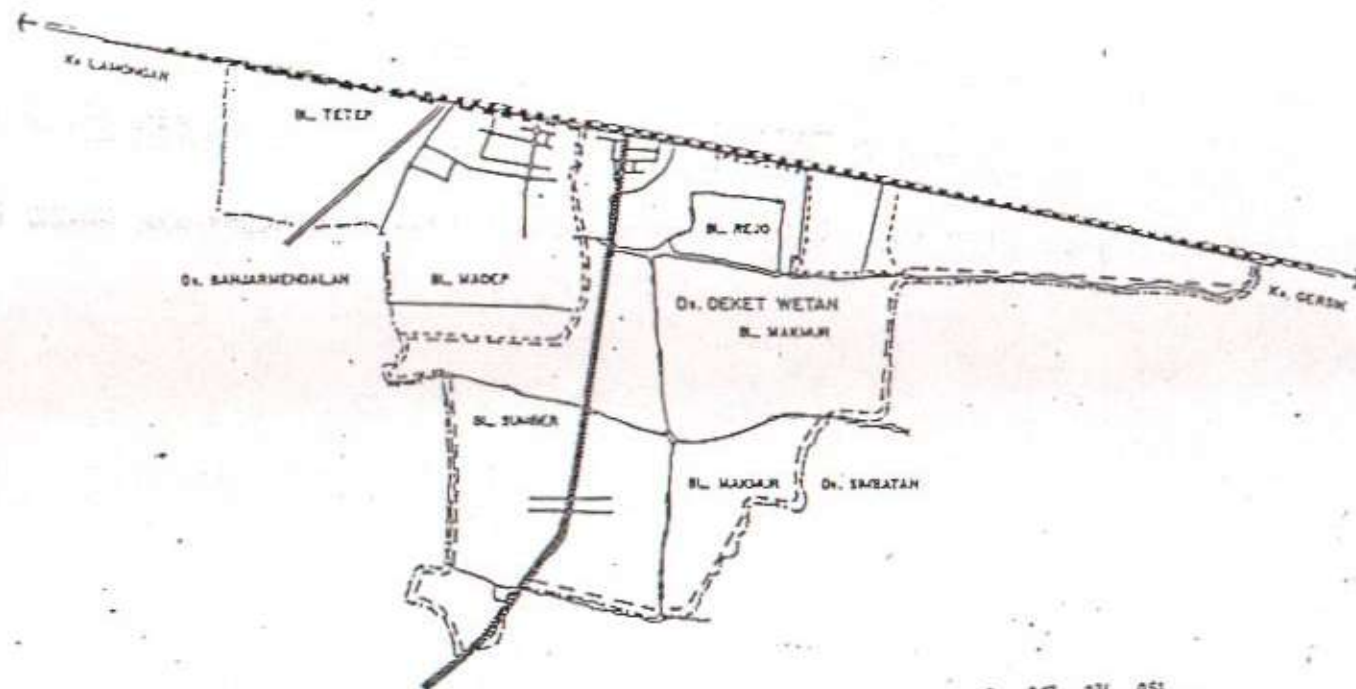
JALAN LOKAL PRIMER /
KOLEKTOR SEKUNDER



JALAN KOLEKTOR SEKUNDER



JALAN LOKAL SEKUNDER



0 0.17 0.34 0.51 KM
SKALA

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA	GAMBAR	:	4.8
	DIGAMBAR	:	
	DIPERIKSA	:	
	NO	:	
	LEMB	:	
	JML	:	
	LEMB	:	

PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA SIRKULASI ANGKUTAN UMUM

KETERANGAN



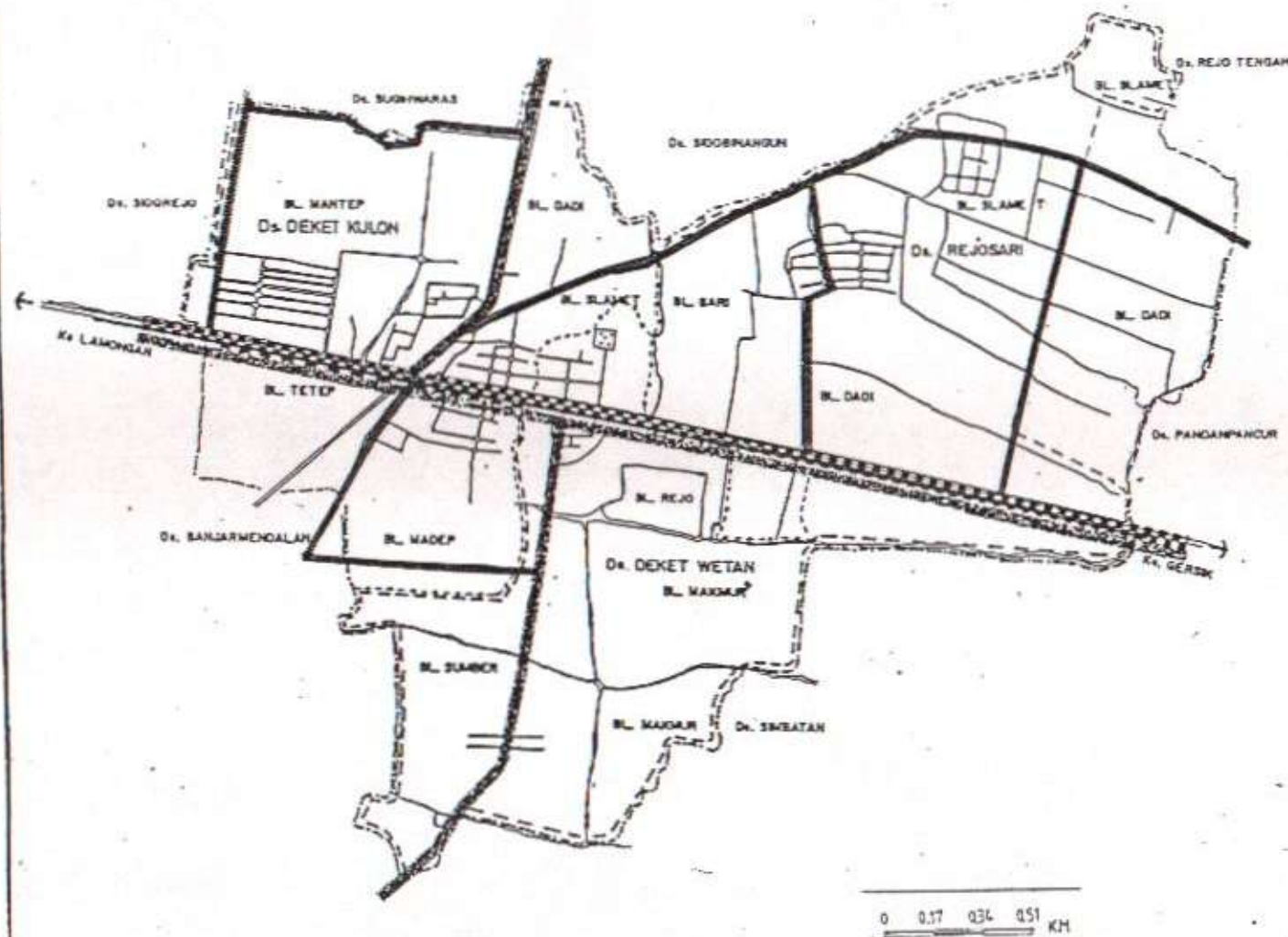
SIRKULASI ANGKUTAN
UMUM ANTAR KOTA



SIRKULASI ANGKUTAN
UMUM ANTAR KECAMATAN



SIRKULASI INTERNAL KOTA



SUMBER : Hasil Rencana

KODE / PETUNJUK PETA

CANEAR	: 14.10
--------	---------

CICAMBAR : 

DIPERMSA : 21



NO	
----	--

CE 48	MI
-------	----

LENS

4.3.5 Rencana Fasilitas Pelayanan Sosial Dan Utilitas BWK

Kebutuhan pengembangan pada tiap BWK di kota Deket sampai akhir tahun perencanaan dihitung berdasarkan basis perkiraan jumlah penduduk yang juga diproyeksikan sampai akhir tahun perencanaan. Kebutuhan pengembangan kota Deket dimanifestasikan ke dalam dua komponen utama, masing-masing kebutuhan fasilitas umum dan kebutuhan utilitas.

Kebutuhan fasilitas umum untuk tiap BWK di kota Deket diperinci atas beberapa jenis, masing-masing :

- fasilitas perumahan
- fasilitas pendidikan
- fasilitas kesehatan
- fasilitas perdagangan
- fasilitas peribadatan
- fasilitas kebudayaan dan rekreasi
- fasilitas ruang terbuka hijau
- fasilitas pelayanan umum

Sedangkan kebutuhan utilitas pada tiap BWK untuk kota Deket diperinci atas beberapa jenis, masing-masing :

- listrik
- air minum
- telepon
- penanganan sampah

Kebutuhan jumlah dan luasan masing-masing fasilitas umum dihitung berdasarkan standar penyediaan fasilitas umum

dari Departemen Pekerjaan Umum yang dituangkan dalam buku Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota. Standar tersebut bersifat umum, dalam arti hanya menyangkut komponen jenis, jumlah, dan luasan ruang yang dibutuhkan sementara komponen hirarki belum dibicarakan. Untuk lebih aplikatifnya, maka pada standar penyediaan fasilitas umum perkotaan tersebut ditambahkan informasi mengenai hirarki fasilitas umum yang dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut :

- fasilitas umum yang memiliki jangkauan pelayanan skala kota
- fasilitas umum yang memiliki jangkauan pelayanan skala bagian wilayah kota
- fasilitas umum yang memiliki jangkauan pelayanan skala lingkungan / lokal

Berdasarkan ukuran keluarga, komposisi jenis perumahan, dan ukuran lahan untuk tiap jenis perumahan, maka pada tahun 2013 mendatang, untuk tiap BWK di kota Deket dibutuhkan sarana perumahan dengan luasan lahan total sebagai berikut :

- kebutuhan lahan perumahan pada BWK A adalah 2,53 ha
- kebutuhan lahan perumahan pada BWK B adalah 12,08 ha
- kebutuhan lahan perumahan pada BWK C adalah 5,57 ha

Selanjutnya, perkiraan kebutuhan perumahan beserta luasannya menurut jenis rumah pada tiap BWK di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 4.1 - 4.3.

TABEL 4.1 KEBUTUHAN FASILITAS PERUMAHAN PADA BMK A

TAHUN	JUMLAH PEOK.	RUMAH-KECIL				RUMAH-SEDANG				RUMAH-BESAR				LUAS LAHAN (ha)
		JUMLAH KK	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS
1993	983	197	118	0.89	59	0.29	29	0.50	29	0.50	29	0.50	29	2.37
1998	1.011	202	121	0.91	61	0.32	31	0.50	31	0.50	31	0.50	31	2.32
2003	1.040	202	125	0.94	62	0.33	31	0.53	31	0.53	31	0.53	31	2.39
2008	1.069	214	128	0.96	64	0.36	32	0.55	32	0.55	32	0.55	32	2.47
2013	1.098	229	132	0.99	66	0.39	33	0.56	33	0.56	33	0.56	33	2.53

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.2 KEBUTUHAN FASILITAS PERUMAHAN PADA BMK B

TAHUN	JUMLAH PDDK.	RUMAH-KECIL				RUMAH-SEDANG				RUMAH-BESAR				LUAS LAHAN (ha)
		JUMLAH KK	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS
1993	4.700	940	564	4.23	282	4.23	94	2.35	94	2.35	94	2.35	94	10.81
1998	4.837	967	580	4.35	290	4.35	97	2.43	97	2.43	97	2.43	97	11.13
2003	4.975	995	597	4.48	299	4.49	99	2.48	99	2.48	99	2.48	99	11.44
2008	5.113	1.023	614	4.61	307	4.61	102	2.55	102	2.55	102	2.55	102	11.76
2013	5.251	1.050	630	4.73	315	4.73	105	2.63	105	2.63	105	2.63	105	12.08

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.3 KEBUTUHAN FASILITAS PERUMAHAN PADA BMK C

TAHUN	JUMLAH PDDK.	RUMAH-KECIL				RUMAH-SEDANG				RUMAH-BESAR				LUAS LAHAN (ha)
		JUMLAH KK	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS
1993	2.170	434	261	1.96	130	1.95	43	1.08	43	1.08	43	1.08	43	4.98
1998	2.234	447	269	2.02	134	2.01	45	1.13	45	1.13	45	1.13	45	5.15
2003	2.297	459	276	2.07	138	2.07	46	1.15	46	1.15	46	1.15	46	5.29
2008	2.361	472	283	2.12	142	2.13	47	1.18	47	1.18	47	1.18	47	5.43
2013	2.425	485	291	2.18	146	2.19	48	1.20	48	1.20	48	1.20	48	5.57

Sumber : hasil analisis

Fasilitas pendidikan yang secara umum dan sesuai untuk disediakan pada kawasan permukiman kota-kota Kecamatan adalah :

- Sekolah Taman Kanak-kanak
- Sekolah Dasar
- Sekolah Menengah Pertama
- Sekolah Menengah Atas

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas pendidikan, maka kebutuhan lahan bagi fasilitas pendidikan pada tiap BMK di kota Deket pada tahun 2013 diperkirakan sebagai berikut :

- kebutuhan lahan pendidikan pada BMK A adalah 0,32 ha
- kebutuhan lahan pendidikan pada BMK B adalah 2,13 ha
- kebutuhan lahan pendidikan pada BMK C adalah 1,22 ha

Selanjutnya, jumlah, jenis, dan luasan lahan yang dibutuhkan untuk menampung kebutuhan fasilitas pendidikan pada tiap BMK di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 4.4 - 4.6.

TABEL 4.4 KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN PADA BMK A

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TAMAN KANAK		SEKOLAH DASAR		SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		SEKOLAH MENENGAH ATAS		TOTAL LUAS LAHAN (ha)
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	
1993	983	1	0.12	1	0.20	0	0.00	0	0.00	0.32
1998	1.011	1	0.12	1	0.20	0	0.00	0	0.00	0.32
2003	1.040	1	0.12	1	0.20	0	0.00	0	0.00	0.32
2008	1.069	1	0.12	1	0.20	0	0.00	0	0.00	0.32
2013	1.098	1	0.12	1	0.20	0	0.00	0	0.00	0.32

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.5 KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN PADA BWK B

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TAMAN KANAK KANAK		SEKOLAH DASAR		SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		SEKOLAH MENENGAH ATAS		TOTAL LUAS LAHAN (ha)
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	
1993	4.700	6	0,72	3	0,60	1	0,27	1	0,27	1,86
1998	4.837	6	0,72	3	0,60	2	0,54	1	0,27	2,13
2003	4.975	6	0,72	3	0,60	2	0,54	1	0,27	2,13
2008	5.113	6	0,72	3	0,60	2	0,54	1	0,27	2,13
2013	5.251	6	0,72	3	0,60	2	0,54	1	0,27	2,13

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.6. KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN PADA BWK C

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TAMAN KANAK KANAK		SEKOLAH DASAR		SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		SEKOLAH MENENGAH ATAS		TOTAL LUAS LAHAN (ha)
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	
1993	2.170	3	0,36	1	0,20	1	0,27	1	0,27	1,10
1998	2.234	3	0,36	1	0,20	1	0,27	1	0,27	1,10
2003	2.297	3	0,36	1	0,20	1	0,27	1	0,27	1,10
2008	2.361	4	0,48	1	0,20	1	0,27	1	0,27	1,22
2013	2.425	4	0,48	1	0,20	1	0,27	1	0,27	1,22

Sumber : hasil analisis

Fasilitas perdagangan yang umumnya terdapat di lingkungan permukiman pada kota-kota kecamatan adalah:

- Pasar
- Kios / warung

- Toko
- Pusat pertokoan/perdagangan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas perdagangan, maka kebutuhan akan fasilitas perdagangan pada tiap BWK di kota Deket diperkirakan sebagai berikut :

- kebutuhan lahan perdagangan pada BWK A adalah 0,05 ha
- kebutuhan lahan perdagangan pada BWK B adalah 1,02 ha
- kebutuhan lahan perdagangan pada BWK C adalah 0,13 ha

Selanjutnya, kebutuhan jumlah, jenis, dan luasan lahan fasilitas perdagangan pada tiap BWK sampai akhir tahun perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4.7 - 4.9.

TABEL 4.7 KEBUTUHAN FASILITAS PERDAGANGAN PADA BWK A

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	WARUNG		TOKO		PUSAT PERDAGANGAN		TOTAL LUAS LAHAN (ha)
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	
1993	983	4	0,02	2	0,03	0	0,00	0,05
1998	1.011	4	0,02	2	0,03	0	0,00	0,05
2003	1.040	4	0,02	2	0,03	0	0,00	0,05
2008	1.069	4	0,02	2	0,03	0	0,00	0,05
2013	1.098	4	0,02	2	0,03	0	0,00	0,05

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.9 KEBUTUHAN FASILITAS PERDAGANGAN PADA BUK B

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	WAWUNG UNIT	LUAS UNIT	TOKO UNIT	PERDAGANGAN UNIT	PUSAT PERDAGANGAN UNIT	TOTAL LUAS LAHAN (ha)
1993	4.700	19	0.10	9	0.14	1	1.35
1998	4.837	13	0.10	9	0.14	1	1.35
2003	4.975	20	0.10	10	0.15	1	1.35
2008	5.113	20	0.10	10	0.15	1	1.35
2013	5.251	21	0.11	11	0.17	1	1.35

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.9 KEBUTUHAN FASILITAS PERDAGANGAN PADA BUK C

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	WAWUNG UNIT	LUAS UNIT	TOKO UNIT	PERDAGANGAN UNIT	PUSAT PERDAGANGAN UNIT	TOTAL LUAS LAHAN (ha)
1993	2.170	9	0.04	5	0.08	0	0.00
1998	2.234	9	0.05	5	0.08	0	0.00
2003	2.297	9	0.05	5	0.08	0	0.00
2008	2.361	10	0.05	5	0.08	0	0.00
2013	2.425	10	0.05	5	0.08	0	0.00

Sumber : hasil analisis

Fasilitas kesehatan yang secara umum dan sesuai terdapat dalam lingkungan permukiman kota-kota kecamatan adalah :

- Balai Pengobatan
- Puskesmas
- KIA dan Rumah Bersalin

- Rumah Sakit
- Apotik
- Tempat Praktek Dokter

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas kesehatan, maka kebutuhan jumlah dan kebutuhan lahan bagi fasilitas kesehatan pada tiap BUK di kota Deket sampai akhir tahun 2013 diperkirakan sebagai berikut :

- kebutuhan lahan kesehatan pada BUK A adalah 0.09 ha
- kebutuhan lahan kesehatan pada BUK B adalah 0.47 ha
- kebutuhan lahan kesehatan pada BUK C adalah 0.25 ha

Selanjutnya, jumlah, jenis, dan luasan lahan untuk fasilitas kesehatan pada tiap BUK di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 4.10 - 4.12.

Fasilitas peribadatan yang biasanya terdapat di lingkungan permukiman pada kota-kota kecamatan adalah :

- Sarana Ibadah bagi pemeluk agama Islam
- Sarana Ibadah bagi pemeluk agama lainnya

Berdasarkan ketentuan ketentuan penyediaan fasilitas peribadatan, maka kebutuhan fasilitas peribadatan pada tiap BUK di kota Deket sampai tahun 2013 diperkirakan sebagai berikut :

- kebutuhan lahan peribadatan pada BUK A adalah 0.29 ha
- kebutuhan lahan peribadatan pada BUK B adalah 1.80 ha
- kebutuhan lahan peribadatan pada BUK C adalah 1.14 ha

TABEL 4.10 KEBUTUHAN FASILITAS KESIHATAN PADA BMK A

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	BKIA PUSKESMAS										TOTAL LUAS LAHAN (ha)	
		BALAI PENG BATAN	DAN RUMAH BERSALIN	BALAI PENG BATAN	RUMAH SAKIT	TEMPAT PRAKTEK DOKTER	APOTIK						
UNIT LUAS UNIT LUAS UNIT LUAS UNIT TT LUAS UNIT LUAS UNIT LUAS													
1993	983	1	0.03	1	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.04	
1996	1.011	1	0.03	1	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.02	1	0.04
2003	1.040	1	0.03	1	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.02	1	0.04
2008	1.069	1	0.03	1	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.02	1	0.04
2013	1.098	1	0.03	1	0.01	0	0.00	0	0.00	1	0.02	1	0.04

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.11 KEBUTUHAN FASILITAS KESIHATAN PADA BMK B

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	BKIA PUSKESMAS										TOTAL		
		BALAI PENGO BATAN	DAN REMAH BERSALIN	BALAI PENGO BATAN	REMAH SAKIT	TERPAT PRATEK DOKTER	APOTIK	LUAS	LAHAN					
UNIT LUAS UNIT LUAS UNIT LUAS UNIT TT LUAS UNIT LUAS UNIT LUAS														
1993	4.700	5	0,15	2	0,05	1	0,12	0	0,00	2	0,03	2	0,07	0,42
1998	4.837	5	0,15	2	0,05	1	0,12	0	0,00	2	0,03	2	0,07	0,42
2003	4.975	5	0,15	2	0,05	1	0,12	0	0,00	2	0,03	2	0,07	0,42
2008	5.113	5	0,15	2	0,05	1	0,12	0	0,00	3	0,05	3	0,11	0,47
2013	5.251	5	0,15	2	0,05	1	0,12	0	0,00	3	0,05	3	0,11	0,47

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.12 KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN PADA EMK C

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	BKIA				PUSKESMAS				TEMPAT PRAKTEK DOKTER				TOTAL LUAS LAHAN (ha)
		BALAI PENGO BATAN	DAN RUMAH BERSALIN	BALAI PENGO BATAN	RUMAH SAKIT	BALAI PENGO BATAN	RUMAH SAKIT	BALAI PENGO BATAN	RUMAH SAKIT	BALAI PENGO BATAN	RUMAH SAKIT	BALAI PENGO BATAN	RUMAH SAKIT	
1993	2.170	2	0,06	1	0,02	1	0,12	0	0	1	0,02	2	0,07	0,29
1998	2.234	2	0,06	1	0,02	1	0,12	0	0	1	0,02	1	0,04	0,25
2003	2.297	2	0,06	1	0,02	1	0,12	0	0	1	0,02	1	0,04	0,25
2008	2.361	3	0,09	1	0,02	1	0,12	0	0	1	0,02	0	0,00	0,25
2013	2.425	3	0,09	1	0,02	1	0,12	0	0	1	0,02	0	0,00	0,25

Sumber : hasil analisis

Lengan demikian maka kebutuhan jumlah, jenis, dan luasan lahan bagi fasilitas peribadatan pada tiap BWK untuk Kota Deket dapat dilihat pada Tabel 4.13 - 4.15.

TABEL 4.13 KEBUTUHAN FASILITAS PERIBADATAN PADA BWK A

TAHUN	Jumlah Penduduk	MESJID				LUAS LAHAN (ha)			
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	LAIN	LAHAN		
1993	983	1	0,18	2	0,06	0,06	0,28		
1998	1.011	1	0,18	2	0,06	0,06	0,29		
2003	1.040	1	0,18	2	0,06	0,06	0,29		
2008	1.069	1	0,18	2	0,06	0,06	0,29		
2013	1.098	1	0,18	2	0,06	0,06	0,29		

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.14 KEBUTUHAN FASILITAS PERIBADATAN PADA BWK B

TAHUN	Jumlah Penduduk	MESJID				LUAS LAHAN (ha)			
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	LAIN	LAHAN		
1993	4.700	6	1,05	12	0,36	0,35	1,76		
1998	4.837	6	1,05	12	0,36	0,35	1,76		
2003	4.975	6	1,05	12	0,36	0,35	1,76		
2008	5.113	6	1,05	12	0,36	0,35	1,76		
2013	5.251	6	1,05	13	0,39	0,36	1,80		

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.15 KEBUTUHAN FASILITAS PERIBADATAN PADA BWK C

TAHUN	Jumlah Penduduk	MESJID				LUAS LAHAN (ha)			
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	LAIN	LAHAN		
1993	2.170	3	0,53	6	0,18	0,18	0,88		
1998	2.234	3	0,53	6	0,18	0,18	0,88		
2003	2.297	3	0,53	7	0,21	0,18	0,92		
2008	2.361	4	0,70	7	0,21	0,23	1,14		
2013	2.425	4	0,70	7	0,21	0,23	1,14		

Sumber : hasil analisis

Jenis fasilitas kebudayaan dan rekreasi yang umumnya terdapat dan sesuai dalam lingkungan permukaan kota-kota kecamatan adalah :

- Balai pertemuan
- Gedung serbaguna
- Gedung bioskop
- Gedung kesenian
- Gedung perpustakaan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas kebudayaan dan rekreasi, maka kebutuhan fasilitas kebudayaan dan rekreasi pada tiap BWK di Kota Deket diperkirakan sebagai berikut :

- kebutuhan lahan kebudayaan dan rekreasi pada BWK A adalah 0,00 ha
- kebutuhan lahan kebudayaan dan rekreasi pada BWK B adalah 0,75 ha

- kebutuhan lahan kebudayaan dan rekreasi pada BKK C adalah 0,12 ha

Dengan demikian, maka kebutuhan jumlah, jenis, dan luasan lahan fasilitas kebudayaan dan rekreasi pada tiap BKK di Kota Deket dapat dilihat pada Tabel 4.16 - 4.18.

TABEL 4.16 KEBUTUHAN FASILITAS KEBUDAYAAN DAN REKREASI PADA BKK A

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	GEDEUNG					GEDEUNG		TOTAL LUAS LAHAN (ha)
		BALAI PERTEMUAN	SERBA GUNA	GEDUNG BIOSKOP	GEDUNG KESENIAN	PERPUS TAKSIAN			
		UNIT LUAS	UNIT LUAS	UNIT LUAS	UNIT LUAS	UNIT LUAS			
1993	983	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,000	
1998	1.011	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,000	
2003	1.040	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,000	
2008	1.069	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,000	
2013	1.098	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,000	

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.17 KEBUTUHAN FASILITAS KEBUDAYAAN DAN REKREASI PADA BKK B

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	GEDEUNG					TOTAL LUAS LAHAN (ha)			
		BALAI PERTEMUAN	SERBA GUNA	GEDUNG BLOKOP	GEDUNG KESENIAN	GEDUNG PERPUS TAKAN				
		UNIT	LUAS	UNIT	LUAS	UNIT		LUAS	UNIT	LUAS
1993	4.700	5	0,15	1	0,10	1	0,20	1	0,10	0,750
1998	4.837	5	0,15	1	0,10	1	0,20	1	0,10	0,750
2003	4.975	5	0,15	1	0,10	1	0,20	1	0,10	0,750
2008	5.113	5	0,15	1	0,10	1	0,20	1	0,10	0,750
2013	5.251	5	0,15	1	0,10	1	0,20	1	0,10	0,750

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.18 KEBUTUHAN FASILITAS KEBUDAYAAN DAN REKREASI PADA BKK C

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	BALAI PERTEMUAN	GEDEUNG		GEDEUNG BLOKOP	GEDEUNG KESENIAN	GEDEUNG		TOTAL LUAS LAHAN
			SERBA GUNA	UNIT LUAS			UNIT LUAS	UNIT LUAS	
1993	2.170	3	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.09
1998	2.234	3	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.09
2003	2.297	3	0.09	0	0.00	0	0.00	0	0.09
2008	2.361	4	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.12
2013	2.425	4	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.12

Sumber : hasil analisis

Fasilitas ruang terbuka hijau yang umumnya terdapat di lingkungan permukiman adalah taman, lapangan olah raga, dan juga fasilitas makam. Pengaturan kebutuhan lahan dilakukan dengan sistem berjenjang sebagai berikut :

- untuk lingkup lokal disediakan fasilitas dengan dukungan 250 penduduk yang membutuhkan lahan seluas 250 m² per unit fasilitas.

- untuk lingkup lingkungan disediakan fasilitas dengan dukungan 2500 penduduk yang membutuhkan lahan seluas 1250 m² per unit fasilitas.

- untuk lingkup kota disediakan fasilitas dengan dukungan 15.000 penduduk yang membutuhkan lahan seluas 9.000 m² per unit fasilitas.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas ruang terbuka hijau, maka kebutuhan akan fasilitas ruang

terbuka hijau untuk tiap BWK di kota Deket sampai tahun 2013 diperkirakan sebagai berikut :

- kebutuhan lahan ruang terbuka hijau pada BWK A adalah 0,10 ha
- kebutuhan lahan ruang terbuka hijau pada BWK B adalah 1,68 ha
- kebutuhan lahan ruang terbuka hijau pada BWK C adalah 0,50 ha

Dengan demikian maka untuk menampung perkembangan kebutuhan akan fasilitas olahraga dan pertamanan pada tiap BWK di kota Deket dapat dilihat perincian pada Tabel 4.19 - 4.21.

TABEL 4.19

KEBUTUHAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU PADA BWK A

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TAMAN LOKAL	TAMAN LINGK	TAMAN KOTA	LUAS (ha)
1993	983	0,10	0,00	0,00	0,10
1998	1.011	0,10	0,00	0,00	0,10
2003	1.040	0,10	0,00	0,00	0,10
2008	1.069	0,10	0,00	0,00	0,10
2013	1.098	0,10	0,00	0,00	0,10

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.20

KEBUTUHAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU PADA BWK B

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TAMAN LOKAL	TAMAN LINGK	TAMAN KOTA	LUAS (ha)
1993	4.700	0,48	0,25	0,90	1,63
1998	4.837	0,48	0,25	0,90	1,63
2003	4.975	0,50	0,25	0,90	1,65
2008	5.113	0,50	0,25	0,90	1,65
2013	5.251	0,53	0,25	0,90	1,68

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.21

KEBUTUHAN FASILITAS RUANG TERBUKA HIJAU PADA BWK C

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	TAMAN LOKAL	TAMAN LINGK	TAMAN KOTA	LUAS (ha)
1993	2.170	0,20	0,13	0,00	0,33
1998	2.234	0,23	0,13	0,00	0,35
2003	2.297	0,22	0,13	0,00	0,35
2008	2.361	0,25	0,13	0,00	0,38
2013	2.425	0,25	0,25	0,00	0,50

Sumber : hasil analisis

Jenis fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum yang biasanya terdapat di lingkungan permukiman pada kota-kota kecamatan adalah :

- Pos hansip
- Parkir umum

- Balai Rukun Warga
- Kantor Kelurahan
- Pos Polisi
- Kantor Pemadam Kebakaran
- Kantor Polisi
- Kantor Kecamatan
- Kantor Pos Cabang

Berdasarkan ketentuan-ketentuan penyediaan fasilitas pemerintahan dan bangunan umum, maka kebutuhan fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum pada tiap BWK di kota Deket diperkirakan sebagai berikut :

- kebutuhan lahan pemerintahan dan bangunan umum pada BWK A adalah 1,647 ha
- kebutuhan lahan pemerintahan dan bangunan umum pada BWK B adalah 7,877 ha
- kebutuhan lahan pemerintahan dan bangunan umum pada BWK C adalah 3,639 ha

Dengan demikian, maka jumlah, jenis, dan kebutuhan luasan lahan yang dibutuhkan bagi perkembangan kebutuhan fasilitas pelayanan umum pada tiap BWK secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.22 - 4.24.

TABEL 4.22 KEBUTUHAN SARANA PELAYANAN UMUM PADA BWK A

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	SARANA PELAYANAN TINGKAT LINGKUNGAN	SARANA PELAYANAN TINGKAT KOTA	JUMLAH KEBUTUHAN LAHAN (ha)
1993	983	0,492	0,983	1,475
1998	1.011	0,508	1,011	1,517
2003	1.040	0,520	1,040	1,560
2008	1.069	0,535	1,069	1,604
2013	1.098	0,549	1,098	1,647

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.23 KEBUTUHAN SARANA PELAYANAN UMUM PADA BWK B

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	SARANA PELAYANAN TINGKAT LINGKUNGAN	SARANA PELAYANAN TINGKAT KOTA	JUMLAH KEBUTUHAN LAHAN (ha)
1993	4.700	2,350	4,700	7,050
1998	4.837	2,419	4,837	7,256
2003	4.975	2,488	4,975	7,462
2008	5.113	2,557	5,113	7,670
2013	5.251	2,626	5,251	7,877

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.24 KEBUTUHAN SARANA PELAYANAN UMUM PADA BWK C

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	SARANA PELAYANAN TINGKAT LINGKUNGAN	SARANA PELAYANAN TINGKAT KOTA	JUMLAH KEBUTUHAN LAHAN (ha)
1993	2.170	1.086	2.171	3.257
1998	2.234	1.118	2.236	3.354
2003	2.297	1.150	2.299	3.449
2008	2.361	1.181	2.363	3.544
2013	2.425	1.213	2.426	3.639

Sumber : hasil analisis

Selanjutnya berdasarkan perhitungan perkiraan kebutuhan jumlah dan kebutuhan luasan untuk tiap jenis fasilitas umum di tiap BWK sampai akhir tahun perencanaan (tahun 2013), maka akan dapat ditentukan kebutuhan total ruang atau lahan bagi pengembangan pada tiap BWK di kota Deket dengan perincian sebagai berikut :

- kebutuhan pengembangan pada BWK A adalah 5,032 ha
- kebutuhan pengembangan pada BWK B adalah 28,399 ha
- kebutuhan pengembangan pada BWK C adalah 12,563 ha

Kebutuhan lahan total bagi pengembangan pada tiap-tiap BWK kota Deket selanjutnya akan lebih jelas pada Tabel 4.25 - 4.27.

Kebutuhan fasilitas kelistrikan untuk tiap BWK di kota Deket diperkirakan berdasarkan rata-rata konsumsi listrik pada tiap rumah tangga perkotaan, khususnya untuk kota-kota yang berstatus kota kecamatan atau kota dengan populasi kurang dari 100.000 jiwa. Kebutuhan listrik non domestik yang biasanya digunakan untuk penerangan jalan umum, fasilitas ekonomi maupun fasilitas sosial, dan kebutuhan non domestik lainnya diperkirakan sekitar 25 persen dari total kebutuhan listrik domestik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tahun 2013 mendatang, jumlah daya yang diperlukan untuk mensupply kebutuhan fasilitas kelistrikan bagi tiap BWK di kota Deket dapat dilihat pada Tabel 4.28 - 4.30.

TABEL 4.28 KEBUTUHAN FASILITAS KELISTRIKAN PADA BWK A

TAHUN	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Listrik Domestik			Kebutuhan Listrik Non Domestik	Total Kebutuhan (kva)
		R. Kecil	R. Sedang	R. Besar		
1993	983	63	63	20	33	165
1998	1.011	64	64	26	34	168
2003	1.040	66	66	27	35	173
2008	1.069	67	67	28	36	178
2013	1.098	69	69	28	37	183

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.25 KEBUTUHAN LAHAN BAGI PENGEMBANGAN KOTA PADA BWK A

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS PERUMAHAN	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PERDAGANGAN	FASILITAS PERIBADATAN	FASILITAS KESEHATAN	FASILITAS KEBUDAYAAN	FASILITAS PERTAMANAN	FASILITAS UMUM LAIN	JUMLAH (ha)
1993	983	2.270	0,320	0,050	0,294	0,040	0,000	0,100	1,475	4,548
1998	1.011	2,323	0,320	0,050	0,294	0,090	0,000	0,100	1,517	4,693
2003	1.040	2,393	0,320	0,050	0,294	0,090	0,000	0,100	1,560	4,807
2008	1.069	2,470	0,320	0,050	0,294	0,091	0,000	0,100	1,604	4,928
2013	1.098	2,530	0,320	0,050	0,294	0,091	0,000	0,100	1,647	5,032

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.26 KEBUTUHAN LAHAN BAGI PENGEMBANGAN KOTA PADA BWK B

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS PERUMAHAN	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PERDAGANGAN	FASILITAS PERIBADATAN	FASILITAS KESEHATAN	FASILITAS KEBUDAYAAN	FASILITAS PERTAMANAN	FASILITAS UMUM LAIN	JUMLAH (ha)
1993	4.700	10,810	1,860	1,580	1,763	0,417	0,750	1,625	7,050	25,855
1998	4.837	11,125	2,130	1,580	1,763	0,418	0,750	1,625	7,256	28,646
2003	4.975	11,438	2,130	1,600	1,763	0,420	0,750	1,650	7,462	27,212
2008	5.113	11,760	2,130	1,600	1,763	0,471	0,750	1,650	7,670	27,793
2013	5.251	12,075	2,130	1,620	1,800	0,473	0,750	1,675	7,877	28,399

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.27 KEBUTUHAN LAHAN BAGI PENGEMBANGAN KOTA PADA BWK C

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	FASILITAS PERUMAHAN	FASILITAS PENDIDIKAN	FASILITAS PERDAGANGAN	FASILITAS PERIBADATAN	FASILITAS KESEHATAN	FASILITAS KEBUDAYAAN	FASILITAS PERTAMANAN	FASILITAS UMUM LAIN	JUMLAH (ha)
1993	2.170	4,983	1,100	0,115	0,881	0,287	0,090	0,325	3,257	11,037
1998	2.234	5,153	1,100	0,120	0,881	0,252	0,090	0,350	3,354	11,300
2003	2.297	5,290	1,100	0,120	0,919	0,253	0,090	0,350	3,449	11,570
2008	2.361	5,428	1,220	0,125	1,138	0,249	0,120	0,375	3,544	12,198
2013	2.425	5,573	1,220	0,125	1,138	0,249	0,120	0,500	3,639	12,563

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.29 KEBUTUHAN FASILITAS KELISTRIKAN PADA BWK B

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN LISTRIK DOMESTIK			KEBUTUHAN LISTRIK NON DOMESTIK	TOTAL KEBUTUHAN (kva)
		R. KECIL	R. SEDANG	R. BESAR		
1993	4.700	253	253	122	157	785
1998	4.837	261	261	126	162	810
2003	4.975	268	269	128	166	831
2008	5.113	276	276	132	171	855
2013	5.251	283	283	136	176	878

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.30 KEBUTUHAN FASILITAS KELISTRIKAN PADA BWK C

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN LISTRIK DOMESTIK			KEBUTUHAN LISTRIK NON DOMESTIK	TOTAL KEBUTUHAN (kva)
		R. KECIL	R. SEDANG	R. BESAR		
1993	2.170	117	117	55	72	361
1998	2.234	121	120	58	75	374
2003	2.297	124	124	59	77	384
2008	2.361	127	127	61	79	394
2013	2.425	130	131	62	81	404

Sumber : hasil analisis

Kebutuhan air minum bagi tiap BWK di kota Deket diperkirakan berdasarkan angka rata-rata konsumsi air minum penduduk perkotaan, khususnya untuk kota-kota yang berstatus kota kecamatan atau kota-kota dengan populasi di bawah 100.000 jiwa, yaitu sebesar 75 liter per orang per hari. Kebutuhan air minum non domestik diperkirakan mencapai volume 25 persen dari total kebutuhan air minum domestik.

Faktor kehilangan (losses) diperkirakan juga, yaitu sebesar 35 persen dari total kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik.

Dengan demikian, maka pada tahun 2013 mendatang, kebutuhan volume dan debit air bersih pada tiap BWK kota Deket dapat dilihat pada Tabel 4.31 - 4.33.

TABEL 4.31 KEBUTUHAN AIR MINUM PADA BWK A

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN VOLUME (liter/hari)			KEBUTUHAN VOLUME TOTAL (ltr/hari)	KEBUTUHAN DEBIT (ltr/dtk)
		DOMESTIK	NON DOMESTIK	LOSSES		
1993	983	73.725	18.431	32.255	124.411	1.440
1998	1.011	75.825	18.956	33.173	127.955	1.481
2003	1.040	78.000	19.500	34.125	131.625	1.523
2008	1.069	80.175	20.044	35.077	135.295	1.566
2013	1.098	82.350	20.588	36.028	138.966	1.608

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.32 KEBUTUHAN AIR MINUM PADA BWK B

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN VOLUME (liter/hari)			KEBUTUHAN VOLUME TOTAL (ltr/hari)	KEBUTUHAN DEBIT (ltr/dtk)
		DOMESTIK	NON DOMESTIK	LOSSES		
1993	4.700	352.500	88.125	154.219	594.844	6.885
1998	4.837	362.775	90.694	158.714	612.183	7.085
2003	4.975	373.125	93.281	163.242	629.648	7.288
2008	5.113	383.475	95.869	167.770	647.114	7.490
2013	5.251	393.825	98.456	172.298	664.580	7.692

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.33 KEBUTUHAN AIR MINUM PADA BWK C

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN VOLUME (liter/hari)			KEBUTUHAN VOLUME TOTAL (ltr/hari)	KEBUTUHAN DEBIT (ltr/dtk)
		DOMESTIK	NON DOMESTIK	LOSSES		
1993	2.170	162.750	40.688	71.203	274.641	3.179
1998	2.234	167.550	41.888	73.303	282.741	3.272
2003	2.297	172.275	43.069	75.370	290.714	3.365
2008	2.361	177.075	44.289	77.470	298.814	3.458
2013	2.425	181.875	45.469	79.570	306.914	3.552

Sumber : hasil analisis

Kebutuhan telepon sampai tahun 2013 untuk tiap BWK kota Deket diperkirakan berdasarkan asumsi bahwa fasilitas telephone dibutuhkan oleh rumah berkapling besar. Kebutuhan telephone non domestik yang dibutuhkan bagi telepon umum dan untuk fasilitas ekonomi serta fasilitas sosial juga perlu untuk diperkirakan. Kebutuhan telepon umum diperkirakan sebesar 1 buah untuk melayani 1.000 penduduk sedangkan kebutuhan telepon untuk memenuhi komunikasi fasilitas sosial dan ekonomi diperkirakan sebesar 25 persen dari kebutuhan telepon domestik.

Dengan demikian jumlah kebutuhan fasilitas telepon untuk tahun 2013 pada tiap BWK di kota Deket secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.34 - 4.36.

TABEL 4.34 KEBUTUHAN FASILITAS TELEPON PADA BWK A

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	RUMAH TANGGA	TELEPON UMUM	KOMER SIAL	JUMLAH
1993	983	197	79	1	20	100
1998	1.011	202	81	1	20	102
2003	1.040	208	83	1	21	105
2008	1.069	214	86	1	22	109
2013	1.098	220	88	1	22	111

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.35 KEBUTUHAN FASILITAS TELEPON PADA BWK B

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	RUMAH TANGGA	TELEPON UMUM	KOMER SIAL	JUMLAH
1993	4.700	940	376	5	94	475
1998	4.837	967	387	5	97	489
2003	4.975	995	398	5	100	502
2008	5.113	1.023	409	5	102	516
2013	5.251	1.050	420	5	105	530

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.36 KEBUTUHAN FASILITAS TELEPON PADA BWK C

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	RUMAH TANGGA	TELEPON UMUM	KOMER SIAL	JUMLAH
1993	2.170	434	173	2	43	218
1998	2.234	447	179	2	45	226
2003	2.297	459	184	2	46	232
2008	2.361	472	189	2	47	239
2013	2.425	485	194	2	49	245

Sumber : hasil analisis

Perkiraan jumlah sarana pengangkutan sampah dilakukan berdasarkan angka rata-rata volume produksi sampah per kapita untuk kota-kota dengan populasi di bawah 100.000 jiwa, yaitu sekitar 2,3 liter per orang per hari.

Sistem penanganan sampah pada lokasi pembuangan akhir dianjurkan menggunakan sistem open dumping pada awalnya dan menggunakan sistem sanitary landfill minimal pada akhir Re-pelita IX (tahun 2013). Sarana pengangkutan sampah yang cocok untuk menangani masalah permasalahan pada kota-kota kecamatan paling tidak adalah :

- gerobak sampah dengan kapasitas 1 m³
- truk sampah dengan kapasitas 6 m³
- tempat pembuangan sementara dengan kapasitas 10 m³ sampah atau dengan luasan lahan minimal 15 m²
- tempat pembuangan akhir yang sanggup menampung pembuangan sampah dengan volume sekitar 30.000 - 40.000 liter atau dengan luasan areal antara 50 - 100 m²

Adapun jumlah kebutuhan sarana pengangkutan sampah untuk tiap BMK kota Deket sampai tahun 2013 yang diperinci per jenis sarana pengangkutan sampah selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.37 - 4.40.

TABEL 4.37 KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN SAMPAH PADA BMK A

TAHUN	JMLAH PENDUDUK	VOLUME SAMPAH (lt/hari)	JMLAH GEROBAK			JMLAH TPS			JMLAH TRUK		
			1-rlt	2-rlt	3-rlt	10 m ³	1-rlt	2-rlt	3-rlt	10 m ³	1-rlt
1993	963	2.949	2	1	0	0	0	0	0	0	0
1998	1.011	3.033	3	1	1	0	0	0	0	0	0
2003	1.040	3.120	3	1	1	0	0	0	0	0	0
2008	1.069	3.207	3	1	1	0	0	0	0	0	0
2013	1.098	3.294	3	1	1	0	0	0	0	0	0

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.38 KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN SAMPAH PADA BMK B

TAHUN	JMLAH PENDUDUK	VOLUME SAMPAH (lt/hari)	JMLAH GEROBAK			JMLAH TPS			JMLAH TRUK		
			1-rlt	2-rlt	3-rlt	10 m ³	1-rlt	2-rlt	3-rlt	10 m ³	1-rlt
1993	4.700	14.100	14	7	4	1	2	1	0	0	0
1998	4.837	14.511	14	7	4	1	2	1	0	0	0
2003	4.975	14.925	14	7	4	1	2	1	0	0	0
2008	5.113	15.339	15	7	4	1	2	1	0	0	0
2013	5.251	15.753	15	7	4	1	2	1	0	0	0

Sumber : hasil analisis

TABEL 4.39 KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN SAMPAH PADA BMK C

TAHUN	JMLAH PENDUDUK	VOLUME SAMPAH (lt/hari)	JMLAH GEROBAK			JMLAH TPS			JMLAH TRUK		
			1-rlt	2-rlt	3-rlt	10 m ³	1-rlt	2-rlt	3-rlt	10 m ³	1-rlt
1993	2.170	6.513	7	3	3	1	1	0	1	1	1
1998	2.234	6.708	7	4	3	1	2	1	1	1	1
2003	2.297	6.897	7	4	3	1	2	1	1	1	1
2008	2.361	7.089	7	4	3	1	2	1	1	1	1
2013	2.425	7.278	8	5	3	1	2	1	1	1	1

Sumber : hasil analisis

4.3.6 Rencana Utilitas RWE

Rencana utilitas pada kota Deket meliputi rencana utilitas air minum, rencana utilitas air buangan dan hujan, rencana utilitas pembuangan sampah, serta rencana utilitas listrik dan telepon.

4.3.6.1 Air Minum

Kebutuhan air minum bagi kota Deket diperkirakan berdasarkan angka rata-rata konsumsi air minum penduduk perkotaan, khususnya untuk kota-kota yang berstatus kota kecamatan atau kota-kota dengan populasi dibawah 100.000 jiwa. Dengan demikian, maka pada tahun 2013 mendatang, diperlukan supply air bersih sejumlah lebih kurang 1,1 juta liter per hari yang membutuhkan debit sejumlah 12 liter per detik.

Perencanaan jaringan distribusi pipa air bersih ditetapkan dengan beberapa kriteria sebagai berikut :

- sistem jaringan distribusi sedapat mungkin dibuat dengan sistem tertutup atau melingkar untuk mendapatkan pemerataan dan keseimbangan tekanan pada setiap titik pengambilan
- perencanaan jaringan pipa distribusi sekunder didasarkan pada penggunaan air pada saat jam puncak dengan faktor 1,5 kali kebutuhan rata-rata, sedangkan main ring diambil 1,25 kali kebutuhan rata-rata yang merata untuk setiap pipa

- tekanan air sisa pada titik pengambilan tidak boleh kurang dari 15 m
- kecepatan air ialah 0,3 - 2,0 m/detik

Untuk kota Deket, sumber air baku yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih direncanakan untuk menyambung dengan sistem jaringan air bersih kota Lamongan karena dirasakan tidak efisien apabila direncanakan sistem penyediaan air bersih secara individual mengingat lokasinya berbatasan langsung dengan wilayah kota Lamongan. Untuk pengembangan bahan baku kebutuhan air bersih selanjutnya, apabila dirasa kurang mencukupi, maka dapat dilakukan studi lebih lanjut yang lebih detail dan bekerjasama dengan P2AT dalam mencari sumber-sumber air baku bagi kebutuhan air bersih kota Deket.

Jaringan air bersih bagi kota Deket direncanakan melalui jaringan jalan arteri primer, jalan lokal primer, dan jalan kolektor sekunder. Sistem jaringan sekundernya direncanakan dengan membentuk percabangan dari sistem jaringan primer. Untuk mempertahankan debit pelayanan pada tiap sambungan, direncanakan beberapa buah reservoir yang terdapat di setiap percabangan antara jaringan primer dan jaringan sekunder. Selanjutnya rencana jaringan air bersih untuk kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.11.

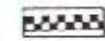


PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA JARINGAN AIR BERSIH

KETERANGAN



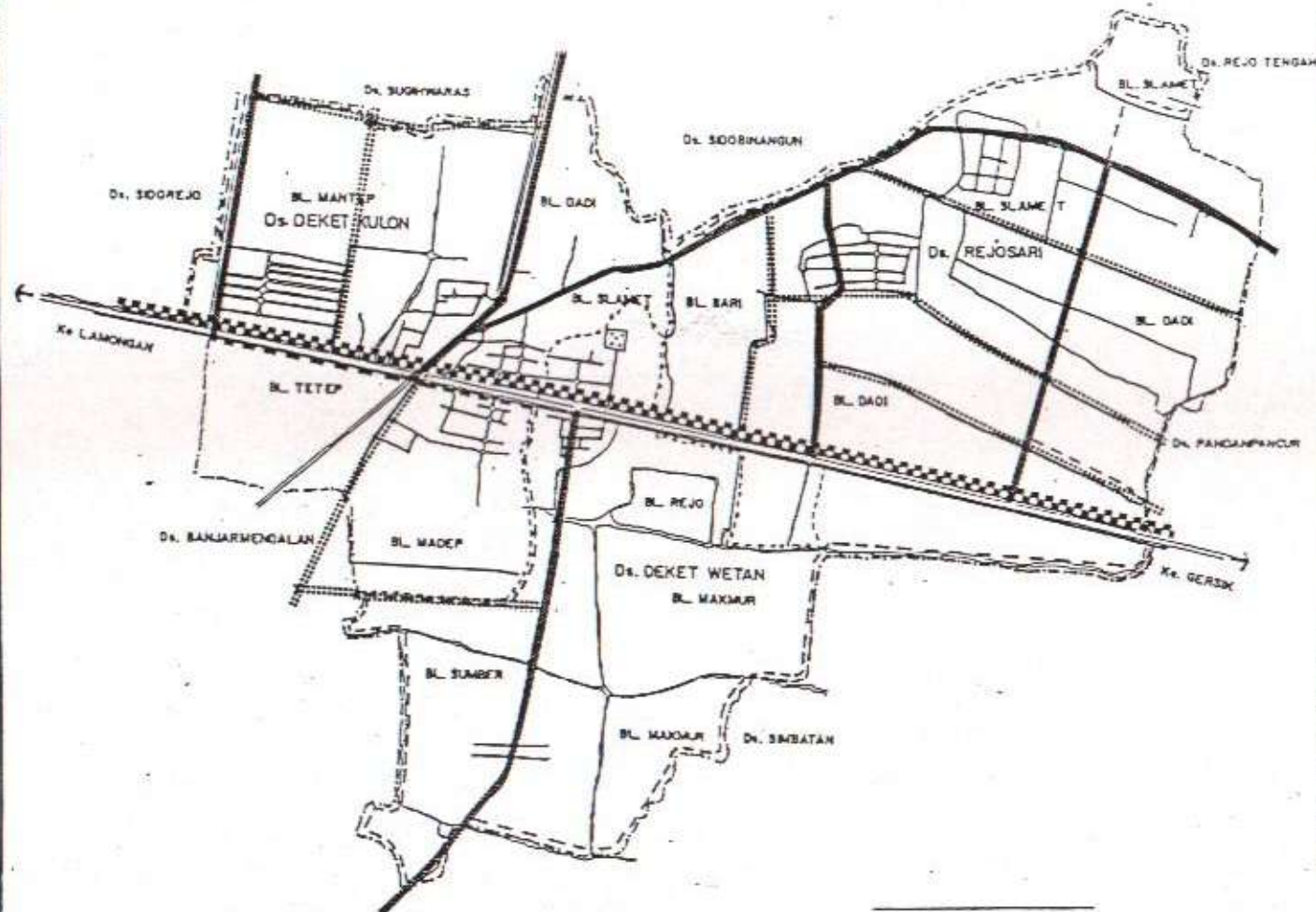
JARINGAN DISTRIBUSI
PRIMER



JARINGAN DISTRIBUSI
SEKUNDER



JARINGAN DISTRIBUSI
TERSIER



0 0.17 0.34 0.51 KM

SUMBER : Hasil Rencana

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 4.11

DIGAMBAR : [Signature]

DIPERIKSA : [Signature]



NO

LEMB

JML

LEMB

4.3.6.2 Air Hujan

Pada daerah perkotaan di Indonesia, umumnya saluran pematusan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penyalur air hujan dan air permukaan serta sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga. Kondisi ini sampai sekarang masih tetap terjadi, biarpun di kota-kota besar sekalipun. Hal ini terjadi karena mahalnya dana untuk pembuatan saluran air limbah yang spesifik serta kompleknya pengaturan masalah limbah rumah tangga. Untuk kasus kota-kota kecil atau kota-kota kecamatan, saluran pematusan kadang memiliki tiga fungsi sekaligus, yaitu selain sebagai saluran pematusan dan saluran pembuangan limbah rumah tangga, saluran pematusan juga berfungsi sebagai saluran irigasi. Ini terjadi karena pada awalnya saluran pematusan tersebut memang saluran irigasi. Sampai sekarangpun saluran irigasi tetap berfungsi karena ciri rural tidak akan terlepas dari atribut kota kecamatan dalam waktu yang relatif masih panjang. Dengan berkembangnya kota, otomatis kawasan-kawasan pertanian akan semakin berkurang sehingga pada perkembangan yang mencapai kondisi optimal, dapat dilakukan perubahan fungsi dari saluran irigasi menjadi saluran pematusan.

Perencanaan saluran pematusan secara teoritis melibatkan banyak komponen perencanaan yang sangat kompleks dan akan mencakup wilayah yang lebih luas dari areal perkotaan. Komponen-komponen utamanya adalah informasi intensitas curah

hujan, frekuensi, waktu ulang, dan durasi. Selain itu proses perencanaan juga melibatkan komponen-komponen fisik seperti topografi, elevasi, hidrologi, catchment area, dan lain sebagainya. Dengan adanya keterbatasan cakupan informasi dan cakupan wilayah pengamatan yang ditetapkan sebatas wilayah batas kota, maka produk perencanaan sistem saluran pematusan hanya akan mengidentifikasi fungsi saluran, hirarki saluran, arah, serta perkiraan dimensi yang sifatnya sangat global.

Untuk kota Deket, saluran irigasi atau sungai yang ada tidak akan dimanfaatkan sebagai saluran pematusan, namun akan digunakan sebagai outlet utama dari seluruh saluran pematusan. Sistem saluran pematusan primer direncanakan dengan memanfaatkan saluran tepi jalan di sepanjang sisi Utara jalan arteri primer. Arah aliran saluran primer ini adalah dari Barat menuju ke arah Timur.

Saluran pematusan sekunder yang direncanakan berfungsi untuk mengatasi genangan pada daerah-daerah di antara saluran pematusan primer. Saluran pematusan ini direncanakan berbentuk saluran tepi jalan dan melalui jalan-jalan utama dengan arah pengaliran Selatan - Utara.

Saluran pematusan tersier yang direncanakan memiliki fungsi mengalirkan air hujan atau air genangan menuju ke saluran pematusan sekunder. Saluran pematusan tersier ini memiliki arah pengaliran dari Barat menuju Timur.

Selanjutnya, rencana saluran penatutan untuk kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.12.

4.3.6.3 Air Buangan

Secara umum sistem pembuangan air limbah rumah tangga dapat dikategorikan atas dua hal, yaitu sistem pembuangan air limbah yang bersatu dengan sistem pembuangan air hujan (saluran penatutan) dan sistem pembuangan air limbah yang secara teknis terpisah dengan sistem pembuangan air hujan.

Sistem pembuangan air limbah yang bersatu dengan sistem pembuangan air hujan terdiri atas beberapa jenis, antara lain :

a. Cubluk Disempurnakan Berventilasi

Sistem sanitasi ini sesuai untuk permukiman yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Oleh karena itu sistem sanitasi ini secara teknis layak untuk dipergunakan pada daerah yang kepadatan penduduknya masih rendah karena sistem ini pada prinsipnya membuang tinja dari lingkungan rumah tangga secara aman dan efektif. Sistem sanitasi ini dapat ditingkatkan menjadi sistem toilet dengan pembilasan (pour-flush toilet) apabila di kemudian hari rumah tangga sudah mendapatkan pelayanan air bersih.

b. Toilet Dengan Pembilasan (pour-flush toilet)

Sistem sanitasi ini merupakan peningkatan dari cubluk disempurnakan berventilasi yang menggunakan kloset jongkok dengan air perapat (leher angsa) yang terbuat dari keramik, semen, atau fiberglas. Tinja bersama dengan air pembilasan akan mengalir secara gravitasi ke dalam lubang resapan. Air perapat yang terdapat pada toilet akan mencegah keluarnya serangga atau bau sehingga toilet ini dapat dibuat di dalam rumah. Toilet dengan pembilasan ini dapat ditingkatkan menjadi sistem jaringan pipa air limbah berdiameter kecil (small bore sewer) dengan mengubah fungsi lubang resapannya menjadi tangki interceptor.

c. Sarana Sanitasi Komunal (MCK)

MCK merupakan salah satu pilihan sistem sanitasi untuk melayani penduduk yang berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu untuk membangun sarana sanitasi individual. Masalah yang umumnya timbul dalam pelaksanaan sistem sanitasi ini adalah kurangnya pemeliharaan oleh masyarakat pengguna MCK.

d. Tangki Septik Dan Bidang Resapan

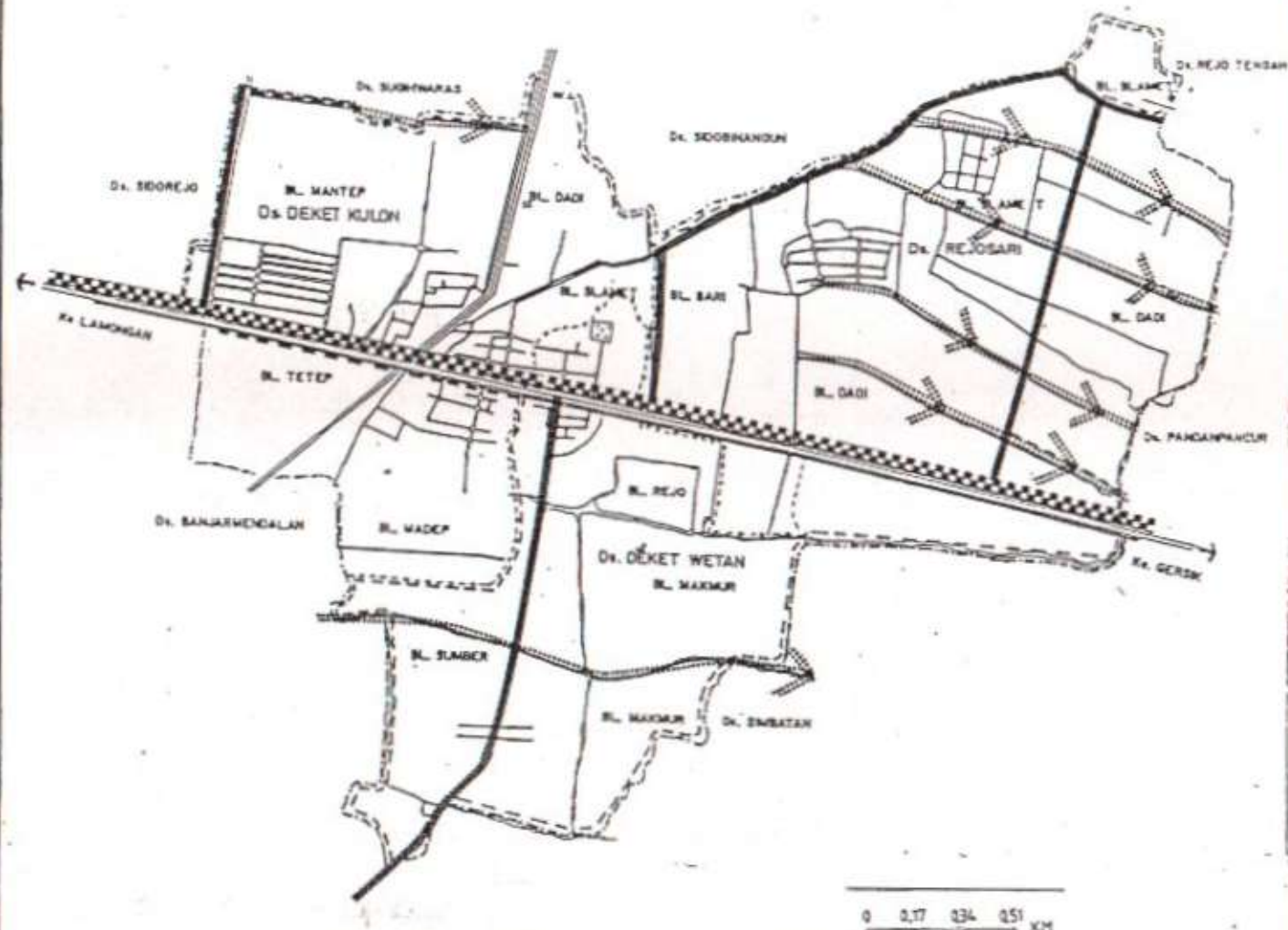
Sistem sanitasi ini merupakan sarana yang banyak digunakan di daerah perkotaan dewasa ini. Permasalahan yang timbul saat ini dan yang menjadi kelemahannya, ialah :



RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA
SALURAN PEMATUSAN

KETERANGAN



SUMBER : Hasil Rencana

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 4.12

OKANBAR : 5

EXPERIENCIA :		
---------------	--	--



NO	
LEMB	
24L	

1. Pencemaran air tanah akibat resapan efluen dari tangki septik padahal air yang tercemar ini mungkin masih digunakan di tempat lain.
2. Sistem ini hanya bisa digunakan untuk pembuangan dari WC karena keterbatasan daya resap tanah dan muka air tanah yang tinggi. Dengan demikian maka bila total air limbah dibuang ke resapan, akan dibutuhkan bidang resapan yang sangat luas.
3. Akibat butir 2 di atas, maka air limbah yang bukan dari WC akan dibuang ke saluran terbuka di pinggir jalan. Sedangkan saluran ini sebenarnya hanya berfungsi sebagai pembuang air hujan. Dengan adanya bahan pencemar pada air limbah yang sama besarnya dengan yang dari WC, maka akan mengakibatkan :
 - terdapat genangan air di saluran saat tak ada hujan, sehingga timbul bau, air berwarna hitam, serta tempat pembiakan nyamuk.
 - terjadi endapan lumpur, yang menyebabkan pendangkalan saluran sehingga di musim hujan air tidak bisa mengalir dengan lancar dan menimbulkan genangan.
 - untuk sistem drainase yang digunakan pada daerah-daerah dengan topografi yang sangat datar dan terpengaruh pasang surut air laut, maka air limbah akan tergenang di kanal atau buze (saluran induk air hujan) dan menimbulkan enceng gondok.

4. Diperlukan pengurasan tangki septik yang cukup mahal dan masih membutuhkan pengolahan lumpur lebih lanjut.
5. Sering menimbulkan bau akibat gas yang dihasilkan oleh proses biologis dalam tangki septik.
6. Sulit untuk mengawasi pembuatan tangki septik yang memenuhi persyaratan terutama bagi pencemaran air tanah.

Sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara terpisah dengan sistem pembuangan air hujan terdiri atas dua jenis, masing-masing :

a. Small Bore Sewer (SBS)

Pada dasarnya metode SBS sama dengan cara tangki septik tetapi efluennya tidak diresapkan ke dalam tanah, melainkan dialirkan melalui pipa untuk diolah lebih lanjut. Jadi dalam sistem SBS, terdapat empat komponen, yakni :

1. Tangki septik
2. Sambungan rumah misalnya dari WC, kamar mandi, dan dapur ke tangki septik dan dari tangki septik ke SBS.
3. Pipa pengumpul (SBS)
4. Instalasi pengolahan lebih lanjut.

Dalam cara SBS, total air limbah ditampung di tangki septik untuk diendapkan kandungannya, sedang airnya dibuang ke pipa pengumpul. Jaringan pipa pengumpul terpisah dari saluran air hujan (drainase). Maka bila dibandingkan

dengan cara terdahulu akan didapat keuntungan-keuntungan di bawah ini.

1. Tidak terjadi genangan air limbah dengan segala dampaknya pada saluran drainase, baik pada saluran induk maupun tersier.
2. Tidak terjadi pencemaran air tanah.

Dalam pada itu bila dibandingkan dengan sistim shallow sewerage, cara ini menunjukkan beberapa kelemahan karena masih dibutuhkan sarana tangki septik, dan pengurasan lumpur tangki septik serta pengolahannya. Sedangkan keuntungannya dari sistim shallow sewerage ialah sebagai berikut :

1. Diameter pipa lebih kecil karena di sini tidak terdapat fluktuasi aliran.
2. Beban pengolahan terpusat hanya mengolah 70 % saja karena sebagian sudah dipieshkan dalam tangki septik.

b. Sistim Sanitasi Shallow Sewerage

Pengelolaan air limbah dengan shallow sewerage pada awalnya mempunyai tiga komponen, yaitu sambungan rumah, pipa pengumpul, dan instalasi pengolahan. Untuk mengurangi biaya baik kapital maupun operasional serta mengurangi kebutuhan air, maka dilakukan modifikasi bagi sambungan rumah pada metode ini. Bila dibandingkan dengan pengelolaan air limbah melalui cara SBS dan sistem sanitasi yang konvensional, komponen shallow sewerage yang bisa dihemat ialah :

1. Sambungan rumah lebih pendek karena pipa pengepul (block sewer) terletak dekat dengan sumber air limbah (WC, kamar mandi, cuci, dan dapur)
2. Tidak dibutuhkan tangki septik.
3. Kedalaman pipa block sewer lebih dangkal dibandingkan dengan pipa lateral pada SBS atau sistem sanitasi konvensional.
4. Infiltrasi dari air permukaan dan air tanah bisa dikurangi karena kedalaman yang tidak terlampau besar sehingga beban aliran lebih kecil. Dengan demikian diameter pipa juga bisa dihemat.
5. Fluktuasi pada aliran tersier juga lebih kecil bila dibandingkan dengan cara sistem sanitasi konvensional, sehingga bisa mengurangi diameter pipa dan gangguan berupa endapan pada saat aliran minimum:

Dengan mempertimbangkan kondisi sistem pembuangan air limbah yang ada serta kondisi sosial ekonomi masyarakat kota Deket, maka sistem pembuangan air limbah yang bercampur dengan saluran pematuan dirasakan masih layak untuk dimanfaatkan. Jenis sistem pembuangan air limbah dapat dipilih dari keempat sistem pembuangan air limbah yang bercampur di atas.

4.3.6.4 Pembuangan Sampah

Sistem penanganan masalah persampahan untuk kota-kota di Indonesia umumnya menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

- lokasi transit sampah seluas 80 m²
- unit container yang terdiri atas :
 - truk container
 - container terpasang
 - container penunjang
- becak sampah dengan volume 0,8 m³
- tong sampah
- tempat pembuangan akhir

Sistem pelayanan dibagi atas dua kategori menurut tingkat sosial ekonomi atau kepadatan penduduknya. Untuk kawasan pelayanan dengan kepadatan penduduk sekitar 200 jiwa/ha atau lebih, diperlukan pola pelayanan yang konvensional dan yang semi konvensional. Dengan pola pelayanan yang konvensional, sampah yang dibawa oleh gerobak dari tiap bak sampah dibawa menuju TPA oleh truk-truk sampah. Dengan pola semi konvensional, sampah dari gerobak dibawa ke depo-depo container yang selanjutnya dibawa ke TPA oleh truk container. Untuk kawasan dengan kepadatan di bawah 200 jiwa per ha, diperlukan pola pelayanan yang lebih modern dengan penggunaan mini container dan truk compactor yang mengambil sampah dari mini container menuju TPA.

Sampai saat ini sistem penimbunan sampah yang telah dilakukan di Indonesia hanya menggunakan dua sistem, masing-masing open dumping dan sanitary landfill. Untuk kota-kota kecamatan yang lahannya masih luas, sistem penimbunan open dumping masih layak untuk dipergunakan namun harus mulai dipikirkan untuk menggunakan sistem sanitary landfill.

Perkiraan jumlah sarana pengangkutan sampah untuk kota Deket dilakukan berdasarkan angka rata-rata volume produksi sampah per kapita untuk kota-kota yang berstatus kota kecamatan atau kota-kota dengan populasi di bawah 100.000 jiwa, yaitu sekitar 2,3 liter per orang per hari. Dengan demikian volume sampah kota Deket pada tahun 2013 diperkirakan sebesar 26.000 liter per hari.

Untuk penanganan masalah sampah di kota Deket, sistem pengelolaan yang sesuai adalah penggunaan metoda konvensional dengan sarana becak sampah dan truk sampah berbentuk container. Pada lokasi pusat-pusat pelayanan kota perlu disediakan lahan bagi tempat pembuangan sampah sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Tempat pembuangan sampah sementara ditempatkan pada lokasi :

- di kawasan pusat kota.
- di pusat EWK Barat (sepanjang jalan utama kawasan permukiman).
- di pusat EWK Selatan.
- di sekitar jalan kolektor sekunder desa Rejosari.

- di sekitar kawasan industri di sepanjang jalan arteri primer.

Lokasi tempat pembuangan akhir sampah direncanakan terletak di luar batas wilayah kota Deket, yaitu di sekitar desa Banjarmendalan karena di dalam wilayah kota Deket tidak ada lahan yang memenuhi persyaratan teknis lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Selanjutnya rencana lokasi tempat pembuangan sampah di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.13.

4.3.6.5 Listrik

Kebutuhan fasilitas kelistrikan untuk kota Deket diperkirakan berdasarkan rata-rata konsumsi listrik pada tiap rumah tangga perkotaan, khususnya untuk kota-kota yang berstatus kota kecamatan atau kota dengan populasi kurang dari 100.000 jiwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada tahun 2013 mendatang, jumlah daya yang diperlukan untuk men-supply kebutuhan fasilitas kelistrikan bagi wilayah kota Deket lebih kurang 1,468 Megawatt.

Sistem pelayanan distribusi listrik dibagi atas tiga jenis jaringan distribusi, masing-masing :

- Jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT 70/150 KV)
- Jaringan listrik tegangan menengah (SUTM 6/20 KV)
- Jaringan listrik tegangan rendah (SUTR 110/220V)

Jaringan listrik yang perlu direncanakan untuk kota-kota berskala kota kecamatan adalah jaringan tegangan menengah SUTM 20 KV. Untuk jaringan distribusi tegangan tinggi, perencanaan jaringannya tidak dimasukkan dalam penyusunan rencana tata ruang kota karena memiliki kriteria dan spesifikasi teknis instalasi yang tersendiri. Dengan demikian, Jaringan SUTT tersebut dianggap merupakan sesuatu yang fixed, sehingga penyusunan rencana peruntukan lahan yang harus mengikuti koridor jaringan tegangan tinggi tersebut. Menurut Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL 1987), lahan di bawah tegangan tinggi harus dikonservasikan selebar 25 meter dari as tegangan tinggi sehingga ada spasi 50 meter. Lahan sisa ini pada umumnya digunakan sebagai jaringan jalan dengan jaringan tegangan tinggi sebagai mediannya. Pada tempat-tempat tertentu dimana perlu diadakan pelayanan listrik dari tegangan tinggi ke kawasan pelayanan, perlu dibangun gardu induk dengan luasan lahan sekitar 100 x 100 meter. Perencanaan jaringan SUTR 110/220 V selanjutnya akan lebih detail pada penyusunan rencana tata ruang kota dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota.

Untuk kota Deket, sistem jaringan listrik yang ada masih dapat dimanfaatkan. Yang perlu adalah peningkatan pelayanan dan penambahan jaringan pada kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi daerah terbangun. Jaringan SUTM 20 KV yang ada dan yang direncanakan akan melalui jalan kolektor



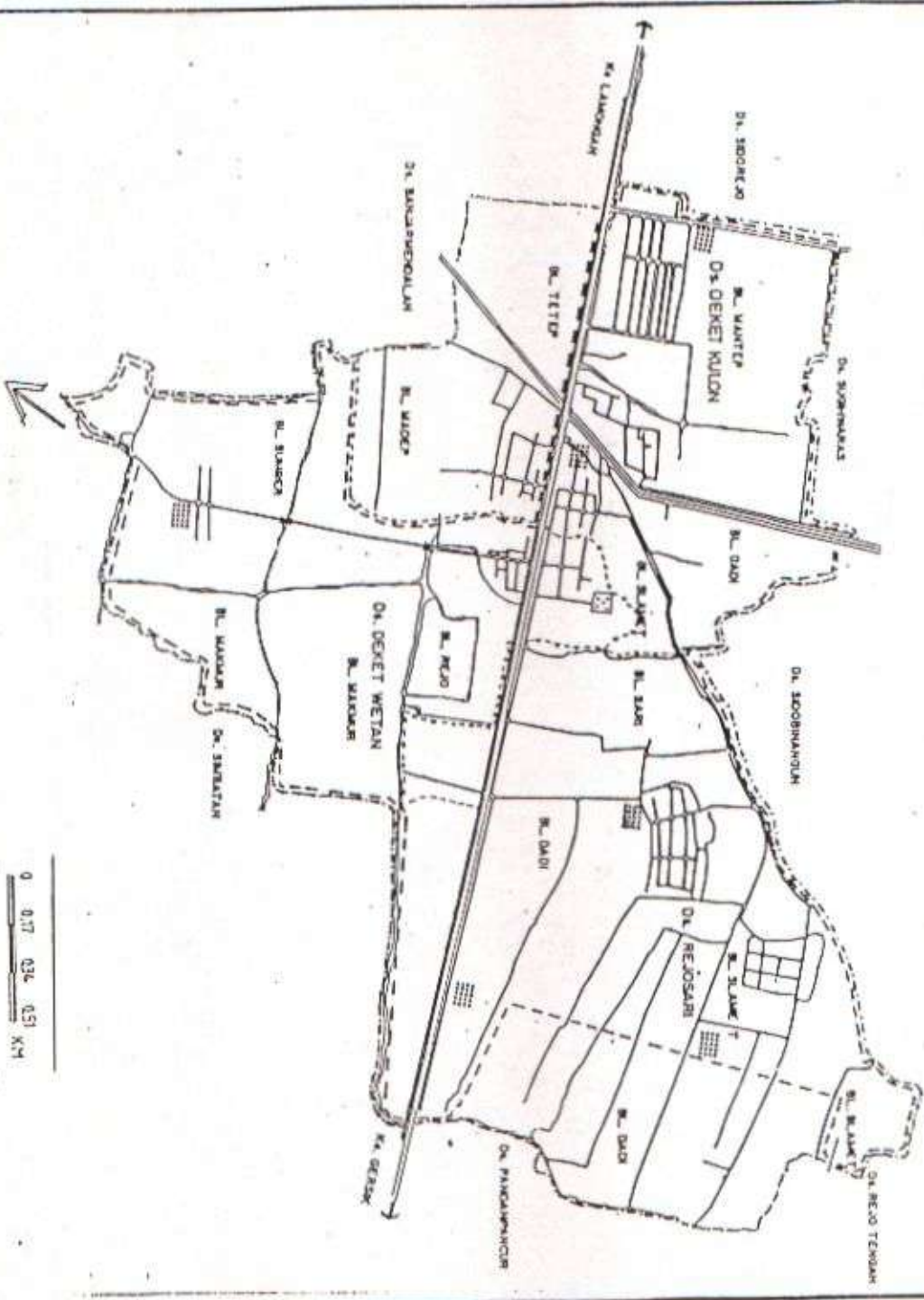
PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

RENCANA URAJAN TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA TEMPAT
PENGUANGAN SAMPAH

KETERANGAN

- TPS (Tempat Pembuangan Sementara)
- TPA (Tempat Pembuangan Akhir)



SUMBER : Hasil Rencana

KODE / PETUNJUK PETA

DAFTAR	1.13
DICAMBAH	
DIREKSI	
NO	
LEMB	
LEMB	

sekunder, jalan arteri primer, dan jalan lokal primer. Jaringan SUTR 220 V diperlukan di seluruh kawasan yang direncanakan menjadi daerah terbangun kecuali kawasan yang tetap dipertahankan sebagai cadangan pengembangan kota Deket. Selanjutnya rencana jaringan listrik untuk kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.14.

4.3.6.6 Telepon

Jumlah kebutuhan fasilitas telepon pada kota Deket sampai tahun 2013 diperkirakan sekitar 886 buah. Sistem pelayanan jaringan telepon memerlukan instalasi-instalasi pelayanan sebagai berikut :

- Sentral Telepon
- Kabel primer
- Kabel sekunder
- Kabel tersier
- Rumah Kabel
- Distribution Point (DP)

Dalam perencanaan sistem pelayanan untuk suatu kawasan, perlu dikalkulasi dulu kebutuhan jumlah telepon serta prospek pemasarannya di masa mendatang. Dari sini akan diperkirakan kebutuhan dan kapasitas sentra telepon dan sistem kabel primernya.

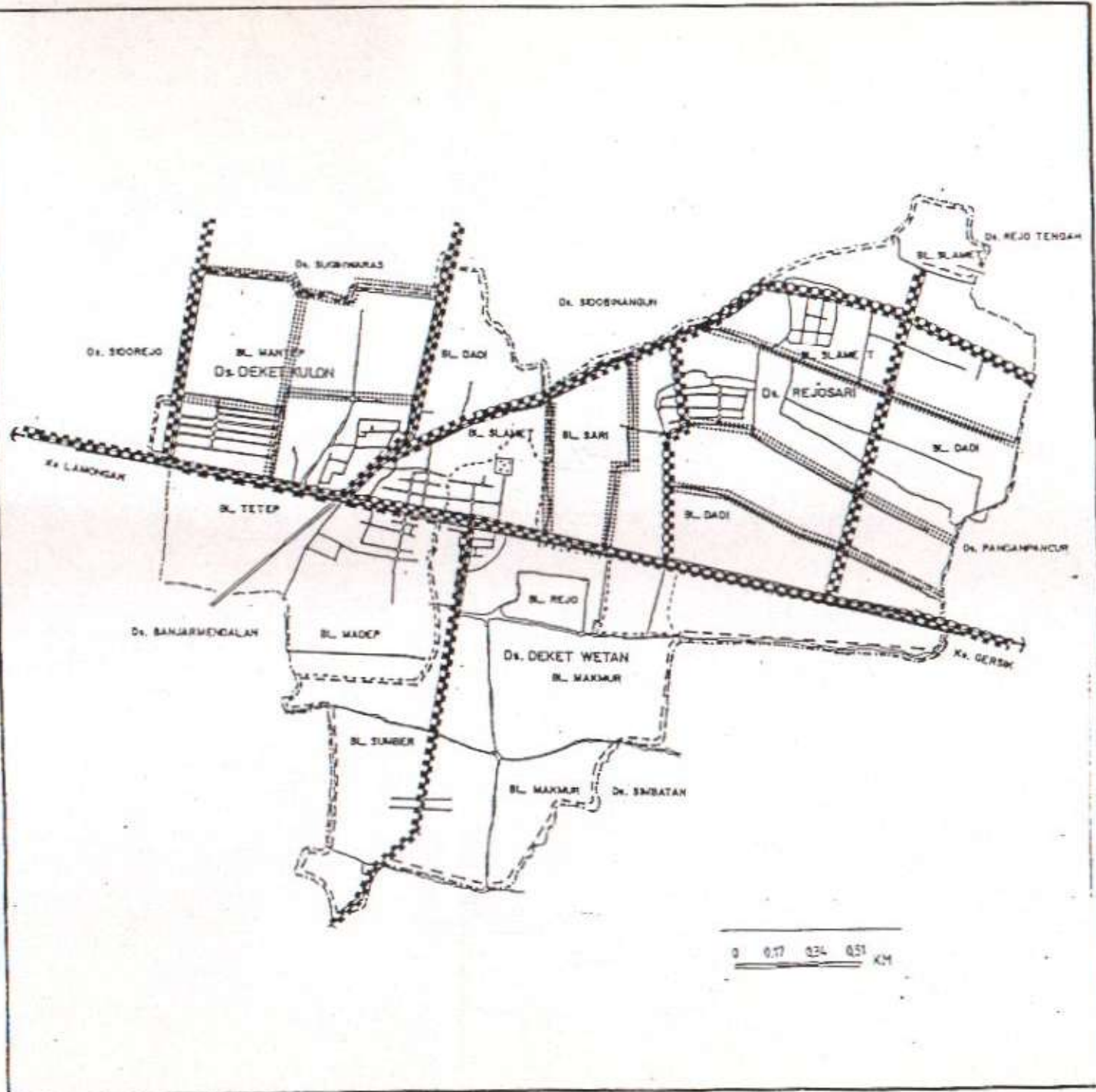
Kebutuhan telepon untuk kota Deket akan dapat dipenuhi apabila dilaksanakan dengan menggabungkan sistem jaringannya

dengan sistem jaringan kabel telepon di kota Lamongan. Kabel utama jaringan telepon ini direncanakan melalui jalan kolektor sekunder, jalan arteri primer, dan jalan lokal primer. Kabel sekunder jaringan telepon direncanakan melalui jaringan jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. Instalasi pendukung seperti rumah kabel dan distribution point (DP) diletakkan pada setiap percabangan antar tiap jenis saluran. Selanjutnya rencana jaringan telepon untuk kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.15.

4.3.7 Rencana Intensitas Penggunaan Tanah BKK

Ketentuan mengenai intensitas penggunaan tanah meliputi pengaturan koefisien dasar bangunan, pengaturan koefisien lantai bangunan, pengaturan ketinggian bangunan, pengaturan luas persil, dan pengaturan garis sempadan bangunan.

Koefisien dasar bangunan pada dasarnya merupakan perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas lahan dimana bangunan tersebut berada. Penetapan koefisien dasar bangunan berkaitan dengan kebutuhan pengaturan kondisi fisik lahan sehingga masih tersisa bidang resapan tanah dengan luasan lahan tertentu yang dapat menjaga kualitas dan kuantitas air tanah dibawahnya. Penetapan koefisien dasar bangunan ini ditetapkan berbeda antara tiap jenis peruntukan



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

**RENCANA
JARINGAN TELEPON**

KETERANGAN

-  KABEL PRIMER
-  KABEL SEKUNDER
-  KABEL TERSIER

SUMBER : Hasil Rencana

KODE / PETUNJUK PETA	DAMBAR	: 14.15
	DIGAMBAR	: [Signature]
	DIPERIKSA	: [Signature]
	NO LEMB	: 1
	JML LEMB	: 1

lahan. Guna lahan dengan intensitas kegiatan tinggi tentunya akan memanfaatkan lahan seefisien mungkin sehingga nilai koefisien dasar bangunan menjadi tinggi pula. Sebaliknya guna lahan dengan intensitas kegiatan rendah akan memanfaatkan lahan dengan koefisien dasar bangunan yang rendah pula. Guna lahan yang umumnya memiliki intensitas kegiatan tinggi adalah perdagangan, jasa, industri, dan aktivitas komersial lainnya.

Untuk kota Deket, pengaturan koefisien dasar bangunan pada komponen-komponen guna lahan ditetapkan berikut :

- kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan regional dan lokal yang berada pada kawasan pusat kota dan pada beberapa pusat bagian wilayah kota di kota Deket diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KDB 70 - 80 %.
- kawasan pemerintahan, dan perkantoran swasta yang terletak pada jalan arteri primer diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KDB 60 - 70 %.
- kawasan perumahan kepadatan tinggi, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya, industri serta gudang diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KDB 50 - 60 %.
- kawasan perumahan kepadatan sedang diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KDB 40 - 50 %.
- kawasan perumahan kepadatan rendah dan fasilitas pendidikan diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KDB 30 - 40%.

- sub terminal yang terdapat di kawasan sekitar pasar kota diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KDB 0 - 30 %.

Pengaturan koefisien dasar bangunan untuk tiap bagian wilayah kota pada kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.16 - 4.18.

Koefisien lantai bangunan pada dasarnya adalah perbandingan antara luas lantai bangunan secara keseluruhan dengan luas lahan dimana bangunan tersebut berada. Pengaturan koefisien lantai bangunan berkaitan dengan kebutuhan pengaturan ruang udara yang terletak di sekitar bangunan dan pengaturan fisik lahan yang berkaitan dengan tingkat kemampuan lahan. Seperti halnya koefisien dasar bangunan, penetapan koefisien lantai bangunan ditetapkan berbeda antara tiap jenis peruntukan lahan. Guna lahan dengan intensitas kegiatan tinggi tentunya akan memanfaatkan lahan seefisien mungkin sehingga nilai koefisien lantai bangunan menjadi tinggi pula. Sebaliknya guna lahan dengan intensitas kegiatan rendah akan memanfaatkan lahan dengan koefisien lantai bangunan yang rendah pula.

Sementara itu pengaturan koefisien lantai bangunan untuk kota Deket diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan regional dan lokal yang berada pada kawasan pusat kota dan fasilitas perdagangan lokal pada beberapa pusat bagian



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TIMORAL II
LAMONGAN

RENCANA UPAH TAJID RUMAH KOTA
DENGAN KEDALIHAN
RENCANA DETAIL TAJID RUMAH KOTA
ISIPRODA KECAMATAN DEKET

RENCANA
PENGATURAN KDB
DI BWK A

KETERANGAN

- PERDAGANGAN GROSIR
- PERDAGANGAN LOKAL
- PERMERINTAHAN
- PERKANTORAN
- PENDIDIKAN
- KESIHATAN
- PERIBADATAN
- BANGUNAN UMUM
- INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
- PEMAKIHMAN KEPADATAN TINGGI
- PEMAKIHMAN KEPADATAN SEDANG
- PEMAKIHMAN KEPADATAN RENDAH
- RTHK (Ruang Tais Hiasu Kota)
- CAOANGAI PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : MSL RENCANA

KODE / PENJUALAN PETA

SAHABAT : 4-15

SAHABAT : 4-15

SAHABAT : 4-15

SAHABAT : 4-15

SAHABAT : 4-15

SAHABAT : 4-15

BU
50-60%

PG
70-80%

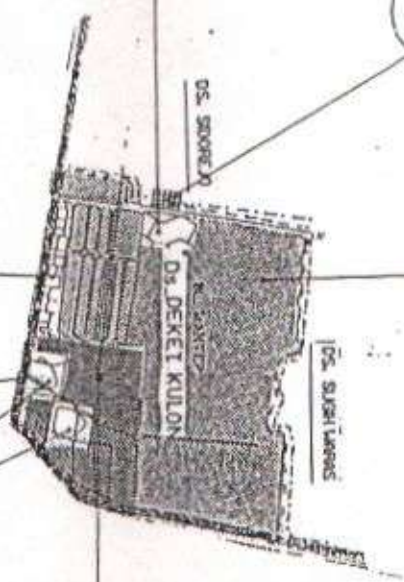
PS
40-50%

PT
50-60%

PK
60-70%

PR
30-40%

PD
30-80%



0 0.17 0.34 0.51 KM
S K A L A



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN KDB DI BWK B

KETERANGAN

- | | |
|--|--------------------------------|
| | PERDAGANGAN GROSIR |
| | PERDAGANGAN LOKAL |
| | PEMERINTAHAN |
| | PERKANTORAN |
| | PENDIDIKAN |
| | KESIHATAN |
| | PERIBADATAN |
| | BANGUNAN UMUM |
| | INDUSTRI DAN PERGUDANGAN |
| | PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI |
| | PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG |
| | PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH |
| | RTHK (Ruang Tata Hijau Kota) |
| | CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA |

SUMBER : HASIL RENCANA

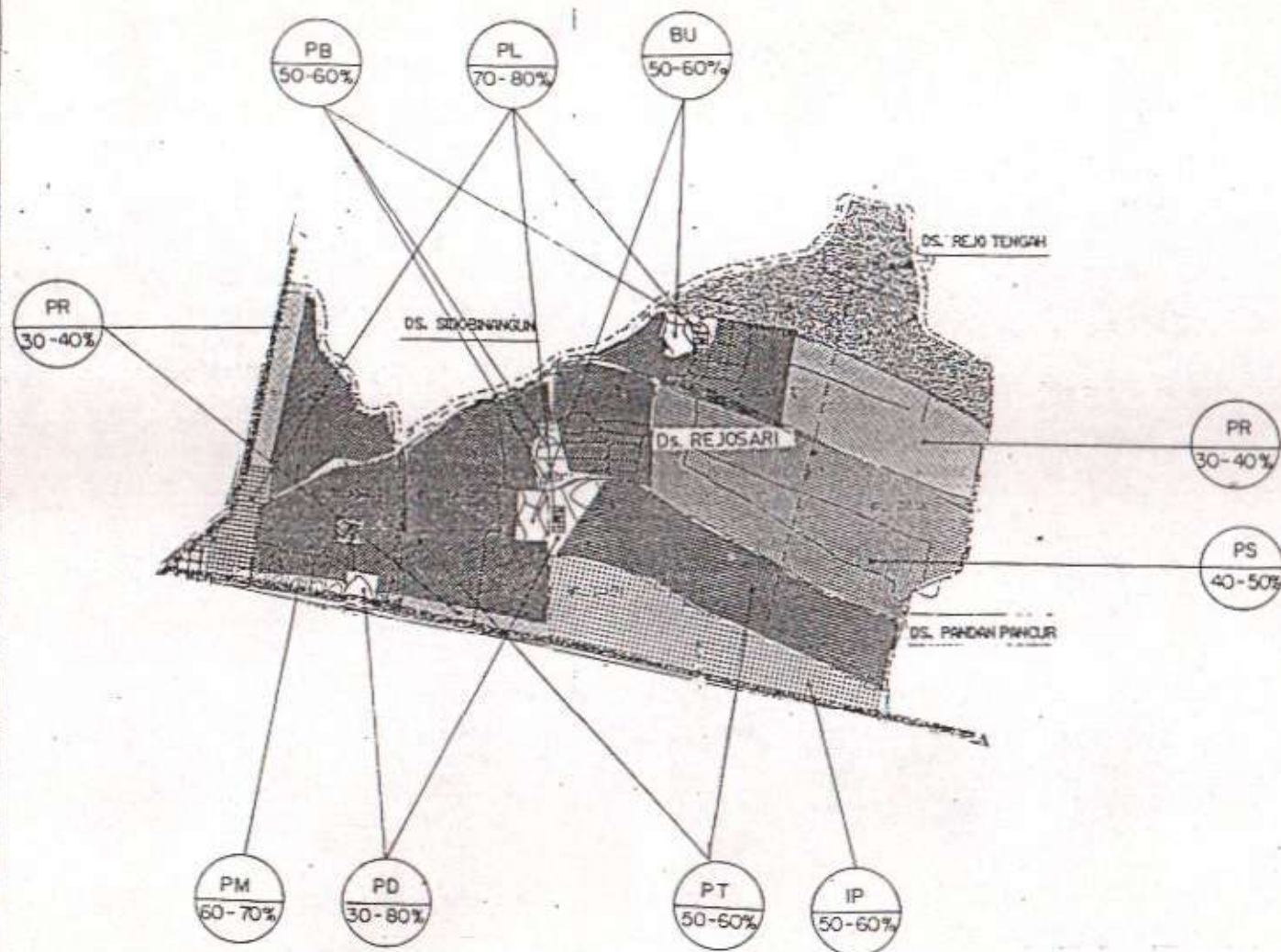
KODE / PETUNJUK PETA

GAHAR : 4.17

DIGAMBAR :

DIPERIKSA :

	NO
	LEMB
	NO
	LEMB



0 0.17 0.34 0.51 KM
S K A L A



RENCANA URAH TATA RUANG KOTA
DENGAN KECUALIAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KEMAHAN DEKET

RENCANA
PENGATURAN KDB
DI BUK C

KETERANGAN

- PERDAGANGAN GROSIR
- PERDAGANGAN LOKAL
- PEMERINTAHAN
- PERKANTORAN
- PENDIDIKAN
- KESEHATAN
- PERIBADATAN
- BANGUNAN UMUM
- INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
- PEMUKIMAN TINGGI
- PEMUKIMAN SEDANG
- PEMUKIMAN RENDAH
- RTK (Ruang Tala Mijau Kota)
- CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PENUNJUK PETA

DAFTAR : F.18	
DICUBA : [Signature]	
DIREKSI : [Signature]	
KOTA : [Signature]	
MT : [Signature]	
12/8	

wilayah kota diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 70 - 250 %.

- kawasan pemerintahan dan perkantoran swasta di sepanjang jalan arteri primer diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 60 - 150 %.
- fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya, serta industri dan gudang di sepanjang jalan arteri primer dan jalan lokal primer diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 50 - 120 %.
- kawasan perumahan kepadatan tinggi diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 50 - 60 %
- kawasan perumahan kepadatan sedang diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 40 - 50 %
- fasilitas pendidikan diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 30 - 80 %.
- kawasan perumahan kepadatan rendah diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 30 - 40 %.
- sub terminal di kawasan sekitar pasar diarahkan untuk memanfaatkan lahan dengan KLB 0 - 30 %.

Pengaturan koefisien lantai bangunan untuk tiap bagian wilayah kota pada kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.19 - 4.21.

Sementara itu ketinggian bangunan untuk kota Deket diatur sebagai berikut :

- kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan re-gional dan lokal diarahkan dengan ketinggian bangunan 1 - 3 lantai.
- kawasan perkantoran, pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya di sepanjang jalan arteri primer dan jalan lokal primer diarahkan dengan ketinggian bangunan 1 - 2 lantai.
- kawasan permukiman, baik permukiman kepadatan rendah, permukiman kepadatan sedang, permukiman kepadatan rendah, serta sub terminal diarahkan dengan ketinggian bangunan 1 lantai.

Selanjutnya pengaturan ketinggian bangunan untuk tiap bagian wilayah kota pada kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.22 - 4.24.

Persyaratan pengendalian penguasaan luas persil untuk kota Deket diatur dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang tiap aktivitas dan kepadatan penduduk yang diarahkan pada tiap jenis permukiman sebagai berikut :

- fasilitas pendidikan dan sub terminal diarahkan memiliki persil dengan luas antara 2.500 - 5.000 m².
- kawasan industri dan pergudangan diarahkan untuk memiliki persil dengan luas antara 1.000 - 2.500 m².
- fasilitas umum yang terdiri atas fasilitas peribadatan dan fasilitas kesehatan, serta kegiatan pemerintahan, perkan-



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN KLB DI BWK A

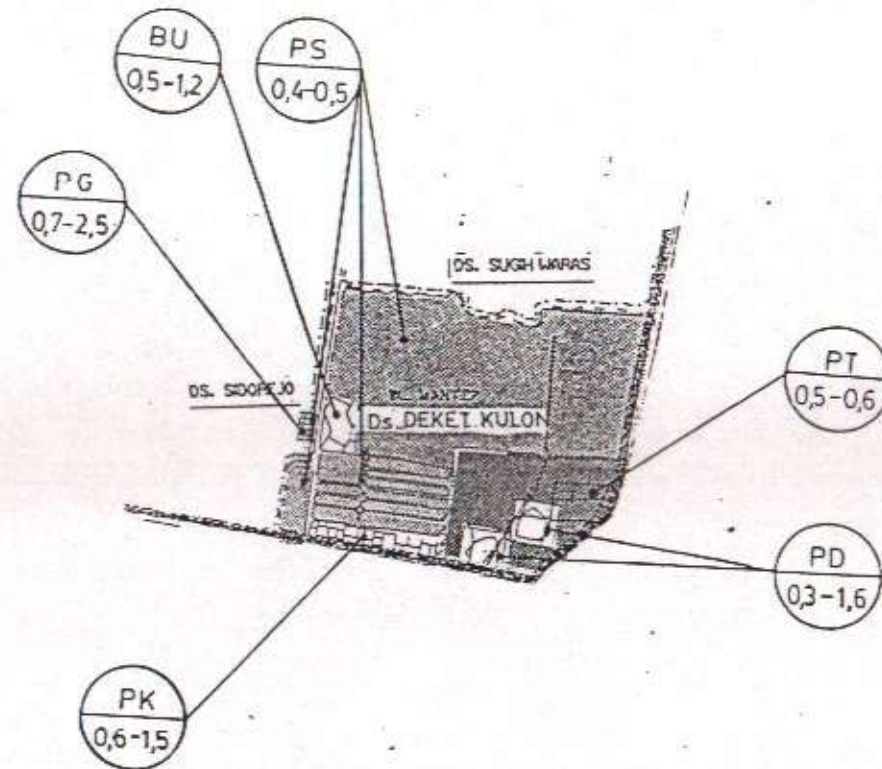
KETERANGAN

- | | |
|--|--------------------------------|
| | PERDAGANGAN GROSIR |
| | PERDAGANGAN LOKAL |
| | PEMERINTAHAN |
| | PERKANTORAN |
| | PENDIDIKAN |
| | KESEHATAN |
| | PERIBADATAN |
| | BANGUNAN UMUM |
| | INDUSTRI DAN PERGUDANGAN |
| | PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI |
| | PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG |
| | PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH |
| | RTHK (Ruang Tata Hijau Kota) |
| | CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA |

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA

GAHAR :	9.19
DIGAMBAR :	
DIPERAGA :	
NO LENS :	
JML LENS :	



0 0.17 0.34 0.51 KM
S K A L A



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

RENCANA ZONASI LALU LARI
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL LALU LARI
BUNDA KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN KLB DI BUK B

KETERANGAN

- PERDAGANGAN GROSIR
- PERDAGANGAN LOKAL
- PEMERINTAHAN
- PERKANTORAN
- PENDIDIKAN
- KESEHATAN
- PERGADATAN
- BANGUNAN UMUM
- INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
- PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI
- PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG
- PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH
- RTHK (Ruang Tata Hijau Kota)
- CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PENYINGKATAN PETA

SKALA : 1 : 4.20

NO. 1

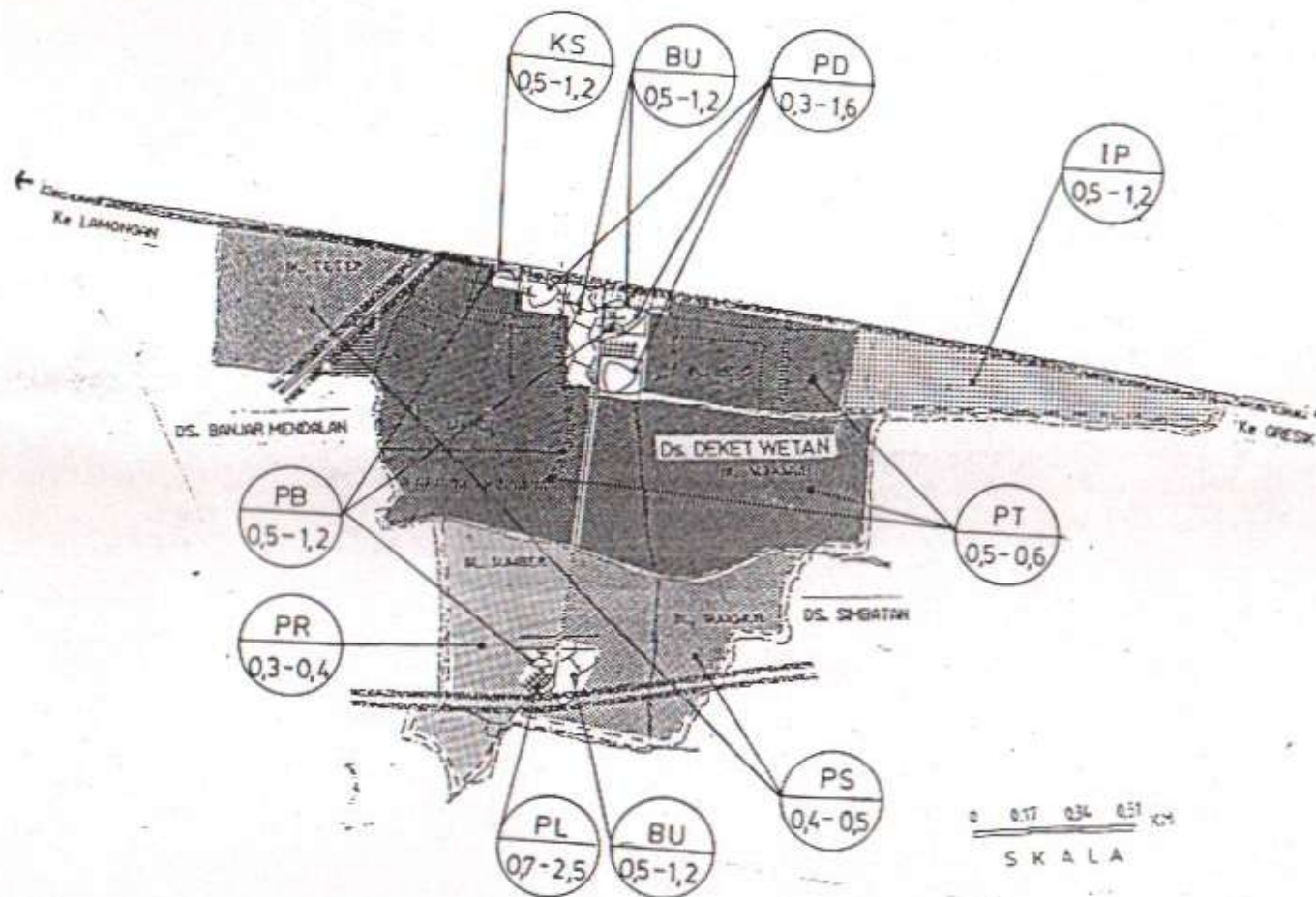
1508

1508

1508

1508

1508



RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAHATAN DEKET

**RENCANA
PENGATURAN KLB
DI BWK C**

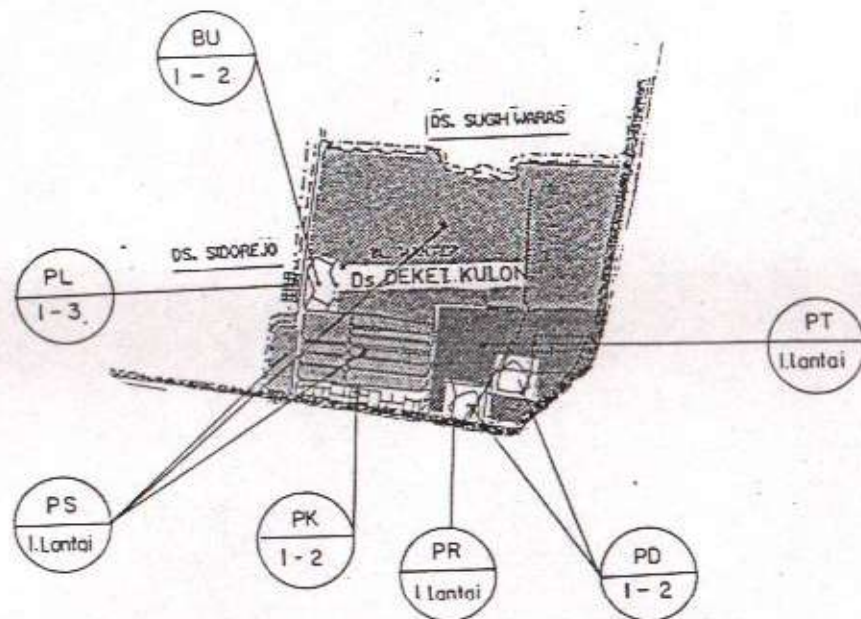
KETERANGAN

- PERDAGANGAN GROSIR
- PERDAGANGAN LOKAL
- PEMERINTAHAN
- PERKANTORAN
- PENDIDIKAN
- KESEHATAN
- PERIBADATAN
- BANGUNAN UMUM
- INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
- PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI
- PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG
- PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH
- RTHK (Ruang Tata Hijau Kota)
- CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA

DAFTAR	17-57
DISAMBAH	17-57
DIPERIKSA	17-57
HO	LEMB
HO	LEMB



PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN KETINGGIAN BANGUNAN DI BWK A

KETERANGAN

- PERDAGANGAN GROSIR
- PERDAGANGAN LOKAL
- PEMERINTAHAN
- PERKANTORAN
- PENDIDIKAN
- KESEHATAN
- PERIBADATAN
- BANGUNAN UMUM
- INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
- PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI
- PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG
- PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH
- RTHK (Ruang Tata Hijau Kota)
- CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : HASIL REKONING

KODE / PETUNJUK PETA	GAMBAR : 1.22
	DIGAMBAR :
	DIPERIKSA :
	NO LEMBAR
	JML LEMBAR



PENYUSUNAN KAWASAN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA URAIAN TATA RUANG KOTA
DENGAN KEPDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
BAGIAN KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN KETINGGIAN BANGUNAN DI BUK B

KETERANGAN

	PERDAGANGAN GROSIR
	PERDAGANGAN LOKAL
	PERMINTAAN
	PERKANTORAN
	PENDIDIKAN
	KESEHATAN
	PERIBADATAN
	BANGUNAN UMUM
	INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
	PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI
	PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG
	PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH
	RTHK (Ruang Teta Hijau Kota)
	CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : HASIL KOKOR

KODE / PETUNJUK PETA

DAUR : 4-23

SKALA : 1:500

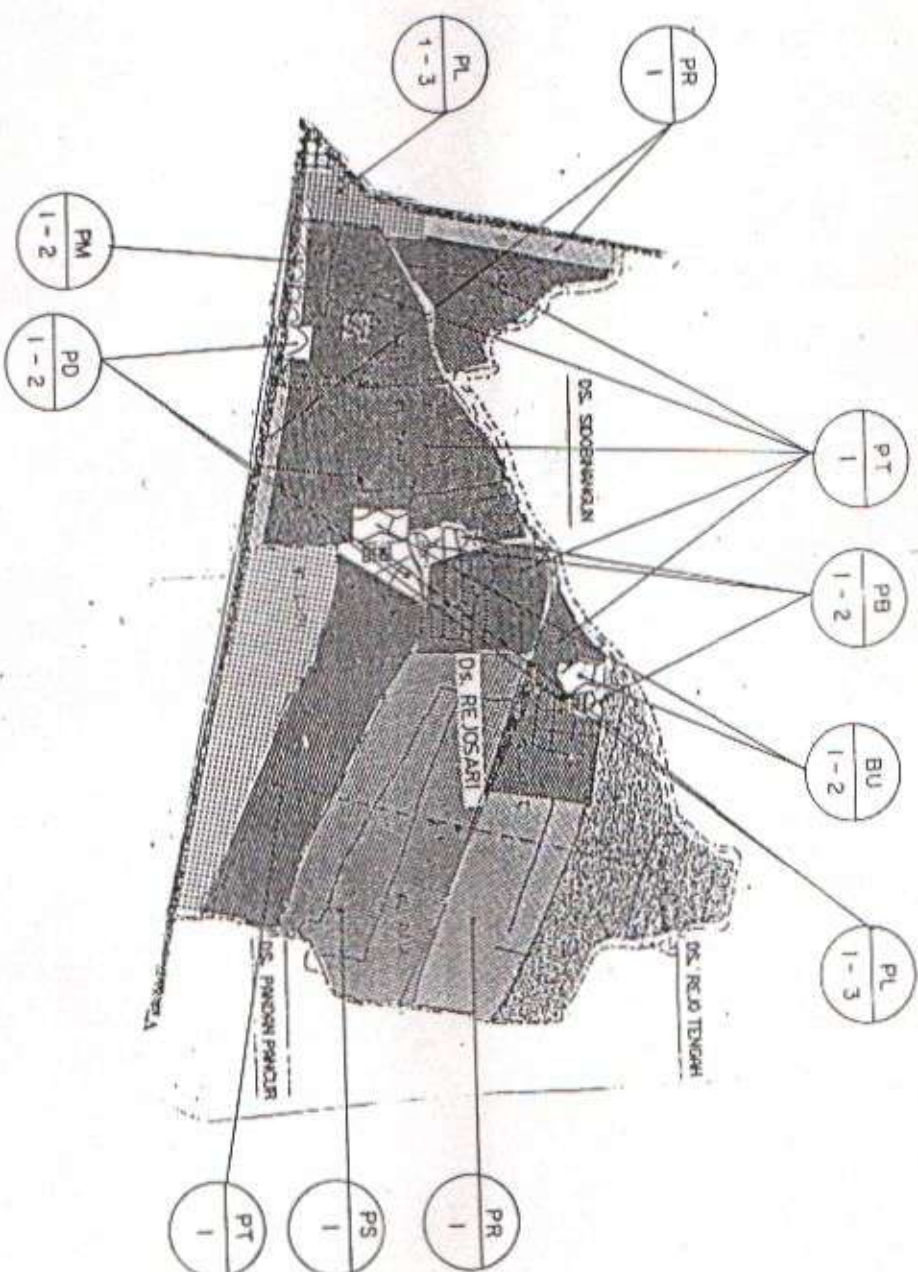
NO : 1

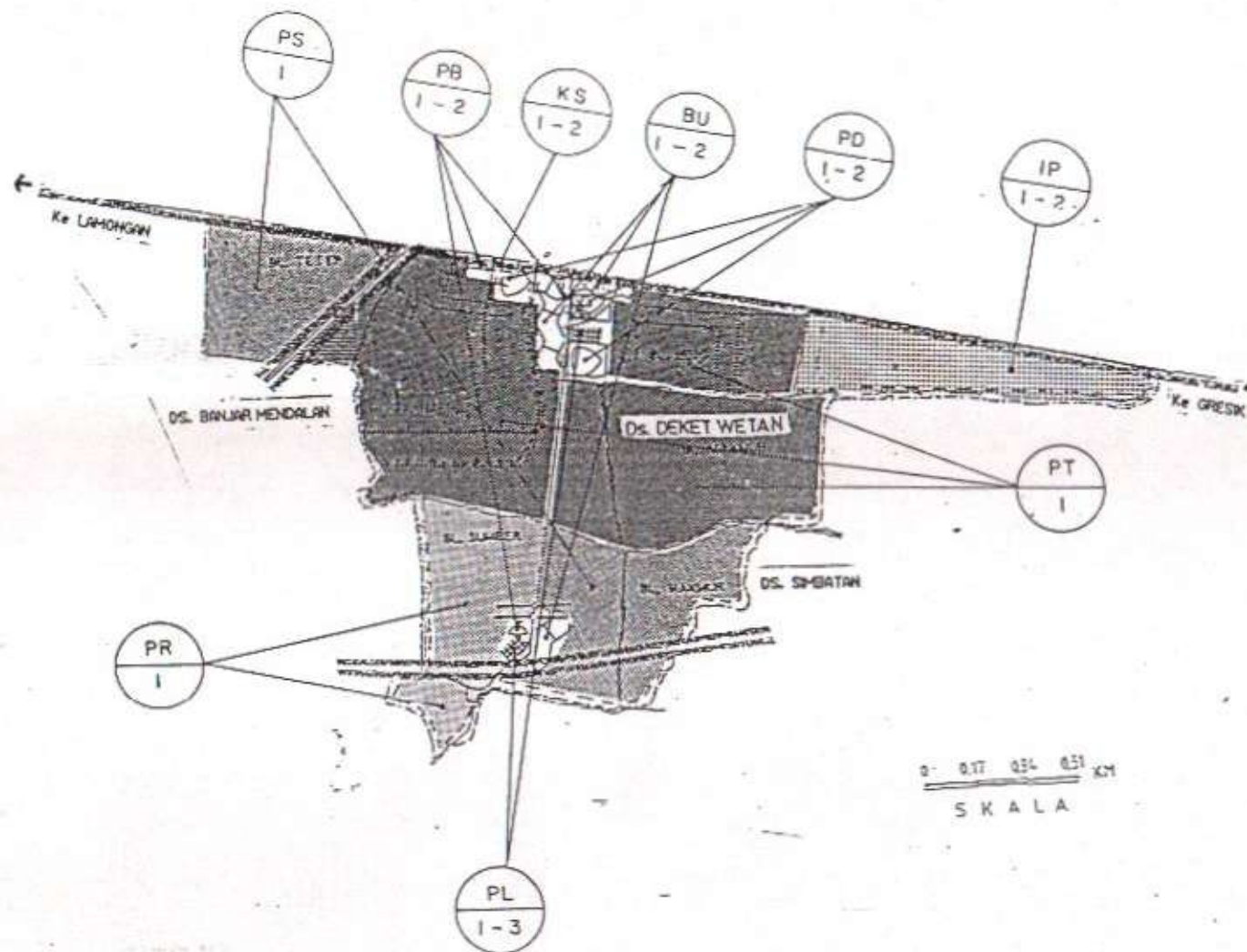
MD : 1

ML : 1

LENG : 1

0 0.17 0.34 0.51 KM
SKALA





RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN KETINGGIAN BANGUNAN DI BWK C

KETERANGAN

-  PERDAGANGAN GROSIR
-  PERDAGANGAN LOKAL
-  PEMERINTAHAN
-  PERKANTORAN
-  PENDIDIKAN
-  KESEHATAN
-  PERIBADATAN
-  BANGUNAN UMUM
-  INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
-  PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI
-  PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG
-  PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH
-  RTHK (Ruang Tata Hijau Kota)
-  CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA

SAKSI : 4.24

DIGAMBAR : 

DIPERIKSA : 

 NO

LEMB

 NO

LEMB

toran, perdagangan regional dan perdagangan lokal diarahkan untuk memiliki persil dengan luas 750 - 1.000 m².

- kawasan permukiman kepadatan tinggi diarahkan untuk memiliki persil dengan luas antara 175 - 250 m².
- kawasan permukiman kepadatan sedang diarahkan untuk memiliki persil dengan luas antara 250 - 375 m².
- kawasan permukiman kepadatan rendah diarahkan untuk memiliki persil dengan luas antara 375 - 750 m².

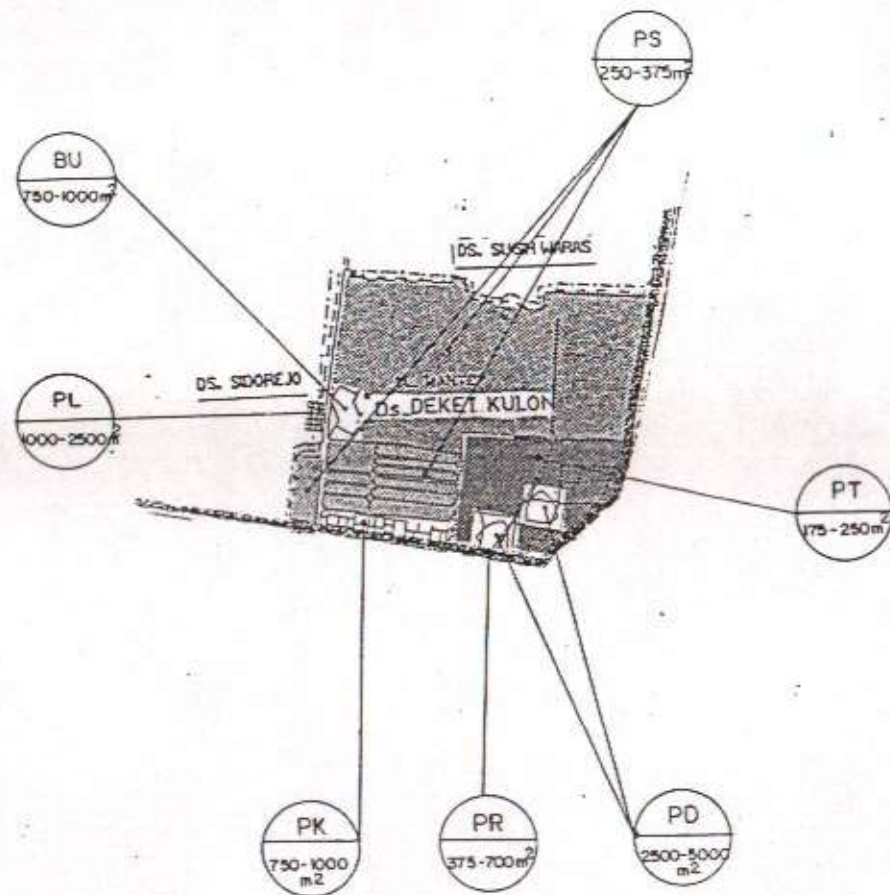
Selanjutnya, pengaturan pemilikan luas persil untuk tiap bagian wilayah kota pada kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.25 - 4.27.

Pengaturan lebar garis sempadan bangunan untuk kota Deket diatur sebagai berikut :

- kawasan di sepanjang jalan arteri primer yang direncanakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa lokal dan regional, pemerintahan, industri, dan fasilitas umum diarahkan untuk memiliki jarak bebas bangunan selebar 11 meter.
- kawasan di sepanjang jalan lokal primer yang direncanakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa lokal serta fasilitas umum diarahkan untuk memiliki jarak bebas bangunan selebar 4 meter.
- kawasan di sepanjang jalan kolektor sekunder yang direncanakan untuk kegiatan permukiman kepadatan sedang dan fasilitas umum diarahkan untuk memiliki jarak bebas bangunan selebar 1 meter.

- kawasan di sepanjang jalan lokal sekunder yang direncanakan untuk permukiman kepadatan tinggi diarahkan untuk memiliki jarak bebas bangunan selebar 1 meter.

Selanjutnya pengaturan lebar garis sempadan bangunan untuk tiap bagian wilayah kota pada kota Deket dapat dilihat pada Gambar 4.28 - 4.30.



0 0.17 0.34 0.51 KM
S K A L A



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
DASAR TINGKAT II

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN LUAS PERSIL DI BWK A

KETERANGAN

- PERDAGANGAN GROSIR
- PERDAGANGAN LOKAL
- PEMERINTAHAN
- PERKANTORAN
- PENDIDIKAN
- KESSEHATAN
- PERIBADATAN
- BANGUNAN UMUM
- INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
- PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI
- PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG
- PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH
- RTHK (Ruang Tata Hijau Kota)
- CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA	DAWAR : 4425
	OKAWAR : 5
	DIPERJAL : 1
	NO LENS
	JUL 1948



Pemerintah Kabupaten
Lamongan

RENCANA ZONASI RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL JALAN RUMAH KOTA
BERKAITAN KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN
LUAS PERSIL
DI BUK B

KETERANGAN

- PERDAGANGAN GROSIR
- PERDAGANGAN LOKAL
- PEMERINTAHAN
- PERKANTORAN
- PENDIDIKAN
- KESIHATAN
- PERIBADATAN
- BANGUNAN UMUM
- INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
- PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI
- PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG
- PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH
- RTHK (Ruang Teras Hijau Kota)
- CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : WKS RENCANA

KODE / PERUMAHAN PETIA

NO	NO
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100



RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEPALUHAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
BUMI KECAMATAN DEKET

RENCANA PENGATURAN
LUAS PERSIL
DI BWS C

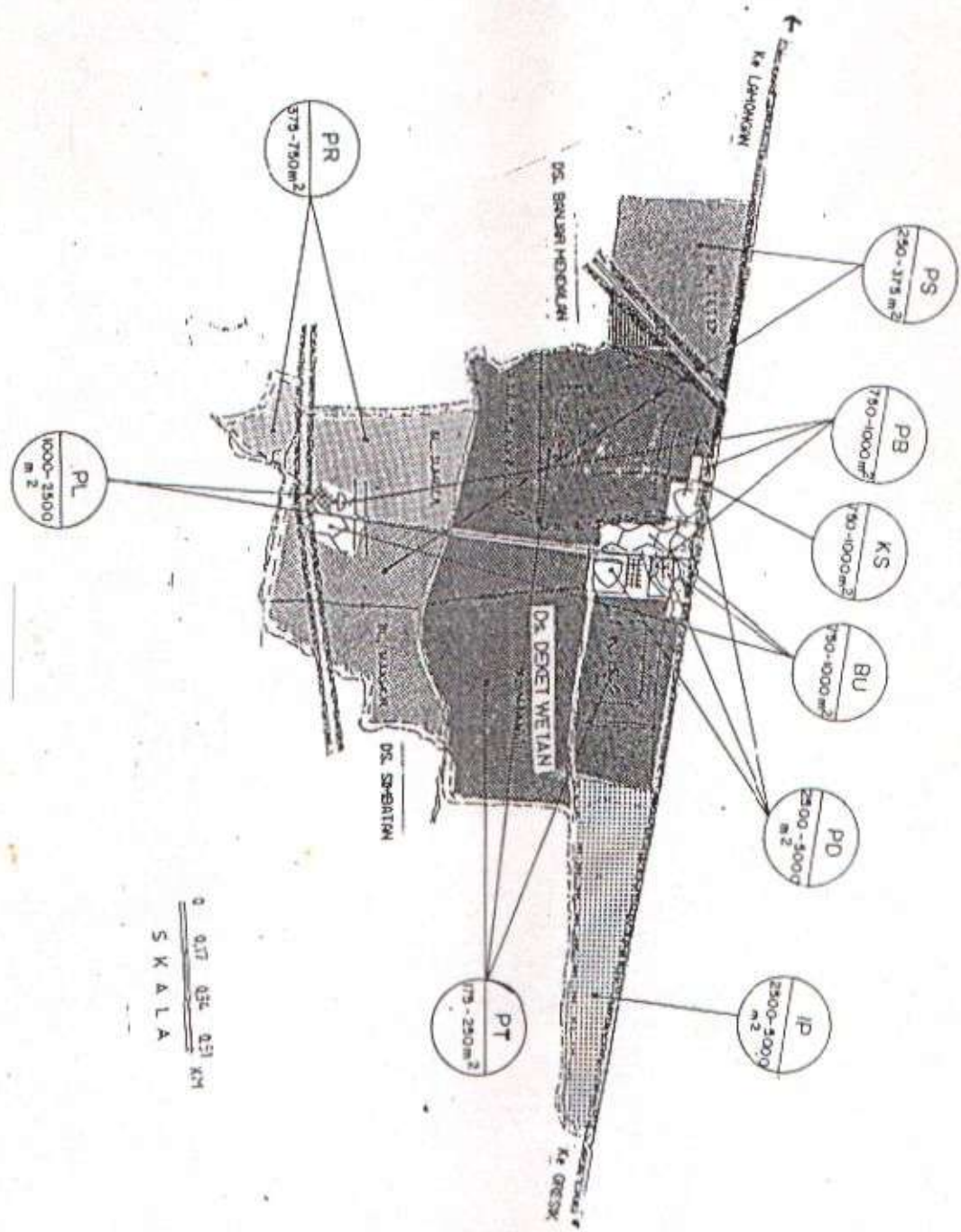
KETERANGAN

- PENDAGANGAN GROSIR
- PERDAGANGAN LOKAL
- PEMERINTAHAN
- PERKANTORAN
- PENDOKAN
- KESIHATAN
- PERIBADATAN
- BANGUNAN UMUM
- INDUSTRI DAN PERGUDANGAN
- PEMUKIMAN KEPADATAN TINGGI
- PEMUKIMAN KEPADATAN SEDANG
- PEMUKIMAN KEPADATAN RENDAH
- RTK (Ruang Tata Hias Kota)
- CADANGAN PENGEMBANGAN KOTA

SUMBER : MRS. RUCIA

KODE / SINGKATAN PETA

GAMBAR : 14.87	
DIBUAT : 1987	
DIREKSI : 1987	
KOTA	
SKALA	
1:1000	





0 0.17 0.34 0.51 KM
SKALA



PEMERINTAH KABUPATEN IV - 63

DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN DEKET

RENCANA
PENGATURAN GSB
DI BWK A

KETERANGAN



JALAN ARTERI PRIMER /
ARTERI SEKUNDER
11 METER



JALAN LOKAL PRIMER /
KOLEKTOR SEKUNDER
4 METER



JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
1 METER



JALAN LOKAL SEKUNDER
1 METER

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA

GAMBAR : 4.28

DIGAMBAR : [Signature]

DUPERSA : [Signature]

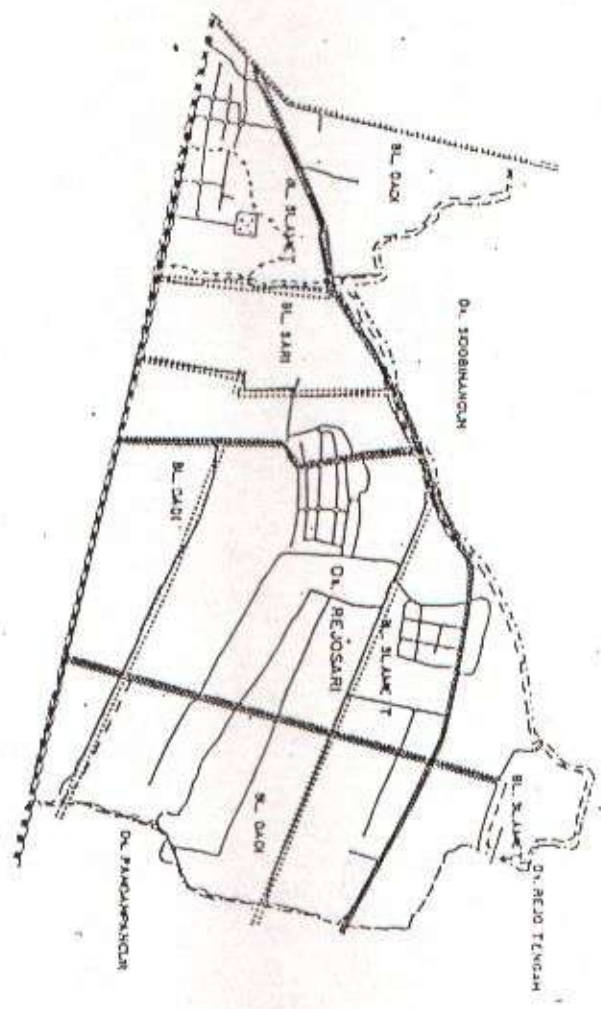
	NO
	LEMB
	NO
	LEMB

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMAHAN DEKET

**RENCANA
PENGATURAN GSB
DI BUK B**

KETERANGAN

-  JALAN ARTERI PRIMER /
ARTERI SEKUNDER
11 METER
-  JALAN LOKAL PRIMER /
KOLEKTOR SEKUNDER
4 METER
-  JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
1 METER
-  JALAN LOKAL SEKUNDER

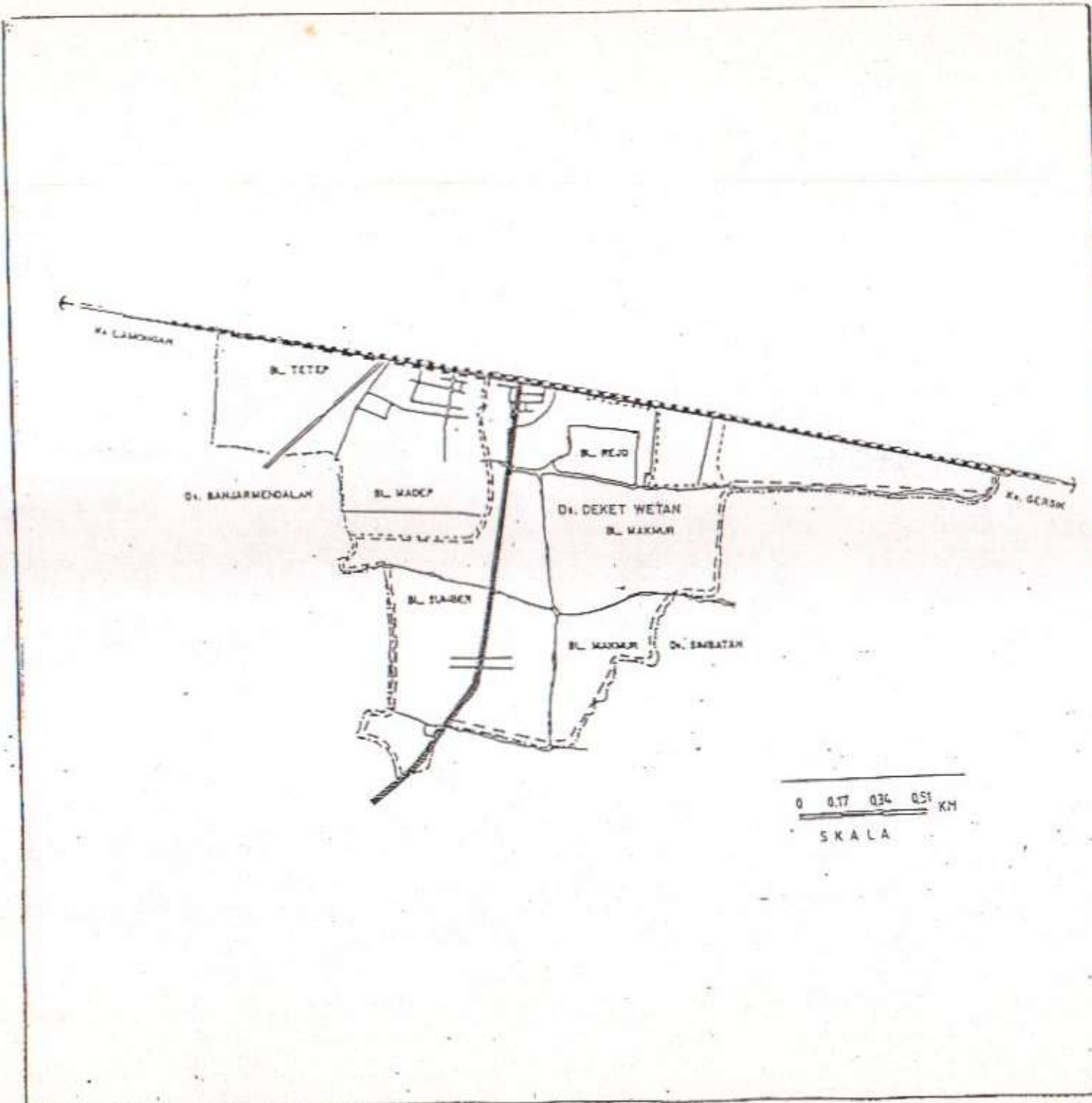


0 0.17 0.34 0.51
SKALA
KM

SUMBER : HASIL PEMERIKSAAN

KODE / PERUMBUK PETA

GAMBAR : 1.29	
DIBERIKSI : 	
NO. 1	LEMB. 1
JML. 1	LEMB. 1

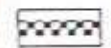


PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA URUTAN TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
(BUKITA KECAMATAN DEKET

**RENCANA
PENGATURAN GSB
DI BWK C**

KETERANGAN



JALAN ARTERI PRIMER /
ARTERI SEKUNDER
11 METER



JALAN LOKAL PRIMER /
KOLEKTOR SEKUNDER
4 METER



JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
1 METER



JALAN LOKAL SEKUNDER
1 METER

SUMBER : HASIL RENCANA

KODE / PETUNJUK PETA

DAFTAR :	1.30
DIKABAR :	1/1
DUPERSA :	1/1
NO	1/1
LEMB	1/1
JML	1/1
LEMB	1/1

BAB V

ASPEK PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

5.1 Tahapan Dan Prioritas Pembangunan

Sistem prioritas disusun atas dasar dan pertimbangan pelaksanaan pembangunan secara berurutan sebagai berikut :

- pembangunan mendesak, yaitu pembangunan sektor dan sub sektor untuk menanggulangi masalah utama yang menyebabkan terjadinya masalah lainnya, yang apabila tidak segera ditanggulangi akan makin bertambah besar secara kumulatif dan makin sulit diatasi
- pembangunan yang diprioritaskan, yaitu berupa pembangunan sektor dan sub sektor yang diharapkan dapat menggerakkan mekanisme percepatan pertumbuhan dan perkembangan sektor utama kota maupun wilayah perencanaan yang dapat memberikan dampak positif. Sektor-sektor yang diprioritaskan biasanya meliputi perdagangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perhubungan.
- pembangunan strategis, yaitu pembangunan sektor dan sub sektor penting yang memberikan implikasi struktural dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat adil dan makmur. Sektor-sektor yang termasuk kategori ini adalah fasilitas umum, penertiban penggunaan tanah dan

bangunan, pengadaan utilitas yang memadai, dan lain-lain.

- pembangunan pelengkap, yaitu pembangunan sektor dan sub sektor yang tidak bersifat kebutuhan dasar tetapi dipandang perlu dibangun sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Sektor-sektor yang terkait adalah pembangunan fasilitas rekreasi, pembangunan pusat kegiatan olahraga, dan pembangunan pusat kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan skala dan sistem prioritas di atas, disusun suatu langkah-langkah atau aktivitas dalam perencanaan pelaksanaan rencana kota, yang antara lain adalah :

- rehabilitasi, yaitu merupakan aktivitas penambahan / perbaikan, peremajaan, peningkatan kualitas lingkungan dan penyesuaian kondisi lingkungan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- pembangunan, yaitu merupakan aktivitas mendirikan atau membuat bangunan pada areal yang telah ditetapkan sesuai dengan peruntukan dan pengembangan jaringan jalan guna merangsang pembangunan fisik.
- penyesuaian terhadap rencana kota, yaitu merupakan aktivitas pembenahan fungsi penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang kota dan upaya pengembangan wilayah kota yang bersangkutan. Tindakan yang dilakukan misalnya dapat berbentuk pemutihan pada bangunan yang memungkinkan, dalam arti pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat segera dilaksanakan jika ternyata telah sesuai dengan rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan.

- penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail, yaitu merupakan tindakan teknis dalam rangka menyusun rencana tata ruang sebagai penjabaran Rencana Umum Tata Ruang Kota, khususnya pada kawasan yang diprioritaskan pengembangannya. Dalam hal ini dilakukan pengukuran di lapangan sesuai dengan tingkat kedalaman rencana tata ruang kota yang telah disusun.

- meningkatkan administrasi pembangunan kota, yang merupakan persiapan segi-segi administrasi pembangunan kota guna mendukung tercapainya tertib pembangunan dalam rangka pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

Untuk pengembangan kota Deket yang sesuai dengan rencana peruntukan lahan, perlu disusun suatu prioritas dalam pelaksanaan pengembangannya. Dalam kaitan dengan pengembangan kawasan-kawasan perkotaan, disusun suatu prioritas pengembangan kawasan sesuai dengan tahapan repelita sebagai berikut :

Tahap I (1994/1995 - 1998/1999)

- pengembangan kawasan perdagangan regional / perdagangan besar dan kawasan perdagangan lokal pada kawasan pusat kota (EWK B) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan kawasan pemerintahan di sepanjang jalan arteri primer (EWK B) yang meliputi penyesuaian penggunaan

- lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan fasilitas umum (BMK B) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan kawasan permukiman kepadatan tinggi pada kawasan pusat kota (BMK B) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.

Tahap II (1999/2000 - 2003/2004)

- pengembangan perluasan kawasan perdagangan lokal di sepanjang jalan utama kawasan permukiman (BMK A) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan kawasan perkantoran di sepanjang jalan arteri primer (BMK A) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan fasilitas umum (BMK A) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan kawasan permukiman kepadatan sedang (BMK A) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian

- peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan kawasan permukiman kepadatan rendah (BMK A) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.

Tahap III (2004/2005 - 2008/2009)

- pengembangan kawasan perdagangan lokal di sepanjang jalan desa Deketwetan (BMK C) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan fasilitas umum (BMK C) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan kawasan permukiman penduduk kepadatan tinggi (BMK C) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan kawasan permukiman penduduk kepadatan rendah (BMK C) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan,

pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.

Tahap IV (2009/2010 - 2013/2014)

- pengembangan kawasan industri dan pergudangan di sepanjang jalan arteri primer (BWK B dan BWK C) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan kawasan permukiman penduduk kepadatan tinggi (BWK C) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan kawasan permukiman penduduk kepadatan sedang (BWK C) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan kawasan permukiman penduduk kepadatan rendah (BWK C) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.
- pengembangan fasilitas umum (BWK C) yang meliputi penyesuaian penggunaan lahan, pengendalian peruntukan, pengendalian luas persil, dan penataan garis sempadan bangunan.

Selanjutnya tahapan pengembangan kawasan di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Untuk pengembangan jaringan jalan di kota Deket, disusun suatu tahapan pengembangan yang disesuaikan dengan tahapan repelita sebagai berikut :

Tahap I (1994/1995 - 1998/1999)

- peningkatan jalan arteri primer yang terdapat di kawasan pusat kota (BWK B).
- peningkatan jalan lokal primer yang terdapat pada kawasan pusat kota (BWK B).
- peningkatan jalan kolektor sekunder yang terdapat di sekitar pusat kota (BWK B).
- peningkatan jalan lokal sekunder yang terdapat pada kawasan pusat kota (BWK B).

Tahap II (1999/2000 - 2003/2004)

- peningkatan jalan arteri primer yang terdapat di bagian wilayah kota A.
- peningkatan jalan kolektor sekunder yang terdapat pada kawasan di bagian wilayah kota A
- peningkatan jalan lokal sekunder yang terdapat pada kawasan di bagian wilayah kota A

Tahap III (2004/2005 - 2008/2009)

- peningkatan jalan arteri primer yang terdapat di bagian wilayah kota C.
- peningkatan jalan kolektor sekunder yang terdapat pada kawasan di bagian wilayah kota C.

- peningkatan jalan lokal sekunder yang terdapat pada kawasan di bagian wilayah kota C.

Tahap IV (2009/2010 - 2013/2014)

- peningkatan jalan kolektor sekunder yang terdapat pada kawasan di bagian Timur Laut kota.
- peningkatan jalan lokal sekunder yang terdapat pada kawasan di bagian Timur Laut kota.

Selanjutnya tahapan pengembangan jaringan jalan di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Untuk pengembangan saluran pematusan di kota Deket, disusun suatu tahapan pengembangan yang disesuaikan dengan tahapan repelita sebagai berikut :

Tahap I (1994/1995 - 1998/1999)

- peningkatan dan pengembangan saluran pematusan primer yang terdapat di sepanjang jalan arteri primer.
- peningkatan dan pengembangan saluran pematusan sekunder yang terdapat di sekitar kawasan pusat kota.

Tahap II (1999/2000 - 2003/2004)

- peningkatan dan pengembangan saluran pematusan sekunder yang terdapat pada bagian Barat kota.
- peningkatan dan pengembangan saluran pematusan tersier yang terdapat pada bagian Barat kota.

Tahap III (2004/2005 - 2008/2009)

- peningkatan dan pengembangan saluran pematusan sekunder yang terdapat pada bagian Selatan kota.
- peningkatan dan pengembangan saluran pematusan tersier yang terdapat pada bagian Selatan kota.

Tahap IV (2009/2010 - 2013/2014)

- peningkatan dan pengembangan saluran pematusan sekunder yang terdapat pada bagian Timur Laut kota.
- peningkatan dan pengembangan saluran pematusan tersier yang terdapat pada bagian Timur Laut kota.

Selanjutnya tahapan pengembangan saluran pematusan di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Untuk pengembangan sarana penyediaan air bersih di kota Deket, disusun suatu tahapan pengembangan yang disesuaikan dengan tahapan repelita sebagai berikut :

Tahap I (1994/1995 - 1998/1999)

- pengembangan jaringan air bersih primer yang melalui jalan arteri primer.
- pengembangan jaringan air bersih primer yang melalui jalan lokal primer.
- pengembangan jaringan air bersih primer yang melalui jalan kolektor sekunder.

PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
BUDAYA KECAKATAN DEKET

TAHAPAN PENGEMBANGAN
SALURAN PEMATUSAN

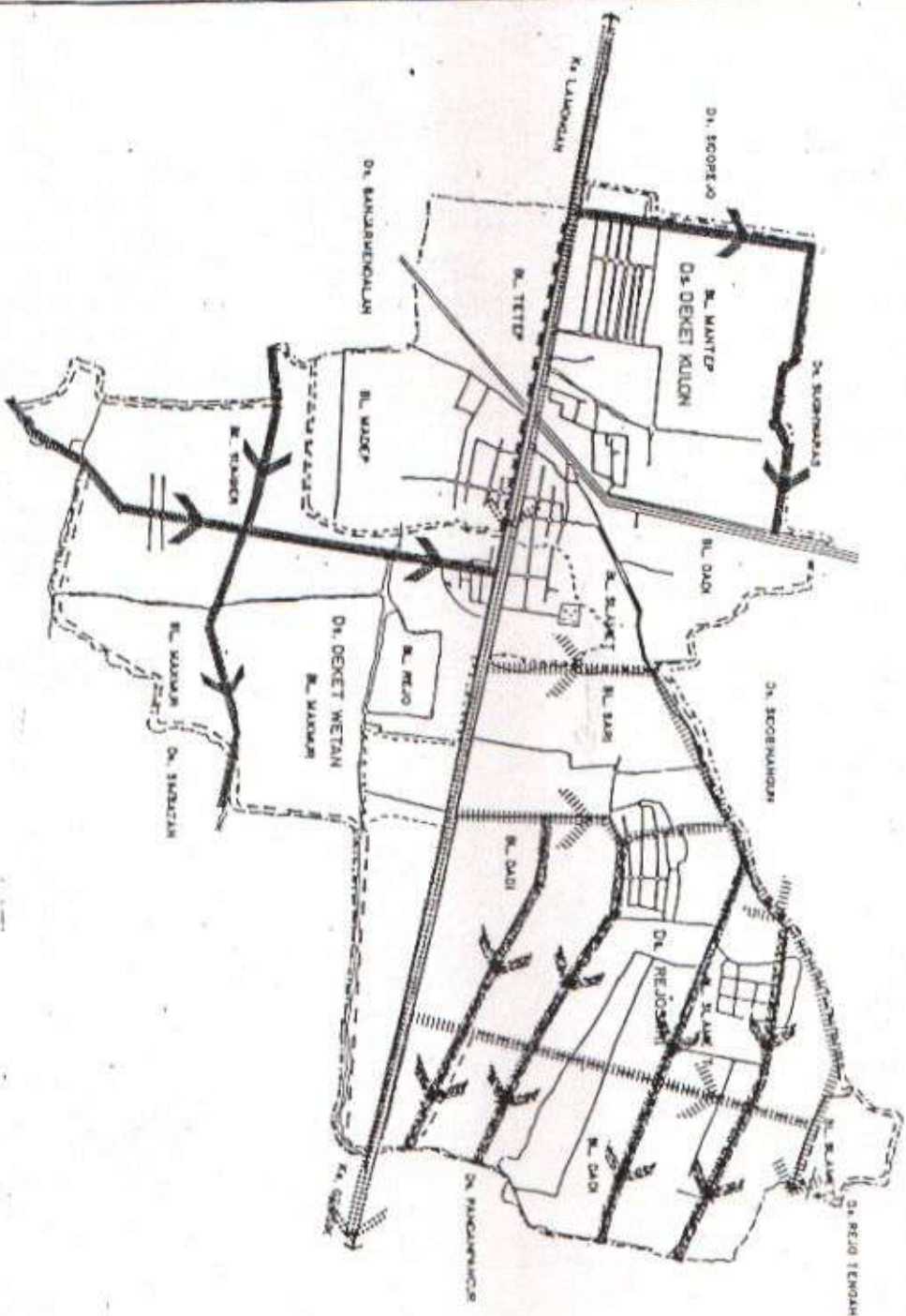
KETERANGAN

ТАНАР I
(TH 1994/1995 - 1998/1999)

ТАРП II
(TH 1999/2000 - 2003/2004)

ТАҲАП III
(TH. 2004/2005 - 2008/2009)

TAHAP IV
(TH 2009/2010 - 2013/2014)



0	0.77	0.76	0.51
150	7.70	7.70	7.70

SUMBER : Hasil Rencana

MODE 1: RETURNING

COMPAR	5.3
DEMAR	5.9
DEPRESA	6
	NO
	LEMB
	JAL
	LEMB

Tahap II (1999/2000 - 2003/2004)

- peningkatan dan pengembangan jaringan air bersih sekunder pada kawasan di bagian Barat kota.
- peningkatan dan pengembangan jaringan air bersih sekunder pada kawasan di pusat kota.
- peningkatan dan pengembangan jaringan air bersih sekunder pada kawasan di bagian Selatan kota.

Tahap III (2004/2005 - 2008/2009)

- peningkatan dan pengembangan jaringan air bersih tersier pada bagian Barat kota.
- peningkatan dan pengembangan jaringan air bersih tersier pada bagian Selatan kota.
- peningkatan dan pengembangan jaringan air bersih tersier pada pusat kota.

Tahap IV (2009/2010 - 2013/2014)

- peningkatan dan pengembangan jaringan air bersih sekunder pada bagian Timur Laut kota.
- peningkatan dan pengembangan jaringan air bersih tersier pada bagian Timur Laut kota.

Selanjutnya tahapan pengembangan pelayanan sarana air bersih di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 5.4.

Untuk pengembangan sarana kelistrikan di kota Deket, disusun suatu tahapan pengembangan yang disesuaikan dengan tahapan repelita sebagai berikut :

Tahap I (1994/1995 - 1998/1999)

- peningkatan dan pengembangan jaringan listrik pada kawasan sepanjang jalan arteri primer di kawasan pusat kota.
- peningkatan dan pengembangan jaringan listrik pada kawasan sepanjang jalan lokal primer.
- peningkatan dan pengembangan jaringan listrik pada kawasan sepanjang jalan kolektor sekunder di kawasan pusat kota.
- peningkatan dan pengembangan jaringan listrik pada kawasan sepanjang jalan lokal sekunder di kawasan pusat kota.

Tahap II (1999/2000 - 2003/2004)

- peningkatan dan pengembangan jaringan listrik pada kawasan sepanjang jalan kolektor sekunder di bagian Barat kota.
- peningkatan dan pengembangan jaringan listrik pada kawasan sepanjang jalan lokal sekunder di bagian Barat kota.

Tahap III (2004/2005 - 2008/2009)

- peningkatan dan pengembangan jaringan listrik pada kawasan sepanjang jalan kolektor sekunder di bagian Selatan kota.
- peningkatan dan pengembangan jaringan listrik pada kawasan sepanjang jalan lokal sekunder di bagian Selatan kota.

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
- DENGAN KECALAMATAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMAHAN DEKET

九州一隅の海軍工廠

- TAHAP I
(1994/1995-1998/1999)
- TAHAP II
(1999/2000-2003/2004)
- TAHAP III
(2004/2005-2008/2009)
- TAHAP IV
(2009/2010-2013/2014)

KODE / PETUNJUK PETA

CAVOUR	..	10.4
DRUMSAR	..	10.4
CHERPASA	..	10.4
NO	LEAS	
	AC	
	LEMB	

Tahap IV (2009/2010 - 2013/2014)

- peningkatan dan pengembangan jaringan listrik pada kawasan sepanjang jalan kolektor sekunder di bagian Timur Laut kota.
- peningkatan dan pengembangan jaringan listrik pada kawasan sepanjang jalan lokal sekunder di bagian Timur Laut kota.

Selanjutnya tahapan pengembangan pelayanan sarana ke-listrikan di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 5.5.

Untuk pengembangan sarana telekomunikasi di kota Deket, disusun suatu tahapan pengembangan yang disesuaikan dengan tahapan repelita sebagai berikut :

Tahap I (1994/1995 - 1998/1999)

- pengembangan sentral telepon di kota Deket untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi di seluruh kota Deket.
- penyiapan lahan yang diperuntukkan bagi lokasi sentral telepon.
- pengembangan jaringan kabel primer di sepanjang jalan arteri primer, lokal primer, dan kolektor sekunder.

Tahap II (1999/2000 - 2003/2004)

- pengembangan jaringan kabel sekunder pada bagian pusat kota.
- pengembangan jaringan kabel tersier pada bagian pusat kota.

Tahap III (2004/2005 - 2008/2009)

- pengembangan jaringan kabel sekunder pada bagian Barat dan Selatan kota.
- pengembangan jaringan kabel tersier pada bagian Barat dan Selatan kota.

Tahap IV (2009/2010 - 2013/2014)

- pengembangan jaringan kabel sekunder pada bagian Timur Laut kota.
- pengembangan jaringan kabel tersier pada bagian Timur Laut kota.

Selanjutnya tahapan pengembangan pelayanan sarana telekomunikasi di kota Deket dapat dilihat pada Gambar 5.6.

5.2 Arahana Penanganan Lingkungan

Arahana penanganan lingkungan yang diusulkan untuk pengembangan kota Deket meliputi :

- peningkatan fungsi, yaitu yang terkait dengan peningkatan fungsi dari fasilitas-fasilitas umum yang terdapat di kota Deket dan jenjang pelayanannya belum sampai pada ketentuan yang digariskan. Fasilitas umum yang perlu ditingkatkan fungsinya adalah fasilitas perdagangan regional, fasilitas pelayanan umum skala kecamatan, fasilitas pendidikan, serta jaringan jalan dengan fungsi regional yaitu jalan arteri primer dan jalan lokal primer.

TAHAPAN PENGEMBANGAN
PELAYANAN SARANA
KELISTRIKAN

TAHAP I
(TH 1994/1995 - 1998/1999)

 TAP II
(TH 1999/2000 - 2003/2004)

 **TAHAP**
(TH 2004/2005 - 2006/2009)

ТАҲАРИ
(11.2009/2010 - 2013/2014)



KODE / PENJUALAN PETA

MODE / PETUNJUK PETA

GAUHBAR	:	5.5
DIGAHBAR	:	
DIPERHUSA	:	

DIFERENSA : 7

DIFERENSA : 7

DIFERENSA : 7

- perbaikan, yaitu yang terkait dengan komponen-komponen tata ruang yang sudah ada dan kondisinya kurang memenuhi syarat. Di kota Deket fasilitas yang perlu diperbaiki adalah fasilitas pasar dan perbaikan pada jenis perkerasan semua jalan tanah dan jalan batu yang ada di kota Deket.

5.3 Indikasi Program Dan Proyek Serta Pendanaan

Beberapa jenis program pembangunan yang terkait dengan pengembangan kawasan perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota di kota Deket adalah :

- penyediaan fasilitas perumahan
- pembangunan prasarana transportasi
- pembangunan prasarana pematusan
- penyediaan prasarana pendidikan
- penyediaan prasarana kesehatan
- penyediaan prasarana peribadatan
- penyediaan prasarana perdagangan
- penyediaan prasarana pertamanan
- penyediaan prasarana kelistrikan
- penyediaan prasarana air bersih
- penyediaan prasarana telekomunikasi
- penyediaan prasarana persampahan

Selanjutnya tahapan pembangunan pada kawasan perencanaan yang mengetengahkan juga mengenai indikasi program pembangunan per-lima-tahunan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan kota dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, bantuan luar negeri, swasta, dan swadaya masyarakat.

Sumber-sumber penerimaan keuangan Daerah Tingkat II se-cara umum dapat dikelompokkan ke dalam penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan. Penerimaan rutin berasal dari subsidi pemerintah atau instansi yang lebih tinggi dan pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan dari pinjaman daerah. Penerimaan pembangunan berasal dari subsidi pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi, PBB, dan pinjaman daerah.

Sumber dana potensial bagi Pemerintah Daerah Tingkat II adalah pendapatan asli daerah sebab salah satu sumber dana yang mungkin untuk dikembangkan atau ditingkatkan hanyalah pendapatan asli daerah. Dalam pembiayaan pembangunan kota selain harus mengandalkan pendapatan asli daerah, yang juga sangat penting adalah partisipasi masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan kota maka dapat digunakan sumber-sumber dana berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB, serta subsidi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I atau instansi yang lebih tinggi.

Sementara itu peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan mengefektifkan pungutan-pungutan pajak dan

TABEL 5.1 INDIKASI PROGRAM DAN PROYEK PEMBANGUNAN KAWASAN PERENCANAAN TAHUN 1992/1993 - 2013/2014

INDIKASI PROGRAM	INDIKASI PROYEK	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	SUMBER DATA
Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota	Penyusunan engineering design	UL B1, B2, C2	UL A1, A2, C1	UL C3, C5, C6	UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	Penda Suasta Masyarakat
Pembangunan kawasan	Pertanian lingkungan	UL B1, B2, C2	UL A1, A2, C1	UL C3, C5, C6	UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	Penda Suasta Masyarakat
Penyediaan fasilitas perumahan	Pembinaan lahan Pembangunan jalan Pembangunan instalasi listrik Pembangunan instalasi air minum	UL B1, B2, C2	UL A1, A2, C1	UL C3, C5, C6	UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	Penda Suasta Masyarakat
Pembangunan prasarana transportasi	Peningkatan jalan arteri sekunder Peningkatan jalan kolektor sekunder Peningkatan jalan lokal sekunder Peningkatan jalan lingkungan Pembuatan jalan kampung	UL B1, B2, C2	UL A1, A2, C1	UL C3, C5, C6	UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	Penda Suasta
Pembangunan prasarana pemukiman	Peningkatan saluran primer Peningkatan saluran sekunder Peningkatan saluran tersier Pembangunan saluran tepi jalan	UL B1, B2, C2	UL A1, A2, C1	UL C3, C5, C6	UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	Penda Suasta
Penyediaan prasarana pendidikan	Peningkatan Taman Kanak-Kanak Peningkatan Sekolah Dasar Peningkatan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Sekolah Menengah Atas	UL B1, B2, C2	UL A1, A2, C1	UL C3, C5, C6	UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	Penda Suasta Masyarakat
Penyediaan prasarana kesehatan	Pengadaan Poliklinik Pengadaan Puskesmas Pembantu Pengadaan Apotik	UL B1, B2, C2	UL A1, A2, C1	UL C3, C5, C6	UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	Penda Suasta Masyarakat
Penyediaan prasarana peribadatan	Peningkatan dan pengadaan mesjid Peningkatan dan pengadaan masjid Peningkatan fasilitas ibadah lain	UL B1, B2, C2	UL A1, A2, C1	UL C3, C5, C6	UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	Penda Suasta Masyarakat
Penyediaan prasarana perdagangan	Pengadaan kios Peningkatan dan pengadaan toko Peningkatan dan pengadaan pusat perbelanjaan	UL B1, B2, C2	UL A1, A2, C1	UL C3, C5, C6	UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	Suasta Masyarakat
Penyediaan prasarana pertamanan	Peningkatan dan pengadaan taman Peningkatan dan pengadaan lapangan olahraga Peningkatan taman	UL B1, B2, C2	UL A1, A2, C1	UL C3, C5, C6	UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	Penda Suasta Masyarakat

lanjutan Tabel 5.1

Penyediaan sarana air bersih	Instalasi dan pemeliharaan pipa primer Instalasi dan pemeliharaan pipa sekunder Instalasi dan pemeliharaan pipa terasler Instalasi dan pemeliharaan pipa kuarternor	UL B1, B2, C2 C4	UL A1, A2, C1 UL C3, C5, C6 UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	PDAM Sasra
Penyediaan sarana kelistrikan	Peningkatan jaringan SUM Peningkatan dan pengadaan gardu distribusi Peningkatan jaringan SUTR	UL B1, B2, C2 C4	UL A1, A2, C1 UL C3, C5, C6 UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	PLN Sasra
Penyediaan sarana telekomunikasi	Instalasi dan pemeliharaan kabel primer Instalasi dan pemeliharaan kabel sekunder Instalasi dan pemeliharaan kabel terasler Instalasi dan pemasangan rumah kabel Instalasi dan pemasangan DP	UL B1, B2, C2 C4	UL A1, A2, C1 UL C3, C5, C6 UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	TELKOM Sasra
Penyediaan sarana persampahan	Pengadaan truk container Pengadaan container Pengadaan landasan container Pengadaan depo transfer Pengadaan bak sampah	UL B1, B2, C2 C4	UL A1, A2, C1 UL C3, C5, C6 UL B3, B4, B5 B6, B7, B8	Pemda Sasra Masyarakat

Sumber : hasil perencanaan

retribusi serta memperluas penggalian sumber-sumber pendapatan baru dan mengaktifkan kembali sumber-sumber dana yang telah di Perdakan. Untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru dari sektor pajak antara lain dengan jalan pembuatan Perda yang isinya akan menambah pembebanan pembagian pajak bagi wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha di atas lahan yang peruntukannya berbeda dengan rencana tata ruang kota.

Selanjutnya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dipercepat dengan meningkatkan jasa-jasa pelayanan, mendirikan perusahaan-perusahaan daerah, serta perusahaan yang bekerjasama dengan pihak swasta.

Dalam hal ini yang paling penting setelah tercapainya peningkatan pendapatan daerah adalah pengaturan kembali proporsi alokasi dana pembangunan untuk daerah perkotaan mengingat kota akan memiliki permasalahan yang relatif kompleks dan perlu penanganan yang segera.

Selain itu dalam pembiayaan pembangunan juga perlu ditingkatkan peran serta pihak swasta untuk lebih memperbesar penanaman investasi di sektor-sektor pembangunan yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Daerah.

Komponen-komponen pendanaan untuk membiayai pembangunan kota tersebut antara lain adalah :

- dana dari Pemerintah Pusat
- SDB (Subsidi Daerah Bawahan) yang dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, biaya pensiun, insentif-insentif, dan biaya administrasi lainnya.

- DIP (Daftar Isian Proyek) yang dipergunakan untuk membiayai :

- program perbaikan kampung, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, dan lain-lain (Cipta Karya PU)
- perbaikan dan pembangunan jalan (Ditjen Bina Marga)
- pengawasan saluran air dan banjir (Ditjen Pengairan)
- pengawasan lalu lintas angkutan (Departemen Perhubungan)
- PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) untuk membiayai fasilitas air bersih (Departemen Keuangan)
- RDI untuk membiayai pembangunan fasilitas air bersih (Kebijaksanaan Menteri Keuangan melalui bantuan asing)
- Inpres Pasar untuk membiayai pembangunan pasar (ERI)
- Inpres Daerah Tingkat II untuk membiayai infrastruktur dengan padat karya seperti jalan-jalan, gang, saluran-saluran air (Departemen Dalam Negeri, Ditjen Bangda)
- Inpres Kesehatan untuk membiayai pembangunan prasarana air bersih dan jamban keluarga (Departemen Kesehatan)

- Pemerintah Daerah Tingkat I

- sumbangan langsung instruksi Gubernur bantuan penanganan dinas-dinas
- jaringan jalan, penanganan sampah, kebakaran, KIP, dan saluran (Subsidi Pemerintah Propinsi)

- Pemerintah Daerah Tingkat II dalam bentuk PAD, assigned revenue, dan PBB

- Desa/Kelurahan dalam bentuk otonomi desa (Ditjen Bangdes - Departemen Dalam Negeri)
- Bantuan asing untuk embelayi penyediaan air bersih, perbaikan kampung, dan pembangunan sampah (Bank Dunia dan APBD)
- Swasta / Swadaya Masyarakat untuk embelayi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perbedaan, pos kesehatan, dan lain-lain

5.4 Aspek Kelengkapan Pembangunan

Proses pembangunan melalui pelaksanaan program-program yang telah direncanakan, perlu ditunjang oleh kemampuan administrasi yang baik dan teratur, disamping kemampuan pengetahuan serta keahlian yang memadai di bidang sosial ekonomi. Tanpa adanya aparat administrasi yang mempunyai pengetahuan serta keahlian, maka pelaksanaan pembangunan cenderung mengalami kemacetan dan hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pelaksanaan pembangunan akan menyangkut keikutsertaan berbagai instansi atau badan pemerintah, ataupun pihak swasta dan masyarakat yang menjamin kelancaran proses pelaksanaan pembangunan. Untuk itu perlu diperhatikan prosedur administrasi pelaksanaan untuk mewujudkan setiap program perencanaan yaitu penetapan garis kerja dan garis koordinasi antara dinas-dinas yang terlibat, badan pelaksana, dan

perencana.

Peningkatan administrasi pembangunan yang diperlukan antara lain adalah pembentukan suatu organisasi pelaksana (badan/aparat/dinas) yang bertugas melakukan kegiatan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan dalam suatu mekanisme kerja yang terarah.

Dengan demikian demi terlaksananya pengelolaan kota dengan baik, perlu adanya pemanfaatan secara optimal aparat-aparat yang terlibat dalam pembangunan kota yang ada saat ini, yaitu dengan cara pemberian penguasaan kewenangan dan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selubungan dengan itu mekanisme kerja dari masing-masing aparat pelaksanaan pembangunan kota diatur sebagai berikut :

- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- menyusun perencanaan pola tata ruang kota dan bagian-bagian kota
- memonitor pelaksanaan program pembangunan kota antar instansi-instansi yang ada, baik horizontal maupun vertikal, dalam tingkat perencanaan maupun dalam tingkat pelaksanaan
- mengevaluasi dan merevisi perencanaan yang telah dibuat tiap 5 tahun sekali
- memperinci perencanaan yang telah dibuat ke dalam bentuk

Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota yang bersifat operasional dan dapat langsung dijadikan pedoman pelaksanaan program tahunan

- mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan kota, khususnya yang menyangkut aspek tata ruang sesuai dengan rencana kotanya
- memberikan keterangan rencana peruntukan tanah kepada perorangan, instansi pemerintah, dan swasta yang akan mendirikan bangunan atau kegiatan di atas sebidang tanah di wilayah kota
- memberikan atau melaksanakan pengukuran dan memberikan peta situasi ukur pada setiap konsumen / pemakai yang memerlukannya

- DINAS PEKERJAAN UMUM

- melaksanakan pembangunan prasarana fisik kota yang merupakan kewenangannya
- memberikan izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan kepada pemakai, baik pemerintah, swasta, maupun perorangan
- mengawasi atau mengontrol pelaksanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga-lembaga atau instansi-instansi di wilayah kota yang bersangkutan
- memberikan prakualifikasi terhadap para pelaksana pembangunan di daerah yang turut melaksanakan pembangunan kota

- KANTOR PERTANAHAN DAERAH

- memberikan pertimbangan peruntukan penggunaan tanah sesuai dengan advis planning yang diberikan oleh Bappeda
- mengadakan pengukuran dalam rangka pemberian sertifikat atas tanah sesuai dengan kewenangannya

- KANTOR CAMAT

- memberikan keterangan pertama mengenai tata ruang kota di wilayahnya beserta gambaran situasi dan kondisi eksisting wilayah perkotaan
- menjaga konsistensi peruntukan lahan seperti yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan mengadakan pengawasan-pengawasan yang sifatnya preventif
- mengadakan koordinasi dengan Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kantor Pertanahan untuk masalah-masalah teknis yang berhubungan dengan pembangunan kota

Dengan adanya perincian tugas terhadap instansi-instansi yang langsung terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut maka diharapkan pengelolaan terhadap wilayah kota akan lebih tertib dan teratur.

Rencana akan menjadi panduan pembangunan yang jelas pelaksanaannya bila dalam penerapannya terdapat prosedur perijinan yang jelas. Secara garis besar perijinan bangunan dapat dikelompokkan kedalam :

- Ijin kesesuaian bangunan dengan rencana kota
- Ijin mendirikan bangunan (IMB)
- Ijin menggunakan bangunan (IPB)
- Ijin desain pengamanan bangunan

Tercakup dalam sistem perjanjian pembangunan ini adalah koordinasi perijinan dan lembaga-lembaga yang mendukung sistem perijinan. Pengertian IMB dan IPB akan melibatkan semua pihak atau instansi yang berkaitan dengan mekanisme pembangunan di daerah, serta badan eksekutif yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk tingkat daerah. Instansi yang berkaitan dalam pemberian ijin penggunaan tanah dan bangunan adalah :

- Dinas Pekerjaan Umum, khususnya bagian perencanaan sebagai pelaksana rencana pembangunan kota secara teknis
- Kantor Badan Pertanahan Nasional, sebagai instansi yang berwenang dalam aspek hukum pertanahan
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana pembangunan kota serta melakukan evaluasi sejauh mana rencana tersebut dilaksanakan
- Dinas Pekerjaan Umum bagian pengawasan bangunan, yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan pembanguann fisik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah sendiri, dengan tujuan agar rencana teknis bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan pembanguann fisik yang berlaku

Sistem perijinan yang harus dilakukan untuk memperoleh langkah-langkah yang terarah namun memenuhi sasaran, memerlukan keterpaduan antara pengawasan dan konsultasi antar semua instansi yang berwenang di atas.

5.5 Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan maupun pelaksanaan pembangunan kota berdasarkan rencana tata ruang kota antara lain adalah :

- Stadsvermning Ordonantie (SVO) Nomor 168 Tahun 1948 tentang Undang-Undang / Peraturan Pembangunan Kota
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Jalan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Stadsvermning Verordening Nomor 40 Tahun 1949 tentang Peraturan Pelaksanaan Pembangunan Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota ini, maka perlu ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan dan ketentuan pelaksanaannya yang mendukung tersebut seperti ketentuan perijinan dan SK Bupati, antara lain :

- peraturan dan ketentuan mengenai perubahan peruntukan lahan, khususnya pada lahan-lahan yang peruntukannya pada saat ini tidak sesuai dengan peruntukan lahan menurut Peraturan Daerah.
- peraturan dan ketentuan mengenai perubahan penggunaan bangunan.
- peraturan dan ketentuan mengenai perubahan ketinggian bangunan.
- peraturan dan ketentuan mengenai perubahan garis sempadan bangunan, baik sempadan muka bangunan, sempadan belakang bangunan, sempadan samping bangunan.
- peraturan dan ketentuan mengenai proses teknis dan administratif untuk mengadakan perubahan pada lahan atau bangunan yang terkena sempadan jaringan jalan, pematusan, dan jaringan utilitas.

- peraturan dan ketentuan mengenai proses teknis dan administratif pada sebagian lahan atau bangunan yang terkena bangunan untuk kepentingan umum seperti TPS berbentuk landasan container, telepon umum, gardu listrik dan sebagainya.
- peraturan dan ketentuan mengenai mekanisme pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri.